



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2025



COPYRIGHT 2026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas implementasi pelaksanaan visi, misi yang telah dilaksanakan Tahun 2025. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.



Praya, Maret 2026
Kabupaten Lombok Tengah.

H. LALIPATHUL BAHRI, S.IP. M.AP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
I. BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
<i>I.1 LATAR BELAKANG.....</i>	<i>I.1</i>
<i>I.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....</i>	<i>I.2</i>
<i>I.3. DASAR HUKUM.....</i>	<i>I.3</i>
<i>I.4. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</i>	<i>I.4</i>
<i>I.5. ORGANISASI.....</i>	<i>I.10</i>
I.5.1. Kelembagaan.....	I.10
I.5.2. Sumber Daya Aparatur	I.13
<i>I.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....</i>	<i>I.17</i>
I.6.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.....	I.18
I.6.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.	I.21
I.6.3 Permasalahan Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	I.25
I.6.4 Permasalahan Layanan Urusan Pilihan	I.32
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II.1
<i>II.1 VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....</i>	<i>II.1</i>
<i>II.1.1. V I S I</i>	<i>II.1</i>
<i>II.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH.....</i>	<i>II.2</i>
<i>II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</i>	<i>II.6</i>
<i>II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2025.....</i>	<i>II.6</i>
<i>II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA</i>	<i>20</i>
<i>II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP.....</i>	<i>21</i>
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III.1
<i>III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025.....</i>	<i>III.1</i>
III.1.1 III.1.1 TUJUAN 1 TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DAN SPRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.....	III.5
III.1.2 III.1.2 SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT III.12	
III.1.3 III.1.3 SASARAN 2 MENINGKATNYA MODERASI BERAGAMA.....	III.18

III.1.4. TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SDM	III.24
III.1.4 III.1.5 SASARAN 2.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT.....	III.35
III.1.6 SASARAN 2.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT ..	III.43
III.1.5 III.1.7 TUJUAN 3 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	III.52
III.1.6 III.1.8 SASARAN 3.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	III.64
III.1.7 III.1.9 SASARAN 3.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	III.76
III.1.10 TUJUAN 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH	III.82
III.1.8 III.1.11 SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA. LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	III.110
III.1.9 III.1.12 SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF	III.127
III.1.13 TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	III.150
III.1.10 III.1.14 SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	III.162
III.1.11 III.1.15 SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN.....	III.168
III.1.12 III.1.16 SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN	III.174
III.1.13 III.1.17 SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	III.180
III.1.14 III.1.11 SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA. LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	III.199
III.1.15 III.1.12 SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF	III.215
III.1.13 TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	III.238
III.1.16 III.1.14 SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	III.250
III.1.17 III.1.15 SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN.....	III.257
III.1.18 III.1.16 SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN	III.263
III.1.19 III.1.17 SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	III.269
III.1.20 III.1.18 SASARAN 4.2.5 MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH.....	III.276
III.1.21 III.1.19 SASARAN 4.2.6. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA	III.288
III.1.22 III.1.20 TUJUAN 5 MENINGKATNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	III.295
III.1.23 III.1.21 SASARAN 5.1 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA BUDAYA.....	III.303

III.2 NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	III.309
III.3 PEDOMAN DAN PINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	III.311
III.4 REALISASI PENDAPATAN DAERAH MENURUT JENIS PENDAPATAN	III.313
III.5 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA.....	III.321
III.6 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	III.327
IV. BAB IV PENUTUP	IV.1

LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. SOP penyusunan dokumen LKJIP.
4. SK Tim Penyusun LKjIP Pemkab. Lombok Tengah Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah Desa. Kelurahan. Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 s.d 2025	I.5
Tabel I-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan`	I.7
Tabel I-3 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan	I.8
Tabel I-4 Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah	I.8
Tabel I-5 Daftar nama Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	I.11
Tabel I-6 Kondisi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	I.14
Tabel I-7 Kondisi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 2025 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	I.16
Tabel I-8 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025I.19	
Tabel I-9 Permasalahan Pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .I.21	
Tabel I-10 Permasalahan Pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman ..I.23	
Tabel I-11 Permasalahan Pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	I.24
Tabel I-12 Permasalahan Pembangunan urusan Ketahanan Pangan	I.25
Tabel I-13 Permasalahan Pembangunan urusan Lingkungan Hidup.....	I.26
Tabel I-14 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanahan	I.27
Tabel I-15 Permasalahan Pembangunan urusan Perhubungan.....	I.28
Tabel I-16	I.29
Tabel I-17 Permasalahan Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah I.30	
Tabel I-18 Permasalahan Pemerintahan urusan Penanaman Modal.....	I.31
Tabel I-19 Permasalahan Pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan.....	I.32
Tabel I-20 Permasalahan Pembangunan urusan Pariwisata	I.33
Tabel I-21 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanian.....	I.34
Tabel I-22 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan	I.35
Tabel I-0-23 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan	I.35
Tabel I-24 Permasalahan Pembangunan urusan Keuanganrmasalahan Pembangunan urusan Keuangan	I.36

Tabel III. 1 PREDIKAT UKURAN KINERJA	III.2
Tabel III. 2 PREDIKAT UKURAN KINERJA	III.2
Tabel III.1. 3 SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL ASYARAKAT	III.13
Tabel III. 4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 1.1 Tujuan 1 Misi 1 Tahun 2025	III.15
Tabel III. 5 Analisa program penunjang sasaran kinerja 1 pada Tujuan 1 Misi 1.....	III.16
Tabel III. 6 SASARAN 2	III.18
Tabel III. 7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran	III.20
Tabel III. 8 Analisa program penunjang sasaran kinerja 1.2 pada Tujuan 1 Misi 1.....	III.21
Tabel III. 9 TUJUAN 2.....	III.24
Tabel III. 10 SASARAN 2 .1	III.35
Tabel III. 11 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2.1 Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025	III.37
Tabel III. 12 Analisa Program Penunjang Sasaran 2.1 pada Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025	III.38
Tabel III. 13 SASARAN 2.2	III.43
Tabel III. 14 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2.2 Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025	III.45
Tabel III. 15 Analisa program penunjang sasaran kinerja 2.2 pada	III.46
Tabel III. 16 TUJUAN 3.....	III.53
Tabel III. 17 SASARAN 3.1	III.65
Tabel III. 18 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2.2 Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025	III.68
Tabel III. 19 Analisa program penunjang sasaran kinerja 3. 1 pada Tujuan 3 Misi 3....	III.68
Tabel III. 20 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	III.71
Gambar III. 18 Perbandingan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lombok Tengah dengan Provinsi NTB tahun 2021-2025.....	III.73
Tabel III. 22 MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP	III.74
Tabel III. 23 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	III.77
Tabel III. 24 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3.2	III.79
Tabel III. 25 Analisa program penunjang sasaran kinerja 3.2 pada Tujuan 3.....	III.80
Tabel III. 26 TUJUAN 4.1 Capaian indikator	III.83
Tabel III. 27 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Maret 2017-2025	III.196
Tabel III. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. 2017-2025	III.197
Tabel III. 29 Capaian indikator Meningkatnya Kesempatan Kerja. Lapangan Usaha Dan Perlindungan Sosial	III.199
Tabel III. 30 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025.....	III.202
Tabel III. 31 Analisa program penunjang sasaran kinerja Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025	III.203
Tabel III. 32 TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (persen)	III.206
Tabel III. 33 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025.....	III.211
Tabel III. 34 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1 Misi 4.....	III.212
Tabel III. 35 Persentase pengeluaran komoditas	III.214
Tabel III. 36 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah. 2024 dan 2025	III.215
Tabel III. 37 Meningkatnya Nilai tumbuh Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif....	III.216
Tabel III. 38 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025.....	III.220

Tabel III. 39 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1	III.220
Tabel III. 40 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025.....	III.226
Tabel III. 41 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1	III.227
Tabel III. 42 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025.....	III.233
Tabel III. 43 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1 Misi 4.....	III.234
Tabel III. 44 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025.....	III.236
Tabel III. 45 TUJUAN 4.2.....	III.239
Tabel III. 46 SASARAN 4.2.1	III.251
Tabel III. 47 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.1 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.254
Tabel III. 48 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025	III.255
Tabel III. 49 SASARAN 4.2.2	III.257
Tabel III. 50 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.2 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.260
Tabel III. 51 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.2 pada Tujuan 4.2 Misi 4.....	III.261
Tabel III. 52 SASARAN 4.2.3	III.263
Tabel III. 53 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.3 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.266
Tabel III. 54 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.3 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025	III.267
Tabel III. 55 SASARAN 4.2.4	III.269
Tabel III. 56 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.1.2.4 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.272
Tabel III. 57 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.4 pada Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025	III.273
Tabel III. 58 NAMA LOKASI DAN LUAS KAWASAN KUMUH.....	III.274
Tabel III. 59 SASARAN 4.2.5	III.277
Tabel III. 60 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.5 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.280
Tabel III. 61 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.5 pada Tujuan 4.2.....	III.281
Tabel III. 62 Hasil penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025	III.281
Tabel III. 63 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.5 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.286
Tabel III. 64 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.5 pada Tujuan 4.2	III.287
Tabel III. 65 SASARAN 4.2.6	III.290
Tabel III. 66 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4.2.6 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025.....	III.292
Tabel III. 67 Analisa program penunjang sasaran kinerja 4.2.6 pada Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025	III.293
Tabel III. 68 TUJUAN 5.....	III.296
Tabel III. 69 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA	III.304
Tabel III. 70 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 5 Tujuan 5 Misi 5 Tahun 2025	III.306
Tabel III. 71 Analisa program penunjang sasaran kinerja 5 pada Tujuan 5 Misi 5 Tahun 2025	III.307
Tabel III. 72 TAHUN PEROLEHAN WTP BAGI LOMBOK TENGAH	III.309

Tabel III. 73 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025	III.313
Tabel III. 74 Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025	III.315
Tabel III. 75 Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025	III.315
Tabel III. 76 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025	III.317
Tabel III. 77 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025	III.318
Tabel III. 78 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2025	III.319
Tabel III. 79 Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III.320
Tabel III. 80 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	III.321
Tabel III. 81 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025	III.322
Tabel III. 82 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	III.322
Tabel III. 83 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	III.324
Tabel III. 84 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025	III.325
Tabel III. 85 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	III.326
Tabel III. 86 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.. Tahun Anggaran 2025	III.327
Tabel III. 87 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	III.327

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah	I.5
Gambar III. 1.1 Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2021- 2025	III.12
Gambar III. 2 Analisa program penunjang sasaran kinerja 1 pada Tujuan 1 Misi 1	III.17
Gambar III. 3 Tren perkembangan penurunan konflik beragama 2021-2025	III.23
Gambar III. 4 Trend Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025	III.32
Gambar III. 5 Komparasi capaian IPM Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat	III.33
Gambar III. 6 IPM Provinsi NTB tahun 2021-2025	III.33
Gambar III. 7 Capaian IPM Nasional	III.34
Gambar III. 8 Trend perkembangan indeks Pendidikan 2021-2025	III.40
Gambar III. 9 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB	III.41
Gambar III. 10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	III.42
Gambar III. 11 Indeks Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025	III.48
Gambar III. 12 Angka kematian ibu Kabupaten Lombok Tengah	III.49
Gambar III. 13 Angka Kematian Bayi	III.50
Gambar III. 14	III.51
Gambar III. 15 Perkembangan hasil evaluasi RB 2020-2025	III.62
Gambar III. 16 Komparasi nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB Tahun 2021-2025	III.63
Gambar III. 17 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2025	III.72
Gambar III. 18 Perbandingan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lombok Tengah dengan Provinsi NTB tahun 2021-2025	III.73
Gambar III. 19 Hasil Evaluasi pelayanan publik Lombok Tengah 2021-2025	III.82
Gambar III. 20 Sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah 2025	III.92
Gambar III. 21 Perbandingan PDRB Lombok Tengah dan NTB dua tahun terakhir	III.92

Gambar III. 22 Indeks Gini Lombok Tengah tahun 2021-2025.....	III.187
Gambar III. 23 Perbandingan tren indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Nasional tahun 2021-2025	III.188
Gambar III. 24 Penurunan angka kemiskinan tahun 2021-2025	III.195
Gambar III. 25 Komparasi persentase penduduk miskin di Lombok Tengah, NTB dan Nasional dua tahun terakhir.....	III.198
Gambar III. 26 Komparasi perkembangan TPT di Lombok Tengah, NTB dan Nasional tahun 2021-2025	III.205
Gambar III. 27 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2022-2024.....	III.207
Gambar III. 28 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024	III.208
Gambar III. 29 Persentase pengeluaran berdasarkan kelompok makanan dan non makanan	III.213
Gambar III. 30 Komparasi Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Lombok Tengah dan NTB tahun 2021-2025	III.222
Gambar III. 31 Tren capaian laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada sektor akomodasi dan makan minum tahun 2021-2025	III.229
Gambar III. 32 Tren laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan 2021-2025	III.237
Gambar III. 33 Perkembangan indeks infrastruktur wilayah 2021-2025	III.250
Gambar III. 34 Perkembangan indeks konektifitas 2021-2025	III.256
Gambar III. 35 Perkembangan indeks kinerja system irigasi 2023-2025	III.262
Gambar III. 36 Perkembangan Cakupan layanan air minum 2021-2025	III.268
Gambar III. 37 Pengurangan luas wilayah kawasan kumuh 2021-2025	III.275
Gambar III. 38 Perkembangan IKLH dari tahun 2021 s/d 2025	III.283
Gambar III. 39 Perkembangan cakupan layanan persampahan tahun 2021-2025	III.288
Gambar III. 40 Perkembangan indeks risiko bencana Lombok Tengah 2021-2025	III.295
Gambar III. 41 Pelanggaran adat yang diselesaikan melalui krama adat 2021-2025	III.302
Gambar III. 42 Persentase krama adat aktif 2021-2025	III.309

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2025 adalah sebesar **114.76 %** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki 5 Misi 6 (Enam) tujuan. 14 (Empat Belas) sasaran. 25 (Dua puluh lima) indikator pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024.

Sasaran kinerja dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiap tahun melalui tema pembangunan. RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang mencakup 62 program pemerintah daerah dan 7 prioritas pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP ini juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas tinggi sehingga tugas-tugas umum pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan diimplementasikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akuntabel. sehingga setiap keputusan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

I.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 178);
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja. pengukuran kinerja. pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah

I.4. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

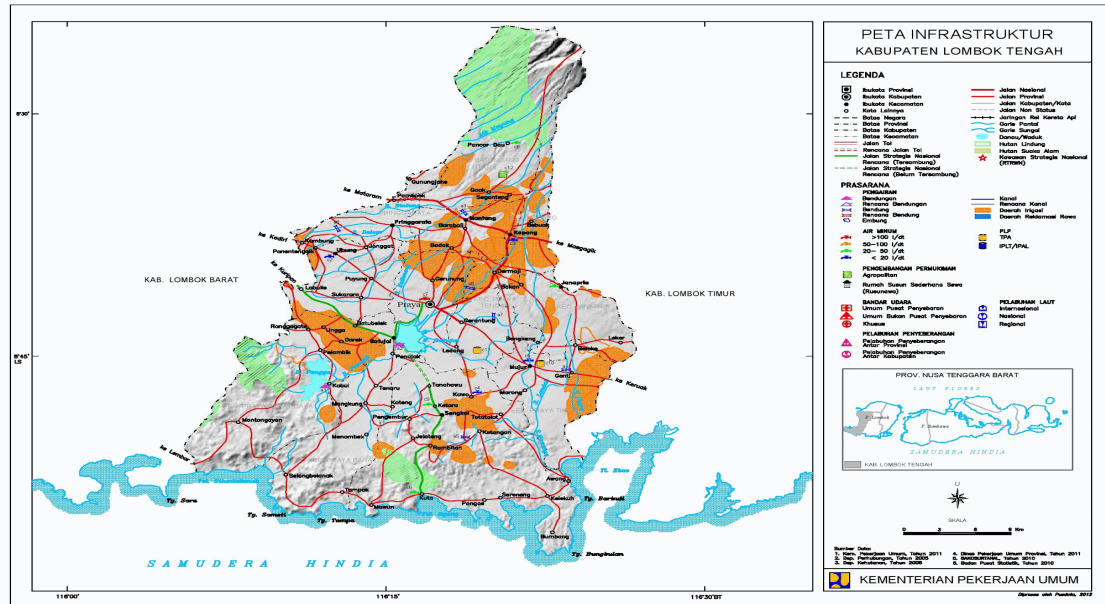
Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan. luas wilayah 1.208.39 km² (1.208.390 Ha). dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara. dan Kabupaten Lombok Timur.;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;

- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;

Adapun peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar I-1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2024

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 terdiri 12 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.797 dusun dan 75 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I-1 Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 s.d 2025

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	144	144	144	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	12	12	12	12	-	-	-	-	-	134	135	135	135	135	-	-	-	-	-
3. P u j u t	16	18	18	18	18	-	-	-	-	-	280	280	280	280	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	14	14	14	14	-	-	-	-	-	186	186	186	186	186	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	16	16	16	16	-	-	-	-	-	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
6. K o p a n g	11	13	13	13	13	-	-	-	-	-	115	115	115	115	117	-	-	-	-	-
7. P r a y a	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	88	88	88	88	88	59	59	59	59	59
8. Praya Tengah	9	10	10	10	10	3	3	3	3	3	115	115	115	115	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	136	136	136	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	-	-	-	-	-

11. Batukliang	10	11	11	11	11	-	-	-	-		155	154	154	154	155	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-		98	98	98	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/ <i>Total</i>	127	142	14	142	142	12	12	12	12	12	1795	1795	1795	1795	1797	75	75	75	75	75

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2025 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 adalah 1142173 jiwa yang terdiri dari 567487 jiwa penduduk laki-laki dan 574686 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208.39 km². maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 945,20 jiwa/km².

Secara lebih rinci. jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan`

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Praya	65.476	66.396	68386	66.453	67.283	69270	131.929	133.679	137.656
2	Jonggat	55.251	56.108	57514	56.288	56.900	58425	111.539	113.008	115939
3	Batukliang	46.689	47.273	48888	46.602	47.294	48891	93.291	94.567	97779
4	Pujut	61.087	61.836	63941	62.499	63.229	65492	123.568	125.065	129433
5	Praya Barat	43.017	43.642	45196	43.540	44.342	45903	86.557	87.984	91099
6	Praya Timur	36.912	37.208	38415	37.927	38.228	39487	74.839	75.436	77902
7	Janapria	44.757	45.414	46817	44.867	45.657	46995	89.624	91.071	93812
8	Pringgarrata	39.739	40.356	41567	40.189	40.697	41871	79.928	81.053	83438
9	Kopang	48.713	49.375	50945	49.268	49.995	51605	97.981	99.370	102550
10	Praya Tengah	38.469	39.021	40217	38.747	39.291	40543	77.216	78.312	80760
11	Praya Barat Daya	30.379	30.980	32172	31.179	31.709	32780	61.558	62.689	64952
12	Batukliang Utara	31.716	32.183	33429	31.800	32.202	33424	63.516	64.385	66853
Jumlah		542.205	549.792	567487	549.359	556.827	574686	1.091.564	1.106.619	1142173

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **137656** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **64952** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan. sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I-3 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Praya	43.400	44.137	44.835	45470
2	Jonggat	38.328	39.102	39.684	40166
3	Batukliang	32.063	32.677	33.209	33723
4	Pujut	40.829	41.652	42.306	43028
5	Praya Barat	28.835	29.497	30.026	30544
6	Praya Timur	26.115	26.463	26.855	27233
7	Janapria	31.225	31.958	32.545	33081
8	Pringgarata	26.645	27.174	27.561	27965
9	Kopang	33.051	33.820	34.422	34920
10	Praya Tengah	25.494	26.032	26.455	26861
11	Praya Barat Daya	21.478	22.197	22.674	23034
12	Batukliang Utara	21.568	22.036	22.376	22797
Jumlah		369.031	376.745	382.948	388.822

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 45470 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Batukliang Utara sebanyak **22797** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I-4 Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	00 – 04	48.541	47.438	34.482	45.232	44.495	32.377	93.773	91.933	66.859
2	05 – 09	55.810	104.02	58.206	51.960	97.085	54.256	107.770	201.105	112.462
3	10 – 14	53.498	54.963	56.070	50.873	52.14	52.760	104.371	107.103	108.830
4	15 – 19	33.939	31.704	43.874	32.620	29.857	42.350	66.559	61.561	86.224

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
5	20 – 24	42.466	43.461	41.691	41.924	42.793	39.682	84.390	86.254	81.373
6	25 – 29	40.409	40.097	42.604	41.381	40.963	43.212	81.790	81.06	85.816
7	30 – 34	42.871	43.169	41.177	44.566	44.456	42.241	87.437	87.625	83.418
8	35 – 39	44.266	44.899	44.395	47.361	47.935	47.199	91.627	92.834	91.594
9	40 – 44	43.426	43.566	43.936	46758	47.217	46.711	90.184	90.783	90.647
10	45 – 49	36.767	38.354	42.169	36.922	39.337	45.239	73.689	77.691	87.408
11	50 – 54	32.018	33.027	34.000	32.763	32.797	32.944	64.781	65.824	66.944
12	55 – 59	21.315	23.586	28.536	24.104	26.63	31.022	45.419	50.216	59.558
13	60 – 64	18.161	18.45	18.390	20.061	20.369	20.518	38.222	38.819	38.908
14	65 – 69	11.685	12.656	16.601	13.382	14.665	19.178	25.067	27.321	35.779
15	70 – 74	8.171	8.227	8.414	9.407	9.514	9.523	17.578	17.741	17.937
16	75+	8.862	9.563	12.942	10.045	11.069	15.474	18.907	20.632	28.416
Jumlah		542.205	597.18	567.487	549.359	601.322	574.686	1.091.564	1.106.619	1.142.173

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun). jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.5. ORGANISASI

I.5.1. Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan tersebut mencakup penataan, pembentukan, penggabungan, dan penghapusan perangkat daerah, serta penguatan fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara teknis dan fungsional, pelaksanaan urusan kelembagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah tertentu, tetapi dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan struktur organisasi, tata kerja, proses bisnis, serta manajemen sumber daya organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pembentukan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

Berikut kami sampaikan perincian Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada kondisi Tahun 2025 sesuai tabel dibawah ini :

Tabel I-5 Daftar nama Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	Dasar Hukum
PENUNJANG			
1	Sekretariat Daerah	A	PERBUP NO: 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
2	Sekretariat DPRD	A	PERBUP NO: 70 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
3	Inspektorat	A	PERBUP NO: 71 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Daerah			
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	A	PERBUP NO: 38 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
2	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	C	PERBUP NO: 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
3	Dinas Kesehatan	A	PERBUP NO: 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A	PERBUP NO: 42 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	B	PERBUP NO: 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
6	Dinas Sosial	B	PERBUP NO: 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	B	PERBUP NO: 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
8	Dinas Perhubungan	B	PERBUP NO: 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	B	PERBUP NO: 80 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
10	Dinas Pariwisata	A	PERBUP NO: 46 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
11	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	B	PERBUP NO: 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	B	PERBUP NO: 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
13	Dinas Pertanian	A	PERBUP NO: 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	Dasar Hukum
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	B	PERBUP NO: 85 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	A	PERBUP NO: 86 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
16	Dinas Ketahanan Pangan	C	PERBUP NO: 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
17	Dinas Lingkungan Hidup	B	PERBUP NO: 44 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	PERBUP NO: 89 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
19	Dinas Komunikasi. Dan Informatika	B	PERBUP NO: 40 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	C	PERBUP NO: 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	B	PERBUP NO: 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
22	Satuan Polisi Pamong Praja	B	PERBUP NO: 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	C	PERBUP NO: 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
Badan Daerah			
1	Badan Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan Sdm	B	PERBUP NO: 41 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	A	PERBUP NO: 46 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	A	PERBUP NO: 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
4	Badan Pendapatan Daerah	B	PERBUP NO: 47 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	PERBUP NO: 99 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	B	PERBUP NO: 98 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja
Kecamatan			

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	Dasar Hukum
1	Praya	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
2	Praya Tengah	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
3	Praya Barat	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
4	Praya Barat Daya	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
5	Praya Timur	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
6	Pujut	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
7	Janapria	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
8	Kopang	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
9	Batukliang	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
10	Batukliang Utara	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
11	Pringgarata	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan
12	Jonggat	A	PERBUP NO: 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan

I.5.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan salah satu indikator utama penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali

kebijakan publik, serta sebagai pelayan masyarakat yang memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. ASN yang memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan sosial kultural yang memadai akan mampu mendorong perumusan kebijakan yang tepat, pelaksanaan program yang efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat

Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I-6
Kondisi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	15	44	67
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	8	12	21
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14	38	8	60
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	19	7	29
5	Badan Pendapatan Daerah	11	3	92	106
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	6	20	21	47
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	15	8	19	41
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	5	1	15	21
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	5	32	43
10	Dinas Kesehatan	29	1641	240	1910
11	Dinas Ketahanan Pangan	3	10	7	20
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7	16	17	40
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	11	14	31
14	Dinas Lingkungan Hidup	7	9	54	70
15	Dinas Pariwisata	6	7	48	61
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12	11	161	184
17	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	9	29	51	89

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	14	10	31
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	9	15	31
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	13	14	29
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15	6658	320	6993
22	Dinas Perhubungan	11	6	51	68
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9	9	26	44
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	17	15	37
25	Dinas Pertanian	27	202	71	300
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	9	47	62
27	Dinas Sosial	4	5	20	29
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	31	22	60
29	Inspektorat	6	62	9	77
30	Kecamatan Batukliang	8	0	4	12
31	Kecamatan Batukliang Utara	7	0	5	12
32	Kecamatan Janapria	7	0	10	17
33	Kecamatan Jonggat	8	0	13	21
34	Kecamatan Kopang	6	0	23	29
35	Kecamatan Praya	52	0	64	116
36	Kecamatan Praya Barat	7	0	13	20
37	Kecamatan Praya Barat Daya	9	0	12	21
38	Kecamatan Praya Tengah	22	0	12	44
39	Kecamatan Praya Timur	7	0	9	16
40	Kecamatan Pringgarata	8	0	9	17
41	Kecamatan Pujut	9	0	19	28
42	Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C	14	363	77	454
43	Satuan Polisi Pamong Praja	10	30	210	250
44	Sekretariat Daerah	15	24	99	138
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	5	35	46
46	Diberhentikan Sementara	0	0	2	2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
JUMLAH		454	9303	2088	11845

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah. Kondisi per 31 Desember 2025

Tabel I-7
Kondisi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 2025
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Jumlah	Golongan					Jenis Kelamin	
			Gol. I	Gol II	GoL. III	Gol. IV	PPP K	Lk	Pr
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67	0	7	48	8	4	39	28
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	21	0	1	15	5	0	15	6
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	60	0	6	37	9	8	25	35
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	0	3	17	3	6	27	2
5	Badan Pendapatan Daerah	106	2	24	70	4	6	71	35
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	47	0	0	33	14	0	25	22
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	42	0	6	27	6	3	28	14
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	21	0	5	12	4	0	14	7
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	43	0	8	21	4	10	22	21
10	Dinas Kesehatan	1910	1	167	698	146	898	585	1325
11	Dinas Ketahanan Pangan	20	0	2	11	3	4	11	9
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	40	0	3	16	5	16	28	12
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	31	0	2	18	4	7	16	15
14	Dinas Lingkungan Hidup	70	1	34	19	6	10	56	14
15	Dinas Pariwisata	61	3	24	22	5	7	49	12
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	184	3	46	116	5	14	152	32
17	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	89	0	18	13	4	54	86	3
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	31	0	2	16	4	9	20	11
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	31	0	3	21	3	4	16	15
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29	0	4	20	3	2	15	14

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Jumlah	Golongan					Jenis Kelamin	
			Gol. I	Gol II	GoL. III	Gol. IV	PPP K	Lk	Pr
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6993	3	73	2000	1328	3589	3188	3805
22	Dinas Perhubungan	68	0	12	25	4	27	52	16
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	44	0	2	28	4	10	29	15
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	37	0	7	22	5	3	23	14
25	Dinas Pertanian	300	0	26	160	28	86	183	117
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	62	0	7	43	5	7	42	20
27	Dinas Sosial	29	0	0	19	1	9	17	12
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60	0	2	43	6	9	40	20
29	Inspektorat	77	0	2	46	27	2	44	33
30	Kecamatan Batukliang	12	0	1	8	2	1	9	3
31	Kecamatan Batukliang Utara	12	0	3	6	1	2	11	1
32	Kecamatan Janapria	17	0	2	14	1	0	15	2
33	Kecamatan Jonggat	21	0	2	11	2	6	15	6
34	Kecamatan Kopang	29	0	4	14	1	10	20	9
35	Kecamatan Praya	116	1	14	73	2	26	71	45
36	Kecamatan Praya Barat	20	0	3	13	1	3	14	6
37	Kecamatan Praya Barat Daya	21	0	3	11	2	5	18	3
38	Kecamatan Praya Tengah	44	0	2	36	2	4	31	13
39	Kecamatan Praya Timur	16	0	3	9	3	1	11	5
40	Kecamatan Pringgarata	17	0	0	14	2	1	10	7
41	Kecamatan Pujut	28	0	5	15	2	6	23	5
42	Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C	454	0	44	195	105	110	162	292
43	Satuan Polisi Pamong Praja	250	0	8	44	8	190	239	11
44	Sekretariat Daerah	138	0	17	69	16	36	87	51
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46	0	5	32	5	4	28	18
	Jumlah	11845	14	612	4201	1809	5209	5684	6161

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah. Kondisi per 31 Desember 2025

I.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan proses terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Permasalahan pembangunan daerah secara umum meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan kualitas dan akses infrastruktur dasar, serta rendahnya produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, sehingga berdampak pada disparitas kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2025 telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagai berikut

I.6.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah: ***“Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas”*** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan daerah
- 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia
- 3) Pengentasan Kemiskinan
- 4) Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing
- 5) Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas
- 6) Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi
- 7) Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah dan dapat memenuhi target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel I-8
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penyakit masyarakat tertangani	Persen	100
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	100
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	80
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	IPM	Poin	71.23
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.57 – 2.63
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	20,40

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.53
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3.75
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.46
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71.05
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	93.248
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	68.6
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79.78
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	765.37
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,10
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	Persen	30.3
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,95
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah (PD7)	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	95

I.6.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan urusan Pendidikan dijabarkan secara rinci sebagai berikut ini:

- ✓ Masih tingginya angka putus sekolah
- ✓ Belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan
- ✓ Masih rendahnya rata-rata lama sekolah

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan Kesehatan dijabarkan secara rinci sebagai berikut ini.

- ✓ Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan
- ✓ Masih tingginya angka kematian bayi
- ✓ Masih tingginya prevalensi stunting
- ✓ Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular
- ✓ Kualitas layanan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan
- ✓ Masih belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel I-9
Permasalahan Pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Cakupan dan kualitas layanan infrastuktur wilayah belum merata	Jalan mantap masih 73,25%	Masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau oleh jalan yang baik
			Jalan yang dibangun mengalami kerusakan lebih cepat dibanding umur teknis
			Jalan yang terbangun belum seluruhnya disertai dengan aksesoris yang memadai

		Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi masih di bawah standar	Panjang dan kualitas saluran irigasi masih kurang
			Kondisi sarana prasarana irigasi masih ada yang rusak
			Peran serta masyarakat dalam tata kelola air masih kurang
			Kelembagaan pengelolaan irigasi belum maksimal
			Masih adanya ketidakpatuhan pengguna air
		Cakupan layanan akses sanitasi layak baru mencapai 85,77% dan sanitasi aman baru mencapai 2,35%	Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki sanitasi layak
			IPAL komunal yang terbangun tidak efektif
			Kesadaran masyarakat untuk melakukan
			penyedotan IPAL masih kurang
			Layanan IPLT belum berfungsi optimal
			Konstruksi IPAL individu belum memenuhi standar
		Cakupan layanan akses air bersih masih 83,67 %	SR Air Minum belum menjangkau seluruh wilayah
			SPAM yang terbangun belum berjalan optimal
			Keterbatasan sumber air baku
2	Pengembangan kawasan belum sepenuhnya sesuai	Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya	RTRW yang berlaku belum mengintegrasikan perkembangan kawasan

	dengan tata ruang	dijadikan rujukan dalam pengembangan kawasan	yang sudah ada
			Belum semua kawasan memiliki rencana rinci tata ruang
			Pengendalian ruang belum optimal

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Salah satu indikator penurunan angka/tingkat kemiskinan adalah Upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain penanganan Rumah tidak layak huni, fokus yang menjadi prioritas adalah penurunan Luasan Kawasan Kumuh, peningkatan terhadap infrastruktur kawasan, lingkungan dan permukiman seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalan lingkungan, drainase, Penerangan Jalan Permukiman serta penyediaan tanah dan lahan untuk infrastruktur publik. Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel I-10
Permasalahan Pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Cakupan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman masih kurang	Penyediaan rumah layak huni belum sesuai kebutuhan	Tingkat kemiskinan masih tinggi
			Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan rumah yang layak huni
			Keterbatasan akses/ daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak
		Masih terdapat kawasan permukiman yang kumuh	Dukungan PSU terbatas

			Masih terdapat banyak ruas jalan lingkungan yang belum tertangani
			Masih adanya kawasan rawan banjir akibat kurangnya upaya pemeliharaan drainase lingkungan
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
			Masih terbatasnya ruang terbuka hijau yang memadai

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel I-11
Permasalahan Pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah/Tekanan Dinmis	Akar Masalah	
1	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada	
			Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	
			Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
			Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun apar

			Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran

6) Sosial

Permasalahan urusan Sosial dijabarkan sebagai berikut:

Permasalahan urusan Sosial lebih pada Cakupan penanganan PMKS belum optimal.

I.6.3 Permasalahan Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Permasalahan urusan Tenaga Kerja dijabarkan sebagai berikut.

- ✓ Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
- ✓ Perluasan kesempatan kerja masih terbatas
- ✓ Kompetensi dan produktifitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan sebagai berikut.

- ✓ Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ✓ Pencapaian Kabupaten Layak Anak belum optimal
- ✓ Masih tingginya kasus pernikahan anak

3) Pangan

Permasalahan urusan Pangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel I-12 Permasalahan Pembangunan urusan Ketahanan Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Masih terdapat desa rentan pangan rendah (Prioritas 3)	Ketersediaan pangan di masyarakat masih berfluktuatif	Masyarakat tidak membudayakan menyimpan pangan hasil panen

			Masyarakat kurang memanfaatkan pekarangan sebagai sarana pengembangan sumber pangan keluarga
--	--	--	--

4) Lingkungan Hidup

Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana fungsinya bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Secara umum permasalahan urusan Lingkungan hidup dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel I-13 Permasalahan Pembangunan urusan Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Nilai IKLH perlu ditingkatkan	Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Limbah cair masih ada yang dibuang ke Lingkungan setempat
			Meningkatnya jumlah kendaraan menyebabkan makin banyaknya polutan
			Menurunnya kualitas air baku
			Kurang optimalnya penanganan air limbah Domestik
2	Cakupan layanan persampahan belum merata	Tumbuhnya permukiman dan pusat pertumbuhan baru yang meningkatkan produksi sampah	Sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum sebanding dengan beban layanan
			Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah

5) Pertanahan

Secara umum permasalahan urusan pertanahan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel I-14 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Minimnya ketersediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Pemerintah tidak memiliki aset untuk pembangunan fasilitas umum	Perencanaan kebutuhan pengadaan tanah untuk fasum belum baik
			Aset pemda belum seluruhnya tersertifikasi

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia kurang memadai
- ✓ Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- ✓ Belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
- ✓ Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi terkait perlu ditingkatkan
- ✓ Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang berwenang karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan
- ✓ Pembinaan lembaga kemasyarakatan belum optimal
- ✓ Percepatan pencapaian desa mandiri belum optimal

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ Cakupan akseptor KB aktif perlu ditingkatkan
- ✓ Pelaksanaan konvergensi stunting belum optimal

9) Perhubungan

Masalah pokok urusan perhubungan adalah rendahnya pelayanan keselamatan jalan, karena hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan urusan perhubungan. Salah satu fungsi dari perhubungan adalah memastikan peningkatan keselamatan lalu lintas melalui upaya peningkatan manajemen keselamatan jalan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal urusan perhubungan adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel I-15 Permasalahan Pembangunan urusan Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Rendahnya pelayanan keselamatan jalan	Keamanan jalan rayan masih perlu ditingkatkan	Terbatasnya fasilitas keselamatan jalan
			Keterjadwalan petugas dalam pengaturan lalu lintas belum optimal
			Kendaraan yang melaksanakan uji Keselamatan jalan masih kurang
			Lampu penerangan jalan masih kurang

10) Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan urusan komunikasi dan informatika dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel I-16

Permasalahan Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	SPBE belum terlaksana secara optimal	Keterersediaan perangkat hardware dan software belum terpenuhi	Software belum disediakan
			Hardware belum tersedia
			SDM yang berkompotensi di TIK masih terbatas
2	Belum terbukanya badan public	Nilai pemeringkatan badan publik perlu ditingkatkan	SOP layanan informasi publik belum tersedia di semua perangkat daerah
			Tidak optimalnya fungsi PPID
3	Rendahnya pemanfaatan statitik sectoral	Belum terkonsolidasinya data sektoral daerah	Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
			Kurangnya Pemahaman OPD dalam penyediaan jenis data statistik pembangunan daerah;
			Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
			Kurangnya Pemahaman OPD tentang klasifikasi data
	Tingkat keamanan informasi rendah	Belum optimal standar pengamanan informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
			Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
			Belum adanya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
			Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel I-17
Permasalahan Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro masih perlu ditingkatkan	Produktivitas koperasi dan Usaha Mikro belum optimal	Kapasitas pelaku koperasi dan usaha mikro masih terbatas
			Akses pemodalan masih terbatas
			Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro belum solid
			Manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro kurang profesional
			Minimnya kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro

12) Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal dijabarkan dengan rinci dalam tabel berikut.

Tabel I-18
Permasalahan Pemerintahan urusan Penanaman Modal

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Nilai investasi PMDN dan PMA belum optimal	Kualitas pelayanan perizinan dan investasi masih perlu ditingkatkan	Mall Pelayanan Publik belum berjalan optimal
		Iklim investasi belum favorabel	Masih sering terjadi sengketa lahan
			Masih sering timbul persoalan sosial terkait dengan investasi
			Masih ada oknum yang memanfaatkan investor untuk kepentingan pribadi
			Informasi perijinan dan penanaman modal belum sepenuhnya dipahami oleh investor
			Infrastruktur dasar (misal air, suplai air bersih) terbatas
			Isu keamanan masih ada

13) Pemuda dan Olahraga

Permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Masih kurangnya pemuda pelopor dalam pembangunan masyarakat desa;
- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan seperti gelanggang remaja;
- ✓ Masih kurangnya upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga;
- ✓ Masih kurangnya pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga olahraga;

- ✓ Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

14) Persandian

Permasalahan urusan Persandian dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- ✓ Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- ✓ Belum adanya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- ✓ Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

15) Kebudayaan

Permasalahan urusan Kebudayaan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara pelaku budaya.
- ✓ Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan
- ✓ Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

16) Perpustakaan

Permasalahan urusan Perpustakaan dijabarkan sebagai berikut

- ✓ Belum adanya regulasi tentang keanggotaan perpustakaan
- ✓ Keterbatasan sarana prasarana

17) Kearsipan

Permasalahan urusan Kearsipan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Rendahnya minat baca
- ✓ Belum adanya kesadaran tentang serah terima cipta karya di Masyarakat.

I.6.4 Permasalahan Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan layanan Klautan dan perikanan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel I-19 Permasalahan Pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Produksi perikanan relatif stagnan	Nelayan belum berproduksi secara maksimal	Daya jangkauan usaha penangkapan ikan masih terbatas
			Masih terbatasnya akses nelayan terhadap bantuan permodalan.
			Tingginya biaya produksi perikanan tangkap
		Produksi perikanan budidaya masih belum maksimal	Teknologi usaha budidaya ikan yang diterapkan masih sederhana
			Biaya produksi usaha budidaya ikan masih tinggi
			Rendahnya kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan

2) Pariwisata

Permasalahan urusan Pariwisata dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel I-20 Permasalahan Pembangunan urusan Pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal	Masih rendahnya Kunjungan wisatawan	Promosi belum optimal
			Daya saing produk wisata belum mampu menarik wisatawan
			Kualitas SDM di bidang pariwisata perlu ditingkatkan
			Event pariwisata perlu ditingkatkan

3) Pertanian

Permasalahan urusan Pertanian dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel I-21 Permasalahan Pembangunan urusan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Produksi pertanian relatif stagnan	Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura belum optimal	Rata-rata produksi masih rendah
			Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida
			Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
			Masih kurangnya infrastruktur pertanian
			Masih kurangnya ketersediaan benih unggul
			Inovasi teknologi pertanian masih terbatas
		Produksi Sub Sektor Peternakan masih rendah	Usaha peternakan masih sederhana
			Usaha peternakan di tingkat hilir terbatas
			Sumber pakan ternak terbatas
			Pakan ternak buatan (pelet) mahal
			Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular
			Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi peternakan

4) Perdagangan

Permasalahan urusan Perdagangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel I-22 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih rendah	Kurang Optimalnya pengembangan perdagangan daerah	Penataan pedagang kaki lima belum optimal
			Belum optimalnya perlindungan konsumen
		Pasar kategori baik masih sedikit	Tata kelola pasar belum optimal
			Pedagang yang memanfaatkan pasar belum seluruhnya mengikuti SOP

5) Perindustrian

Permasalahan urusan Perindustrian dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini :

Tabel I-I-23 Permasalahan Pembangunan urusan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah	Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat	Penjualan produk IKM belum optimal
			Rendahnya pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal
			Belum optimalnya pemanfaatan SDA unggulan
			Belum maksimalnya Pembangunan Perwilayahan Industri
		Lemahnya Daya saing Prodok IKM dan belum optimalnya utilitas kapasitas produk IKM	Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kecil dan indusri kreatif;

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
			Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif

I.6.4 Permasalahan Layanan urusan Penunjang unsur pendukung Pemerintah

1) Urusan Perencanaan

Permasalahan urusan Perencanaan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan Pembangunan
- ✓ Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
- ✓ Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan
- ✓ Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan

2) Urusan Pengawasan

Permasalahan urusan Pengawasan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Kuantitas sumber daya manusia APIP terbatas
- ✓ Pemahaman pada tataran teknis kegiatan Perangkat Daerah belum memadai
- ✓ Budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai
- ✓ Masih adanya keengganan dari Pihak-Pihak tertentu untuk diawasi
- ✓ Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal

3) Urusan Keuangan

Permasalahan urusan Keuangan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel I-24 Permasalahan Pembangunan urusan Keuangan permasalahan Pembangunan urusan Keuangan

No	Masalah Pokok	Masalah/ Tekanan Dinamis	Akar Masalah
1	Penerimaan target pajak tidak optimal	Pemungutan pajak tidak berjalan maksimal	Intensifikasi pemungutan belum maksimal

			Jumlah dan kapasitas SDM pemungut pajak masih perlu ditingkatkan
			Kurangnya pemanfaatan teknologi
		Penetapan target pajak tidak sesuai dengan potensi yang ada	Validitas dan realibilitas data pajak perlu ditingkatkan
			Cakupan objek pajak masih perlu diperluas

4) Urusan Kepegawaian

Permasalahan urusan Kepegawaian dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Belum terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
- ✓ Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- ✓ Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.
- ✓ Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai.
- ✓ Masih belum jelasnya "rewardssystem".
- ✓ Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi.
- ✓ Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan

5) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan urusan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi.
- ✓ Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi
- ✓ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan public belum optimal;

6) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah
- ✓ Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah.

1.7 Program Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sebagai implementasi program Prioritas pembangunan Daerah secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa kegiatan teknis Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
I	URUSAN WAJIB	
A	TERKAIT PELAYANAN DASAR	
1.	PENDIDIKAN	
a	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD
		APK SD
		APK SMP/MTs
		PAUD Terakreditasi
		SD Terakreditasi A
		SMP Terakreditasi A
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
b	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal
c	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi
		Persentase PTK SD tersertifikasi
		Persentase PTK SMP tersertifikasi
d	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru
e	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
		Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
2	KESEHATAN	
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita stunting
		Angka Kematian Ibu
		Angka Kematian Bayi
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan
c	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan
d	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu keluarga aktif
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
		Nilai SAKIP OPD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi
b	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman
c	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah terbangun

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
d	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata
e	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap
f	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat
g	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan
h	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman
i	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
a	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani
		Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)
b	Program Kawasan Permukiman	Penurunan luasan kawasan kumuh
c	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditangani
d	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU
e	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
a	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
c	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana
d	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
6	SOSIAL	
a	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang dibina
b	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani
c	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
d	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani
e	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya
f	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP Daerah yang dikelola
g	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
B	TIDAK TERKAIT LAYANAN DASAR	
7	TENAGA KERJA	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
a	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen database ketenagakerjaan
b	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih
c	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar terserap
d	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
a	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif
b	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani
c	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina
d	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data gender dan anak
e	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak
f	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
9	PANGAN	
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif
b	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi
		Konsumsi protein
c	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio desa rawan pangan yang ditangani

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
d	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
10	PERTANAHAN	
a	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
b	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase permukiman baru yang terbangun
c	Program Penatagunaan Tanah	Dokumen penatagunaan tanah
11	LINGKUNGAN HIDUP	
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH
b	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan taman kehati
d	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3
e	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan
f	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih
g	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
h	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani
		Persentase pengurangan sampah
i	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
a	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik
		Persentase penerbitan KIA
		Persentase penerbitan surat pindah
b	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama
d	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
a	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri
b	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama
c	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi
d	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
a	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB
c	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
15	PERHUBUNGAN	
a	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan
b	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
a	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama
b	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
a	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)
b	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan
c	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP (dokumen)
d	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
e	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi
f	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan omset aset UMKM
g	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil
h	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
18	PENANAMAN MODAL	
a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN
		Nilai investasi PMA
b	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Wajib Lapor LKPM yang melapor
e	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi
b	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi
c	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang dilatih
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
20	STATISTIK	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data
21	PERSANDIAN	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi daerah yang diamankan
22	KEBUDAYAAN	
a	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan
b	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif
c	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarikan
23	PERPUSTAKAAN	
a	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan
b	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
24	KEARSIPAN	
a	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan pengelolaan kearsipan
b	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pesentase arsip terselamatkan
c	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan
C	PILIHAN	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
a	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
b	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan
		Produksi Perikanan Budidaya

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
c	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani
d	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan
		kelautan dan perikanan
		Produksi garam rakyat
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
26	PARIWISATA	
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan
b	Program Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif
c	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
27	PERTANIAN	
a	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas pertanian unggulan :
		- Padi (GKG)
		- Tembakau
		- Melon
		- Sapi
b	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kenaikan prosentase penerapan biosecurity budidaya ternak
d	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
e	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan
f	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi
g	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
28	PERDAGANGAN	
a	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
b	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	nilai omset perdagangan
c	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi Pasar
d	Program Pengembangan Ekspor	Nilai transaksi pameran
e	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pasar tertib ukur
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
29	PERINDUSTRIAN	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten
30	TRANSMIGRASI	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang difasilitasi
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
31	SEKRETARIAT DAERAH	
a	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan
		Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
b	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan
		Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
c	Program Administrasi Umum	Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan
		Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.
		Nilai SAKIP OPD
32	SEKRETARIAT DPRD	
a	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan
		Nilai SAKIP OPD
b	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas
		Jumlah berita yang dipublikasikan
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
33	PERENCANAAN	
a	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD
b	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
34	KEUANGAN	
a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan
b	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
d	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
35	KEPEGAWAIAN	
a	Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi
		Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
38	INSPEKTORAT DAERAH	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah
b	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang
		menyusun manajemen
		risiko dengan kategori
		maturitas terdefinisi,
		terkelola dan terukur
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
G	UNSUR KEWILAYAHAN	
39	KECAMATAN	
a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui
c	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat
d	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan
e	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
a	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik
b	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU
		Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi
		Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik
c	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi
d	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2025.

II.1 VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

II.1.1. VISI

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Makna dari visi tersebut adalah:

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala.

MISI:

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba;

- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

II.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Visi. Misi. Tujuan. Sasaran. Strategi. dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KESATU: MERAWAT AKHLAQL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
<i>Terwujudnya Nilai-nilai Luhur Mental dan Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	1. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	<i>Menjaga Stabilitas Keamanan dikawasan Strategis dan Wilayah Penyangga</i>	<i>a. Koordinasi, Kerjasama dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum</i>
			<i>b. Penegakan Peraturan Daerah</i>
			<i>c. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>
			<i>d. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya</i>
	2. Meningkatnya Moderasi Beragama	<i>Internalisasi Nilai-nilai yang sesuai Ajaran Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	<i>e. Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak</i>
			<i>a. Pelibatan Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial</i>
MISI KEDUA: MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL			
<i>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</i>	1. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	<i>Peningkatan Partisipasi Sekolah</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</i>
			<i>b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan tenaga Kependidikan</i>
			<i>c. Pemerataan Sumberdaya dan Kualitas Pendidikan</i>
			<i>d. Pemberian Stimulus Pendidikan</i>
			<i>e. Pemenuhan SPM Pendidikan</i>
			<i>f. Meningkatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan</i>
			<i>g. Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Pendidikan</i>
			<i>h. Meningkatkan Minat Baca</i>
			<i>i. Pengembangan Mitra Perpustakaan</i>
			<i>j. Pengembangan Pemuda dan atlit Berprestasi</i>
	2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	<i>Peningkatan Kualitas layanan kesehatan</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan</i>
			<i>b. Pemenuhan SPM Kesehatan</i>
			<i>c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan</i>
			<i>d. Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</i>
MISI KETIGA: PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH			
<i>Terwujudnya Tata Kelola</i>	1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerinah Daerah		<i>a. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Inovasi Daerah</i>
			<i>b. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</i>

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerintahan Yang baik		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			d. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			e. Optimalisasi Pendapatan Daerah
			f. Peningkatan Profesionalisme ASN
			g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			h. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat. Mudah dan Ramah	a. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik
			b. Digitalisasi Pelayanan Publik
			c. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik
			d. Penyesuaian Regulasi Pelayanan Publik
MISI KEEMPAT: PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS			
I. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja. Lapangan Usaha dan Perlindungan Sosial	1) Meningkatkan Investasi di Daerah	a. Menciptakan Iklim Ramah Investasi
			b. Peningkatan Pelayanan dan Promosi Investasi
		2) Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
			b. Penyiapan Tenaga Siap Kerja dari Kelompok Masyarakat Miskin
		3) Mengurangi Pengeluaran Masyarakat Miskin	a. Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
			b. Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
			c. Peningkatan Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat Miskin
			d. Verifikasi. Validasi dan Pemanfaatan Data Kemiskinan.
		2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Ekonomi Kreatif	1) Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pengolahan
	b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		
	c. Penguatan Mutu Bahan Baku dan Integrasi Hulu Hilir		
	d. Penguatan Pemanfaatan Ekonomi Digital		
	e. Peningkatan Akses Pasar dan Permodalan		
	2) Memajukan Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif		a. Memperkuat Citra Kepariwisata Daerah Melalui Media Promosi.
			b. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Objek Destinasi tujuan Wisata
			d. Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata Tematik
	e. Peningkatan Intensitas Penyelenggaraan Even Kepariwisataaan		
3) Meningkatkan Daya Saing Sektor Agraris Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Perikanan		
	b. Peningkayan Volume Produksi Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Perikanan		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			<p>c. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Perikanan</p> <p>d. Perlindungan Usaha Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Perikanan</p> <p>e. Penguatan Ketersediaan. Distribusi dan Diversifikasi Pangan</p> <p>f. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Perikanan</p>	
II. Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Serta Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan	<p>a. Peningkatan Kapasitas Aksesibilitas Jalan Menuju Kawasan Strategis</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi</p> <p>c. Peningkatan Fasilitas Kemanan dan Keselamatan Jalan</p>	
	2. Meningkatnya Cakupan Layanan Sistem Irigasi Kabupaten	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi	<p>a. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</p> <p>b. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi</p>	
	3. Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Peningkatan Kapasitas Layanan Air Minum	<p>a. Peningkatan Kualitas Sistem Penyediaan Air Minum Daerah</p> <p>b. Peningkatan dan Perlindungan Sumber Air</p> <p>c. Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan</p> <p>d. Pengembangan Jaringan Air Bersih</p>	
	4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Sinergitas Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dikawasan Kumuh	
	5. Meningkatnya Ketahanan Bencana	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan (MITIGASI) dan Penanggulangan Bencana	<p>a. Penguatan Mitigasi Bencana. Tanggap Darurat dan Penanganan Pasca Bencana</p> <p>b. Pembentukan Desa dan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilokasi Rawan Bencana</p> <p>d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana</p> <p>e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan</p>	
	MISI KELIMA: MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR			
	Meningkatnya Perwujudan Nilai-nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Peningkatan Peras Serta Lembaga Sosial dan Budaya dalam Pembangunan	<p>a. Penanaman Nilai Budaya Luhur</p> <p>b. Peningkatan Kecintaan terhadap Budaya dan Seni Daerah</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan</p>

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 200.a Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan. Adapun ikhtisar perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 kami sampaikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3.72
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	71,23
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,50-6,00
		Angka Kemiskinan	Persen	11.98 -12,31
		Indeks Gini	Poin	0.343-0,328
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.57-2,63

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10.06
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.53
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3.75
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.46
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71,05
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	93,248
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	68,60
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79.78
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	765.37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,10
		Cakupan layanan persampahan	Persen	30.3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155.95
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	80

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	264,596,823,404
2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10,008,000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	60,326,461
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10,154,195,991
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	123,001,151
6	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	982,909,420
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	16,650,000
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	710,802,923
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	279,532,280
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,244,101,297
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	172,289,991,765
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34,584,869,000
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	76,038,629,020
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	18,274,812,530
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	34,353,773,560
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	60,583,220
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	727,968,386
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,899,592,772
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	35,027,215,840
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7,230,809,907
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	38,704,793,058
22	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	344,555,245
23	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	10,845,008
24	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	69,023,860
25	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	985,924,857
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,075,580,431
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,249,607,091
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	854,640,148
29	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	162,035,715

No	PROGRAM	ANGGARAN
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,745,491,581
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,305,065,033
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	176,127,670
33	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,785,355,300
34	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	61,169,513
35	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,518,261,623
36	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	585,626,550
37	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	26,132,398
38	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	207,609,186
39	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	33,182,768
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99,206,852
41	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	343,168,228
42	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	292,523,432
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5,585,732,000
44	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,734,380,568
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	641,113,923
46	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	707,999,335
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	701,999,495
48	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	192,254,500
49	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	76,498,603
50	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10,525,040
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	34,524,598
52	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	239,080,063
53	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	99,999,827
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4,590,791,442
55	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	844,981,043
56	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	844,981,043
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	128,027,986
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	57,720,902
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,231,982,743
60	PROGRAM PENATAAN DESA	300,103,000
61	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1,024,999,832
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	1,273,554,025

No	PROGRAM	ANGGARAN
	KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
63	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	13,015,892
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14,219,419,978
65	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLI	1,439,883,000
67	PROGRAM APLIKASI NFORMATIKA	2,306,688,366
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	162,636,133
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125,359,250
70	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13,977,350
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	255,139,716
72	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	179,249,903
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	301,875,271
74	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7,297,027,632
75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	72,056,570
76	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30,000,000
77	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	312,506,225
78	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	81,999,755
79	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20,740,000
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,940,626,945
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,410,310,210
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	294,682,130
83	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	44,957,320
84	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2,419,746,358
85	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	357,046,697
86	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	11,674,595
87	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12,485,000
89	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1,171,646,481
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,752,371,074
91	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	136,987,993
92	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	887,498,012

No	PROGRAM	ANGGARAN
93	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,460,338,815
94	PR930GRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5,856,569,178
95	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378,500,544
96	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3,051,944,506
97	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5,960,553,698
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	30,223,092,443
99	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,321,002,078
100	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	170,262,498
101	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13,273,773,392
102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,496,426,672
103	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	76,388,000
104	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160,077,325
105	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7,158,017,637
106	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,326,307,222
107	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,710,091,697
108	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,654,061,456
109	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,012,275,892
110	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,368,206,257
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	385,422,419,693
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,264,634,461
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,434,265,905
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,414,278,420
115	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,661,433,833
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,577,341,297
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,233,780,234
118	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	579,298,867
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,445,955,247

No	PROGRAM	ANGGARAN
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	785,841,341
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,651,446,202
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	568,608,220
123	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	252,818,362
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	206,945,232
125	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,259,980,138
126	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,810,211,255
127	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,160,626,549
128	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	388,186,673
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,351,304,942,352
	JUMLAH.....	2,657,976,283,889

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3.69
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100

3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	71,97
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,35
		Angka Kemiskinan	Persen	11,62
		Indeks Gini	Poin	0,343
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,15
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	20,40
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.53
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan-minum	Persen	3.75
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.46

13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71,05
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	93,248
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	68,60
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79.78
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	765.37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,90
		Cakupan layanan persampahan	Persen	30,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155.95
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adaktif	Persen	80

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.522.407.450,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	76.650.000,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.230.545.735,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.008.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	116.326.461,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	323.731.964.109,77
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.244.101.297,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	710.802.923,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	525.088.420,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	13.760.207.090,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	37.165.526.070,88
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.030.657.807,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	40.582.991.890,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87.116.659.208,37
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25.434.498,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	880.930.829,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	440.155.245,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.852.824.907,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	41.983.508.012,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.131.415.855,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.177.648.837,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	752.703.655,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	845.946.012,10
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.463.470.387,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.709.333.309,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170.727.670,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	161.690.715,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	45.781.915,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.764.842.242,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	506.938.696,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.473.284.334,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	23.793.960,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	253.583.432,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	69.596.648,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	158.101.186,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	571.857.228,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.365.969.434,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	621.112.708,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	176.175.015,50
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.443.185.511,00
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	65.754.460,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	10.695.008,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	86.731.927,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213.668.277,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.644.030,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	76.498.603,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.525.040,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.605.944.768,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	885.744.345,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.247.691,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	95.981.417,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.597.866,00
PROGRAM PENATAAN DESA	72.473.600,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	945.713.936,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.956.924.501,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.254.875.884,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	583.221.328,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.610.733.178,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.489.640.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.458.796.816,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.965.892,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.535.976.094,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.280.082.256,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	11.300.350,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	158.029.903,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	994.660.254,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	244.311.222,90
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.855.478.215,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	266.110.225,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	19.790.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	48.957.151,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30.326.971,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.430.631.286,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.979.195.527,17
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	336.881.367,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.828.833,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.149.818,96
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	14.925.112.591,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	130.801.151,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.498.464.902,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	42.857.320,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235.244.628,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.485.000,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	7.849.595,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.195.643.127,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.472.453.512,55
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	307.578.499,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	627.007.751,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	825.246.116,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.132.330.323,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	33.741.086.388,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.192.520.342,45
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.051.944.506,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378.500.544,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	191.580.673,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.863.724.283,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.717.903.872,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	76.388.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160.077.325,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14.492.435.828,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.369.998,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.469.218.078,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.181.683.602,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.417.917.708,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.290.736.993,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.553.231.255,99
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	399.948.957.849,31
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.567.182.175,09
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.399.044.647,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.783.353.325,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.153.331.076,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.232.445.521,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.206.813.726,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	934.429.243,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	795.988.263,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.879.295.772,22
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	549.195.532,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.354.587.513,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	465.197.890,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.518.913.421,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.118.733.030,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	380.529.785,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	404.469.493,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.180.083.753,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.424.689.628.664,92
JUMLAH	2.926.100.945.429,25

II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (PD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, PD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil PD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja PD.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder. Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki. Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari PD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing PD;
 2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada PD disertai batas waktu penyampaian data;
 3. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan PD;
 4. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
 5. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan PD untuk melakukan *cross check* terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
 6. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara *cross check* PD, reviu oleh APIP Kabupaten;
 7. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari PD.
 8. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun LKjIP tahun 2025.
- Dokumen terlampir.

II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2025.

III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III. 1 PREDIKAT UKURAN KINERJA

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 91 s.d 100	SANGAT TINGGI
2	Nilai 76 s.d 90	TINGGI
3	Nilai 66 s.d 75	SEDANG
4	Nilai 51 s.d 65	RENDAH
5	Nilai < 50	SANGAT RENDAH

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir tahun 2025 telah mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel III. 2 PREDIKAT UKURAN KINERJA

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2025
				2024	2025		2024	2025	2024	2025	%
I.	M.1	MERAWAT AKHLAQL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT									
T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3.69	3,72	3.88	3.79	3,97	102.71	106,72	102,24
S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penyakit masyarakat tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
II	M.2	MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS. MANDIRI DAN UNGGUL									
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	68.02	71,23	68.01	71.19	72,07	104.66	101,18	104,43
S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.602	0,606	0.609	0.616	0,622	102.33	102,64	
S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.725	0,729	0.734	0.801	0,798	110.48	109,47	
III	M.3	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH. CEPAT DAN BERSIH;									

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2025
				2024	2025		2024	2025	2024	2025	%
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B 61	B 62,35	BB 70	BB 77,28	BB 77,94	126.9 7	125	110,09
S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B 61,05	B 63,85	B 70	B 62,90	B 63,85	103.0 3	100	
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	95	95	100	100	100	105.2 6	105,26	
IV	M. 4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;									
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.55- 5.80	4,50- 6,00	5.30	3.34	4,87	73.40	100	167,67
		Indeks Gini	poin	0.298	0,343- 0,328	0.323	0,344	0,344	99,71	99,71	
		Angka Kemiskinan	Persen	12.4	11,98- 12,31	11.72	12.07	10,68	102.6 6	110,85	
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.52	2,57- 2,63	2.28	2.55	3,36	98.81	72,24	
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/ Tahun	10.03	10,06	10.09	11.53	11,87	114.9 5	117,99	
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.03	3,53	3.83	3.99	3,54	131.6 8	100,28	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3.25	3,75	4.06	9.54	8,06	293.5 3	214,93	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.36	1,46	1.56	1.04	7,67	76.47	525,34	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	69.55	71,05	72.55	74.93	72,46	107.7 4	101,98	103,71
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	86.50	93,248	99.99	85.18	88,44	98.37	94,84	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN. SEJAHTERA. BERMUTU. MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2025
				2024	2025		2024	2025	2024	2025	%
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	66,10	68,60	71,1	70,58	77,11	106,78	112,41	
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79,28	79,78	80,28	78,82	76,30	99,42	95,64	
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	Ha/tahun	775,37	765,37	755,37	751,07	775,37	103,13	98,69	
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,87	61,10	61,40	63,47	70,14	104,27	114,80	
		Cakupan layanan persampahan	Persen	29,3	30,3	31,3	39,65	35,51	235,32	117,19	
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	poin	155,98	155,95	155,93	133,05	165,07	114,70	94,15	
V	M. 5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR									
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krama adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,44
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	78	80	85	80	83,10	102,56	103,88	
Total Capaian Kinerja Tujuan/Misi											114,76
Predikat											Sangat tinggi

Berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai data yang didapatkan dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya maka pencapaian 6 (Enam) tujuan. 14 (Empat Belas) sasaran. 25 (Dua puluh lima) indikator. maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2024 adalah **114.76 % "SANGAT TINGGI"**.

Untuk lebih rincinya atas capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan pada tabel-tabel berikut.

III.1.1 III.1.1 TUJUAN 1 TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lombok Tengah merupakan fondasi utama dalam membangun daerah yang harmonis, berdaya saing, dan berkeadaban. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Nilai-nilai luhur mental dan spiritual tercermin dalam sikap religius, toleransi antarumat beragama, semangat gotong royong, kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan aspek ini menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, arus globalisasi, serta tantangan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Untuk menjaga kehidupan yang harmonis yang sudah terbina harus dilakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Untuk implementasi harapan tersebut Pemerintah Kabupaten telah menuangkan dalam kerangka kerjanya dengan mengukur toleran penduduk yang berbeda-beda agama, ras dan etnisnya. Adapun hasilnya sesuai tabel dibawah.

Tabel III.3. TUJUAN 1

Capaian indikator

Indikator	Perhitungan	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Toleransi	Indeks Toleransi = $(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$	Poin	3,69	3,72	3,88	3,79	3,97	102,71	106,72	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah

1. Analisis Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2025

Dari table III.2.1 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025, target Indeks Toleransi ditetapkan sebesar 3,72 dengan realisasi mencapai 3,97, dan persentase capaian sebesar 106,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 telah

melampaui target yang ditetapkan, dengan selisih positif sebesar 0,25 poin dari target, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun ini terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

2. ***Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya***

Pada tahun 2024, target Indeks Toleransi ditetapkan sebesar 3,69 poin dengan realisasi mencapai 3,79 poin. Hal ini menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target sebesar 0,10 poin atau sekitar 102,71%, yang mencerminkan kondisi toleransi masyarakat yang relatif baik dan lebih tinggi dari yang direncanakan.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 3,72 poin dan realisasi juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,97 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 0,25 poin atau sekitar 106,72%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,18 poin (dari 3,79 menjadi 3,97), yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas toleransi yang cukup kuat dari tahun sebelumnya.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah***

Selanjutnya, apabila dikomparasikan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,88 poin, capaian tahun 2025 yang mencapai 3,97 poin telah melampaui target tersebut sebesar 0,09 poin atau sekitar 102,32%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator Indeks Toleransi tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan toleransi di masyarakat yang konsisten dan progresif, serta menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan efektif.

4. ***Analisis Perbandingan dengan target standar nasional***

Secara nasional belum bisa dibandingkan sebab mengingat dalam RPJMD yang dipakai sebagai indikatornya adalah salah satu instrument dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama. Jadi seharusnya Lombok Tengah juga merunut kepada standar nasional sehingga dibandingkan capaian indikatornya.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator adalah :

1. Pemerintah daerah secara konsisten mendorong program pembinaan umat beragama melalui kegiatan dialog lintas agama, pembinaan majelis taklim, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan;
2. Komunikasi lintas agama turut menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial yang diorchestrasi oleh FKUB;
3. Fungsi deteksi dini konflik berjalan lebih efektif melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan tokoh agama;
4. Tidak ada ujaran yang bersifat intoleran antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari semua berjalan dengan harmonis.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

1. Program moderasi beragama perlu lebih diarahkan pada pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, perempuan, dan organisasi kemasyarakatan;
2. Optimalisasi peran FKUB melalui peningkatan kapasitas kelembagaan serta dukungan anggaran;
3. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan menjadi kunci dalam membangun generasi yang inklusif dan terbuka terhadap keberagaman.
4. Pemda Lombok Tengah tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi penduduk minoritas dalam rangka mengembangkan diri untuk kemajuan bersama di Lombok Tengah.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel. III.4 Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya Pada Tujuan I Indikator Indeks Toleransi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M1	MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				
T1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	100	94,48	-5,52

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja Tujuan 1 mencapai 100%, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,48%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -5,52%.

Nilai efisiensi sebesar -5,52% menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah optimal (100%), namun penggunaan anggaran lebih rendah dari target kinerja, sehingga dapat dikategorikan sebagai efisien. Artinya, pemerintah daerah mampu mencapai seluruh target kinerja tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tujuan 1 telah dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang hemat dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas output maupun outcome yang dihasilkan. Efisiensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Optimalisasi perencanaan kegiatan sehingga menghindari pemborosan anggaran
- Pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran
- Adanya efisiensi belanja operasional maupun kegiatan pendukung
- Pemanfaatan sumber daya non-anggaran, seperti partisipasi masyarakat atau sinergi lintas sektor

Pada Tujuan 1, capaian kinerja (100%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (94,48%), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya berada dalam kategori efisien.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada Tujuan 1 telah dilaksanakan secara efisien, dengan capaian kinerja maksimal dan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual masyarakat telah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel. III.5 Analisis Program Penunjang Tujuan Pertama Indikator Indeks Toleransi

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T 1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi						
S1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	100	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan	107,33	Menunjang
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	100	Menunjang
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100	Menunjang
S1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	100	100	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	Menunjang	
						Persentase kebijakan bidang Hukum yang dilaksanakan	100	Menunjang	
						Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan	100	Menunjang	
	Rata-rata capain program							101,04	Sangat Tinggi

Pada Tujuan 1: *Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat* dengan Indikator tujuan: Indeks Toleransi

Indeks toleransi merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kerukunan, stabilitas sosial, serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tingkat moderasi beragama di daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, program pendukung Tujuan 1 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 101,04% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program-program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Pada Sasaran 1.1, capaian indikator persentase penurunan penyakit masyarakat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat relatif stabil dan terkendali.

Capaian ini didukung oleh beberapa program:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 107,33% pada indikator persentase Perda yang ditegakkan, menunjukkan efektivitas penegakan regulasi dalam menjaga ketertiban masyarakat.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian 100% pada indikator persentase konflik sosial yang terselesaikan, mencerminkan kemampuan pemerintah dalam meredam dan menyelesaikan potensi konflik secara efektif.
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100% pada indikator pengendalian gangguan ketertiban masyarakat, menunjukkan sinergi yang baik dalam menjaga stabilitas sosial.

Seluruh program pada sasaran ini berstatus menunjang, yang berarti berkontribusi langsung terhadap terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi utama toleransi.

Pada Sasaran 1.2, capaian indikator persentase penurunan konflik berlatar belakang agama juga mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama terjaga dengan baik.

Capaian ini didukung oleh:

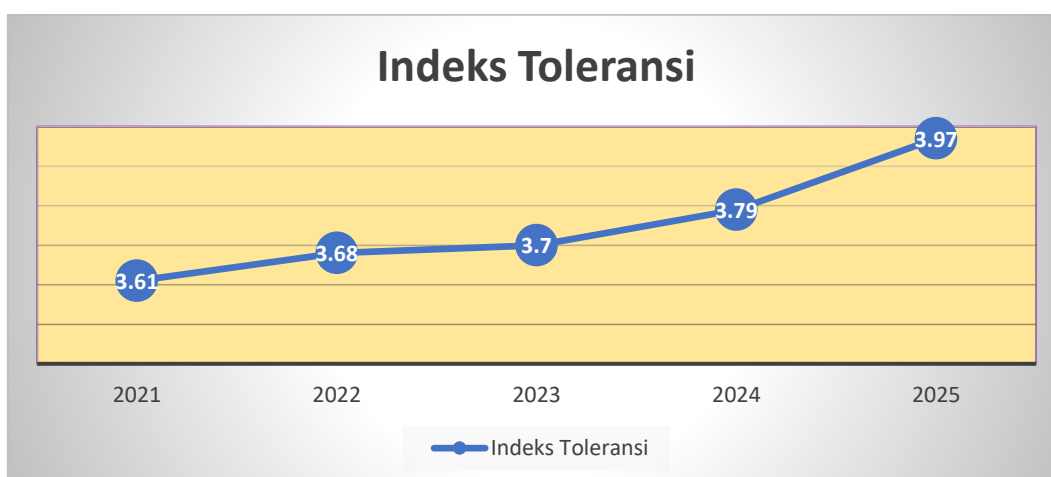
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan capaian 100%, yang mencakup fasilitasi kerukunan umat beragama serta pencegahan konflik sosial berbasis nilai budaya.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian 100% pada berbagai indikator, meliputi:
 - ❖ Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
 - ❖ Kebijakan bidang hukum
 - ❖ Kebijakan bidang pemerintahan

Program-program ini berperan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, sehingga memperkuat harmoni sosial dan toleransi antar kelompok masyarakat.

Seluruh program pada sasaran ini juga berstatus menunjang, yang menunjukkan kontribusi langsung terhadap penguatan moderasi beragama dan kehidupan sosial yang harmonis.

Trend perkembangan indeks toleransi di Kabupaten Lombok Tengah sesuai gambar sebagai berikut:

Gambar III.1 Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2021- 2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021 – 2025 terus mengalami peningkatan dimana hal ini mencerminkan bahwa kehidupan umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah bisa dikategorikan harmonis mengingat selama kurun waktu itu tersebut belum ada konflik komunal antar agama ataupun antar umat seagama. Hal ini diharapkan terus berkesinambungan untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga tetap tercipta kondusifitas dan stabilitas di Lombok Tengah.

III.1.2 III.1.2 SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT

Stabilitas sosial dalam konteks kerukunan antarumat beragama merujuk pada kondisi masyarakat yang harmonis. di mana setiap individu atau kelompok dari latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai. tanpa konflik atau diskriminasi. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan dalam hubungan sosial yang didasarkan pada toleransi. saling menghormati. serta keterbukaan dalam menerima perbedaan keyakinan

Dalam praktiknya. stabilitas sosial dalam keberagaman agama memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. termasuk pemerintah. tokoh agama. serta individu. untuk terus membangun dan merawat nilai-nilai toleransi dan keharmonisan. Untuk menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kehidupan sosial sehingga pembangunan mental spiritual dan non spiritual dapat dilaksanakan dengan tepat dan terencana.

Untuk mengetahui perkembangan stabilitas sosial di Kabupaten Lombok Tengah Pemerintah Daerah menggunakan indikator penanganan penyakit masyarakat sebagai indikator untuk mengukur kondisi stabilitas sosial masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6 SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT

Capaian Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	$= \frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat } n-1 \text{ dikurangi selisih jumlah penyakit masyarakat tahun } n \text{ dan } n-1}{\text{jumlah penyakit masyarakat Tahun } n-1} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber: LkJP SATPOL-PP Lombok Tengah Tahun 2024

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasikinerja tahun ini

Dalam tabel III.1.3 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus penyakit masyarakat yang menjadi kewenangan daerah telah ditangani secara penuh sesuai target yang ditetapkan.

2. Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

Capaian indikator Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat menunjukkan adanya konsistensi capaian kinerja, meskipun terdapat anomali pada penetapan target tahun 2025.

Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus penyakit masyarakat yang menjadi kewenangan telah tertangani secara optimal sesuai target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

Sementara itu, pada tahun 2025 target tercatat sebesar 1000%, namun realisasi tetap berada pada angka 100%. Secara substantif, capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja penanganan tetap optimal dan seluruh kasus berhasil ditangani. Namun demikian, jika dibandingkan secara matematis terhadap target 1000%, capaian tersebut hanya mencapai 10%. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaktepatan atau kesalahan dalam penetapan target tahun 2025, karena secara logis indikator persentase memiliki batas maksimum sebesar 100%.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, realisasi tahun 2025 tidak mengalami perubahan, tetap berada pada angka 100%, yang berarti kinerja penanganan penyakit masyarakat tetap terjaga pada level optimal.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, capaian tahun 2025 telah memenuhi target tersebut secara penuh (100%). Hal ini menunjukkan bahwa secara kinerja riil, indikator ini telah mencapai sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat sudah sangat baik dan konsisten mencapai target maksimal. Namun demikian, diperlukan perbaikan dalam perumusan target kinerja tahun berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kaidah indikator persentase.

4. Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara nasional untuk Indikator Persentase penanganan penyakit Masyarakat belum tersedia perbandingannya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator adalah :

- a. Sinergi antara perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, unsur TNI/Polri, serta pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan mempercepat proses penanganan setiap laporan atau temuan kasus di lapangan.
- b. Pelaksanaan operasi rutin maupun operasi terpadu secara berkala mampu menekan potensi pelanggaran dan memastikan setiap kasus yang muncul dapat segera ditangani.

c. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban umum.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan indikator ini adalah :

- a. Peningkatan kompetensi aparatur dalam penegakan peraturan daerah, mediasi sosial, serta pendekatan persuasif akan meningkatkan kualitas penyelesaian kasus,;
- b. Perlu dilakukan pembinaan lanjutan kepada pelaku melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga sosial.;
- c. Sosialisasi peraturan daerah, edukasi kepada kelompok rentan, dan kampanye ketertiban umum agar potensi pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1.1 Tujuan 1 Misi 1 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M1	MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				
T1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi			
S1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penyakit masyarakat tertangani	100	92,16	-7.84

Nilai efisiensi sebesar -7,84% pada sasaran meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dengan indikator persentase penyakit masyarakat tertangani menunjukkan bahwa:

- ❖ Target kinerja tercapai sepenuhnya (100%), bahkan tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.
- ❖ Terdapat penghematan anggaran sebesar 7,84% dari total pagu untuk mencapai output yang ditetapkan.
- ❖ Kondisi ini mencerminkan efisiensi yang baik, karena hasil maksimal diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang lebih rendah.

Hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi -7,84% termasuk kategori efisien, karena:

- Kinerja tercapai 100%
- Anggaran tidak terserap penuh
- Terdapat penghematan tanpa mengurangi kualitas output

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 8 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 1 pada Tujuan 1 Misi 1

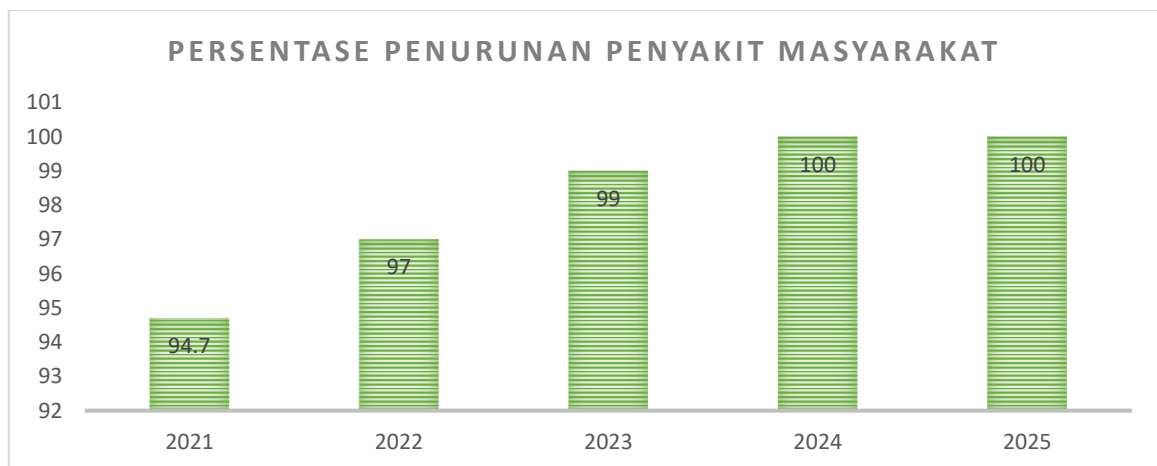
No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T 1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat							
S1. 1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	100	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan	107,33	Menunjang
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	100	Menunjang
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100	Menunjang
	Rata-rata capain program						102,44	Sangat tinggi

Berdasarkan capaian indikator, seluruh program menunjukkan kinerja optimal, sehingga secara agregat dinilai sangat menunjang pencapaian sasaran sesuai hasil analisis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator “Persentase Perda yang ditegakkan” dengan capaian 107,33% menunjukkan kinerja sangat menunjang. Penegakan Peraturan Daerah yang efektif berkontribusi langsung dalam menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti pelanggaran ketertiban umum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Indikator “Persentase konflik sosial yang terselesaikan” dengan capaian 100% dinilai sangat menunjang. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik sosial secara tuntas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah berkembangnya gangguan ketertiban yang dapat memicu penyakit masyarakat.
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator “Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat” dengan capaian 100% dinilai sangat menunjang. Pengendalian gangguan secara efektif menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Untuk perkembangan capaian penurunan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai gambar dibawah :

Gambar III. 1 persentase penurunan penyakit masyarakat 2021-2025



Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

Dari Grafik pada Gambar III.1 dapat dilihat secara keseluruhan, tren 2021–2025 menunjukkan :

- Peningkatan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan.
- Sistem penanganan yang semakin matang dan stabil.
- Capaian optimal yang mampu dipertahankan selama dua tahun terakhir.

III.1.3 SASARAN 2 MENINGKATNYA MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem. baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme. radikalisme. ujaran kebencian. hingga retaknya hubungan antarumat beragama. merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang secara totalitas belum kelar. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebhinekaan fakta sosial yang melingkupi kita.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya melakukan terobosan danantisipasi terjadinya konflik komunal berlatar belakang SARA guna menciptakan kondisi yang nyaman. damai dengan berbagi perbedaan. hal ini dapat dilihat pada capaian indikator pemerintah dalam menjaga moderasi beragama di Lombok Tengah sesuai tabel dibawah ini :

**Tabel III. 9 SASARAN 2
Capaian Indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	(Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n-1 dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan n-1) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun n-1 dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dalam tabel III.1.4 dapat dilihat Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh konflik berlatar belakang agama yang terjadi pada tahun tersebut dapat ditangani secara tuntas sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

2. Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Capaian indikator Persentase Konflik Berlatar Belakang Agama Tertangani menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten dalam dua tahun terakhir.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konflik berlatar belakang agama yang terjadi telah berhasil ditangani secara menyeluruh, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan.

Pada tahun 2025, target tetap dipertahankan sebesar 100% dan realisasi juga kembali mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 tetap berada pada tingkat optimal, tanpa adanya penurunan maupun peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antarumat beragama melalui penanganan konflik yang efektif.

Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tidak terdapat perubahan capaian, di mana keduanya sama-sama mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator telah berada pada level maksimal dan mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, capaian tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target tersebut. Artinya, sasaran jangka menengah daerah untuk indikator ini telah tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang agama, serta menunjukkan efektivitas kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan capaian ini secara berkelanjutan melalui langkah-langkah preventif dan penguatan deteksi dini potensi konflik.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara nasional untuk Indikator Persentase penanganan penyakit Masyarakat belum tersedia perbandingannya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung pencapaian indikator adalah :

- a. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Kerukunan Umat Beragama dengan membuat kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan toleransi dan harmoni sosial;
- b. Keterlibatan aktif Forum Kerukunan Umat Beragama ini dalam memberikan rekomendasi dan membangun komunikasi lintas iman membantu mencegah eskalasi konflik.;
- c. Upaya preventif terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini. deteksi dini. pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa. polmas. pol pp. BKD. Bale mediasi desa. Krama Desa dll);

Solusi/alternatif peningkatan pencapaian indikator adalah :

- a. Penguatan program moderasi beragama dengan mendorong internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui dialog seagama dan lintas agama, seminar kebangsaan dll.;
- b. Melaksanakan pelatihan mediasi, negosiasi, dan manajemen konflik bagi aparatur pemerintah, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat lintas agama;
- c. Penguatan peran pemerintah Desa dan Kecamatan dalam menjaga harmoni sosial.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 10 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Tujuan 1 Misi 1 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M1	MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi			
S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	100	95,49	-4.51

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat efisiensi -4,51%, maka pelaksanaan sasaran meningkatnya moderasi beragama dapat dikategorikan efisien, karena hasil yang maksimal dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

Nilai efisiensi sebesar -4,51% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran tersebut tergolong efisien, karena target kinerja dapat tercapai secara optimal tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini mengindikasikan adanya penghematan anggaran sebesar 4,51% dari total pagu yang dialokasikan.

Secara substantif, efisiensi ini dapat mencerminkan:

- Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan efektif dalam menangani konflik berlatar belakang agama.
- Adanya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga moderasi beragama.
- Dukungan partisipasi masyarakat yang turut berperan dalam pencegahan dan penanganan konflik.
- Perencanaan anggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Tabel III. 11 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 1.2 pada Tujuan 1 Misi 1

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T 1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat							

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
S1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	100	100	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	Menunjang
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	Menunjang
						Persentase kebijakan bidang Hukum yang dilaksanakan	100	Menunjang
						Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan	100	Menunjang
	Rata-rata capain program						100	Sangat Tinggi

Capaian seluruh indikator program yang mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan fasilitasi yang direncanakan telah dilaksanakan secara optimal. Adapun program dan indikator nya yang mendukung kinerja sasaran dimaksud sbb:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Indikator “Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan fasilitasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan” dengan capaian 100% dinilai sangat menunjang. Program ini berperan langsung dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif melalui penguatan nilai toleransi, pencegahan konflik sosial, serta peningkatan harmoni antar

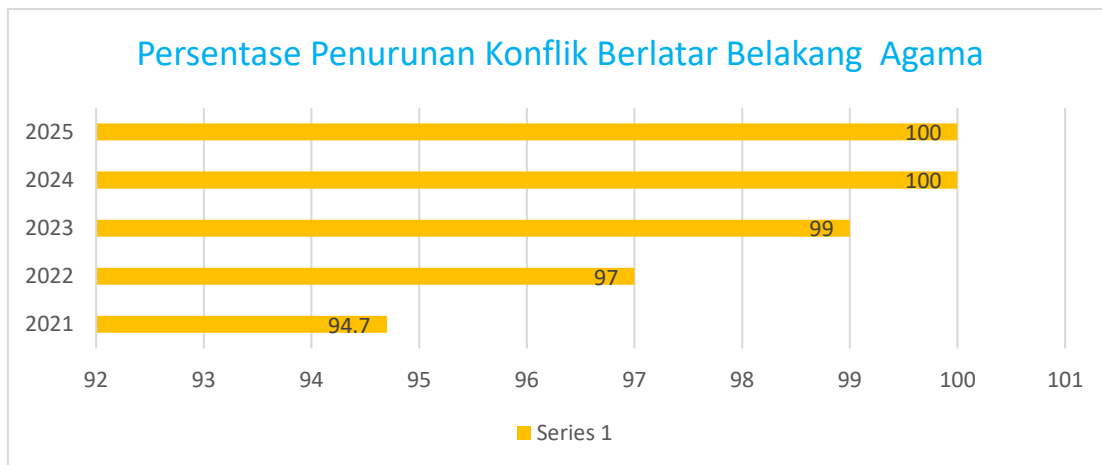
kelompok masyarakat. Pelaksanaan kebijakan secara penuh menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan moderasi beragama.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, program ini juga memiliki kontribusi penting melalui pendekatan kebijakan lintas sektor dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan (100%) dinilai menunjang, karena peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meminimalisir potensi konflik sosial, termasuk yang berlatar belakang agama.
- 2) Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan (100%) dinilai sangat menunjang, karena penegakan hukum yang adil dan merata menjadi faktor kunci dalam mencegah dan menangani konflik.
- 3) Persentase kebijakan bidang pemerintahan yang dilaksanakan (100%) juga menunjang, karena tata kelola pemerintahan yang baik mendorong terciptanya pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan penurunan konflik beragama di Lombok Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar III. 2
Tren perkembangan penurunan konflik beragama 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari Gambar III.1.3 nampak ketika kita amati selama kurun waktu 5 terakhir di Kabupaten Lombok Tengah belum ada kejadian atau konflik yang dilatarbelakangi unsur agama. Capaian tersebut diatas merupakan implementasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dengan upaya pencegahan atau deteksi dini pemicu konflik serta pemupukan rasa solidaritas antar umat beragama sehingga di Kabupaten Lombok Tengah bebas dari konflik berlatar belakang agama.

III.1.4. TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SDM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. SDM yang berkualitas tidak hanya diukur dari aspek pendidikan formal, tetapi juga dari kesehatan, keterampilan, produktivitas, karakter, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya peningkatan kualitas SDM diarahkan pada pembangunan manusia secara utuh dan menyeluruh, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta pembinaan karakter berbasis nilai-nilai moral dan budaya lokal. Intervensi yang terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia.

Secara keseluruhan, meningkatnya kualitas SDM akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan SDM yang unggul, Kabupaten Lombok Tengah memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermutu, dan berdaya saing.

Untuk mengukur capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan SDM berkualitas di daerah dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

Tabel III. 12 TUJUAN 2

Capaian Indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
IPM	Poin	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	68.02	71,23	68.01	71.19	72,07	104.66	101,18	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPERIDA Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Melalui tabel III.12 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025, target IPM mengalami peningkatan signifikan menjadi 71,23, atau naik 3,21 poin dibanding target tahun sebelumnya. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 72,07, dengan tingkat capaian 101,18%. Selisih antara target dan realisasi sebesar 0,79 poin, yang berarti target tetap terlampaui

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, target IPM ditetapkan sebesar 68,02 poin dengan realisasi mencapai 71,19 poin. Hal ini menunjukkan capaian yang jauh melampaui target sebesar 3,17 poin atau sekitar 104,66%, yang mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia berkembang lebih cepat dari yang direncanakan.

Memasuki tahun 2025, target IPM meningkat menjadi 71,23 poin, seiring dengan meningkatnya ekspektasi pembangunan. Realisasi pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan menjadi 72,07 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 0,84 poin atau sekitar 101,18%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,88 poin (dari 71,19 menjadi 72,07), yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 68,01 poin, capaian tahun 2025 yang mencapai 72,07 poin telah melampaui target tersebut sebesar 4,06 poin atau sekitar 105,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia yang konsisten dan progresif. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan peningkatan IPM dengan memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan dasar agar capaian yang tinggi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat.

4. ***Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat pembangunan manusia antara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tingkat nasional.

Pada tahun 2025, capaian IPM Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 72,07 poin. Angka ini masih berada di bawah capaian IPM Provinsi NTB yang mencapai 73,97 poin. Selisih sebesar 1,90 poin tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Lombok Tengah masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan rata-rata provinsi.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 75,9 poin, kesenjangan yang terlihat semakin besar, yaitu mencapai 3,83 poin. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak yang menjadi komponen utama penyusun IPM.

Sementara itu, jika dilihat dari posisi Provinsi NTB terhadap nasional, NTB juga masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 1,93 poin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pembangunan manusia di tingkat daerah, masih terdapat gap yang perlu dikejar baik di tingkat kabupaten maupun provinsi terhadap capaian nasional.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan pentingnya upaya percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat, agar kesenjangan dengan tingkat provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendukung pencapaian indikator adalah :

- a. Pemkab Lombok tengah melalui Disdikbud terus berupaya dalam peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan rata-rata lama sekolah
- b. Pemkab Lombok tyengah terus melaksanakan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kampanye hidup sehat;
- c. Pemberdayaan pelaku UMKM secara intens untuk meningkatkan pendapatan keluarga;

- d. Pemberian bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah

Solusi/alternatif peningkatan capain indikator ini adalah :

- a. Perluasan beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu;
 - b. Optimalisasi layanan Puskesmas dan rumah sakit daerah;
 - c. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
- Program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin secara berkelanjutan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Tabel III. 13 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya pada Tujuan 2

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M2	MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS. MANDIRI DAN UNGGUL				
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	101,18	71,73	-29,45

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja Tujuan 2 sebesar 101,18%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 71,73%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -29,45%.

Nilai efisiensi sebesar -29,45% menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah melampaui target (>100%), sementara penggunaan anggaran relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 2 tergolong sangat efisien.

Efisiensi ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas SDM, yang diukur melalui IPM, dapat dicapai secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, terdapat kemampuan dalam mengelola sumber daya secara hemat namun tetap menghasilkan kinerja yang tinggi.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi efisiensi ini antara lain:

- Efektivitas program prioritas, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi komponen utama IPM.

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga output dan outcome tetap tercapai meskipun dengan realisasi anggaran yang lebih rendah.
- Sinergi lintas sektor, yang memungkinkan pencapaian hasil tanpa ketergantungan pada satu sumber pembiayaan saja.
- Dampak kumulatif program tahun sebelumnya, yang turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM pada tahun berjalan.
- Pada Tujuan 2, capaian kinerja (101,18%) jauh lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (71,73%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan sangat efisien.
- Nilai efisiensi yang cukup besar (negatif tinggi) menunjukkan adanya ruang efisiensi anggaran, yang dapat diartikan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Tabel. III. 14 Analisis Program Pendukung Tujuan II indikator IPM

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM						
S2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	0,606 poin	102,64	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	104,82	Menunjang
						APK SD	97,48	Menunjang
						APK SMP/MTs	103,06	Menunjang
						PAUD Terakreditasi	138,6	Menunjang
						SD Terakreditasi A	100,3	Menunjang
						SMP Terakreditasi A	101,17	Menunjang
						Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	100,02	Menunjang
					Program Pendidik Dan Tenaga	Persentase PTK PAUD/TK		Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Kependidikan	tersertifikasi	95,22	
						Persentase PTK SD tersertifikasi	96,52	Menunjang
						Persentase PTK SMP tersertifikasi	109,35	Menunjang
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	111,11	Menunjang
					Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	143,75	Menunjang
S2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,729 poin	109,47 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	43,31	Tidak Menunjang
						Angka Kematian Ibu	110,26	Menunjang
						Angka Kematian Bayi	104,44	Menunjang
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	105,26	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	84,8	Menunjang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang kompeten di pelayanan dasar	96,11	Menunjang
	Rata-rata capain program						102,52	Sangat tinggi

Pada Tujuan 2: *Meningkatnya kualitas SDM dengan* Indikator tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data yang tersedia, program pendukung Tujuan 2 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 102,52% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program-program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Sasaran 2.1, capaian indikator Indeks Pendidikan sebesar 102,64% menunjukkan bahwa target telah tercapai dan melampaui target. Hal ini mencerminkan peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan masyarakat.

Capaian ini didukung oleh beberapa program utama:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini menunjukkan kinerja sangat baik, dengan hampir seluruh indikator mencapai atau melampaui target, antara lain:

- APK PAUD (104,82%)
- APK SD (97,48%)
- APK SMP/MTs (103,06%)
- PAUD terakreditasi (138,6%)
- SD terakreditasi A (100,3%)
- SMP terakreditasi A (101,17%)
- Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs (100,02%)

Capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan semakin luas dan kualitas pendidikan semakin meningkat.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- PTK PAUD/TK tersertifikasi (95,22%)
- PTK SD tersertifikasi (96,52%)
- PTK SMP tersertifikasi (109,35%)

Program ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan.

c. Program Pendukung Lainnya

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (111,11%)

- Program Pembinaan Perpustakaan (143,75%)

Program ini memperkuat aspek non-akademik dan literasi masyarakat yang turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Seluruh program pada Sasaran 2.1 berstatus menunjang, yang berarti memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan indeks pendidikan.

Pada Sasaran 2.2, capaian indikator Indeks Kesehatan sebesar 109,47% menunjukkan bahwa target telah tercapai dan melampaui target. Hal ini mencerminkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Capaian ini didukung oleh beberapa program, dengan hasil yang bervariasi:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

- Angka Kematian Ibu (110,26%) → menunjang
- Angka Kematian Bayi (104,44%) → menunjang
- Persentase Balita Stunting (43,31%) → tidak menunjang

Meskipun sebagian indikator menunjukkan capaian baik, tingginya angka stunting menjadi faktor yang belum mendukung optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- PIRT diterbitkan (105,26%) → menunjang

Program ini mendukung aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

c. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- PUS akseptor KB (84,8%) → menunjang, meskipun belum optimal

Program ini berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

d. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

- Nakes kompeten (96,11%) → menunjang

Program ini mendukung kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Secara umum, sebagian besar program pada sektor kesehatan berstatus menunjang, namun masih terdapat indikator yang tidak menunjang, khususnya terkait stunting.

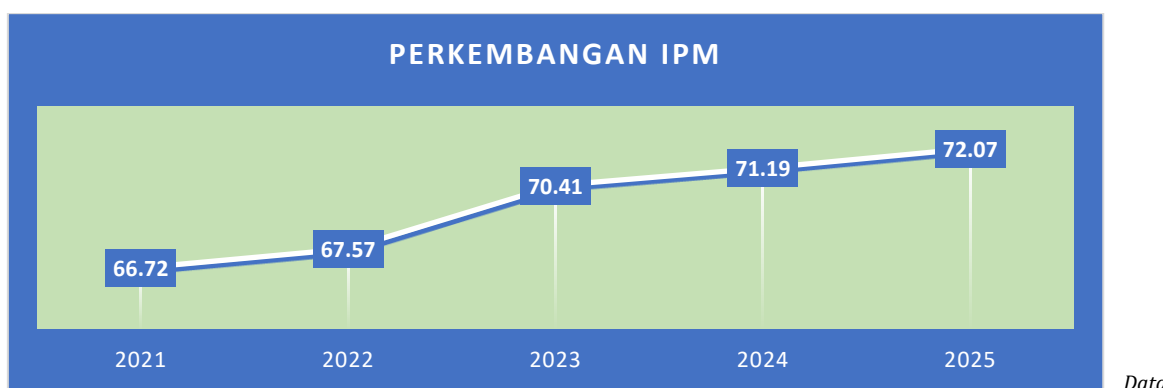
Berdasarkan keseluruhan program:

- Dimensi pendidikan menunjukkan kinerja sangat kuat dan konsisten, dengan seluruh program berstatus menunjang dan capaian di atas target.

- Dimensi kesehatan juga menunjukkan capaian baik secara umum, namun masih terdapat tantangan pada indikator stunting.
- Sinergi antara peningkatan akses pendidikan, mutu tenaga pendidik, pelayanan kesehatan, dan kualitas SDM menjadi faktor utama dalam peningkatan IPM.

Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan telah mencakup dimensi utama pembentuk IPM dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas SDM.

Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat sesuai gambar berikut :Gambar III. 3
Trend Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025

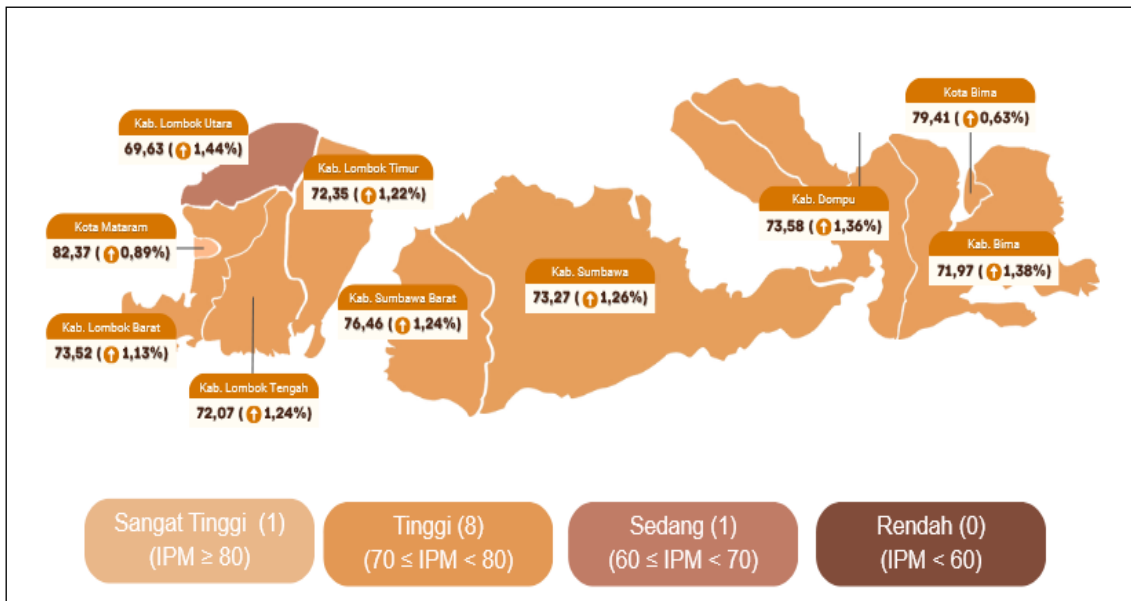


diolah : sumber Data : Bapperida Lombok Tengah

IPM menunjukkan tren meningkat konsisten tanpa penurunan. Terjadi percepatan signifikan pada tahun 2023. Pertumbuhan setelah 2023 bersifat stabil dan berkelanjutan. Total kenaikan 5,3 poin dalam lima tahun merupakan capaian yang cukup progresif.

Dengan tren yang positif ini, Kabupaten Lombok Tengah memiliki fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Gambar III. 4
Komparasi capaian IPM Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat

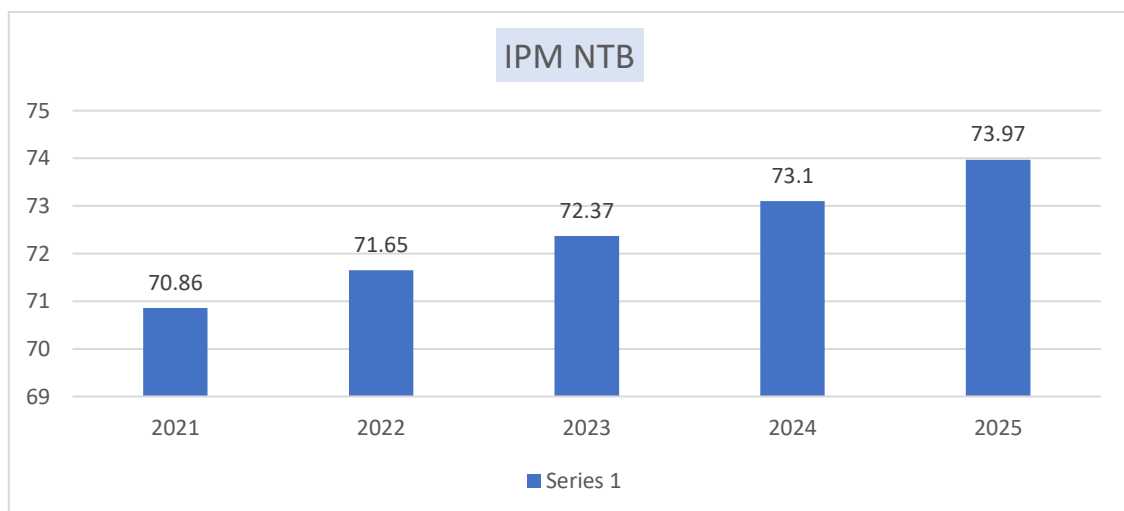


Sumber BPS NTB 2025

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2025, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2025 adalah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima yaitu berturut-turut mencapai 1,44 persen dan 1,38 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2025 yaitu Kota Bima, yaitu sebesar 0,63 persen.

Untuk mengetahui secara rinci perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar III. 5 IPM Provinsi NTB tahun 2021-2025

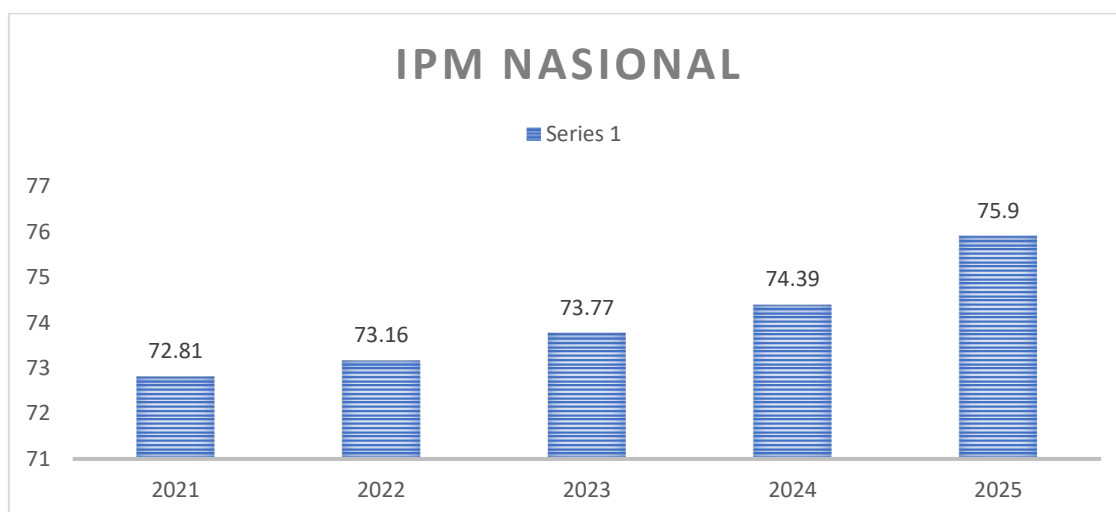


Sumber Data : BPS NTB 2024

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 4,32 persen dibanding tahun sebelumnya dan pengeluaran riil per kapita sebesar 2,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya mencapai 0,48 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,07 persen.

Kemudian perkembangan Nasional untuk 5 (lima) tahun terakhir pun dapat dilihat dengan rinci sesuai gambar berikut :

Gambar III. 6
Capaian IPM Nasional



Sumber BPS tahun 2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didorong oleh semua indikator penyusunnya. Seluruh indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 461.000 rupiah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,22 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,09 tahun, dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 0,32 tahun.

III.1.4 III.1.5 SASARAN 2.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan tingkat pendidikan juga berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki kemampuan untuk berinovasi. Pendidikan yang lebih baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi, serta penguatan karakter dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun mengikuti pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengetahui capaian indikator yang berkaitan dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 15 SASARAN 2.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Pendidikan	Poin	$IPendidikan = (IHLS + IRLS) / 2$	0.602	0,606	0.609	0.616	0,622	102.33	102,64	Sangat tinggi

Sumber: Bapperida Kab.Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Indeks Pendidikan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target Indeks Pendidikan pada tahun tersebut sebesar 0,606 poin, sementara realisasinya mencapai 0,622 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 0,016 poin atau sekitar 102,64% dari target.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pembangunan di sektor pendidikan berjalan lebih optimal dari yang direncanakan. Peningkatan Indeks Pendidikan tersebut mencerminkan perbaikan pada komponen penyusunnya, seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan serta meningkatnya kualitas pendidikan secara umum.

2. Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya.

Capaian indikator Indeks Pendidikan menunjukkan kinerja yang positif dan mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, target Indeks Pendidikan ditetapkan sebesar 0,602 poin dengan realisasi mencapai 0,616 poin. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,014 poin atau sekitar 102,33%, yang mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan berkembang lebih baik dari yang direncanakan.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 0,606 poin, seiring dengan upaya peningkatan kualitas sektor pendidikan. Realisasi pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan menjadi 0,622 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 0,016 poin atau sekitar 102,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,006 poin (dari 0,616 menjadi 0,622), yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pendidikan, baik dari sisi rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,609 poin, capaian tahun 2025 yang mencapai 0,622 poin telah melampaui target tersebut sebesar 0,013 poin atau sekitar 102,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan yang berjalan secara konsisten dan progresif. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan, terutama melalui pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

Capaian indikator Indeks Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung dengan capaian tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data Indeks Pendidikan nasional secara publik sebagai indikator yang berdiri sendiri, sehingga tidak memungkinkan dilakukan komparasi yang setara.

Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung, capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah tetap relevan untuk dianalisis dalam konteks kontribusinya terhadap peningkatan IPM

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana sekolah.
- b. Pemerataan distribusi sekolah hingga wilayah terpencil.
- c. Penyediaan fasilitas penunjang seperti ruang kelas baru dan sanitasi sekolah
- d. Monev program pendidikan secara berkala.

Solusi/Alternatif peningkatan capaian indikator :

- a. Meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan dan putus sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
- d. Pemerataan mutu pendidikan melalui distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan secara proporsional

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 36 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2.1 Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M2	MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS. MANDIRI DAN UNGGUL				
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM			
S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	102,64	99,37	-3,27

Pada sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 102,64%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,37%, dengan nilai efisiensi sebesar -3,27%

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong efisien, karena capaian kinerja melampaui target (over achievement) meskipun anggaran yang digunakan tidak terserap secara penuh.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Hasil kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melebihi target yang ditetapkan.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 3,27% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya telah dilakukan secara optimal dengan output yang lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 17 Analisa Program Penunjang Sasaran 2.1 pada Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM						
S2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	0,606 poin	102,64	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	104,82	Menunjang
						APK SD	97,48	Menunjang
						APK SMP/MTs	103,06	Menunjang
						PAUD Terakreditasi	138,6	Menunjang
						SD Terakreditasi A	100,3	Menunjang
						SMP Terakreditasi A	101,17	Menunjang
						Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	100,02	Menunjang
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	95,22	Menunjang
						Persentase PTK SD tersertifikasi	96,52	Menunjang
						Persentase PTK SMP tersertifikasi	109,35	Menunjang
					Program Pengembangan	Jumlah atlet berprestasi	111,11	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
					Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	143,75	Menunjang
	Rata-rata capain program						108,45	Sangat tinggi

Secara umum, program-program pendukung sasaran yang dilaksanakan telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan indeks pendidikan, mayoritas indikator menunjukkan capaian di atas target, yang mengindikasikan kinerja program berjalan efektif. Adapun program dan indikatornya sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan Program ini merupakan program utama dalam peningkatan indeks pendidikan karena menyentuh aspek akses dan mutu pendidikan.
 - a. APK PAUD (104,82%), APK SMP/MTs (103,06%), serta persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs (100,02%) menunjukkan capaian menunjang, karena mencerminkan akses dan keberlanjutan pendidikan yang baik.
 - b. APK SD sebesar 97,48% dinilai menunjang namun belum optimal, karena masih sedikit di bawah target sehingga perlu peningkatan partisipasi.
 - c. Indikator mutu pendidikan seperti PAUD terakreditasi (138,6%), SD terakreditasi A (100,3%), dan SMP terakreditasi A (101,17%) menunjukkan capaian sangat menunjang, karena peningkatan kualitas lembaga pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks pendidikan.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini berfokus pada peningkatan kualitas SDM pendidikan dengan dua buah indikator sbb :
 - a. Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi (95,22%) dan PTK SD tersertifikasi (96,52%) dinilai menunjang namun belum optimal, karena belum sepenuhnya mencapai target.
 - b. Persentase PTK SMP tersertifikasi (109,35%) dinilai menunjang, karena telah melampaui target.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Indikator jumlah atlet berprestasi dengan capaian 111,11% dinilai menunjang. Meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap indeks pendidikan, program ini berkontribusi dalam pengembangan potensi peserta didik secara holistik dan peningkatan daya saing.

4. Program Pembinaan Perpustakaan dengan Indikator peningkatan kunjungan perpustakaan dengan capaian 143,75% dinilai sangat menunjang. Tingginya minat kunjungan mencerminkan peningkatan budaya literasi masyarakat yang menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Tren Perkembangan indeks Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 (lima) Tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar III. 7 Trend perkembangan indeks Pendidikan 2021-2025



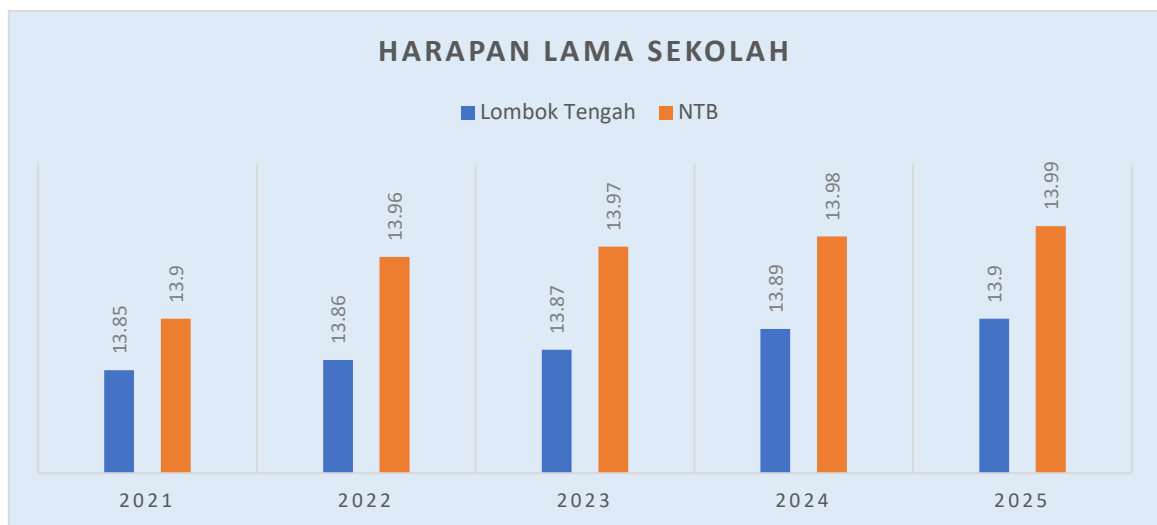
Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar III.1.7 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2021-2025. diharapkan kedepannya juga akan mengalami trend yang sama sehingga kualitas sumber daya manusia Lombok Tengah bisa setara atau sejajar dengan daerah lainnya.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

Untuk mengetahui perkembangan IHL Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar III. 8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB



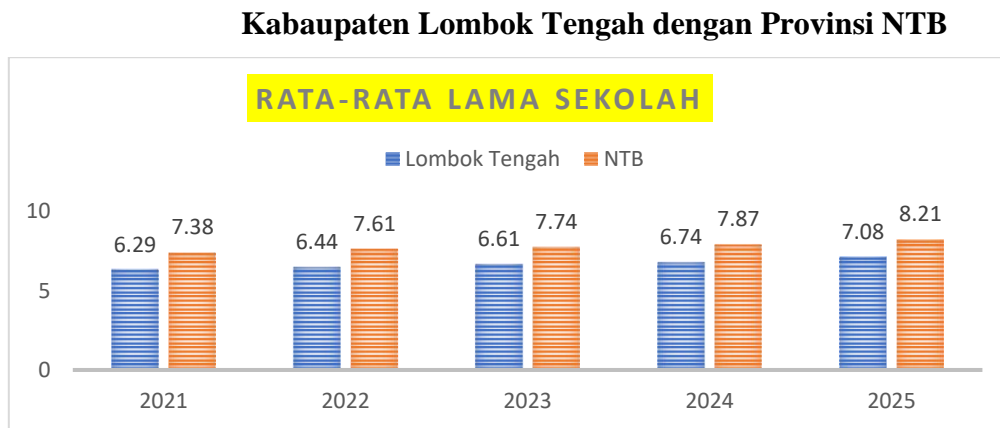
Sumber : BPS NTB 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan baik pada tingkat Kabupaten Lombok Tengah maupun Provinsi NTB. Namun demikian, capaian HLS Kabupaten Lombok Tengah masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi NTB pada setiap tahun pengamatan. Pada tahun 2021, HLS Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 13,85 tahun, sedangkan Provinsi NTB mencapai 13,90 tahun, sehingga terdapat selisih 0,05 tahun. Memasuki 2022, HLS Lombok Tengah meningkat tipis menjadi 13,86 tahun, sementara NTB meningkat lebih tinggi menjadi 13,96 tahun, sehingga selisih meningkat menjadi 0,10 tahun. Pada 2023, HLS Lombok Tengah kembali mengalami peningkatan menjadi 13,87 tahun, sedangkan NTB mencapai 13,97 tahun, dengan selisih yang relatif sama yaitu 0,10 tahun. Tren peningkatan berlanjut pada 2024, di mana Lombok Tengah mencapai 13,89 tahun dan NTB 13,98 tahun, sehingga selisih sedikit menurun menjadi 0,09 tahun. Selanjutnya pada 2025, HLS Kabupaten Lombok Tengah mencapai 13,90 tahun, sedangkan NTB berada pada 13,99 tahun, dengan selisih kembali sekitar 0,09 tahun.

Secara umum, perkembangan HLS di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sedikit berada di bawah rata-rata Provinsi NTB, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat agar dapat lebih mendekati atau melampaui capaian tingkat provinsi.

Selanjutnya untuk mengetahui Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III. 9 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Sumber : BPS NTB 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Namun demikian, nilai RLS Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian Provinsi NTB, meskipun keduanya sama-sama mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2021, RLS Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 6,29 tahun, sedangkan Provinsi NTB mencapai 7,38 tahun, sehingga terdapat selisih 1,09 tahun. Pada 2022, RLS Lombok Tengah meningkat menjadi 6,44 tahun, sementara NTB mencapai 7,61 tahun, dengan selisih 1,17 tahun.

Selanjutnya pada 2023, RLS Lombok Tengah kembali meningkat menjadi 6,61 tahun, sedangkan Provinsi NTB mencapai 7,74 tahun, sehingga selisih antara keduanya menjadi 1,13 tahun. Pada 2024, capaian RLS Lombok Tengah meningkat menjadi 6,74 tahun, sementara NTB mencapai 7,87 tahun, dengan selisih yang relatif stabil yaitu 1,13 tahun. Pada 2025, RLS Kabupaten Lombok Tengah mencapai 7,08 tahun, sedangkan Provinsi NTB mencapai 8,21 tahun, sehingga selisih antara keduanya kembali berada pada kisaran 1,13 tahun.

Secara keseluruhan, capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, kesenjangan dengan rata-rata Provinsi NTB masih terlihat cukup signifikan, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan akses, keberlanjutan pendidikan, serta menekan angka putus sekolah agar rata-rata lama sekolah masyarakat dapat terus meningkat dan mendekati capaian provinsi.

III.1.6 SASARAN 2.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah dalam dimensi kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini tercermin dari membaiknya angka harapan hidup, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan primer di tingkat desa dan kecamatan, optimalisasi peran puskesmas dan posyandu, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis, serta distribusi obat-obatan yang memadai turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, program promotif dan preventif semakin diperkuat melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), imunisasi dasar lengkap, pencegahan stunting, serta deteksi dini penyakit tidak menular. Pendekatan berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat..

Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sehingga harapan hidup lebih lama juga bisa terwujud. terkait dengan hal tersebut untuk melihat derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 4 SASARAN 2.2
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Kesehatan	Poin	$\text{Ikesehatan} = \frac{(\text{AHH} - \text{AHHmin})}{(\text{AHHmax} - \text{AHHmin})}$	0,725	0,729	0,734	0,801	0,798	110,48	109,47	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target Indeks Kesehatan pada tahun tersebut

sebesar 0,729 poin, sementara realisasinya mencapai 0,798 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 0,069 poin atau sekitar 109,46% dari target.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pembangunan di sektor kesehatan berjalan lebih optimal dari yang direncanakan. Peningkatan Indeks Kesehatan tersebut mencerminkan perbaikan pada berbagai aspek, seperti meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik.

2. Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya

Capaian indikator Indeks Kesehatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang konsisten melampaui target, meskipun terdapat sedikit dinamika antar tahun.

Pada tahun 2024, target Indeks Kesehatan ditetapkan sebesar 0,725 poin dengan realisasi mencapai 0,801 poin. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,076 poin atau sekitar 110,48%, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang cukup signifikan.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 0,729 poin, sementara realisasi tercatat sebesar 0,798 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga melampaui target sebesar 0,069 poin atau sekitar 109,46%. Meskipun masih berada di atas target, jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,003 poin (dari 0,801 menjadi 0,798). Namun demikian, penurunan ini relatif kecil dan tidak mengurangi capaian kinerja yang tetap berada pada level sangat baik.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,734 poin, capaian tahun 2025 yang mencapai 0,798 poin telah melampaui target tersebut sebesar 0,064 poin atau sekitar 108,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator Indeks Kesehatan tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan yang konsisten dan melampaui ekspektasi. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga stabilitas capaian tersebut serta memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terus berkelanjutan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian indikator Indeks Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung dengan capaian tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data Indeks Kesehatan nasional secara rinci dan terpublikasi sebagai indikator yang berdiri sendiri, sehingga komparasi secara langsung tidak dapat dilakukan secara setara.

Meskipun demikian, Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat nasional. Dengan demikian, meskipun tidak disajikan secara terpisah, kinerja Indeks Kesehatan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian IPM nasional, bersama dengan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung pencapaian target indikator :

- a. Optimalisasi fungsi puskesmas sebagai gatekeeper layanan kesehatan;
- b. Meningkatnya kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. Intervensi percepatan penurunan stunting;
- d. Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator ini adalah :

- a. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan.
- b. Edukasi pola hidup aktif dan sehat bagi usia produktif dan lanjut usia.
- c. Pemetaan wilayah dengan angka kesakitan tinggi untuk intervensi prioritas.
- d. Penguatan program pengentasan kemiskinan yang berdampak pada status gizi dan akses layanan kesehatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 59 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2.2 Tujuan 2 Misi 2 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M2	MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS. MANDIRI DAN UNGGUL				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM			
S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	109,47	91,57	-17,9

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 109,47%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,57%. tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh: $91,57\% - 109,47\% = -17,90\%$

Nilai efisiensi sebesar -17,90% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja tidak hanya mencapai target tetapi juga melampaui secara signifikan, sementara penggunaan anggaran relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ✓ Terjadi over achievement/melampaui target kinerja yang cukup tinggi pada Indeks Kesehatan.
- ✓ Terdapat penghematan anggaran sebesar 17,90% dari total pagu.
- ✓ Efektivitas penggunaan sumber daya sangat baik, dengan output yang jauh lebih besar dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 20 Analisa Program Penunjang Sasaran Kinerja 2.2 pada Tujuan 2 Misi 2

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM						
S2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,729 poin	109,47%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	43,31	Tidak Menunjang

						Angka Kematian Ibu	110,26	Menunjang
						Angka Kematian Bayi	104,44	Menunjang
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	105,26	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	84,8	Menunjang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang kompeten di pelayanan dasar	96,11	Menunjang
Rata-rata capain program							90,69	Tinggi

Capaian indikator program menunjukkan kontribusi yang bervariasi dalam menunjang sasaran sesuai analisis sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini merupakan program inti yang berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat dengan beberapa indikatornya sbb :
 - a. Indikator “Persentase balita stunting” dengan capaian 43,31% dinilai kurang menunjang, karena masih menunjukkan kondisi yang belum sesuai target (semakin rendah seharusnya semakin baik), sehingga berdampak negatif terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
 - b. Indikator “Angka Kematian Ibu (AKI)” dengan capaian 110,26% dinilai menunjang, karena menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target dalam menurunkan angka kematian ibu.
 - c. Indikator “Angka Kematian Bayi (AKB)” dengan capaian 104,44% juga dinilai menunjang, karena mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan Indikator “Persentase PIRT yang diterbitkan” dengan capaian 105,26% dinilai menunjang. Pengawasan dan legalitas produk pangan rumah tangga berkontribusi dalam menjamin keamanan konsumsi masyarakat, sehingga mendukung peningkatan kesehatan secara tidak langsung.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Indikator “Persentase PUS akseptor KB” dengan capaian 84,8% dinilai menunjang namun belum optimal. Program KB berperan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga, namun capaian yang belum maksimal menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam jangkauan layanan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Indikator “Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar” dengan capaian 96,11% dinilai menunjang namun belum optimal. Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten sangat menentukan kualitas layanan kesehatan, sehingga capaian ini sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

Dalam diagram dibawah ini dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perkembangan indeks kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang terus mengalami peningkatan.

Trend perkembangan indeks kesehatan Lombok Tengah sesuai gambar berikut:

Gambar III. 10 Indeks Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025



Sumber: Bapperida Lombok Tengah

Dari grafik tersebut dapat dilihat perkembangan indeks Kesehatan di Lombok Tengah terus mengalami kenaikan dari tahun 2021-2025. hal ini merupakan hasil kerja nyata pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan serta kerja sama yang baik antar stakeholder terkait untuk memajukan kesehatan Masyarakat khususnya di kabupaten Lombok Tengah.

Angka Harapan Hidup Masyarakat merupakan instrumen ukur dalam formula penentuan capaian target indeks Kesehatan dengan beberapa item sebagai penentunya adalah ;

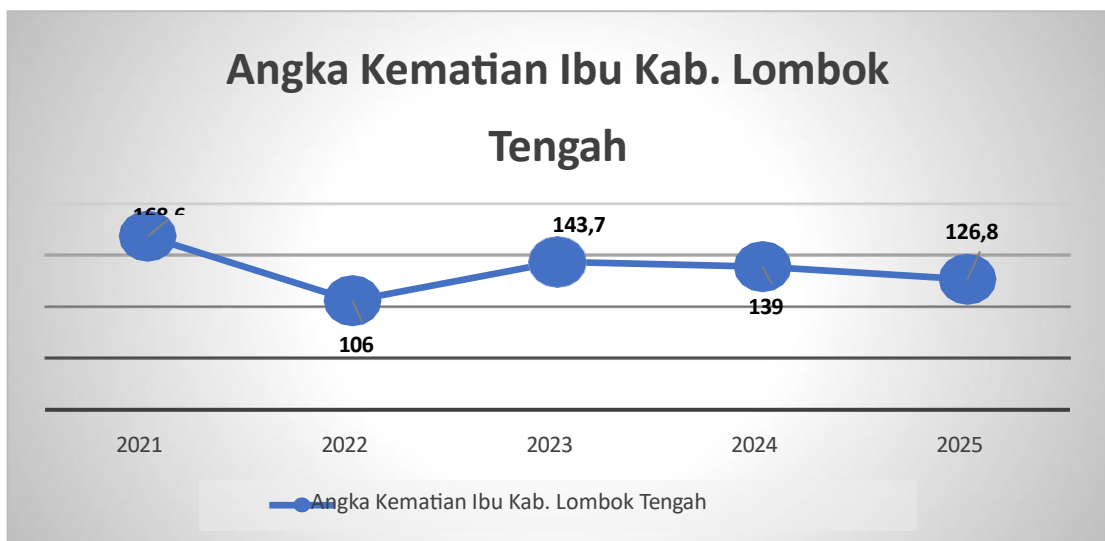
1. Angka Kematian Ibu (AKI)

2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Persentase Balita Stunting
4. Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar
5. P-IRT yang diterbitkan
6. Cakupan Posyandu Keluarga Aktif

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kematian ibu dihitung dari terjadi kematian ibu pada masa kehamilan (bumil). persalinan (Bulin) dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2021-2025 tergambar data historisnya dalam time series pada Gambar :

Gambar III. 11 Angka kematian ibu Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka kematian Ibu di Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun 2025 angka kematian ibu sebanyak 126.8/100.000 KH sedangkan di Tahun 2024 angka kematian ibu berada di angka 139/100.000 KH turun sebanyak 12.2/100.000 Kelahiran Hidup. Secara trend 4 (empat) tahun kebelakang, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuatif, dimana di Tahun pertama Renstra 2021-2026 angka kematian ibu mencapai 168,6/100.000 KH, kemudian di tahun ke 2 (dua) Tahun 2022 angka kematian ibu menurun menjadi 106/100.000 KH. Di Tahun 2023 angka kematian ibu meningkat drastis menjadi 143,7/100.000 yang disebabkan beberapa faktor seperti pernikahan dini, pendarahan dan komplikasi. Di Tahun 2024 angka kematian ibu turun menjadi 139/100.000 KH dan turun kembali

menjadi 126.8/100.000 KH dari jumlah lahir hidup sebanyak 14.983 jiwa . Penurunan angka kematian ibu ini menunjukkan tren positif dikarenakan kasus kematian sebanyak 19 kasus

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Untuk angka kematian Bayi (AKB) di kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dalam kurun 2021-2025 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar III. 12 Angka Kematian Bayi



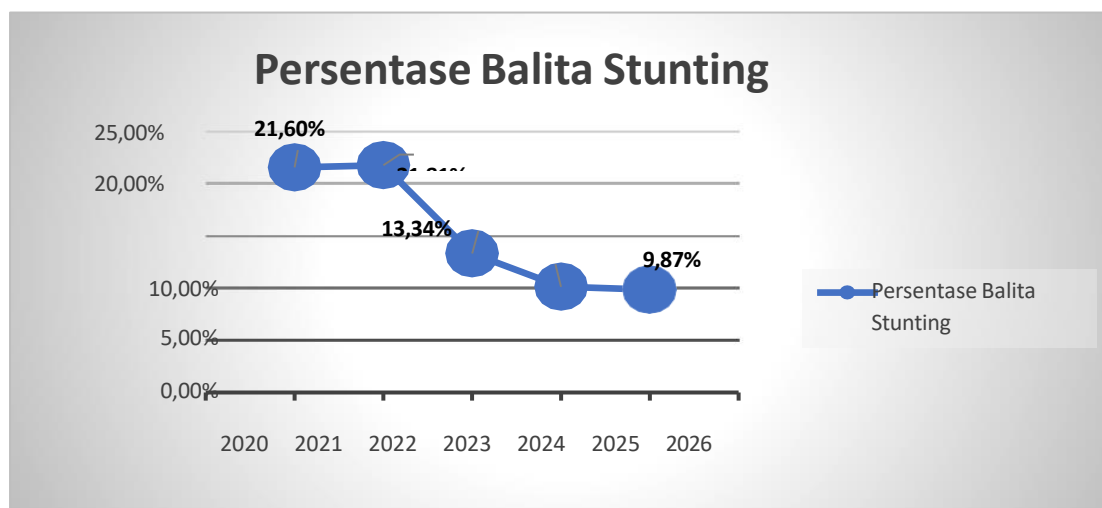
Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan 2025

Dari gambar III.12 dapat dilihat angka kematian Bayi di Tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana Pada Tahun 2024 angka kematian bayi sebanyak 7.74/1.000 Kelahiran Hidup meningkat menjadi 9.4/1.000 Kelahiran Hidup di Tahun 2025. Trend angka kematian bayi dari pada Tahun 2021 berada di angka 9.7/1000 KH, mengalami kenaikan di Tahun 2022 menjadi 10.1/1000 KH. Di Tahun 2023 angka kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6.5/1000 KH dan di Tahun 2024 naik menjadi 7.74/1000 KH dan di Tahun 2025 kembali naik menjadi 9.4/1000 KH. Kenaikan angka kematian bayi ini disebabkan oleh 3 (tiga kasus) yaitu Kasus BBLR sebanyak 27%, Kasus Asfiksia sebanyak 27,6% dan yang terakhir Kasus Septis sebanyak 18,4%. Ketiga kasus ini menyebabkan angka atau jumlah kasus kematian bayi menjadi bertambah atau naik dari tahun-tahun sebelumnya.

3) Persentase Balita Stunting

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dalam kurun 2021-2025 seperti tergambar pada historis time seriesnya dibawah ini:

Gambar III. 13
Persentase Balita Stunting Kab. Lombok Tengah Tahun 2021-2025



Sumber LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2025

Persentase Balita Stunting dari di Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana di Tahun 2024 persentase balita stunting berada di 10.14% dan turun menjadi 9.87% di Tahun 2025. Dilihat dari trend 4 (empat) tahun kebelakang persentase balita stunting mengalami penurunan yang positif. Dimana pada Tahun 2021 atau di awal Renstra 2021-2026 persentase balita stunting sebanyak 21.60% kemudian turun menjadi 21.81% di Tahun 2022. Di Tahun 2023 angka persentase balita stunting menjadi 13.34%, kemudian di Tahun 2024 turun menjadi 10.14% dan di akhir Tahun 2025 persentase balita stunting mencapai 1 (satu) digit yaitu 9.87%.

4) Tenaga Kesehatan (Nakes)

Program Persentase Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Pelayanan Dasar di Tahun 2025 belum mencapai target 100%. Namun capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di Tahun 2024 berada di angka 92.61% dan di Tahun 2025 meningkat menjadi 96.11%. Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh belum optimalnya sumber dana dimana sumber dananya hanya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana jenis pelatihannya sudah ditentukan oleh pusat sehingga kurangnya tenaga kesehatan

yang kompeten di pelayanan dasarnya menjadi optimal atau butuh pelatihan yang sesuai dengan jenis kebutuhannya.

5) P-IRT yang diterbitkan

Di Tahun 2025 capaian indikator sasaran program untuk P-IRT yang diterbitkan sudah mencapai angka 100% dari target 95%. Hal ini disebabkan karenakan semua Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sudah mendapat Sertifikan Layak Pangan dari BPOM. Sehingga legalitas keamanan pangan produksi rumah tangga sudah bisa diproduksi.

6) Cakupan Posyandu Keluarga Aktif

Cakupan posyandu keluarga aktif di tahun 2025 sudah mencapai 100% posyandu yang aktif dengan jumlah 1740 posyandu aktif. Capaian indikator kinerja ini berhasil dipertahankan dari tahun sebelumnya yaitu 100% di Tahun 2024.

III.1.5

III.1.7 TUJUAN 3 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penerapan prinsip good governance juga tercermin melalui keterbukaan informasi publik, digitalisasi layanan pemerintahan, serta penyederhanaan birokrasi. Transformasi digital dalam pelayanan administrasi dan perizinan memberikan kemudahan, kepastian waktu, serta meminimalisir praktik maladministrasi.

Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik. ASN dituntut profesional, berintegritas, serta berorientasi pada hasil (result oriented). Budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Lebih jauh, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan akan diminta akuntabilitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk tahun 2022 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dievaluasi hasil kerjanya dengan hasil sesuai tabel dibawah:

Tabel III. 30 TUJUAN 3**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 61	B 62,35	BB 70	BB 77,28	BB 77,94	126,97	125	Sangat tinggi

Sumber: Kementerian PAN-RB

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan, baik dari sisi nilai maupun predikat.

Pada tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 62,35 dengan predikat B. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 77,94 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan adanya selisih capaian sebesar 15,59 poin di atas target atau sekitar 124,99% dari target yang ditetapkan.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi nilai, tetapi juga dari peningkatan predikat, yaitu dari target B menjadi realisasi BB. Kenaikan predikat ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

2. Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mengalami peningkatan secara konsisten, baik dibandingkan target tahunan maupun target jangka menengah (RPJMD).

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 61 dengan predikat B, sementara realisasi mencapai 77,28 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 16,28 poin atau sekitar 126,69%, sekaligus berhasil melampaui predikat yang ditargetkan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan awal dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan implementasi reformasi birokrasi.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 62,35 dengan predikat B. Realisasi yang dicapai juga mengalami peningkatan menjadi 77,94 dengan predikat BB. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 15,59 poin atau sekitar 124,99%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat peningkatan nilai sebesar 0,66 poin (dari 77,28 menjadi 77,94), yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas reformasi birokrasi, meskipun predikat tetap berada pada kategori BB.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 70 dengan predikat B, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 7,94 poin atau sekitar 111,34%, serta berada pada predikat yang lebih tinggi (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja reformasi birokrasi tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten dan progresif. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah mendorong peningkatan menuju predikat yang lebih tinggi, melalui penguatan inovasi pelayanan publik, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Capaian Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Kabupaten Lombok Tengah mencatat capaian RB sebesar 77,94 poin dengan predikat BB, sedangkan rata-rata nasional berada pada 71,83 poin dengan predikat yang sama yaitu BB. Meskipun berada dalam kategori predikat yang sama, capaian Lombok Tengah lebih tinggi 6,11 poin dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Lombok Tengah lebih unggul dalam aspek-aspek penilaian RB, seperti manajemen perubahan, penataan kelembagaan, tata laksana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kesamaan predikat BB mengindikasikan bahwa baik Lombok Tengah maupun nasional telah mencapai kategori “Baik Sekali”, namun selisih nilai yang cukup signifikan mencerminkan bahwa Lombok Tengah berada pada posisi yang lebih mendekati kategori

berikutnya (A), sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan predikat di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan efektif dan berada di atas rata-rata nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung pencapaian predikat BB Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi aktif antara Perangkat yang bertugas mengkoordinasi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Perangkat Daerah Pengampu dan pendukung kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Tim Evaluator yang terus mendorong kepada Perangkat daerah pengampu dan pendukung untuk melaksanakan semua rekomendasi hasil evaluasi internalnya.
- c. Komitmen Perangkat Daerah Pengampu dan pendukung dalam menyusun dan melaksanakan seluruh rencana aksi pelaksanaan RB.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan hasil capaian pada indikator ini adalah :

- a. Komitmen dan atensi para kepala perangkat daerah harus nyata untuk mendorong seluruh pejabat dan staf agar eksis dalam melaksanakan program dan kegiatan RB dimasing-masing unit kerja dengan rencana aksi yang telah disusun baik RB General maupun RB Tematik;
- b. TPI lebih keras mendorong perangkat daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi triwulan atau tahunan;
- c. Pemda harus memberikan reward kepada Perangkat daerah yang telah menjalankan program RB dengan nilai baik.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 31 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan 3

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M 3	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH. CEPAT DAN BERSIH;				
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	125	92,51	-32,49

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja Tujuan 3 sebesar 125%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,51%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -32,49%.

Nilai efisiensi sebesar -32,49% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target secara signifikan, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 3 tergolong sangat efisien.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi (125%) mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meliputi aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak maksimal (92,51%), yang menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang hemat dan optimal.

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Optimalisasi sistem dan proses birokrasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan.
- Peningkatan kapasitas aparatur, sehingga kinerja organisasi meningkat tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.
- Efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, yang mengurangi duplikasi kegiatan dan meningkatkan sinergi program.
- Dampak berkelanjutan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pada tahun berjalan.
- Pada Tujuan 3, capaian kinerja (125%) jauh lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (92,51%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan sangat efisien.
- Nilai efisiensi yang cukup besar menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang signifikan, dimana output dan outcome yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel. III.32 Analisis Program Penunjang Pada Tujuan 3 Misi 3

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi						
S3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat B	100%	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	121,18	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	163,51	Menunjang
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindakan lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah	99,84	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	100	Menunjang
						Rata-rata Kecepatan Layanan Perbendaharaan	95	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	101,52	Menunjang
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	114,37	Menunjang
					Program Kepegawaian Daerah	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	239,87	Menunjang
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu	105,26	Menunjang
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap Ranperda yang dibahas	22,99	Tidak Menunjang
						Jumlah Berita yang dipublikasikan	100	Menunjang
S3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	95%	105,26%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	111,11	Menunjang
					Program Pencatatan Sipil	Porsentase kepemilikan akta kelahiran	100,69	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	98,87	Menunjang	
						Persentase penerbitan KIA	121,35	Menunjang	
						Persentase penerbitan surat pindah	100	Menunjang	
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100	Menunjang	
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	100	Menunjang	
					Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun	100	Menunjang	
	Rata-rata capain program							117,78	Sangat tinggi

Secara umum, pencapaian Tujuan 3 didukung oleh pelaksanaan berbagai program lintas perangkat daerah yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan tabel capaian, sebagian besar program pendukung menunjukkan kategori capaian tinggi hingga sangat tinggi, dengan rata-rata capaian program sebesar 117,78%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program terhadap pencapaian Tujuan 3 telah berjalan efektif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator program yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pencapaian sasaran 3.1 ini ditopang oleh beberapa program yang secara umum menunjang, antara lain:

1. Program Penataan Desa dengan capaian 121,18% melalui indikator persentase peningkatan status desa mandiri, menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sampai pada level desa. Program ini

mendukung akuntabilitas karena desa yang semakin mandiri akan lebih tertib dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemerintahan.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memperoleh capaian 163,51% pada indikator realisasi PAD. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencapai 100% pada indikator persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan yang baik antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas perencanaan pembangunan.
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan mencapai 99,84% pada indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah. Walaupun sedikit di bawah angka 100%, capaian ini tetap menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan sangat baik dan tetap menunjang sasaran akuntabilitas kinerja.
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah juga memberikan kontribusi positif, dengan capaian 100% pada indikator ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD, serta 95% pada indikator rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah relatif baik dan mendukung peningkatan akuntabilitas, walaupun layanan perbendaharaan masih dapat terus ditingkatkan agar lebih optimal.
6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 101,52% pada indikator validasi data aset. Ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset daerah telah berjalan dengan baik, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian 114,37% pada indikator persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi menunjukkan bahwa penempatan dan pengembangan kompetensi ASN semakin tepat, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan akuntabilitas organisasi.
8. Program Kepegawaian Daerah memberikan dukungan sangat kuat terhadap sasaran ini, terlihat dari capaian 239,87% pada indikator rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi dan 105,26% pada indikator persentase layanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan tepat waktu. Capaian ini

menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam profesionalisme aparatur dan kualitas layanan administrasi kepegawaian.

Namun demikian, masih terdapat indikator program yang tidak menunjang, yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, khususnya indikator rasio Perda yang ditetapkan terhadap Ranperda yang dibahas yang hanya mencapai 22,99%. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi belum optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, indikator lain dalam program yang sama, yaitu jumlah berita yang dipublikasikan, mencapai 100% dan tetap memberikan kontribusi pada aspek transparansi informasi publik.

Keberhasilan sasaran 3.2 ini didukung oleh sejumlah program sebagai berikut:

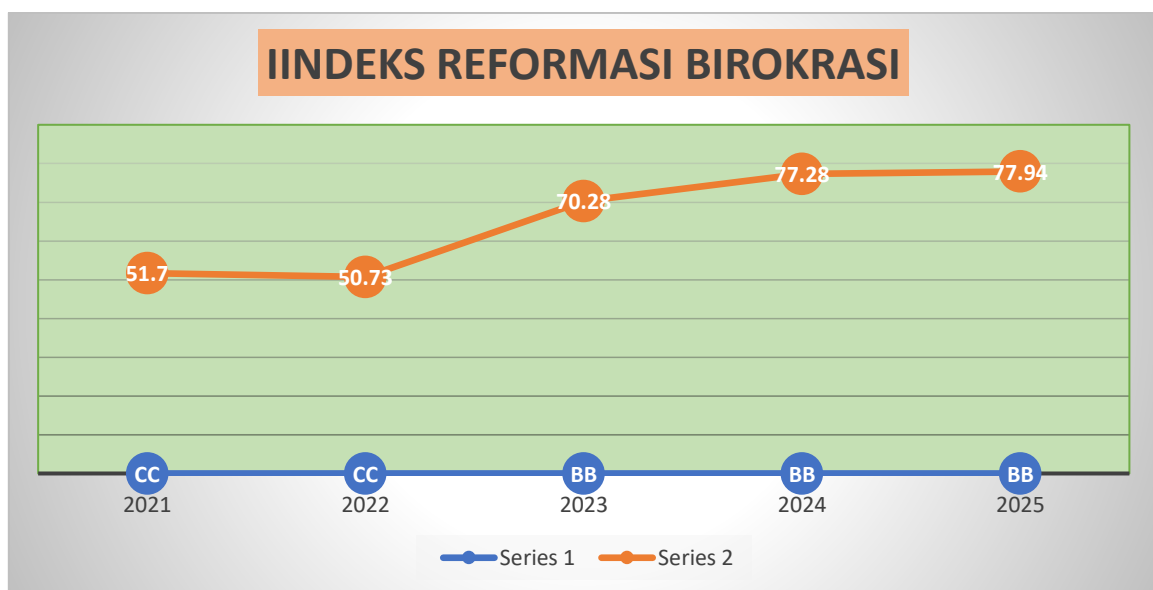
1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 111,11% pada indikator PD yang menjalankan pelayanan publik secara online. Capaian ini menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi pelayanan publik, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
2. Program Pencatatan Sipil dengan capaian 100,69% pada indikator persentase kepemilikan akta kelahiran menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan baik dan menjangkau masyarakat secara efektif.
3. Program Pendaftaran Penduduk juga memberikan dukungan yang cukup kuat, dengan capaian 98,87% pada indikator persentase kepemilikan KTP elektronik, 121,35% pada indikator persentase penerbitan KIA, dan 100% pada indikator persentase penerbitan surat pindah. Meskipun kepemilikan KTP elektronik sedikit di bawah 100%, secara umum program ini tetap menunjang sasaran karena dua indikator lainnya telah memenuhi bahkan melampaui target.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 100% pada indikator persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan pada level kewenangan yang dilimpahkan telah berjalan sesuai target. Berdasarkan capaian tersebut, program ini dapat dinilai menunjang sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Program Pelayanan Penanaman Modal mencapai 100% pada indikator persentase permohonan perizinan yang dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan perizinan telah berjalan sesuai target, yang berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

6. Program Penataan Bangunan Gedung mencapai 100% pada indikator gedung pemerintah terbangun. Keberadaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai turut mendukung peningkatan mutu pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara keseluruhan, seluruh program pendukung pada Sasaran 3.2 dapat dinilai menunjang, karena masing-masing berkontribusi terhadap kemudahan akses, kecepatan, kepastian, dan kualitas pelayanan publik. Capaian sasaran yang melebihi target menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

Sebagai informasi lebih lanjut bahwa Trend perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 14 Perkembangan hasil evaluasi RB 2020-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

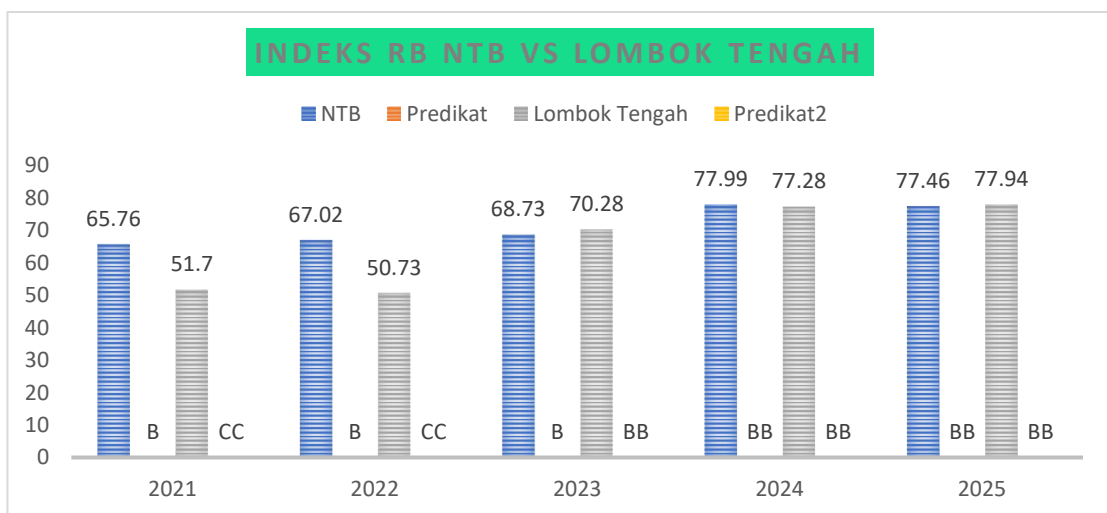
Berdasarkan grafik Predikat dan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021–2025, terlihat adanya peningkatan nilai reformasi birokrasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yang juga diikuti dengan peningkatan predikat penilaian. Pada tahun 2021, nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 50,73 dengan predikat CC. Pada 2022, nilai tersebut meningkat menjadi 55,77, meskipun predikat yang diperoleh masih berada pada kategori CC. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, namun belum cukup untuk mendorong peningkatan kategori penilaian.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2023, di mana nilai Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 70,28 dan berhasil mendorong kenaikan predikat menjadi BB. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan yang lebih nyata dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya pada 2024, nilai Reformasi Birokrasi kembali meningkat menjadi 77,28 dengan predikat yang tetap berada pada kategori BB. Tren peningkatan berlanjut pada 2025, di mana nilai Reformasi Birokrasi mencapai 77,94, dengan predikat yang masih berada pada kategori BB.

Secara keseluruhan, capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif, baik dari sisi nilai maupun predikat. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 15 Komparasi nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber : Kemenpan RB (data diolah)

Berdasarkan grafik Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025, terlihat adanya perbandingan capaian nilai dan predikat yang menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2021, nilai Reformasi Birokrasi Provinsi NTB tercatat sebesar 65,76 dengan predikat B, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah memperoleh nilai 51,70 dengan predikat CC. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Lombok Tengah masih berada cukup jauh di bawah rata-rata provinsi.

Pada 2022, nilai RB Provinsi NTB meningkat menjadi 67,02 dengan predikat B, sementara Lombok Tengah sedikit mengalami penurunan nilai menjadi 50,73 dengan predikat yang masih berada pada kategori CC. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Lombok Tengah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi.

Perbaikan yang cukup signifikan terjadi pada 2023, di mana nilai RB Provinsi NTB mencapai 68,73 dengan predikat B, sedangkan Lombok Tengah meningkat pesat menjadi 70,28 dan berhasil memperoleh predikat BB. Pada tahun ini, capaian Lombok Tengah bahkan melampaui nilai rata-rata Provinsi NTB.

Pada 2024, nilai RB Provinsi NTB kembali meningkat menjadi 77,99 dengan predikat BB, sementara Lombok Tengah memperoleh nilai 77,28 dengan predikat yang sama yaitu BB. Selisih antara keduanya menjadi sangat kecil, yang menunjukkan bahwa capaian Lombok Tengah sudah hampir setara dengan capaian provinsi.

Selanjutnya pada 2025, nilai RB Provinsi NTB tercatat sebesar 77,46 dengan predikat BB, sedangkan Lombok Tengah meningkat menjadi 77,94 dengan predikat BB. Pada tahun ini, capaian Lombok Tengah kembali sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTB.

III.1.6 III.1.8 SASARAN 3.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan wujud komitmen dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Akuntabilitas kinerja tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif dalam menyusun laporan, tetapi sebagai sistem yang memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan secara terukur dan transparan.

Di Kabupaten Lombok Tengah, penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan indikator kinerja yang jelas dan berorientasi pada outcome. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi

instrumen utama dalam mendorong keterkaitan antara sasaran strategis daerah dengan target kinerja perangkat daerah secara konsisten.

Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta melakukan langkah korektif secara cepat dan tepat. Setiap perangkat daerah didorong untuk menyusun perjanjian kinerja yang realistis, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 33 SASARAN 3.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Nilai SAKIP	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 61.05	B 63,85	BB 70,01	B 62.90	B 63,85	103.03	100	Sangat tinggi

Sumber: Kemenpan RB

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

Capaian indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 63,85 dengan predikat B, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 63,85 dengan predikat B. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh upaya dan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian ini mengindikasikan stabilitas kinerja dalam pengelolaan akuntabilitas instansi pemerintah. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, terutama melalui penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas indikator kinerja,

serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi guna mendorong peningkatan predikat ke level yang lebih tinggi.

Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja organisasi. Predikat B menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah tergolong baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan menuju kategori yang lebih tinggi.

2. Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya ;

Capaian indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan kinerja yang stabil dengan tren peningkatan, meskipun masih terdapat gap terhadap target jangka menengah daerah.

Pada tahun 2024, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 61,05 dengan predikat B, sementara realisasi mencapai 62,90 dengan predikat B. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 1,85 poin atau sekitar 103,03%, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam penerapan akuntabilitas kinerja.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 63,85 dengan predikat B, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 63,85 dengan predikat B. Dengan demikian, tingkat capaian tahun 2025 mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan nilai sebesar 0,95 poin (dari 62,90 menjadi 63,85), yang menunjukkan adanya kemajuan meskipun masih dalam kategori predikat yang sama.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 70,01 dengan predikat BB, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target tersebut dengan selisih sebesar 6,16 poin. Selain itu, dari sisi predikat juga masih berada pada kategori B, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai predikat BB sesuai dengan target jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan cukup baik dan mengalami peningkatan secara bertahap. Namun demikian, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih optimal, seperti penguatan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara lebih efektif, guna mendorong peningkatan nilai dan predikat SAKIP di masa mendatang.

5. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional, meskipun berada dalam kategori predikat yang sama. Kabupaten Lombok Tengah mencatat capaian SAKIP sebesar 63,85 poin dengan predikat B, sedangkan rata-rata nasional mencapai 66,42 poin dengan predikat B. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar 2,57 poin, di mana capaian Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kesamaan predikat B mengindikasikan bahwa secara umum kualitas akuntabilitas kinerja di Lombok Tengah sudah berada pada kategori “Baik”, namun belum optimal. Selisih nilai tersebut mencerminkan masih adanya ruang perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal yang menjadi komponen utama dalam penilaian SAKIP. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar dapat melampaui rata-rata nasional dan menuju predikat yang lebih tinggi. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaporan, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendorong pencapaian indikator ini adalah :

- a. Penyelarasan dokumen IKU. PK. Renstra. dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rekomendasi dari Evaluator;
- b. Melakukan reviu terhadap dokumen AKIP secara berkala
- c. Melakukan monev secara berkala terhadap progres renja

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator ini adalah :

- a. Mendorong kompetensi dan profesionalisme ASN dalam merencanakan. melaksanakan. dan mengevaluasi program;
- b. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program harus ditingkatkan dari semua aspek guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal;
- c. Membuat/menggunakan aplikasi e-SAKIP terintegrasi untuk pemantauan kinerja.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3.1 Tujuan 3 Misi 3 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M 3	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH. CEPAT DAN BERSIH;				
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			
S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	100	92,15	-7,85

Nilai efisiensi sebesar -7,85% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong efisien, karena target kinerja dapat tercapai sepenuhnya tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia, pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,15%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Target kinerja Nilai SAKIP tercapai 100% sesuai yang ditetapkan.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 7,85% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal dengan hasil maksimal.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Tabel III. 35 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 3. 1 pada Tujuan 3 Misi 3

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi						
S3. 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predika t B	1007%	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	121,18	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	163,51	Menunjang
					Rogram Perencanaan,	Persentase kesesuaian	100	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	program pada RPJMD dengan RKPD		
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindaklanj ut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Daerah	99,84	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	100	Menunjang
						Rata-rata Kecepatan Layanan Perbendaharaan	95	Menunjang
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	101,52	Menunjang
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	114,37	Menunjang
					Program Kepegawaian Daerah	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	239,87	Menunjang
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu	105,26	Menunjang
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap Ranperda	22,99	Tidak Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
						yang dibahas			
						Jumlah Berita yang dipublikasikan	100	Menunjang	
	Rata-rata capain program							113,63	Sangat tinggi

Pada sasaran kinerja ini mayoritas indikator program pendukung sasaran menunjukkan capaian di atas target, yang mengindikasikan kontribusi positif terhadap peningkatan predikat SAKIP dengan capaian sebagai berikut :

- A. Program Penataan Desa dengan Indikator “Persentase peningkatan status desa mandiri” dengan capaian 121,18% dapat dinilai menunjang secara signifikan. Peningkatan kemandirian desa mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di tingkat desa, yang turut berkontribusi terhadap akuntabilitas secara keseluruhan.
- B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Indikator “Realisasi PAD” dengan capaian 165,51% dinilai sangat menunjang. Optimalisasi pendapatan daerah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, yang merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian SAKIP.
- C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Indikator “Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD” dengan capaian 100% dinilai menunjang secara optimal. Konsistensi perencanaan merupakan fondasi utama dalam sistem akuntabilitas kinerja, sehingga program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SAKIP.
- D. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Indikator “Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan” dengan capaian 99,84% dinilai menunjang sangat kuat. Tingginya penyelesaian tindak lanjut menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan pengendalian internal yang efektif.
- E. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 2 indiktornya :
 1. Indikator “Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD” dengan capaian 100% dinilai menunjang secara optimal.

2. Indikator “Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan” dengan capaian 95% dinilai menunjang namun belum optimal.

Secara keseluruhan, program ini menunjang signifikan, khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

F. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator “Validasi data aset” dengan capaian 101,52% dinilai menunjang. Pengelolaan aset yang baik meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah.

G. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Indikator “Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi” dengan capaian 114,37% dinilai sangat menunjang. Kesesuaian kompetensi ASN merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi yang akuntabel.

H. Program Kepegawaian Daerah terdapat dua indikator :

1. Indikator “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi” dengan capaian 239,87% dinilai sangat dominan menunjang.

2. Indikator “Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu” dengan capaian 105,26% dinilai sangat menunjang.

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat 2 (dua) indikator :

1. Indikator “Rasio Perda yang ditetapkan terhadap Ranperda yang dibahas” dengan capaian 22,99% dinilai kurang menunjang, karena rendahnya rasio penetapan Perda dapat mempengaruhi efektivitas fungsi legislasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

2. Indikator “Jumlah berita yang dipublikasikan” dengan capaian 100% dinilai menunjang, khususnya dalam aspek transparansi informasi kepada publik.

Nilai AKIP Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2025 sesuai hasil evaluasi kemenpan RB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 36 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20.40	20,48
2	Pengukuran Kinerja	30	17.20	17,47
3	Pelaporan Kinerja	15	9.66	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.64	15,99

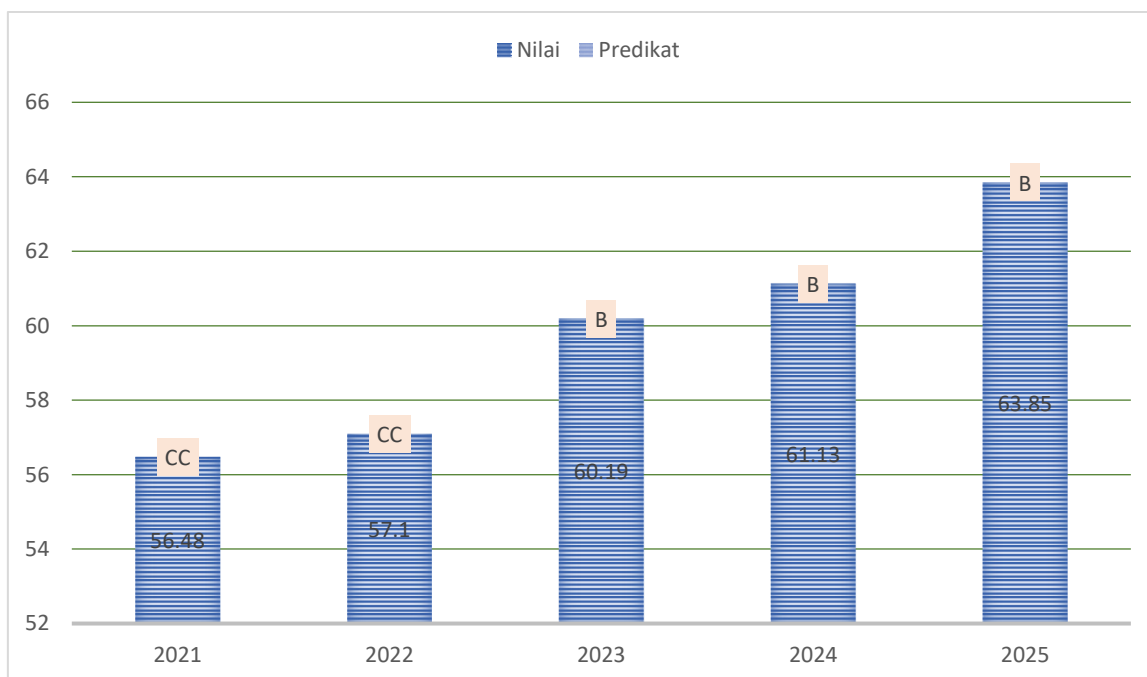
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62.90	63,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Kemenpan RB

Dari tabel tersebut dapat dilihat pergerakan nilai akuntabilitas kinerja Pemerinath Kabupaten Lombok Tengah dari semua komponen yang dinilai bergerak lambat dan tipis. untuk tahun 2025 naik 0,95 poin dari tahun 2024.

Sedangkan untuk tren perkembangan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 16 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2025

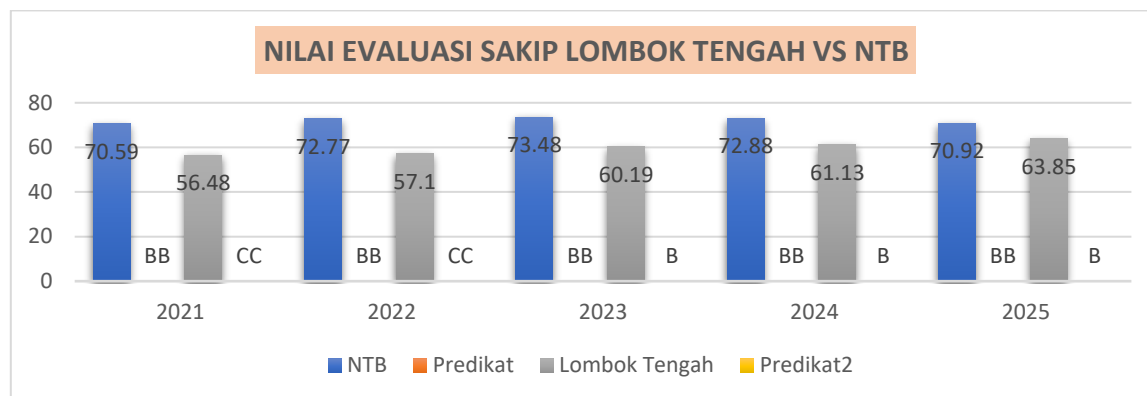


Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat perkembangan nilai AKIP Lombok Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. namun belum ada peningkatan yang begitu melonjak atau pergerakan nilainya tidak terlalu signifikan walaupun pencapaian predikatnya adalah predikat B. untuk kedepan diperlukan sinergitas yang cukup intens dalam penatakelolaan Sistem AKIP sehingga dapat mendongkrak nilai dan predikat AKIP Pemerintah Daerah Lombok Tengah.

Untuk komparasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Provinsi NTB selama 5 (lima) tahun terakhir sesuai gambar berikut ini :

Gambar III. 17 Perbandingan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lombok Tengah dengan Provinsi NTB tahun 2021-2025



Sumber : Kemenpan RB 2025

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbedaan capaian antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, meskipun keduanya sama-sama menunjukkan upaya perbaikan tata kelola kinerja pemerintahan.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi NTB, nilai evaluasi SAKIP selama periode 2021–2025 relatif stabil dan konsisten berada pada predikat BB. Tahun 2021 nilai SAKIP tercatat sebesar 70,59, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,77 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 73,48. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 72,88, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 70,92, namun tetap mempertahankan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di tingkat provinsi sudah berada pada kategori baik dan mampu menjaga konsistensi implementasi manajemen kinerja.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang lebih signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi NTB. Pada tahun 2021 nilai SAKIP Lombok Tengah sebesar 56,48 dengan predikat CC, kemudian meningkat menjadi 57,10 pada tahun 2022 dengan predikat yang sama. Perbaikan cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika nilai meningkat menjadi 60,19 sehingga naik ke predikat B. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 61,13, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 63,85, yang tetap berada pada predikat B.

Secara komparatif, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah dalam seluruh periode evaluasi lima tahun terakhir.

Namun demikian, laju peningkatan kinerja Lombok Tengah relatif lebih progresif, ditandai dengan kenaikan nilai yang cukup konsisten serta peningkatan predikat dari CC menjadi B sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan manajemen kinerja, perencanaan berbasis kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk meningkatkan kualitas SAKIP maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan akuntabilitas kinerja sesuai dengan rekomendasi evaluator sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 37 MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
I	KOMPONEN PRENCANAAN KINERJA				
1	Melakukan reviu kembali atas dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan perencanaan kinerja telah mengacu pada isu strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan terkawal dalam rumusan tujuan, dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil/outcome. Selanjutnya, penetapan tujuan dan sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup;	Mereviu dan menyesuaikan dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja, dan Rencana Kinerja Tahunan/RKT) untuk memastikan Rumusan tujuan dan sasaran strategis telah mengacu pada isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RPJPD/RKPD).	Penyesuaian tujuan dan sasaran strategis sesuai isu strategis	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Saat ini tengah dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renstra seluruh Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, mulai tanggal 13 - 23 Oktober 2025. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rumusan tujuan dan sasaran strategis OPD telah mengacu pada isu strategis yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.
2	Memperbaiki kualitas penjenjangan kinerja seluruh PD dengan sepenuhnya mengacu pada prinsip penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Serta memastikan bahwa penjenjangan kinerja memiliki hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF di setiap level, sampai ke level operasional.	Melakukan reviu dan pemetaan ulang penjenjangan kinerja PD mulai dari level kabupaten hingga level unit kerja, dengan memastikan keselarasan mengacu pada Imendagri nomor 2 tahun 2025 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra PD tahun 2025-2029.	Tersusunnya hasil pemetaan penjenjangan kinerja seluruh PD	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Penjenjangan kinerja pada PD telah teruraikan secara terperinci dalam dokumen Renstra OPD pada Lampiran tabel 4.2. dan dapat diakses pada laman SIPD RI.
3	Segera menyelesaikan proses rancangan perencanaan kinerja daerah maupun perangkat daerah, dan memastikan bahwa perencanaan kinerja yang disusun telah mengacu pada kaidah atau ketentuan yang berlaku, dan menggambarkan kualitas yang baik (beorientasi hasil)	Mempercepat proses penyusunan dan finalisasi dokumen perencanaan kinerja daerah dan perangkat daerah meliputi <i>Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</i> , dan	Proses penyusunan dan finalisasi rancangan perencanaan kinerja daerah dan PD selesai	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Dokumen perencanaan pada tingkat OPD saat ini sudah sampai pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan saat ini sedang dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renstra untuk seluruh Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 lingkup Pemerintah

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
		<i>Perjanjian Kinerja (PK)</i>			Daerah Kabupaten Lombok Tengah, mulai tanggal 13 - 23 Oktober 2025, dengan mengacu pada Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029.
II	KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA				
1.	Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran	Melakukan reviu kesesuaian indikator kinerja dengan memperhatikan relevansi terhadap tujuan dan sasaran strategis, keterukuran dan ketersediaan data pendukung, kepatuhan terhadap prinsip SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>).	Tersusunnya hasil reviu kesesuaian indikator dengan kriteria SMART	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Telah dilakukan reviu indikator kinerja pada dokumen RPJMD 2025-2029 oleh Kementerian PAN RB, dengan penekanan pada penguatan prinsip-prinsip SMART. Reviu dilakukan pada Juli 2025 via zoom meeting.
2.	Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja maupun rencana aksi agar memanfaatkan sistem informasi teknologi yang memberikan kemudahan dalam pengisian dan monitoring, dan juga mengumpulkan data-data dari berbagai PD. Selanjutnya membuat aturan atau ketentuan untuk memberikan timeline kepada PD dalam hal pelaporan capaian kinerja berkala.	Melakukan evaluasi berkala atas kepatuhan pelaporan PD, termasuk pemberian peringatan/dorongan perbaikan jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian data.	Pelaporan capaian kinerja dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Pelaksanaan pengukuran kinerja OPD telah dilakukan secara periodik (triwulan) dilakukan dengan menginput capaian kinerja masing-masing OPD melalui aplikasi <i>e-dalren</i> yang dikelola oleh Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pelaporan capaian kinerja dilakukan secara tepat waktu dan terjadwal.
III	KOMPONEN PELAPORAN KINERJA				
1.	Mereviu kembali LKJ PD dan memastikan bahwa rencana aksi tindak lanjut yang termuat dalam laporan kinerja menjadi dasar dalam penentuan rencana aksi kinerja tahun berikutnya	Memastikan bahwa rencana aksi tahun depan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan	Tersusunnya rencana aksi kinerja tahun berikutnya yang berbasis hasil reviu LKJIP	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Sudah dilaksanakan
IV	KOMPONEN EVALUASI INTERNAL				
1.	Memastikan tindak lanjut PD atas LHE AKIP internal dilakukan tidak hanya pada aspek pemenuhan melainkan juga aspek kualitas dan pemanfaatan, agar temuan dan rekomendasi yang ditetapkan tidak terus berulang di periode berikutnya	Melakukan pembinaan dan asistensi kepada PD yang tindak lanjutnya masih bersifat administratif atau belum menunjukkan peningkatan kualitas kinerja.	1. Reviu Renstra PD 2. pendampingan penyusunan cascading PD perhubungan, kecamatan	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	1. Sedang berlangsung (Sep-Okt 2025) 2. Telah dilaksanakan

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian
			3. pendampingan implementasi AKIP		3. Telah dilaksanakan
			4. Permintaan data dukung dan matrik TL AKIP tahun 2024		4. Telah dilaksanakan
			5. rencana pendampingan peningkatan AKIP		5. Desember 2025
			pembangunan sistem evaluasi internal dan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi		6. Oktober-desember

Sumber : Hasil Rapat Tim SAKIP Kab. Lombok Tengah

III.1.7 III.1.9 SASARAN 3.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah menyangkut layanan administratif, jasa dan barang banyak dikeluhkan masyarakat. Masalah yang dipersoalkan seputar belum jelasnya dasar hukum layanan, syarat, sistem mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif.

Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan penyimpangan pelayanan publik, diantaranya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa, tidak memberikan pelayanan, dan perlakuan diskriminasi.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi menimbulkan citra birokrasi pemerintah yang negatif karena tidak efisien, efektif, lamanya proses layanan, tingginya biaya produksi, biaya pengangkutan, merebaknya korupsi dan pungutan liar, dan sebagainya.

Setiap penyelenggara harus merubah paradigmanya bahwa pelayanan masyarakat bukan lagi sekedar pemenuhan tanggung jawab kerja semata sehingga diberikan tidak optimal. Perubahan tata kelola pelayanan publik yang baik untuk mencapai titik ideal memang perlu proses yang panjang dan harus dilakukan secara bersama-sama namun hasil yang akan diraih juga akan dirasakan luas oleh masyarakat. Semangat pemerintah dalam menata birokrasi telah mulai dirasakan perubahan-perubahan dari tahun ke tahun.

Namun reformasi pelayanan publik harus terus digalakkan tanpa henti. agar *cost* perubahan yang telah dikeluarkan selama ini tidak sia-sia. Untuk melihat bagaimana perkembangan pelayanan publik di Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat yang secara langsung berurusan dengan kepentingan layanan publik dapat dilihat pada table dibawah :

Tabel III. 38 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Persentase PD dengan predikat Indeks kepuasan Masyarakat baik	Persen	= Jumlah OPD Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik / jumlah OPD yang menyelenggarakan indeks kepuasan x 100%	95	95	100	100	100	105,26	105,26	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 95%, sementara realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memperoleh predikat IKM minimal “baik”, dengan capaian melampaui target sebesar 5 poin persentase atau sekitar 105,26%.

Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di seluruh Perangkat Daerah telah berada pada level yang baik secara merata. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Analisis/perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya ;

capaian indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memenuhi bahkan melampaui target, dengan capaian sebesar 105,26%, yang mencerminkan bahwa seluruh PD telah memperoleh predikat IKM minimal “baik”.

Pada tahun 2025, target tetap dipertahankan sebesar 95% dan realisasi kembali mencapai 100%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga melampaui target sebesar 5 poin persentase atau sekitar 105,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, tidak terdapat perubahan capaian, di mana keduanya sama-sama mencapai 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik dalam menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh Perangkat Daerah.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100%, capaian tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target tersebut. Artinya, seluruh Perangkat Daerah telah mencapai standar pelayanan publik yang ditetapkan dalam sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan capaian ini sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan menuju kategori yang lebih tinggi (sangat baik), melalui inovasi pelayanan, digitalisasi, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Analisis bandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;

Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik tidak memiliki data pembandingan secara nasional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat spesifik pada tingkat daerah, karena pengukuran IKM dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan unit layanan yang dimiliki dan kondisi pelayanan di wilayahnya.

Selain itu, meskipun terdapat pedoman nasional dalam pengukuran IKM, hasil pengukuran umumnya tidak dikompilasi dan dipublikasikan dalam bentuk indikator agregat nasional yang secara langsung dapat dibandingkan antar daerah. Oleh karena itu, capaian indikator ini lebih relevan untuk dianalisis dalam konteks internal daerah, baik dari sisi tren waktu maupun tingkat ketercapaian terhadap target yang telah ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah :

- a. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas;
- b. Penetapan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas moenev terhadap pelaksanaan pelayanan publik terus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik.

Solusi/alternatif untuk peningkatan pencapaian indikator ini adalah :

- a. Mendorong PD tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi meningkatkan kualitas pengalaman layanan (service experience)..
- b. Integrasi sistem pelayanan antar PD untuk mengurangi proses berulang;
- c. Internalisasi nilai ASN BerAKHLAK secara konsisten.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 39 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3.2

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M3	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH. CEPAT DAN BERSIH;				
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	105,26	96,00	-19,26

Dengan capaian kinerja sebesar 105,26% dan tingkat efisiensi sekitar -9,26%, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan sangat efisien, karena mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Kinerja melampaui target pada indikator IKM, dengan capaian di atas target yang ditetapkan.
- Terdapat penghematan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Penggunaan sumber daya berjalan optimal dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

**Tabel III. 40 Analisa program penunjang sasaran kinerja 3.2
pada Tujuan 3 Misi 3**

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi						
S3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	95%	105,26%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	111,11	Menunjang
					Program Pencatatan Sipil	Porsentase kepemilikan akta kelahiran	100,69	Menunjang
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	98,87	Menunjang
						Persentase penerbitan KIA	121,35	Menunjang
						Persentase penerbitan surat	100	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
						pindah			
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100		
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	100	Menunjang	
					Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun	100	Menunjang	
	Rata-rata capain program							104,00	Sangat tinggi

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator “OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online” dengan capaian 111,11% dapat dinilai sangat menunjang. Digitalisasi layanan publik meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi pelayanan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Kemudian Program Pencatatan Sipil dengan Indikator “Persentase kepemilikan akta kelahiran” dengan capaian 100,69% dinilai menunjang secara optimal. Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan layanan dasar yang sangat penting dan menjadi salah satu indikator utama kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Sedangkan untuk Program Pendaftaran Penduduk dengan beberapa indikator sebagai berikut :

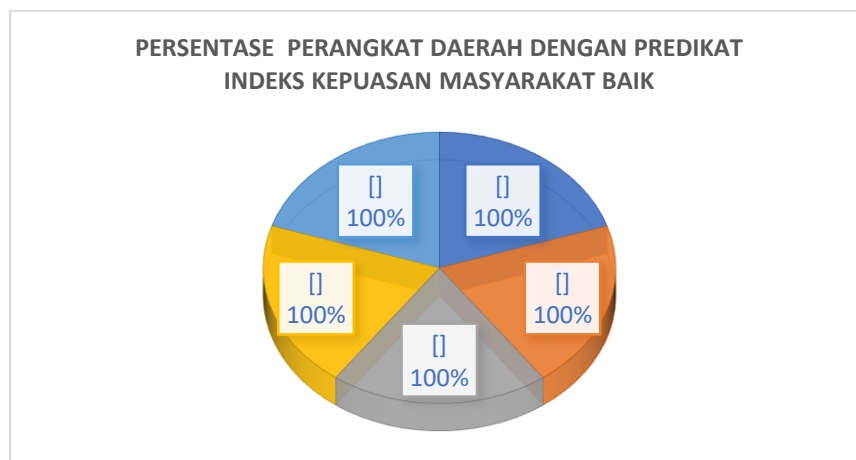
- ❖ Indikator “Persentase kepemilikan KTP Elektronik” dengan capaian 98,87% dinilai menunjang namun belum optimal, karena masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum terlayani.
- ❖ Indikator “Persentase penerbitan KIA” dengan capaian 121,35% dinilai sangat menunjang, menunjukkan peningkatan layanan administrasi bagi anak secara signifikan.
- ❖ Indikator “Persentase penerbitan surat pindah” dengan capaian 100% dinilai menunjang secara optimal, mencerminkan pelayanan administrasi yang berjalan efektif.

Selanjutnya untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator “Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan” dengan capaian 100%

dinilai menunjang secara optimal. Pelimpahan kewenangan pelayanan yang efektif dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta responsivitas pelayanan.

Lebih lanjut untuk trend perkembangan capaian indikator Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik sesuai gambar dibawah ini :

Gambar III. 18 Hasil Evaluasi pelayanan publik Lombok Tengah 2021-2025



Sumber : Bapperida Lomnbok Tengah

Perangkat daerah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik telah melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melakukan tata kelola pelayanan secara proporsional dan profesional berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan sehingga masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Disamping itu pula perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik juga di evaluasi oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI.

Perangkat daerah dan unit kerja yang menjadi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai hanya 5 buah perangkat daerah/unit kerja yang dijadikan sampel oleh Ombudsman. Adapun sampel dimaksud bukan pemda yang mengajukan akan tetapi diambil acak oleh Ombudsman dan setiap tahun bisa berubah-ubah.

III.1.10 TUJUAN 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut inklusif, mampu

menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Di Kabupaten Lombok Tengah, penguatan struktur ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Optimalisasi potensi lokal serta hilirisasi produk unggulan daerah menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar regional maupun nasional.

Peningkatan daya saing daerah juga ditopang oleh perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, serta kepastian regulasi. Kemudahan berusaha mendorong masuknya investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan paling penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Bahkan, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti akan memberikan dampak yang baik pula pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/negara.

secara keseluruhan, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkatkan angka statistik, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat

Untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah sesuai capaian berdasarkan indikator tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel III. 41 TUJUAN 4.1 Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$LPE = (PDRBt - PDRBt-1) / PDRBt \times 100$	4,55-5,80	4,50-6,00	5,30	3,34	4,87	73,40	100	Sangat tinggi
Indeks Gini	poin	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i . Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i . Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.	0,298	0,343-0,328	0,323	0,342	0,344	99,71	99,71	Sangat Tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Angka Kemiskinan	Persen	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p> <i>P</i>₀ = Persentase penduduk miskin <i>z</i> = Garis kemiskinan <i>y_i</i> = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : <i>y_i</i> < <i>z</i> <i>q</i> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan <i>n</i> = Jumlah penduduk </p>	12,4	11,98-12,31	11,72	12,07	10,68	102,66	110,85	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Bahwa Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur pencapaian tujuan antara sebagai berikut

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada pada kisaran 4,50% hingga 6,00%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 4,87%.

Realisasi tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi pada batas bawah hingga menengah dari target yang direncanakan, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah mengalami pertumbuhan positif meskipun belum mencapai level optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai sektor ekonomi tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Pertumbuhan sebesar 4,87% mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Ke depan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak menuju batas atas target, melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih perlu didorong untuk mencapai target yang lebih optimal.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 4,50%–6,00%, dengan realisasi sebesar 4,87%. Capaian ini berada dalam rentang target yang telah ditentukan, meskipun masih berada pada batas bawah hingga menengah dari kisaran target tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh positif, namun belum mencapai potensi maksimalnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, di mana target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,55%–5,80%, terlihat bahwa pada tahun 2025 terdapat sedikit penyesuaian rentang target, khususnya pada batas atas yang meningkat menjadi 6,00%. Meskipun data realisasi tahun 2024 tidak disebutkan, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa arah pertumbuhan ekonomi masih terjaga dalam koridor yang direncanakan, dengan kecenderungan stabil.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5,30%, realisasi tahun 2025 yang mencapai 4,87% masih berada di bawah target tersebut, dengan selisih sebesar 0,43 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi sudah berada pada jalur yang positif, masih diperlukan upaya percepatan untuk mencapai sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan tumbuh, namun ke depan diperlukan strategi yang lebih agresif dan terarah, seperti penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal, agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan mendekati bahkan melampaui target RPJMD.

4. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 4,87%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11%. Dengan

demikian, terdapat selisih sebesar 0,24 poin persentase, di mana pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pemulihan dan ekspansi ekonomi di tingkat daerah belum secepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor tertentu, tingkat investasi yang belum optimal, serta daya dorong sektor unggulan yang masih perlu diperkuat.

Meskipun demikian, capaian 4,87% tetap menunjukkan bahwa perekonomian Lombok Tengah berada dalam kondisi tumbuh positif dan relatif stabil. Ke depan, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan sektor-sektor potensial, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi lokal, sehingga dapat memperkecil kesenjangan dengan capaian nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor pendorong pencapaian indikator adalah :

- a. Pengembangan kawasan pariwisata seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, antara lain pada sektor perhotelan, restoran, transportasi;
- b. Produksi komoditas pangan dan hortikultura yang relatif stabil mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan;
- c. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat;
- d. Keberadaan UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta memperluas lapangan kerja.

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator ini adalah :

- a. Mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk;
- b. Promosi potensi investasi daerah kepada investor nasional maupun internasional;
- c. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah;

d. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III.42 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tujuan 4.1 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	100	94,76	-5,24

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja Tujuan 4.1 sebesar 100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,76%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -5,24%.

Nilai efisiensi sebesar -5,24% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target secara optimal (100%), sementara penggunaan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 4.1 tergolong efisien.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai sesuai target tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, terdapat pengelolaan sumber daya yang cukup hemat namun tetap efektif dalam menghasilkan output dan outcome pembangunan ekonomi.

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efektivitas program ekonomi utama, seperti pengembangan sektor industri, pariwisata, dan pertanian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- Sinergi antar sektor ekonomi, sehingga dampak program lebih luas tanpa membutuhkan tambahan anggaran besar.
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran.
- Pengaruh faktor eksternal positif, seperti peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan investasi yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada Tujuan 4.1, capaian kinerja (100%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (94,76%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang relatif kecil (dibanding tujuan lain) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sudah cukup proporsional dan mendekati kebutuhan riil, sehingga tidak terjadi selisih yang terlalu besar antara target dan realisasi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel III. 43 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.1 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,53%	100,28%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai omset perdagangan pembangunan industri kabupaten	100	Menunjang
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai omset perdagangan	190,23	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk)	Pertumbuhan omset aset UMKM	100	
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	102,13	
S-4.1.3	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	3,75%	214,93%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	100	Menunjang

					Rogram Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	100	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	100	
S-4.1.4	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,46%	525,34%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Padi	156,83	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tembakau	134,3	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Buah Melon	52,16	Tidak menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Sapi	76,38	Mneunjang
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	90,85	Menunjang
						Produksi Benih Ikan	109,39	Menunjang
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Protein	97,41	Menunjang
	Rata-rata capain program						107,31	Sangat tinggi

Pada Tujuan 4.1: *Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah* dengan Indikator tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian indikator laju pertumbuhan ekonomi pada Tujuan 4.1 didukung oleh berbagai program yang tersebar pada beberapa sasaran strategis, khususnya pada penguatan sektor industri pengolahan, sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data capaian program, rata-rata kinerja program pendukung mencapai 107,31% dengan kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa secara umum program-program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Pada sektor industri pengolahan, capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 100,28% menunjukkan bahwa target telah tercapai.

Capaian ini didukung oleh beberapa program, antara lain:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian 100% (menunjang), menunjukkan bahwa perencanaan dan pengembangan industri berjalan sesuai target.
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian 190,23%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
- Program Pemberdayaan UMKM dengan capaian 100%, menunjukkan stabilitas dan kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah.
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan capaian 102,13%, yang mendukung penguatan ekonomi berbasis kelembagaan masyarakat.

Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan didukung oleh program-program yang menunjang, dengan capaian yang stabil hingga sangat tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pada sektor akomodasi dan makan minum, capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum sebesar 214,93% menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dan jauh melampaui target.

Capaian ini didukung oleh:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (100%, menunjang), yang memastikan pengembangan destinasi wisata berjalan sesuai rencana.
- Program Pemasaran Pariwisata (100%), yang memperkuat promosi pariwisata, khususnya melalui media digital.
- Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%), yang meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Seluruh program pada sektor ini dapat dinilai menunjang, dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi berbasis pariwisata. Tingginya capaian menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor ini sebesar 525,34% menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Capaian ini didukung oleh berbagai program, antara lain:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - ✓ Produksi padi: 156,83% (menunjang)
 - ✓ Produksi tembakau: 134,3% (menunjang)
 - ✓ Produksi melon: 52,16% (tidak menunjang)
 - ✓ Produksi sapi: 76,38% (menunjang, namun belum optimal)
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (100%, menunjang), yang memastikan ketersediaan infrastruktur pertanian.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - ✓ Capaian umum: 90,85% (menunjang)
 - ✓ Produksi benih ikan: 109,39% (menunjang)
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan (97,41%, menunjang), yang mendukung kualitas konsumsi masyarakat.

Secara umum, sektor ini sangat kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum optimal, terutama pada produksi melon dan ternak sapi, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

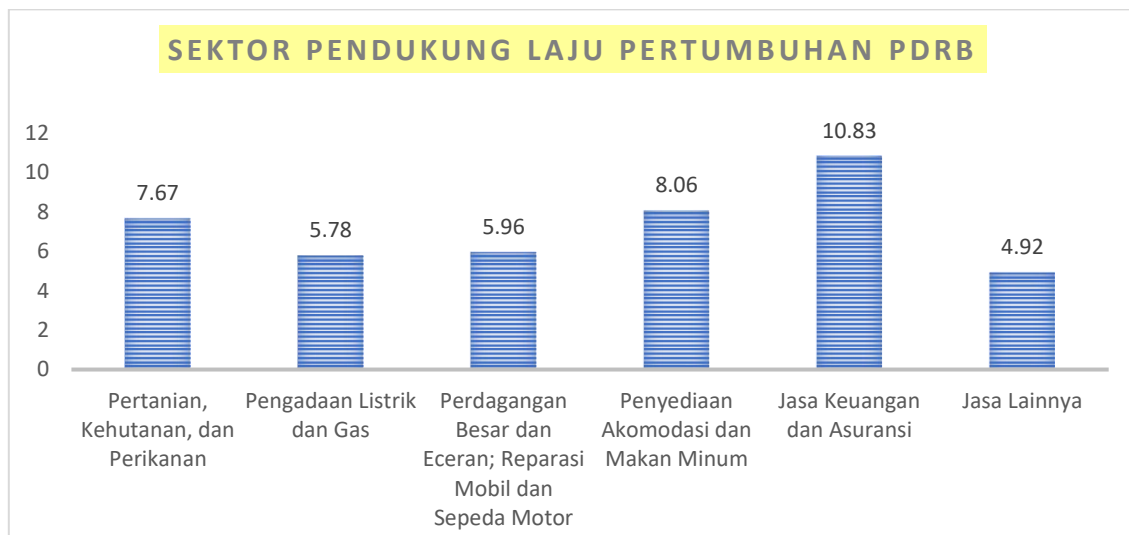
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. kecuali lapangan usaha industri pengolahan turun 0,45% dari 3,99%, pengadaan listrik dan gas 3,5% dari 9,28%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor turun 0,55% dari 6,51%, penyediaan akomodasi dan makan minum turun 1,48 % dari 9,54%, informasi dan komunikasi turun 1,14 % 4,37%, real estate turun 0,27% dari 3,98%, jasa perusahaan turun 1,07% dari 5,22%, Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib , turun 2,34% dari 5,28%, Jasa Pendidikan turun 1,46% dari 3,39%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial turun 3,12% dari 6,29 %.

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2025 mencapai 10,83 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha,

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,6%, Transportasi dan Pergudangan 4,32%, konstruksi 2,66%, Transportasi 4,32%, pertambangan dan penggalan 2,12%, jasa lainnya 4,92%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,79%.

Sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah Tahun 2025 dapat dilihat sesuai gambar berikut:

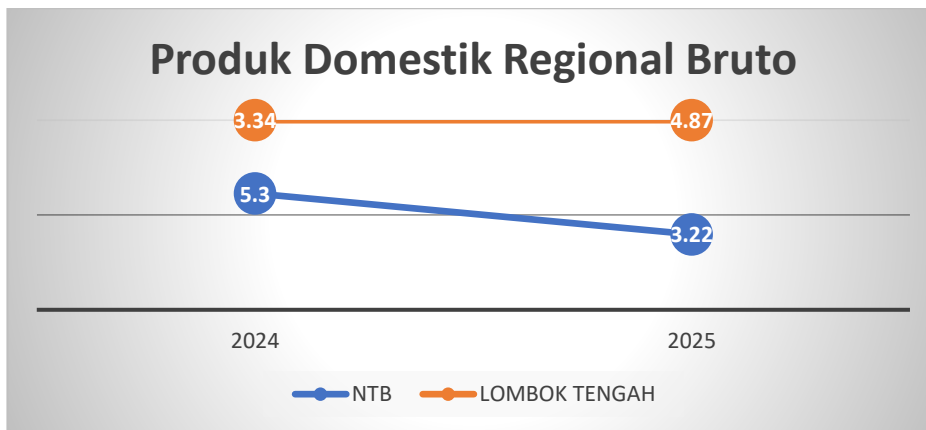
Gambar III. 19
Sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah 2025



Sumber : BPS tahun 2026 Lombok Tengah Dalam Angka (data diolah)

Komparasi laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah dan Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar III. 20 Perbandingan PDRB Lombok Tengah dan NTB dua tahun terakhir



Sumber : BPS: BRS pertumbuhan Ekonomi NTB 2025 TW IV
 BPS : Lombok Tengah Dalam Angka 2026

Berdasarkan data yang tertera pada gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi di tingkat Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,30 persen, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,22 persen. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah, laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,34 persen dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 4,87 persen.

Apabila dilakukan perbandingan, pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah, dengan selisih sekitar 1,96 poin (5,30 persen di tingkat provinsi dibandingkan 3,34 persen di Lombok Tengah). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut aktivitas ekonomi di tingkat provinsi secara agregat berkembang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah.

Namun pada tahun 2025, kondisi tersebut mengalami perubahan dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah justru lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTB. Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah tercatat sebesar 4,87 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar 3,22 persen, atau terdapat selisih sekitar 1,65 poin. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekonomi di Lombok Tengah, yang kemungkinan didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha daerah.

Jika dilihat dari dinamika pertumbuhan, Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi, dari 3,34 persen pada tahun 2024 menjadi 4,87 persen pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 1,53 poin. Sebaliknya, pada tingkat Provinsi NTB terjadi perlambatan pertumbuhan, dari 5,30 persen pada tahun 2024 menjadi 3,22 persen pada tahun 2025

B. INDEKS GINI

1. ***Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;***

Capaian indikator Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah tahun berjalan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih berada sedikit di atas rentang target yang telah ditetapkan.

Target Indeks Gini ditetapkan pada kisaran 0,343–0,328, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat ketimpangan menuju kategori yang lebih merata. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 0,344. Angka ini berada sedikit di atas batas atas target (0,343), dengan selisih sebesar 0,001 poin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat ketimpangan relatif stabil, upaya penurunan ketimpangan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan. Nilai Indeks Gini yang masih berada di atas target mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat masih belum merata secara optimal. Capaian ini mencerminkan bahwa pengendalian ketimpangan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran melalui penguatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah, agar tingkat ketimpangan dapat ditekan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. ***Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;***

Capaian indikator Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun terdapat dinamika perbaikan antar tahun.

Pada tahun 2024, target Indeks Gini ditetapkan sebesar 0,298, sementara realisasi mencapai 0,342. Hal ini menunjukkan deviasi yang cukup besar, yaitu sebesar 0,044 poin di atas target, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan masih lebih tinggi dari yang diharapkan.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan dalam rentang 0,343–0,328, yang mencerminkan upaya penurunan ketimpangan secara bertahap. Realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,344, yang berarti masih sedikit berada di atas batas atas target (0,343) dengan selisih sebesar 0,001 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat perbaikan tipis sebesar 0,002 poin (dari 0,342 menjadi 0,344) hal ini menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan belum signifikan dan cenderung stagnan.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,323, capaian tahun 2025 masih berada di atas target tersebut dengan selisih sebesar 0,021 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih lebih tinggi dari sasaran jangka menengah yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian ketimpangan telah dilakukan namun belum optimal. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif, seperti peningkatan pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan program perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, agar ketimpangan dapat ditekan dan mendekati target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian indikator Indeks Gini tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional.

Pada tahun 2025, Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 0,344, sedangkan Indeks Gini nasional sebesar 0,363. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 0,019 poin, di mana tingkat ketimpangan di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional. Meskipun demikian, nilai Indeks Gini yang masih berada pada kisaran di atas 0,3 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tetap perlu menjadi perhatian, karena masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam pengendalian ketimpangan di tingkat daerah jika dibandingkan dengan nasional. Namun demikian, upaya penurunan ketimpangan tetap perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemerataan akses ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat, agar distribusi pendapatan semakin merata dan berkelanjutan.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;***

Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator indeks gini :

1. Sulitnya akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha;
2. Bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran;
3. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi;
4. Sektor ekonomi tertentu. seperti pertanian berkembang lebih pesat dibanding sektor lain seperti manufaktur. pelayanan jasa. pariwisata dll.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator :

1. Memperketat pengawasan dalam pemberian subsidi seperti subsidi pendidikan. kesehatan. dan perumahan bagi masyarakat Lombok Tengah sehingga tepat sasaran;
2. Pemberian bantuan langsung tunai yang berbasis data yang akurat agar tepat sasaran;
3. Mengkaji ulang penerapan upah minimum yang layak agar pekerja mendapatkan pendapatan yang cukup;
4. Menarik minat investor agar menanamkan modalnya untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III.44 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tujuan 4.1 Indikator Indeks Gini

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Indeks Gini	99,71	99,70	-0,01

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator Indeks Gini sebesar 99,71%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,70%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -0,01%.

Nilai efisiensi sebesar -0,01% menunjukkan bahwa capaian kinerja dan penyerapan anggaran berada pada kondisi yang sangat seimbang. Capaian kinerja hampir mencapai target, dan penggunaan anggaran juga hampir sepenuhnya terserap sesuai perencanaan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada indikator Indeks Gini tergolong efisien dan proporsional, di mana alokasi anggaran telah digunakan secara optimal dan tepat sasaran untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target.

Efisiensi yang sangat kecil (mendekati nol) menunjukkan bahwa:

- Perencanaan anggaran sangat akurat, sesuai dengan kebutuhan riil program.
- Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, tanpa kelebihan maupun kekurangan penggunaan anggaran yang signifikan.
- Hubungan antara input (anggaran) dan output/outcome (penurunan ketimpangan) berada dalam kondisi ideal.

Namun demikian, capaian kinerja yang sedikit di bawah 100% (99,71%) menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya sangat kecil dan secara umum masih dalam kategori baik.

Pada Tujuan 4.1 indikator Indeks Gini, capaian kinerja (99,71%) sedikit lebih rendah dibandingkan penyerapan anggaran (99,70%), namun selisihnya sangat kecil (-0,01%), sehingga secara praktis masih dapat dikategorikan efisien dan seimbang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah optimal dan terkendali, tanpa adanya pemborosan maupun kekurangan yang signifikan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Tabel III. 45 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.1 Indikator Indeks Gini

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Indeks Gini						
	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Rata-rata pengeluaran perkapita	10,06 jt/Rp./t hn	117,99%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
	<i>Rata-rata capain program</i>						100	Sangat tinggi

Pada Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan Indikator tujuan: Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya melalui peningkatan daya beli dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan data yang tersedia, dukungan terhadap pencapaian indikator Indeks Gini dalam Tujuan 4.1 ditopang oleh program pada sasaran **meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha**, khususnya melalui indikator **rata-rata pengeluaran per kapita** dengan target sebesar **Rp10,06 juta/kapita/tahun** dan capaian **117,99%**. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui target, yang mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat.

Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita tersebut didukung oleh **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan indikator **persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhannya** yang mencapai **100%** dan dinilai **menunjang**. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan telah mendapatkan intervensi yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Program Rehabilitasi Sosial memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan, karena intervensinya secara langsung menasar kelompok masyarakat yang berada pada kondisi rentan dan berpenghasilan rendah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok tersebut, kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi dapat dikurangi, sehingga berdampak positif terhadap perbaikan nilai Indeks Gini.

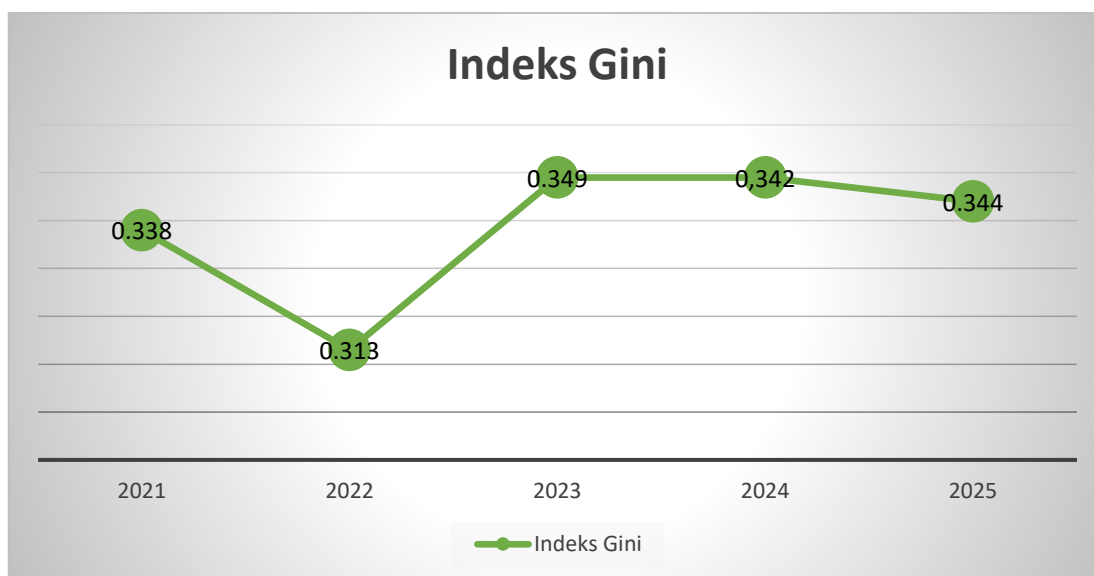
Dengan capaian program sebesar **100%** dan kategori **sangat tinggi**, dapat disimpulkan bahwa program pendukung telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Gini. Meskipun dalam tabel hanya terdapat satu program

utama yang ditampilkan, kontribusi program ini cukup signifikan karena menysasar aspek distribusi kesejahteraan secara langsung.

Secara keseluruhan, program penunjang Tujuan 4.1 pada indikator Indeks Gini telah **menunjang dengan baik** pencapaian tujuan, terutama melalui peningkatan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Capaian rata-rata pengeluaran per kapita yang melampaui target serta terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi telah berjalan efektif.

Tren perkembangan indeks gini Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021-2025 sesuai gambar berikut:

Gambar III. 21 Indeks Gini Lombok Tengah tahun 2021-2025



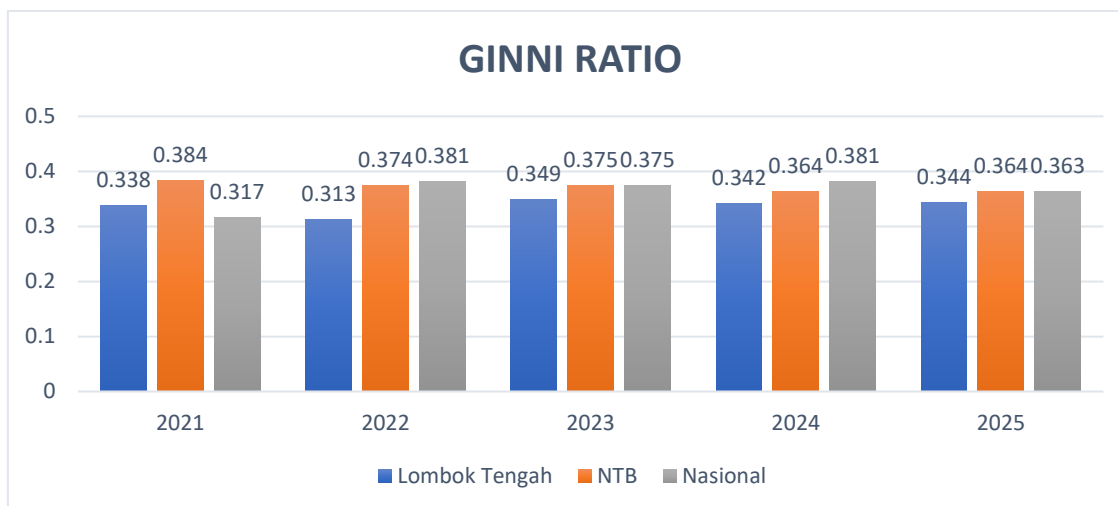
Sumber

: Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks gini di Lombok Tengah bergerak fluktuatif artinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan pada masyarakat Lombok Tengah masih terjadi sehingga pemerataan itu harus diupayakan lebih terukur dan terintegrasi dalam semua aspek yang akan mendorong pengendalian ketimpangan dimaksud.

Komparasi indeks Gini Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB sesuai tabel berikut :

Gambar III. 22 Perbandingan tren indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Nasional tahun 2021-2025



Sumber : BPS NTB Tahun 2024

Berdasarkan grafik Indeks Gini (Gini Ratio) tahun 2021–2025, terlihat perbandingan tingkat ketimpangan pendapatan antara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan tingkat nasional.

Pada tahun 2021, Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 0,338. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Provinsi NTB yang mencapai 0,384, namun lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, tetapi masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional.

Memasuki tahun 2022, Indeks Gini Lombok Tengah menurun menjadi 0,313, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Pada tahun yang sama, NTB berada pada angka 0,374, sedangkan nasional sebesar 0,381. Dengan demikian, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah merupakan yang terendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, Indeks Gini Lombok Tengah meningkat menjadi 0,349, sementara NTB sebesar 0,375 dan nasional juga sebesar 0,375. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya, namun Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Selanjutnya pada tahun 2024, Indeks Gini Lombok Tengah kembali menurun menjadi 0,342. Sementara itu NTB berada pada angka 0,364 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2025, Indeks Gini Lombok Tengah sedikit meningkat menjadi 0,344, sedangkan NTB mencapai 0,364 dan nasional sebesar 0,363. Secara komparatif,

ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah tetap lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

C. ANGKA KEMISKINAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target angka kemiskinan berada pada kisaran 11,98%–12,31%, yang mencerminkan upaya penurunan kemiskinan secara bertahap. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 10,68%, yang berarti berada di bawah batas bawah target. Hal ini menunjukkan capaian yang lebih baik dari yang direncanakan, dengan selisih sebesar 1,30 poin persentase dari batas bawah target dan 1,63 poin persentase dari batas atas target.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sangat efektif, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan melebihi ekspektasi. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, efektivitas program perlindungan sosial, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, target angka kemiskinan ditetapkan sebesar 12,4% dengan realisasi mencapai 12,07%. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,33 poin persentase, yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan pada kisaran 11,98%–12,31%. Realisasi yang dicapai sebesar 10,68%, yang berarti berada jauh di bawah batas bawah target. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target secara signifikan, dengan selisih sebesar 1,30 poin persentase dari batas bawah target dan 1,63 poin persentase dari batas atas target. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,39 poin persentase (dari 12,07% menjadi 10,68%), yang menunjukkan perbaikan yang cukup besar dan progresif.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 11,72%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sebesar 1,04 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan, memastikan ketepatan sasaran program, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian angka kemiskinan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah masih berada di atas rata-rata nasional.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 10,68%, sedangkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 2,43 poin persentase, yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di Lombok Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Lombok Tengah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah, tingkat produktivitas masyarakat, akses terhadap lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan yang belum optimal.

Namun demikian, capaian penurunan kemiskinan hingga 10,68% tetap menunjukkan progres yang positif dan mencerminkan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, seperti penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja, agar kesenjangan dengan capaian nasional dapat semakin diperkecil.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Faktor pendorong pencapaian target indikator :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang merata. tidak hanya terpusat di kota tetapi juga di desa;
- b. Pelatihan keterampilan dan vokasi bagi calon tenaga kerja sehingga lebih kompetitif dan mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak;
- c. Pemerintah Lombok Tengah telah membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas;
- d. Pemerintah memberikan beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan pencapaian target indikator :

- a. (BLT) kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Distribusi sembako dan subsidi pangan bagi masyarakat kurang mampu;
- c. Kredit usaha mikro tanpa jaminan untuk masyarakat miskin agar bisa memulai usaha;
- d. Memberikan pendampingan bisnis cepat untuk membantu wirausaha kecil berkembang;
- e. Memberikan atau meningkatkan volume program kegiatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel III. 46 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tujuan 4.1 Indikator Angka Kemiskinan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	110,85	99,36	-11,49

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator angka kemiskinan sebesar 110,85%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,36%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -11,49%.

Nilai efisiensi sebesar -11,49% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target secara signifikan, sementara penggunaan anggaran relatif lebih rendah

dibandingkan capaian kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada indikator angka kemiskinan tergolong efisien.

Capaian kinerja yang melebihi target mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan lebih baik dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program yang dilaksanakan, baik melalui peningkatan kesempatan kerja, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah berjalan efektif.

Efisiensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efektivitas program pengentasan kemiskinan, yang tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- Sinergi antara program ekonomi dan sosial, seperti peningkatan investasi, pelatihan tenaga kerja, serta bantuan sosial yang saling melengkapi.
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian outcome dapat diraih tanpa harus menggunakan seluruh anggaran.
- Dampak positif pertumbuhan ekonomi daerah, yang turut meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada Tujuan 4.1 indikator angka kemiskinan, capaian kinerja (110,85%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (99,36%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang cukup besar menunjukkan adanya pemanfaatan anggaran yang optimal, dimana hasil yang dicapai lebih tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel III. 47 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.1 Indikator Angka Kemiskinan

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan						

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
S4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,57-2,63 %	72,24%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMA	177,66	Menunjang	
						Nilai investasi PMDN	859,54	Menunjang	
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	302,08	Menunjang	
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	108,7	Menunjang	
	Rata-rata capain program							361,995	Sangat tinggi

Tujuan 4.1: *Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan Indikator tujuan: Angka Kemiskinan*

Angka kemiskinan merupakan indikator strategis yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penurunan angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja agar mampu terserap dalam aktivitas ekonomi produktif.

Berdasarkan data yang tersedia, pencapaian indikator angka kemiskinan pada Tujuan 4.1 didukung oleh program pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha, khususnya melalui indikator tingkat pengangguran terbuka dengan target 2,57–2,63% dan capaian 72,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran belum mencapai target, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan pengangguran sebagai salah satu faktor utama pengurangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian, program-program pendukung pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 361,995% dan seluruhnya berstatus menunjang. Hal ini menunjukkan bahwa secara programatik, intervensi yang dilakukan sudah kuat, meskipun dampaknya terhadap indikator makro masih belum optimal.

Ketika kita melihat program-program penunjang Tujuan 4.1 ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan indikator nilai investasi PMA sebesar 177,66% dan nilai investasi PMDN sebesar 859,54%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap daerah serta berkembangnya aktivitas ekonomi. Secara teoritis, peningkatan investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Namun, tingginya investasi ini belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, yang tercermin dari belum optimalnya capaian tingkat pengangguran.
2. Program Promosi Penanaman Modal juga menunjukkan capaian sangat tinggi sebesar 302,08% pada indikator jumlah proyek investasi baru di atas Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi baru. Program ini berperan penting dalam memperluas basis ekonomi daerah dan membuka peluang kerja, sehingga secara tidak langsung mendukung pengurangan kemiskinan.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mencapai 108,7% pada indikator persentase tenaga kerja yang terlatih. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja telah berjalan dengan baik. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.

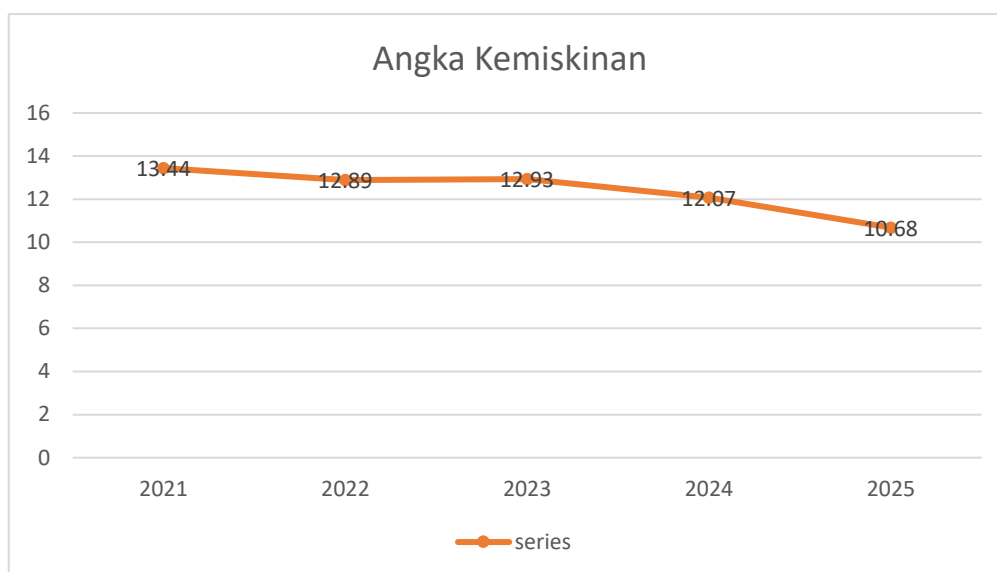
Secara keseluruhan, program-program tersebut memiliki keterkaitan yang kuat terhadap penurunan angka kemiskinan melalui tiga jalur utama:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.
2. Perluasan kesempatan usaha melalui promosi penanaman modal.
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan produktivitas.

Meskipun demikian, belum optimalnya capaian tingkat pengangguran menunjukkan bahwa manfaat dari program-program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja, atau distribusi peluang kerja yang belum merata.

Tren perkembangan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III. 23 Penurunan angka kemiskinan tahun 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Untuk indikator kemiskinan ini perkembangannya dari tahun 2021-2025 terlihat bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2023 sempat terkoreksi naik sekitar 0,04 % dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan segenap daya Upaya menurunkan angka kemiskinan level yang cukup signifikan dimana menoreh hasil sebesar 12,7% dan di tahun 2025 turun lagi ke angka 10,68 %.

Untuk Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 48 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Maret 2017-2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	369.650	142,14	15,31
2018	386.676	130	13,87
2019	404.633	128,82	13,63
2020	421.439	128,1	13,44
2021	447.200	131,94	13,44
2022	480.657	128	12,89
2023	520.852	129,74	12,93

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
2024	594.400	122,32	12,07
2025	569.910	109,25	10,68

Sumber : BPS Lombok Tengah dalam Angka 2026

Berdasarkan data pada table diatas terlihat bahwa, kondisi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya perbaikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp594.400 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 122.232 jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 12,07 persen dari total penduduk.

Selanjutnya pada tahun 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp569.910 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 109.925 jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 10,68 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12.307 jiwa, serta penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,39 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta efektivitas berbagai program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terhadap indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 49 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. 2017-2025

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahannya Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2017	2,81	0,75
2018	2,31	0,54
2019	2,33	0,25

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
2020	1,42	0,26
2021	1,69	0,35
2022	2,01	0,44
2023	2,12	0,52
2024	1,56	0,27
2025	1,55	0,31

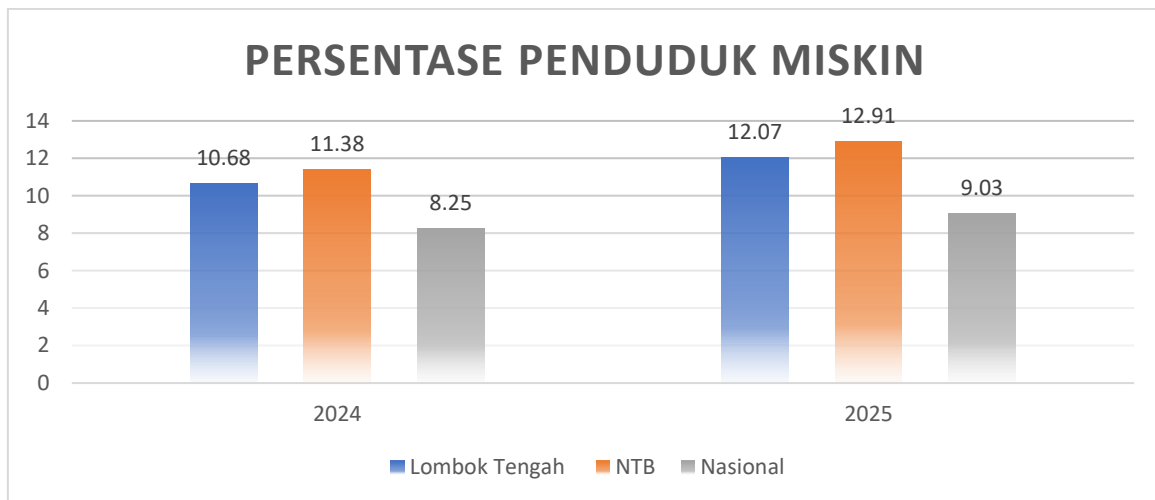
Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka 2026

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,56, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 1,55. Penurunan sebesar 0,01 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin, dimana rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan cenderung semakin mengecil.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,27, kemudian meningkat menjadi 0,31 pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 0,04 poin tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok miskin lainnya.

Secara umum, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan dinamika kondisi kemiskinan yang berbeda. Di satu sisi, kedalaman kemiskinan mengalami sedikit perbaikan, yang berarti rata-rata kondisi ekonomi masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Namun di sisi lain, keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin masih perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Gambar III. 24 Komparasi persentase penduduk miskin di Lombok Tengah, NTB dan Nasional dua tahun terakhir



Sumber BPS NTB tahun 2025

Berdasarkan grafik persentase penduduk miskin, terlihat adanya perbandingan kondisi antara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan tingkat nasional pada tahun 2024–2025.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 10,68%. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTB yang mencapai 11,38%, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, tetapi masih berada di atas capaian nasional.

Memasuki tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah meningkat menjadi 12,07% atau mengalami kenaikan sebesar 1,39 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Provinsi NTB meningkat menjadi 12,91% dari sebelumnya 11,38% (naik 1,53 poin persentase), sedangkan nasional meningkat menjadi 9,03% dari 8,25% (naik 0,78 poin persentase).

Secara komparatif pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTB, namun tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, meskipun posisi Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan provinsi, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat agar dapat mendekati bahkan melampaui capaian nasional.

III.1.8 III.1.11 SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA. LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Meningkatnya kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, dan penguatan perlindungan sosial merupakan fondasi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi

juga pada penciptaan pekerjaan yang produktif, layak, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Tengah, perluasan kesempatan kerja didorong melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Penguatan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pendampingan usaha menjadi strategi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.

Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sehingga diharapkan link and match dengan dunia usaha dan industri. Langkah ini bertujuan agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan mampu mengisi peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun luar daerah.

Untuk mengetahui tingkat kesempatan kerja serta lapangan dan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 50 Capaian indikaor Meningkatnya Kesempatan Kerja. Lapangan Usaha Dan Perlindungan Sosial

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100$	2.5 2	2,57- 2,63	2.28	2.55	3,36	98.81	72,24	Tinggi
Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah /Tahun	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{2025}) - \ln(\text{pengeluaran}_{2024})}{\ln(\text{pengeluaran}_{2025}) - \ln(\text{pengeluaran}_{2024})}$	10.03	10,06	10.09	11.53	11,87	114.95	117,99	Sangat tinggi

Sumber: Bapperida Kab. Lombok Tengah

A. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target TPT berada pada kisaran 2,57%–2,63%, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menekan tingkat pengangguran. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 3,36%, yang berarti berada di atas batas atas target. Terdapat selisih sebesar 0,73 poin persentase dari batas atas target, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari yang diharapkan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal, sehingga jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor penyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa indikator TPT masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang lebih intensif.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya penurunan kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, serta masih belum mencapai target jangka menengah daerah.

Pada tahun 2024, target TPT ditetapkan sebesar 2,52% dengan realisasi sebesar 2,55%. Capaian ini sedikit berada di atas target dengan selisih 0,03 poin persentase, namun secara umum masih mendekati target yang direncanakan dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif terkendali.

Memasuki tahun 2025, target TPT ditetapkan pada kisaran 2,57%–2,63%. Namun, realisasi yang dicapai sebesar 3,36%, yang berarti melampaui batas atas target dengan selisih sebesar 0,73 poin persentase. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 0,81 poin persentase (dari 2,55% menjadi 3,36%), yang menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,28%, capaian tahun 2025 masih berada jauh di atas target tersebut, dengan selisih sebesar 1,08 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa indikator TPT belum berada pada jalur yang diharapkan untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan yang cukup besar pada tahun 2025, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kesesuaian kompetensi tenaga kerja. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, seperti

peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, pengembangan sektor-sektor padat karya, serta peningkatan investasi daerah, agar tingkat pengangguran dapat ditekan dan mendekati target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.

Pada tahun 2025, TPT Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,36%, sedangkan TPT nasional sebesar 4,74%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,38 poin persentase, di mana tingkat pengangguran di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Jika dilihat secara persentase, TPT Kabupaten Lombok Tengah lebih rendah sekitar 29,11% dibandingkan TPT nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif, penyerapan tenaga kerja di Lombok Tengah lebih baik dibandingkan kondisi nasional.

Meskipun demikian, capaian TPT sebesar 3,36% tetap perlu menjadi perhatian karena masih berada di atas target daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun secara komparatif lebih baik dari nasional, upaya penurunan tingkat pengangguran tetap perlu diperkuat melalui peningkatan penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

- a. Kurangnya dorongan untuk kewirausahaan dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Minimnya jumlah wahana pendidikan dan pelatihan keterampilan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah sehingga dapat membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

- c. Kurangnya jumlah/nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja.
- d. Belum optimal pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah sehingga menghambat pertumbuhan wirausaha baru

Solusi/Alternatif untuk eninhgkatan pencapaian indiator :

- a. Memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha bagi wirausaha muda dan pelaku UMKM;
- b. Mengadakan pelatihan bisnis yang berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.
- c. Meningkatkan program infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal untuk menyerap tenaga kerja. seperti pembangunan jalan desa dan irigasi (padat karya);
- d. Menyederhanakan birokrasi perizinan usaha agar lebih banyak bisnis bisa berkembang.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 51 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja. lapangan usaha dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	72,24	99,36	27,12

Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), capaian kinerja pada tahun berjalan sebesar 72,24%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,36%. tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh: $99,36\% - 72,24\% = 27,12\%$.

Nilai efisiensi sebesar 27,12% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong tidak efisien, karena penggunaan anggaran hampir seluruhnya terserap, namun capaian kinerja masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa :

- Capaian indikator TPT belum optimal (baru mencapai 72,24% dari target).
- Penyerapan anggaran sangat tinggi (99,36%), namun belum mampu mendorong hasil kinerja yang sebanding.
- Terdapat kesenjangan antara input (anggaran) dan output (kinerja) yang cukup signifikan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 52 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,57-2,63 %	72,24%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMA	177,66	Menunjang
						Nilai investasi PMDN	859,54	Menunjang
						Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	302,08	Menunjang
						Persentase tenaga kerja yang terlatih	108,7	Menunjang
						Rata-rata capain program		361,99

Untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator sebagai berikut

:

- ✓ Indikator “Nilai investasi PMA” dengan capaian 177,66% dapat dinilai sangat menunjang, karena peningkatan investasi asing akan mendorong pembukaan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
- ✓ Indikator “Nilai investasi PMDN” dengan capaian 859,54% menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan dominan dalam menunjang sasaran. Lonjakan investasi dalam negeri ini mengindikasikan ekspansi usaha yang signifikan, sehingga berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru secara masif.

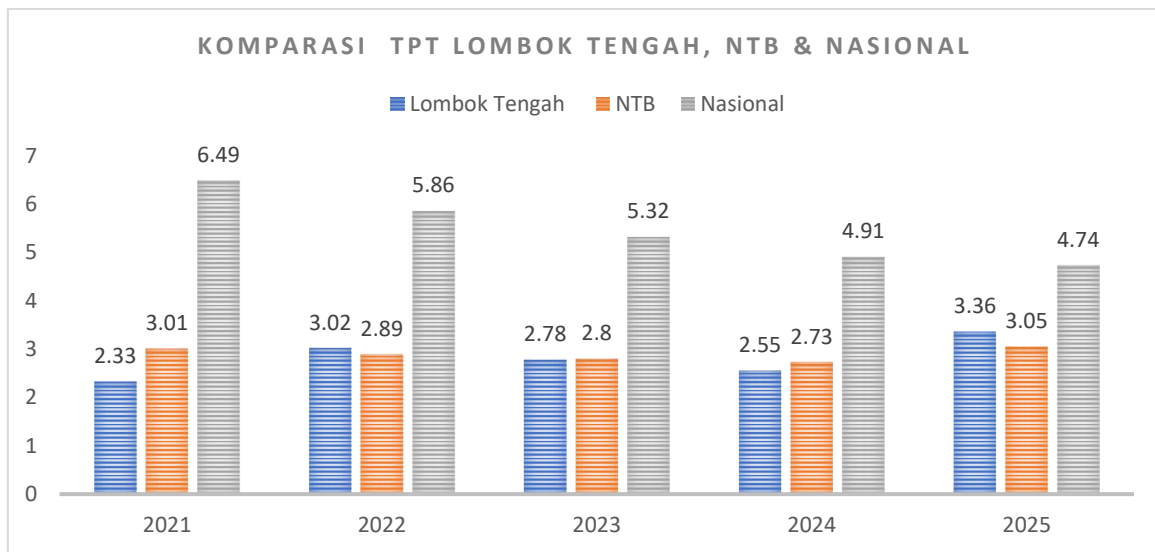
Sedangkan untuk Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator “Jumlah proyek investasi baru di atas 1 miliar” dengan capaian 302,08% dapat dikategorikan sangat menunjang. Banyaknya proyek investasi baru menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi riil yang secara langsung membuka kesempatan kerja di berbagai sektor.

Selanjutnya untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Indikator “Persentase tenaga kerja yang terlatih” dengan capaian 108,7% dinilai sangat menunjang terhadap sasaran. Peningkatan kompetensi tenaga kerja akan memperbesar peluang masyarakat untuk terserap di pasar kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal.

Berdasarkan capaian seluruh indikator program, dapat disimpulkan bahwa program-program pendukung telah sangat menunjang pencapaian sasaran. Program yang berkaitan dengan investasi menjadi faktor paling dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan program pelatihan tenaga kerja berperan dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Untuk melihat komparasi Tren Perkembangan penurunan TPT Kabupaten Lombok Tengah, NTB dan Nasional untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar III. 25 Komparasi perkembangan TPT di Lombok Tengah, NTB dan Nasional tahun 2021-2025



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS NTB 2025 dan Bapperida Lombok Tengah (data diolah)

Berdasarkan data yang tersebut diatas, Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun secara umum membaik, baik di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun pada tingkat nasional. Pada tahun 2021, TPT Lombok Tengah tercatat sebesar 2,33 persen, lebih rendah dibandingkan NTB sebesar 3,01 persen dan jauh di bawah angka nasional yang mencapai 6,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Pada tahun 2022, TPT Lombok Tengah meningkat menjadi 3,02 persen, sedangkan NTB justru menurun menjadi 2,89 persen dan nasional juga turun menjadi 5,86 persen. Kenaikan TPT di Lombok Tengah pada tahun ini mengindikasikan adanya tekanan pada pasar kerja daerah, sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi, meskipun masih tetap jauh lebih rendah dari tingkat nasional.

Selanjutnya pada tahun 2023, TPT Lombok Tengah menurun menjadi 2,78 persen, hampir sama dengan NTB yang sebesar 2,80 persen, sementara nasional masih berada pada angka 5,32 persen. Penurunan ini menunjukkan mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Lombok Tengah setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, TPT Lombok Tengah kembali menurun menjadi 2,55 persen, lebih rendah dibandingkan NTB yang sebesar 2,73 persen dan tetap jauh di bawah nasional yang mencapai 4,91 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar kerja di Lombok Tengah semakin membaik, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Namun pada tahun 2025, TPT Lombok Tengah kembali meningkat menjadi 3,36 persen. Meskipun demikian, angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 3,05 persen, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan nasional yang berada pada 4,74 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ketenagakerjaan Lombok Tengah relatif masih lebih baik daripada nasional, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian agar peningkatan pengangguran tidak berlanjut.

Secara keseluruhan, tren perkembangan TPT Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, bahkan pada sebagian besar tahun juga lebih baik dibandingkan Provinsi NTB. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2025, secara umum tingkat pengangguran di Lombok Tengah masih berada pada level yang cukup terkendali.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 820.546 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 79,16 persen tergolong angkatan kerja, yang dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingginya TPAK mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Secara sederhana, TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia produktif. Pada 2024, TPAK laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan, kondisi yang kerap dipengaruhi oleh norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam urusan rumah tangga.

Untuk mengetahui kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Lombok Tengah berdasarkan hasil sensus BPS sesuai tabel berikut :

Tabel III. 53 TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (persen)

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia 15 tahun ke atas (jiwa)	411.390	409.325	820.546
Angkatan Kerja			
Bekerja	96,81	98,24	97,45
Pengangguran	3,19	1,76	2,55
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	47,66	16,19	26,12
Mengurus Rumah Tangga	26,17	78,85	62,23
Lainnya	26,16	4,97	11,66

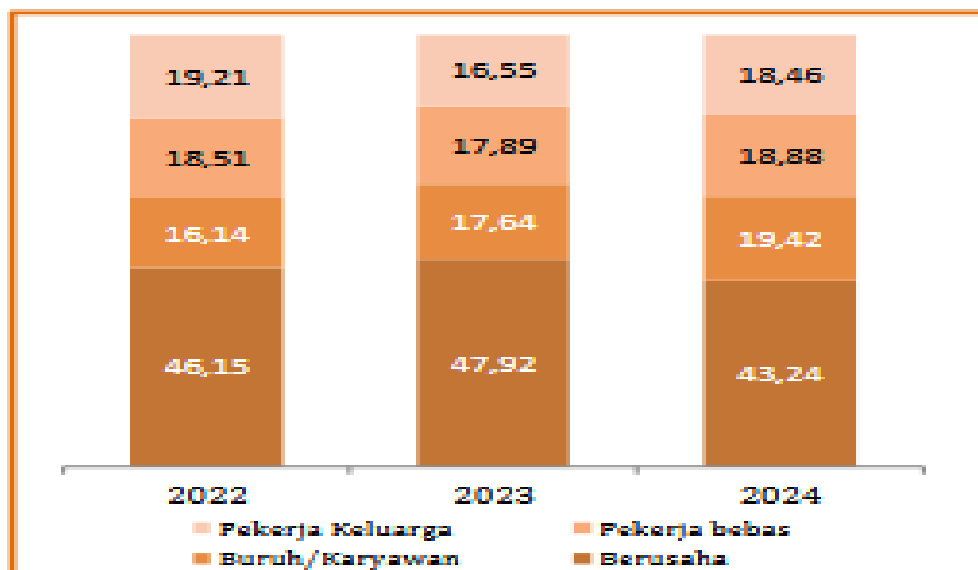
Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	86,88	70,12	79,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,19	1,76	2,55

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 (data 2025 belum di publis)

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Untuk angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat seui tabel berikut :

Gambar III. 26 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2022-2024



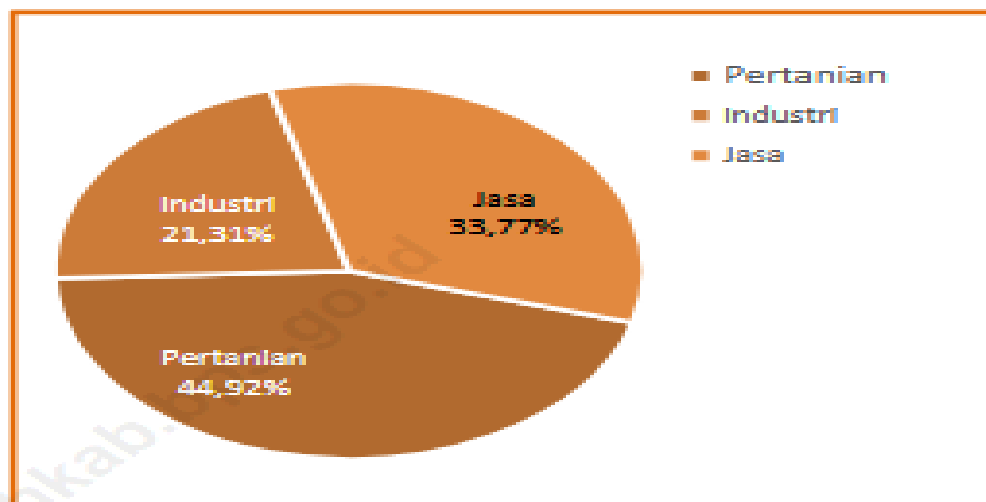
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022-2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2024 sekitar 43,24 persen angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah berstatus sebagai berusaha. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian yang cukup baik dalam menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Namun demikian, terdapat sekitar 18,46 persen yang bekerja sebagai pekerja keluarga

dan 18,88 persen sebagai pekerja bebas. Kedua kelompok ini tergolong rentan karena keterbatasan keterampilan serta kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga memiliki kemungkinan lebih besar untuk beralih menjadi penganggur. Dilihat dari status pekerjaan utama, sekitar 47.92 persen angkatan kerja yang bekerja berstatus berusaha pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa kemandirian angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan lapangan usaha sendiri sudah cukup baik. Namun, sekitar 16.55 persen dan 17.89 persen masing-masing sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas. Golongan ini sangat rentan beralih status menjadi pengangguran karena keterampilan yang dimiliki terbatas dan ketidakstabilan ekonomi.

Sektor pertanian, manufaktur dan jasa merupakan lapangan usaha utama yang dominan di Lombok Tengah. Untuk perkembangan sektor ini dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III. 27 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1, sekitar 97.22 persen atau sebanyak 602.084 ribu angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah berstatus bekerja. Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor jasa dan pertanian, yakni masing-masing mencapai 36.63 persen dan 36.22 persen. Sedangkan sektor industri menyerap sebanyak 27.15 persen tenaga kerja. Secara garis besar, pada tahun 2023 terdapat pergeseran lapangan usaha utama yang diusahakan oleh penduduk Kabupaten Lombok Tengah dari yang sebelumnya sektor pertanian menjadi sektor jasa

B. RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target rata-rata pengeluaran per kapita ditetapkan sebesar 10,06 juta rupiah per tahun, sementara realisasi yang dicapai sebesar 11,87 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 1,81 juta rupiah atau sekitar 118,00% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta membaiknya aktivitas konsumsi rumah tangga.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa peningkatan pengeluaran juga perlu diimbangi dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga secara riil.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren peningkatan yang konsisten serta capaian yang melampaui target tahunan maupun target jangka menengah.

Pada tahun 2024, target rata-rata pengeluaran per kapita ditetapkan sebesar 10,03 juta rupiah per tahun dengan realisasi mencapai 11,53 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 1,50 juta rupiah atau sekitar 114,96%, yang mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat.

Memasuki tahun 2025, target sedikit meningkat menjadi 10,06 juta rupiah per tahun, sementara realisasi juga mengalami peningkatan menjadi 11,87 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 1,81 juta rupiah atau sekitar 118,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi

sebesar 0,34 juta rupiah (dari 11,53 juta menjadi 11,87 juta), yang menunjukkan adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 10,09 juta rupiah per tahun, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 1,78 juta rupiah atau sekitar 117,64%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan konsumsi rumah tangga. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga stabilitas daya beli melalui pengendalian inflasi serta memastikan pemerataan peningkatan kesejahteraan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 11,87 juta rupiah per tahun, sedangkan rata-rata nasional mencapai 12,8 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 0,93 juta rupiah per tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Jika dilihat secara relatif, rata-rata pengeluaran per kapita Lombok Tengah berada sekitar 7,27% lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati kondisi nasional.

Meskipun demikian, capaian sebesar 11,87 juta rupiah per tahun tetap menunjukkan kondisi yang cukup baik dan mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas, sehingga daya beli masyarakat dapat terus meningkat dan kesenjangan dengan tingkat nasional dapat semakin diperkecil.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat;
- b. Pemerintah memberikan subsidi/BLT bagi kelompok rentan sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar;
- c. Pemerintah telah melakukan perbaikan akses transportasi (Jalan dan jembatan) serta infra struktur irigasi;

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator :

- a. Mengembangkan desa wisata dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pariwisata yang berkompeten ;
- b. Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga agar masyarakat mampu menjangkau harga terutama untuk kebutuhan pokok;
- c. Mengoptimalkan program bantuan sosial berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilannya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 54 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Rata-rata pengeluaran perkapita	117,99	99,70	-18,29

Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial dengan indikator rata-rata pengeluaran per kapita, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 117,99%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,70%. maka tingkat

efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,70\% - 117,99\% = -18,29\%$

Nilai efisiensi sebesar -18,29% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja tidak hanya mencapai target tetapi juga melampaui secara signifikan, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement yang cukup tinggi pada indikator rata-rata pengeluaran per kapita.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 18,29% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya sangat optimal dengan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 55 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1 Misi 4

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Rata-rata pengeluaran perkapita	10,06 jt/Rp./t hn	117,99%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang
	Rata-rata capain program						100	Sangat tinggi

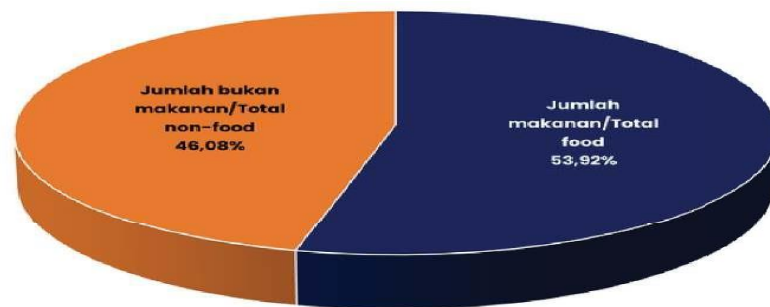
Bahwa pada tabel tersebut dapat dilihat program pendukung sasaran kinerja adalah Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator “Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan capaian sebesar 100% dapat dinilai menunjang, namun dalam konteks yang tidak langsung terhadap sasaran. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar kelompok rentan telah terpenuhi secara

optimal, yang berdampak pada peningkatan daya tahan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita, karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan mendorong stabilitas konsumsi rumah tangga.

Namun demikian, program ini tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja atau memperluas kesempatan usaha, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan indikator sasaran lebih bersifat pendukung (supporting) dibandingkan sebagai penggerak utama.

Selama 2025, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 1.361.849 rupiah. Pengeluaran tersebut 53,92 persen untuk makanan dan 46,08 persen untuk bukan makanan, sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar III. 28 Persentase pengeluaran berdasarkan kelompok makanan dan non makanan



Sumber ; BPS Lombok Tengah 2025

Kelompok komoditas makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 16,70 persen. Sementara kelompok komoditas bukan makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 23,80 persen.

Untuk komoditas-komoditas yang memiliki persentase pengeluaran tinggi dapat dilihat sesuai table berikut:

Tabel III. 56 persentase pengeluaran komoditas

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	16,92	7,00
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	0,41	0,32
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	7,09	3,98
Daging/ <i>Meat</i>	4,56	2,70
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	3,47	2,00
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	9,16	6,03
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	2,25	1,37
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	5,57	3,09
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	2,33	1,42
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	2,55	1,44
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	2,08	1,11
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	1,56	0,96
Makanan dan minuman jadi/<i>Prepared food and beverages</i>	29,81	16,70
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	12,24	5,81
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	58,28	53,92
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	22,89	23,80
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	7,86	8,77
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	2,52	2,81
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	4,60	6,07
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	2,42	2,77
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	1,42	1,87
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	41,72	46,08
Jumlah/<i>Total</i>	100,00	100

Sumber : BPS Lombok Tengah (Lombok Dalam Angka Tahun 2025)

Dari Tabel tersebut diatas persentase pengeluaran komoditas terbesar dari kelompok makanan Adalah sektor makan dan minum untuk tahun 2024 tercatat sebesar 29,81 % dan padatahun 2025 tercatat sebesar 16 70% selisihanatar tahun 2024 dengan 2025 sekitar 13,11 %

Untuk pengeluaran per kapita di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai tabel berikut :

Tabel III. 57 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah. 2024 dan 2025

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	109.647	95.386
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	2.649	4.330
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	45.958	54.254
Daging/ <i>Meat</i>	29.563	36.779
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	22.491	27.241
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	59.338	82.091
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	14.557	18.600
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	36.098	42.042
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	15.093	19.286
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	16.546	19.576
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	13.461	15.183
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	10.076	13.048
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	193.189	227.405
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	79.304	79.061
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	647.989	734.281
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	254.462	324.054
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	87.442	119.399
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	28.063	38.288
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	51.116	82.692
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	26.924	37.675
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	15.807	25.459
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	463.814	627.586
Jumlah/<i>Total</i>	1.111.803	1.361.849

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam angka 2025)

III.1.9 III.1.12 SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan nilai tambah tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi pada proses pengolahan, inovasi, pengemasan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar yang mampu meningkatkan harga jual dan daya saing produk lokal.

Di Kabupaten Lombok Tengah, pengembangan produk unggulan daerah diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, serta industri kecil dan menengah. Ekonomi kreatif juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan tumbuhnya usaha berbasis kreativitas dan inovasi seperti kuliner, fesyen, serta konten digital. Dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, serta promosi dan pameran produk menjadi faktor pendorong utama dalam memperluas pasar produk kreatif lokal. Pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran berbasis online turut memperluas jangkauan pasar hingga tingkat regional. Kolaborasi antara pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan dunia usaha memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan global. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal menuju ekonomi yang lebih inovatif, produktif, dan bernilai tinggi.

Khususnya bagaimana produk unggulan pada daerah bisa memiliki nilai tambah. Terkait bagaimana peran penting unsur pemda dalam mengimplemntasi peningkatan nilai tambah produk unggulan dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sesuai tabel dibawah :

Tabel III. 58 Meningkatnya Nilai Tumbuh Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t - \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1})}{\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t} \times 100$	3.03	3,53	3.83	3.99	3,54	131.68	100,28	Sangat tinggi 3,53
Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$\text{LPE} = \frac{(\text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_t - \text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_{t-1})}{\text{PDRB}_t} \times 100$	3.25	3,75	4.06	9.54	8,06	293.53	214,93	Sangat tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t - \text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t-1})}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t} \times 100$	1,36	1,46	1,56	1,04	7,67	76,47	525,34	Sedang

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar 3,53%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,54%. Dengan demikian, capaian kinerja sedikit melampaui target dengan selisih sebesar 0,01 poin persentase atau sekitar 100,28% dari target.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan mampu tumbuh secara stabil dan sesuai dengan ekspektasi yang direncanakan. Meskipun selisihnya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam menjaga kinerja sektor industri sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan sebesar 3,54% mencerminkan bahwa aktivitas industri pengolahan tetap berjalan dengan baik, didukung oleh faktor-faktor seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, serta permintaan pasar. Ke depan, diperlukan upaya untuk terus mendorong peningkatan nilai tambah sektor industri melalui penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan investasi di sektor industri pengolahan agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun terdapat dinamika antar tahun dan masih terdapat gap terhadap target jangka menengah.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar 3,03%, dengan realisasi mencapai 3,99%. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,96 poin persentase atau sekitar 131,68%, yang mencerminkan kinerja sektor industri yang cukup kuat pada tahun tersebut.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 3,53%, sementara realisasi tercatat sebesar 3,54%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 sedikit melampaui target sebesar 0,01 poin persentase atau sekitar 100,28%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 0,45 poin persentase (dari 3,99% menjadi 3,54%), yang mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi***

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,83%, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target tersebut dengan selisih sebesar 0,29 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, pertumbuhan sektor industri pengolahan belum sepenuhnya berada pada jalur untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap tumbuh positif dan stabil, namun memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan laju pertumbuhannya. Ke depan, diperlukan penguatan sektor industri melalui peningkatan investasi, pengembangan hilirisasi, peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta dukungan terhadap pelaku industri lokal agar pertumbuhan dapat kembali meningkat dan mencapai target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,54%, sedangkan pada tingkat nasional mencapai 5,3%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,76 poin persentase, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi dan dinamika sektor industri pengolahan di daerah belum sekuat di tingkat nasional. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan skala industri, belum optimalnya hilirisasi produk, keterbatasan investasi, serta masih dominannya sektor-sektor primer dalam struktur ekonomi daerah.

Meskipun demikian, capaian pertumbuhan sebesar 3,54% tetap menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Lombok Tengah berada dalam kondisi tumbuh positif dan stabil. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja sektor ini, antara lain melalui peningkatan investasi industri, pengembangan kawasan industri, penguatan nilai tambah produk lokal, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk, sehingga dapat memperkecil kesenjangan dengan capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator :

- a. Bahan baku untuk sektor industri pengolahan cukup tersedia dengan harga yang stabil dan cukup berkualitas;
- b. Ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau sangat yang mendukung sektor industri pengolahan;
- c. Daya beli masyarakat meningkat.

Solusi/alternatif lebih meningkatkan pencanpaian indikator :

- a. Memperkuat kerja sama antara industri pengolahan dengan petani, nelayan, dan peternak untuk memastikan pasokan bahan baku stabil;
- b. Memperluas akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM sektor industri pengolahan;
Mendorong kebijakan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pemerintah dan swasta.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 59 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	100,28	93,04	-7,24

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 100,28%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,04%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh : $93,04\% - 100,28\% = -7,24\%$

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong efisien, karena capaian kinerja berhasil melampaui target, meskipun anggaran yang digunakan tidak terserap secara penuh.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Capaian kinerja mengalami sedikit over achievement (di atas 100%).
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 7,24% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya berjalan optimal dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 60 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
T4	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan	Laju Pertumbuh an Ekonomi						

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
	daya saing daerah							
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,53%	100,28%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai omset perdagangan pembangunan industri kabupaten	100	Menunjang
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai omset perdagangan	190,23	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan omset aset UMKM	100	
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	102,13	
	Rata-rata capain program						123,09	Sangat tinggi

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator “Nilai omset perdagangan pembangunan industri kabupaten” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. Program ini berperan dalam mendorong pengembangan kawasan dan aktivitas industri, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah barang hasil olahan

Kemudian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator “Nilai omset perdagangan” dengan capaian 190,23% dapat dikategorikan sangat menunjang. Capaian yang jauh melampaui target menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan yang signifikan, yang berdampak pada kelancaran distribusi hasil industri pengolahan.

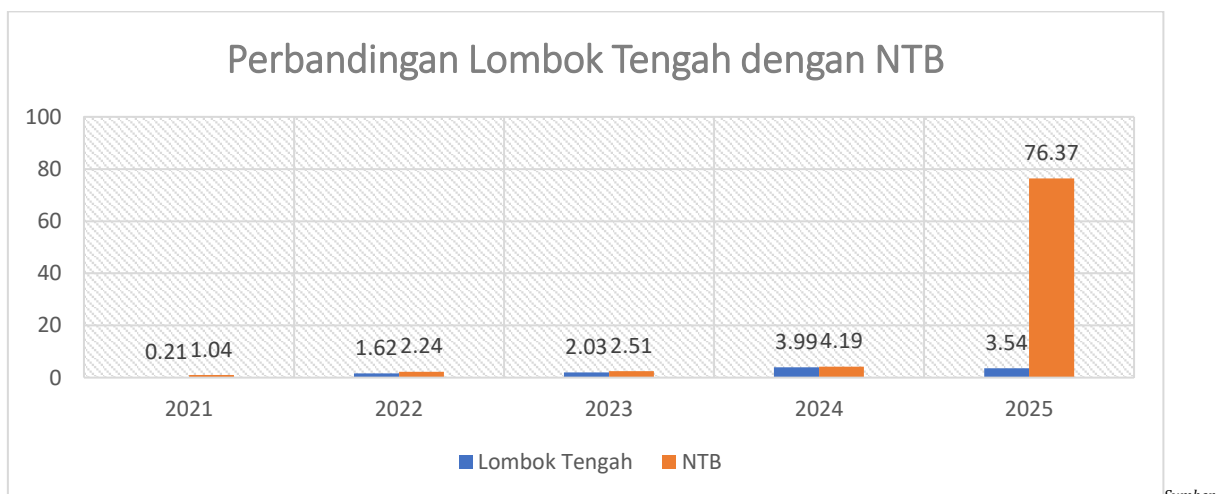
Selanjutnya pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Indikator “Pertumbuhan omset aset UMKM” dengan capaian 100% dinilai menunjang secara optimal. UMKM merupakan pelaku utama dalam sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah.

Untuk Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator “Pertumbuhan omset aset koperasi” dengan capaian 102,13% dapat dinilai menunjang secara signifikan. Koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mendukung pembiayaan, pemasaran, dan penguatan usaha anggota, termasuk dalam sektor industri pengolahan.

Berdasarkan capaian seluruh indikator program, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang bahkan sangat menunjang pencapaian sasaran. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menjadi faktor paling dominan karena capaian yang sangat tinggi dalam meningkatkan omset perdagangan. Sementara itu, program lainnya memberikan kontribusi yang solid dalam memperkuat ekosistem industri dari sisi produksi, pelaku usaha, dan kelembagaan ekonomi.

Perbandingan Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 29 Komparasi Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Lombok Tengah dan NTB tahun 2021-2025



: BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Pada gambar III.1.23 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan pada beberapa tahun berada lebih

tinggi dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah tercatat sebesar 0,21 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan NTB yang sebesar 1,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode pemulihan ekonomi, laju pertumbuhan Lombok Tengah masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi.

Memasuki tahun 2022, pertumbuhan PDRB Lombok Tengah meningkat menjadi 1,62 persen, namun masih berada di bawah NTB yang mencapai 2,24 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah kembali meningkat menjadi 2,03 persen, tetapi tetap sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan NTB sebesar 2,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan ekonomi di Lombok Tengah, kecepatannya masih belum melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Perkembangan yang lebih baik terlihat pada tahun 2024, ketika laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah mencapai 3,99 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan NTB yang sebesar 4,19 persen. Selisih ini relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah mulai mendekati capaian tingkat provinsi.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah tercatat sebesar 3,54 persen, sedangkan NTB mengalami lonjakan sangat tinggi hingga 76,37 persen. Perbedaan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2025 didorong oleh faktor tertentu yang sangat signifikan, sehingga jauh melampaui pertumbuhan Lombok Tengah. Dengan demikian, secara umum Lombok Tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. .

B. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 3,75%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 8,06%. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 4,31 poin persentase atau sekitar 214,93% dari target. Capaian ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum mengalami ekspansi yang kuat, yang kemungkinan didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan, serta berkembangnya usaha jasa

perhotelan dan kuliner di daerah. Sektor ini juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pariwisata.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang sangat baik pada sektor jasa terkait pariwisata. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi dan produk unggulan, agar kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, meskipun terdapat sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 3,25% dengan realisasi mencapai 9,54%. Hal ini menunjukkan capaian yang jauh melampaui target sebesar 6,29 poin persentase atau sekitar 293,54%, yang mencerminkan lonjakan pertumbuhan yang sangat kuat, terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor jasa pendukungnya.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 3,75%, sementara realisasi tercatat sebesar 8,06%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga melampaui target secara signifikan, dengan selisih sebesar 4,31 poin persentase atau sekitar 214,93%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 1,48 poin persentase (dari 9,54% menjadi 8,06%), yang mengindikasikan adanya normalisasi pertumbuhan setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,06%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 4,00 poin persentase atau sekitar 198,52%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan melampaui ekspektasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor unggulan dengan pertumbuhan yang sangat kuat di Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk wisata dan kuliner, serta penguatan daya saing sektor pariwisata agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah sedikit lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 8,06%, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 8,04%. Dengan demikian, terdapat selisih tipis sebesar 0,02 poin persentase, di mana Lombok Tengah berada sedikit di atas rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah memiliki daya tumbuh yang kompetitif dan mampu mengikuti bahkan sedikit melampaui dinamika pertumbuhan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran sektor pariwisata yang cukup dominan dalam mendorong aktivitas usaha jasa akomodasi dan kuliner di daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja sektor yang sangat baik dan berada pada level yang sebanding dengan nasional. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keunggulan tersebut melalui penguatan kualitas layanan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan destinasi dan produk wisata, sehingga sektor ini dapat terus menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendorong pencapaian indikator adalah :

- a. Peningkatan kunjungan wisatawan.
- b. Meningkatnya tingkat hunian hotel dan restoran.
- c. Bertambahnya pelaku usaha di sektor kuliner dan jasa akomodasi.

Solusi/alternatif untuk meningkatkan pencapaian indikator :

- a. Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata & Kuliner melalui berbagai media;
- b. Meningkatkan kemasan event budaya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan konsumsi di sektor ini;
- c. Meningkatkan skema kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur pariwisata;
- d. Mendorong pengelolaan street food yang terorganisir. dengan kebersihan dan standar kualitas yang tinggi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 61 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	214,99	97,24	-117,75

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 214,99%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,24%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $97,24\% - 214,99\% = -117,75\%$

Nilai efisiensi sebesar -117,75% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target secara sangat signifikan, sementara penggunaan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement yang sangat tinggi pada indikator pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 117,75% dalam konteks perbandingan terhadap capaian kinerja.
- Output yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan efisiensi yang sangat tinggi.

Terhadap capaian yang begitu besar dengan dengan penghematan anggaran yang sangat tinggi maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap metode penetapan target agar lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika sektor;
- Meningkatkan kualitas intervensi program agar tetap relevan dan berkelanjutan di tengah pengaruh faktor eksternal yang kuat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 62 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	3,75%	214,93%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	100	Menunjang
					Rogram Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	100	
					Program Pengembangan Sumber Daya	Jumlah SDM Pariwisata dan	100	

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
					Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Rata-rata capain program						100	Sangat tinggi

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Indikator “Persentase destinasi wisata yang dikembangkan” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. Pengembangan destinasi wisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap jasa akomodasi dan konsumsi makanan dan minuman.

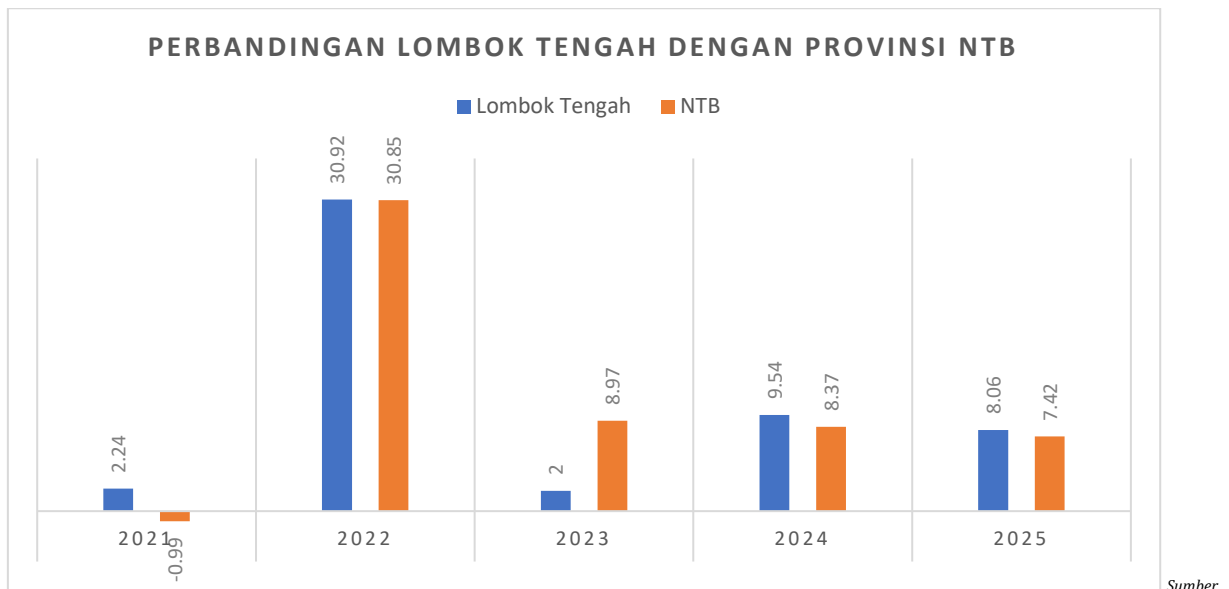
Kemudian pada Program Pemasaran Pariwisata Indikator “Media promosi online yang aktif” dengan capaian 100% juga dinilai menunjang secara optimal. Promosi yang efektif, khususnya melalui media digital, berperan dalam meningkatkan visibilitas destinasi dan menarik minat wisatawan. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.

Selanjutnya untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Indikator “Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. SDM yang kompeten akan meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan capaian indikator pada ketiga program tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang secara optimal pencapaian sasaran.

Komparasi persentase capaian laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada sektor akomodasi dan makan minum tahun 2021-2025, sebagai mana termuat pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 30 Tren capaian laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada sektor akomodasi dan makan minum tahun 2021-2025



: BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 2,24 persen, sedangkan NTB mengalami kontraksi sebesar -0,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah pada tahun tersebut lebih baik dibandingkan capaian provinsi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum meningkat sangat signifikan baik di Lombok Tengah maupun NTB. Lombok Tengah mencapai 39,92 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 30,85 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah berlangsung lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan rata-rata provinsi.

Namun demikian, pada tahun 2023 pertumbuhan di Lombok Tengah melambat cukup tajam menjadi 2,00 persen, sementara NTB masih mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 8,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pertumbuhan pada tahun sebelumnya, sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah mengalami perlambatan yang lebih besar dibandingkan provinsi.

Pada tahun 2024, Lombok Tengah kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 9,54 persen, lebih tinggi dibandingkan NTB yang mencapai 8,37 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025, di mana Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 8,06 persen, juga masih lebih tinggi dibandingkan NTB sebesar 7,42 persen.

Secara keseluruhan, komparasi selama tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kinerja pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi NTB pada sebagian besar tahun pengamatan, yakni tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025. Hanya pada tahun 2023 Lombok Tengah berada di bawah capaian provinsi

C. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 1,46%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 7,67%. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 6,21 poin persentase atau sekitar 525,34% dari target. Capaian ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kinerja yang sangat kuat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan produksi komoditas unggulan, kondisi cuaca yang mendukung, perbaikan infrastruktur pertanian, serta meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, dukungan program pemerintah di sektor pertanian dan perikanan juga turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan yang tinggi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah dengan kontribusi yang signifikan. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, modernisasi sektor pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor ini.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya lonjakan kinerja yang sangat

signifikan pada tahun 2025 setelah sebelumnya mengalami capaian yang relatif rendah pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 1,36%, namun realisasi hanya mencapai 1,04%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 0,32 poin persentase atau sekitar 76,47% dari target, yang mengindikasikan adanya tekanan atau kendala pada kinerja sektor tersebut.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 1,46%, dan realisasi melonjak tajam menjadi 7,67%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 6,21 poin persentase atau sekitar 525,34%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6,63 poin persentase (dari 1,04% menjadi 7,67%), yang menunjukkan adanya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan yang kuat di sektor ini.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,56%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sebesar 6,11 poin persentase atau sekitar 491,67%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga jauh melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pemulihan yang sangat kuat dan kinerja yang luar biasa pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut serta memastikan stabilitas produksi melalui penguatan ketahanan sektor, peningkatan produktivitas, serta mitigasi terhadap risiko seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 7,67%, sedangkan pada tingkat nasional mencapai 13,53%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 5,86 poin persentase, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan signifikan, namun laju pertumbuhannya belum secepat pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti skala produksi, produktivitas, teknologi yang digunakan, serta dukungan infrastruktur dan pasar.

Secara keseluruhan, capaian sebesar 7,67% tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pertumbuhan yang kuat di tingkat daerah. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor, penguatan hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah komoditas agar pertumbuhan sektor ini dapat semakin meningkat dan mendekati capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Curah hujan yang relatif stabil dan distribusi musim tanam yang baik.
- b. Berkurangnya gangguan iklim ekstrem dibanding tahun sebelumnya..
- c. Penerapan teknologi pertanian modern (benih unggul, pupuk tepat guna, mekanisasi).
- d. Bantuan sarana produksi (alsintan, benih, pupuk bersubsidi).

Solusi/Alternatif untuk pencapaian indikator :

- a. Penggunaan benih unggul dan varietas tahan iklim;
- b. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi;
- c. Perbaikan akses jalan produksi menuju sentra pertanian dan perikanan.
- d. Penguatan koperasi tani dan nelayan.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 63 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	525,34	96,58	-428,76

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 525,34%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,58%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $96,58\% - 525,34\% = -428,76\%$

Nilai efisiensi sebesar -428,76% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien namun bersifat anomali (ekstrem), sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasi, mengingat capaian kinerja melampaui target secara sangat signifikan, sementara penggunaan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Output yang dihasilkan jauh melampaui target dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan.
- Secara matematis menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi, namun juga perlu dicermati secara lebih mendalam dari sisi kualitas perencanaan.

Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- ❖ Rendahnya baseline atau target awal, sehingga realisasi tampak melonjak sangat tinggi.
- ❖ Adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan intervensi program yang dibiayai

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Tabel III. 64 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2
Tujuan 4.1 Misi 4**

pada

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,46%	525,34%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Padi	156,83	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tembakau	134,3	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Buah Melon	52,16	Tidak menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Sapi	76,38	Mneunjang
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	90,85	Menunjang
						Produksi Benih Ikan	109,39	Menunjang
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Konsumsi Protein	97,41	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
					Pangan Masyarakat				
	Rata-rata capain program							102,17	Sangat tinggi

Untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikatornya sebagai berikut:

- Indikator produksi padi dengan capaian 156,83% dapat dinilai sangat menunjang, karena peningkatan produksi padi secara signifikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor pertanian.
- Indikator produksi tembakau dengan capaian 134,3% juga sangat menunjang, mengingat tembakau merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.
- Indikator produksi melon dengan capaian 52,16% dinilai kurang menunjang, karena realisasi yang jauh di bawah target menunjukkan belum optimalnya pengembangan komoditas hortikultura tersebut.
- Indikator produksi sapi dengan capaian 76,38% dinilai cukup menunjang namun belum optimal, karena meskipun berkontribusi terhadap sektor peternakan, capaian yang belum maksimal membatasi dampaknya terhadap pertumbuhan sektor secara keseluruhan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Indikator “Indeks ketersediaan prasarana pertanian” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal. Ketersediaan prasarana yang memadai seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, sehingga mendukung pertumbuhan sektor secara berkelanjutan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indicator sebagai berikut :

- Indikator capaian program sebesar 90,85% dinilai menunjang namun belum optimal, karena belum sepenuhnya mencapai target sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor perikanan masih terbatas.
- Indikator produksi benih ikan dengan capaian 109,39% dapat dinilai sangat menunjang, karena ketersediaan benih yang cukup akan mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator “Konsumsi protein” dengan capaian 97,41% dinilai menunjang namun belum optimal. Program ini lebih

berperan pada sisi konsumsi dan kualitas gizi masyarakat, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB bersifat tidak langsung.

Untuk mengetahui perkembangan laju pertumbuhan ketiga indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 65 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025

Sektor PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.01	1.67	2.23	1.04	7,67
B. Pertambangan dan Penggalian	6.64	-4.03	5.39	1.84	2,12
C. Industri Pengolahan	0.2	1.62	2.03	3.99	3,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.23	10.41	5.13	9.28	5,78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.43	4.74	1.00	0.49	1,79
F. Konstruksi	16.74	-5.28	8.36	2.11	2,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.69	5.57	7.84	6.51	5,96
H. Transportasi dan Pergudangan	-5.58	28.74	13.85	3.92	4,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.24	30.92	8.62	9.54	8,06
J. Informasi dan Komunikasi	5.02	3.46	5.07	4.37	3,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.48	3.51	4.06	4.52	10,83
L. Real Estate	1.52	4.63	4.35	3.98	3,71
M.N. Jasa Perusahaan	0.41	9.14	8.32	5.22	4,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.64	1.73	1.11	5.28	2,94
P. Jasa Pendidikan	1.46	3.17	5.01	3.39	1,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.01	2.13	5.98	6.29	3,17

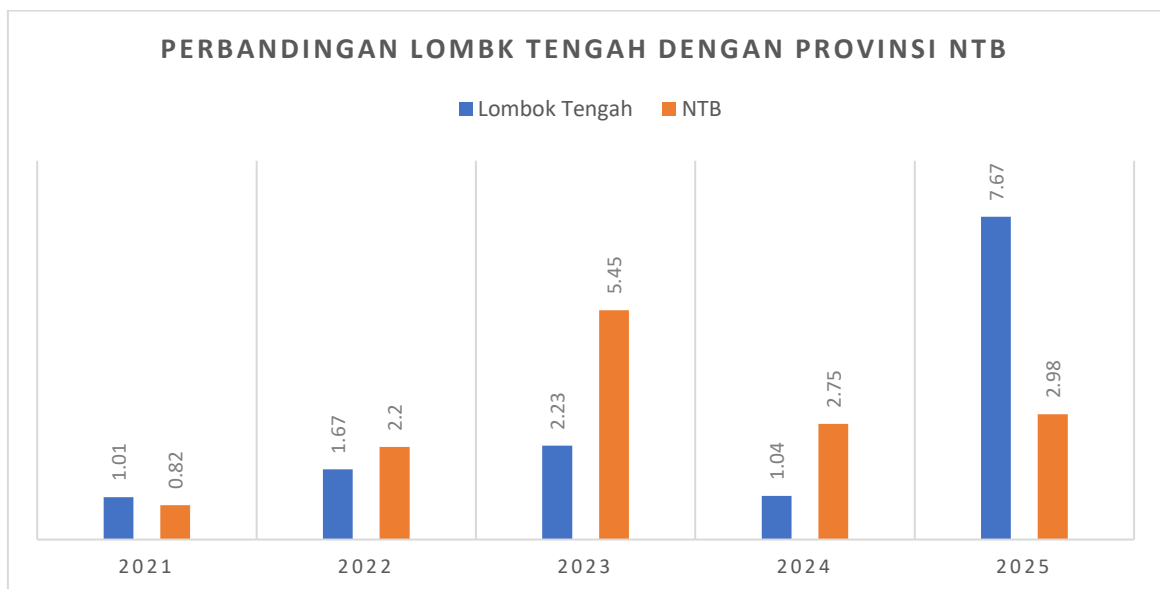
Sektor PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
R.S.T.U. Jasa lainnya	2.26	13.74	6.26	4.86	4,92
PDRB	4.03	3.55	5.77	3.34	4,87

Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Dari ketiga indikator untuk sasaran ini hanya indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2025 pencapaiannya sebagaimana tergambar pada table diatas.

Sedangkan untuk melihat komparasi perkembangan pada indikator ini selama lima tahun terakhir dengan provinsi NTB sesuai gambar berikut :

Gambar III. 31 Tren laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan 2021-2025



Sumber : BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Berdasarkan Gambar tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 1,01 persen, lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 0,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan capaian provinsi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah meningkat menjadi 1,67 persen, namun masih berada di bawah NTB yang mencapai 2,20 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 2,23 persen, sedangkan NTB tumbuh jauh lebih tinggi yaitu 5,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 hingga 2023, laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tingkat provinsi berkembang lebih cepat dibandingkan Lombok Tengah.

Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah menurun menjadi 1,04 persen, sementara NTB tetap berada pada angka yang lebih tinggi yaitu 2,75 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan masih tertinggal dari capaian provinsi.

Namun demikian, pada tahun 2025 Lombok Tengah menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat kuat hingga mencapai 7,67 persen, jauh melampaui NTB yang sebesar 2,98 persen. Capaian ini menandakan adanya perbaikan yang sangat signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah, sehingga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Secara keseluruhan, komparasi tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah cenderung fluktuatif. Lombok Tengah unggul dibandingkan NTB pada tahun 2021 dan 2025, sedangkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pertumbuhan sektor ini masih berada di bawah capaian provinsi. Dengan demikian, meskipun sektor ini sempat mengalami perlambatan, pada akhir periode pengamatan Lombok Tengah berhasil menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat baik

III.1.13 TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

Pemerataan pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas layanan dasar lainnya diarahkan untuk membuka akses terhadap pusat-pusat produksi, distribusi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan akses yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan arus barang menjadi lebih efisien, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, prinsip keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga dipastikan kualitasnya, daya tahannya, serta sistem pemeliharannya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta integrasi dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.

Dukungan infrastruktur yang merata juga berperan dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Desa dan wilayah terpencil yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses kini mulai terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi. Hal ini berdampak pada meningkatnya peluang usaha, akses terhadap pasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, diharapkan tercipta struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif. Infrastruktur menjadi enabler utama pembangunan, bukan hanya sebagai sarana fisik, tetapi sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah.

Terkait capain indikator pada tujuan ni dapat dilihat sesuai tabel dibawah:

Tabel III. 66 TUJUAN 4.2
MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN
BERKELANJUTAN
Capain indkator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	$IFW = \frac{\sum(jm + ir + am + sl + km)}{5}$ <p>Jm= persentase jalan mantap</p> <p>Ir = persentase irigasi kondisi baik</p> <p>am = persentase RT akses air minum layak</p>	69,55	71,05	72,55	74,93	72,46	107,74	101,98	Sangat tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
		sl = persentase RT sanitasi layak km = persentase kawasan kumuh								

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian III.152 adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks infrastruktur wilayah ditetapkan sebesar 71,05 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 72,46 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 1,41 poin atau sekitar 101,99% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja berada di atas ekspektasi yang direncanakan.

Keberhasilan melampaui target ini mengindikasikan bahwa infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan cukup efektif, baik dari sisi penyediaan, kualitas, maupun pemerataan infrastruktur wilayah. Peningkatan ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti percepatan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, dan fasilitas publik), peningkatan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi program yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa infrastruktur wilayah telah berkembang dengan baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Ke depan, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas infrastruktur, meningkatkan pemerataan antar wilayah, serta memastikan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Capaian III.153 adalah III.153 or Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika kinerja yang tetap baik meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, target indeks infrastruktur wilayah ditetapkan sebesar 69,55 poin dengan realisasi mencapai 74,93 poin. Capaian ini melampaui target sebesar 5,38 poin atau sekitar 107,73%, yang menunjukkan kinerja III.153 adalah III.153 or III.153 n infrastruktur yang sangat optimal.

Selanjutnya pada tahun 2025, target meningkat menjadi 71,05 poin dan realisasi tercatat sebesar 72,46 poin. Capaian ini masih melampaui target sebesar 1,41 poin atau sekitar 101,99%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 2,47 poin (dari 74,93 menjadi 72,46), yang mengindikasikan adanya perlambatan atau normalisasi capaian setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 72,55 poin, capaian tahun 2025 sudah sangat mendekati sasaran tersebut, dengan selisih tipis sebesar 0,09 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja III.153 adalah III.153 or III.153 n infrastruktur wilayah telah berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik karena masih melampaui target tahunan dan III.153 adalah memenuhi target akhir RPJMD. Ke depan, diperlukan III.153 dala untuk menjaga konsistensi kualitas III.153 adalah III.153 or III.153 n, meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan pemerataan III.153 adalah III.153 or III.153 n antar wilayah agar capaian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam melakukan perbandingan dengan capaian nasional.

Meskipun pada tahun 2025 indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan capaian yang baik, namun hasil tersebut tidak dapat dibandingkan secara

langsung dengan capaian di III.154 adalah III.154 nasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam pendekatan pengukuran yang digunakan.

Pada III.154 adalah III.154 pemerintah pusat, pengukuran infrastruktur umumnya menggunakan pendekatan yang bersifat makro dan agregatif lintas wilayah, sehingga III.154 adalah III.154 or yang dihasilkan merupakan III.154 adalah III.154 o umum kondisi infrastruktur secara nasional dengan cakupan yang luas dan terstandar. Sementara itu, pada III.154 adalah III.154 pemerintah daerah, pengukuran indeks infrastruktur wilayah cenderung menggunakan pendekatan yang lebih operasional dan kontekstual, yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi spesifik daerah.

Perbedaan pendekatan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam metodologi, III.154 adalah III.154 or penyusun, serta cakupan penilaian, sehingga hasil pengukuran tidak berada pada basis yang sama untuk diperbandingkan secara langsung.

Dengan demikian, capaian indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 lebih tepat dianalisis secara internal (time series) maupun terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, dibandingkan dengan melakukan komparasi dengan capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendorong pencapaian III.154 adalah III.154 or :

- a. Konsistensi pengalokasian anggaran belanja modal untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar;
- b. Sinergi pendanaan dari APBN, DAK, dan bantuan provinsi.;
- c. Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten/desa;
- d. Pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian III.154 adalah III.154 or ini III.154 adalah :

- a. Penyusunan prioritas berbasis gap wilayah (desa/kecamatan dengan indeks terendah);
- b. Pengawasan mutu pekerjaan secara ketat dan transparan;
- c. Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mendeteksi kerusakan dini.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 67 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tujuan 4.2 Indikator Indeks Infrsatraktur Wilayah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	101,98	98,18	-3,8

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator Indeks Infrastruktur Wilayah sebesar 101,98%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,18%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -3,8%.

Nilai efisiensi sebesar -3,8% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 4.2 tergolong efisien.

Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah yang melebihi target mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, yang meliputi konektivitas jalan, irigasi, air minum, permukiman, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana. Keberhasilan ini dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak sepenuhnya maksimal, menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif dan hemat.

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efektivitas pelaksanaan program infrastruktur, yang mampu menghasilkan output optimal dengan penggunaan anggaran yang terkendali.
- Prioritisasi kegiatan strategis, sehingga anggaran difokuskan pada program yang memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan indeks infrastruktur.
- Sinergi antar sektor infrastruktur, seperti keterpaduan antara pembangunan jalan, permukiman, dan layanan dasar.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian proyek, sehingga meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Pada Tujuan 4.2 indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, capaian kinerja (101,98%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (98,18%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang relatif kecil menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah cukup proporsional, dengan keseimbangan yang baik antara input (anggaran) dan outcome (kinerja infrastruktur).

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 68 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.2 Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	93,248 poin	94,84%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	82,41	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	100,1	Menunjang
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	68,60 poin	112,41%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	109,4	Mennjang
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	79,78%	95,64%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	89,75	Menunjang
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	765,37 ha/thn	98,69	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	0	Tidak Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
						dibawah 10 ha yang ditangani		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman	86,91	Menunjang
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	375,73	Menunjang
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,10 poin	114,80 %	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	102,99	Menunjang
		Cakupan layanan persampahan	30,3%	117,19%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	74,77	Menunjang
						Persentase Pengurangan Sampah	12,91	Tidak Menunjang
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	115,95 poin	94,15 %	Program Pengembangan Perumahan	Pengelolaan/pemeliharaan Perumahan (Rumah Susun Umum, Rumah Khusus dan Perumahan Komersil)	100	Menunjang
						Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	100	

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	147,68	
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhannya dasarnya	100	
	Rata-rata capain program						105,90	Tinggi

Secara umum, pencapaian Tujuan 4.2 Misi 4 didukung oleh berbagai program pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup konektivitas wilayah, layanan irigasi, air minum aman, kawasan perumahan dan permukiman, kualitas lingkungan hidup, persampahan, serta ketahanan bencana. Berdasarkan tabel yang disampaikan, rata-rata capaian program sebesar 105,90% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program-program pendukung telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator program yang belum optimal dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran.

1. Capaian Sasaran 4.2.1 sebesar 94,84% menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah belum sepenuhnya mencapai target, meskipun secara umum pelaksanaan program pendukung telah memberikan kontribusi positif.

Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator persentase jalan mantap mencapai 82,41% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas jalan telah berjalan, namun belum optimal. Kondisi jalan mantap yang belum sepenuhnya sesuai harapan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum tercapainya target indeks konektivitas.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan mencapai 100,1% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan transportasi telah terpenuhi dengan baik dan memberi dukungan positif terhadap kelancaran konektivitas wilayah.

Secara keseluruhan, program-program pendukung pada Sasaran 4.2.1 telah menunjang, namun hasil sasaran belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas dan pemerataan kemantapan jalan agar konektivitas antarwilayah dapat lebih optimal.

2. Capaian Sasaran 4.2.2 sebesar 112,41% menunjukkan bahwa target layanan sistem irigasi kabupaten telah tercapai dan melampaui target. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan infrastruktur irigasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan produksi.

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi yang mencapai 109,4% dan dinilai menunjang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan jaringan irigasi telah dapat menjangkau wilayah irigasi sesuai bahkan melebihi target yang direncanakan.

Dengan demikian, Program Pengelolaan Sumber Daya Air memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sistem irigasi kabupaten. Keberhasilan ini penting untuk dipertahankan karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan kestabilan penyediaan air irigasi.

3. Capaian Sasaran 4.2.3 sebesar 95,64% menunjukkan bahwa akses air minum aman belum sepenuhnya mencapai target, meskipun sudah berada pada kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan air minum aman masih perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman yang mencapai 89,75% dan dinilai menunjang. Capaian ini memperlihatkan bahwa program telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan layanan, namun belum optimal untuk mendorong sasaran mencapai target sepenuhnya.

Secara umum, program pendukung pada Sasaran 4.2.3 masih menunjang, tetapi masih diperlukan peningkatan jangkauan layanan, kualitas sistem penyediaan air minum, dan percepatan perluasan akses air minum aman khususnya pada wilayah yang belum terlayani secara memadai.

4. Capaian Sasaran 4.2.4 sebesar 98,69% menunjukkan bahwa target penanganan kawasan kumuh hampir tercapai, namun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman telah berjalan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya optimal.

Sasaran ini didukung oleh beberapa program, dengan hasil yang bervariasi.

- Program Kawasan Permukiman pada indikator persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani hanya mencapai 0% dan dinilai tidak menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi penanganan langsung terhadap kawasan kumuh skala kecil belum terlaksana, sehingga menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pencapaian sasaran.
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator persentase akses sanitasi layak dan aman mencapai 86,91% dan dinilai menunjang. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan sanitasi dasar masyarakat.
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator persentase perumahan/lingkungan/dusun yang terfasilitasi PSU mencapai 375,73% dan dinilai menunjang. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya dukungan sangat kuat dalam penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.
 - Secara keseluruhan, Sasaran 4.2.4 didukung oleh program-program yang pada umumnya menunjang, terutama melalui sanitasi dan penyediaan PSU. Namun demikian, belum adanya capaian pada Program Kawasan Permukiman menjadi kelemahan utama yang menyebabkan sasaran belum sepenuhnya mencapai target.
5. Capaian Sasaran 4.2.5 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah melampaui target, demikian pula pada aspek layanan persampahan secara umum. Hal ini menunjukkan adanya hasil positif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan layanan persampahan di daerah.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan mencapai 102,99% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan sudah cukup baik dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.
 - Program Pengelolaan Persampahan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya merata. Indikator persentase sampah yang ditangani mencapai 74,77% dan dinilai menunjang, yang berarti program tetap berkontribusi positif terhadap peningkatan layanan persampahan. Namun, indikator persentase pengurangan sampah hanya mencapai 12,91% dan dinilai tidak menunjang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah dari sumber, seperti pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, masih sangat rendah.

Secara keseluruhan, Sasaran 4.2.5 tetap menunjukkan capaian yang sangat baik. Namun, ke depan diperlukan penguatan pada aspek pengurangan sampah agar pengelolaan persampahan tidak hanya berfokus pada penanganan akhir, tetapi juga pada upaya pengendalian dari hulu.

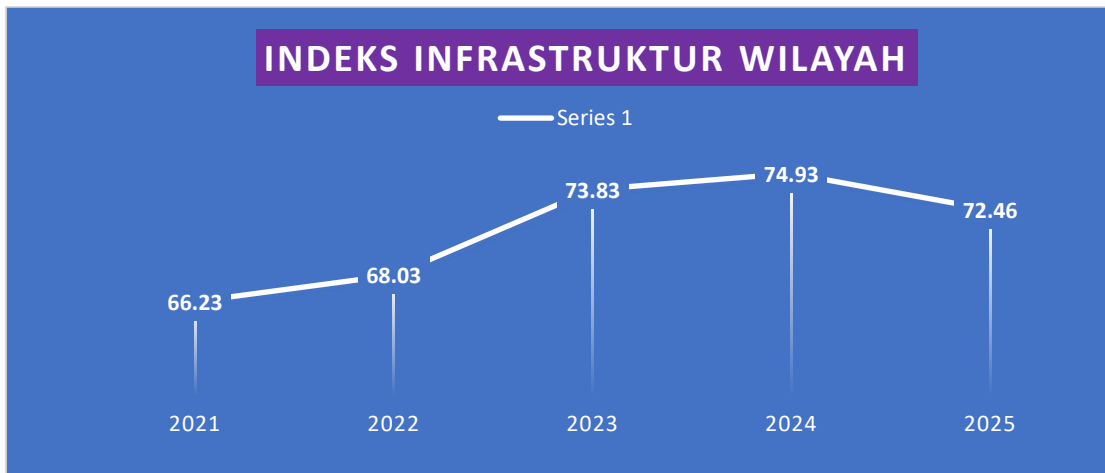
6. Capaian Sasaran 4.2.6 sebesar 94,15% menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan bencana belum sepenuhnya mencapai target, meskipun sebagian besar program pendukung menunjukkan hasil yang baik.
- Program Pengembangan Perumahan menunjukkan kinerja baik, dengan indikator pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus, dan perumahan komersial) mencapai 100% dan indikator persentase rumah korban bencana yang ditangani juga mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan pada pemulihan perumahan akibat bencana telah berjalan sesuai target dan dapat dinilai menunjang.
 - Program Penanggulangan Bencana dengan indikator persentase desa tangguh bencana mencapai 147,68%. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik dalam penguatan kapasitas masyarakat dan desa dalam menghadapi risiko bencana. Walaupun status pada tabel belum dituliskan, berdasarkan capaian tersebut program ini dapat dinilai menunjang.
 - Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban bencana telah berjalan sesuai target. Berdasarkan capaian tersebut, program ini juga dapat dinilai menunjang.
 - Secara umum, program-program pendukung Sasaran 4.2.6 telah memberikan kontribusi yang baik, terutama dalam penanganan pascabencana, pelayanan korban, dan penguatan desa tangguh bencana. Namun demikian, capaian sasaran yang masih di bawah target menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana secara menyeluruh masih perlu diperkuat, terutama pada aspek mitigasi dan pencegahan.

Indeks Infrastruktur wilayah ini ditentukan melalui pengukuran capaian beberapa indikator lainnya sebagai berikut :

- 1) Persentase Jalan kondisi mantap
- 2) Persentase irigasi baik
- 3) Persentase RT yang terakses air minum layak
- 4) Persentase RT sanitasi layak
- 5) Persentase penanganan kawasan kumuh

Lebih lanjut Tren perkembangan indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah dari 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 32 Perkembangan indeks infrastruktur wilayah 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan grafik Indeks Infrastruktur Wilayah selama periode 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2024, meskipun pada 2025 terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2021, Indeks Infrastruktur Wilayah tercatat sebesar 66,23. Pada 2022, indeks tersebut meningkat menjadi 68,03, atau naik sebesar 1,80 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

Selanjutnya pada 2023, indeks kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,83, atau bertambah 5,80 poin dari tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pada 2024, capaian Indeks Infrastruktur Wilayah meningkat lagi menjadi 74,93, atau naik sebesar 1,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini merupakan capaian tertinggi selama periode 2021–2025.

Namun demikian, pada 2025 terjadi sedikit penurunan indeks menjadi 72,46, atau turun sebesar 2,47 poin dibandingkan capaian tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode awal (2021–2022).

III.1.10 III.1.14 SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Konektivitas tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya akses jalan atau sarana transportasi, tetapi juga sebagai keterhubungan yang efektif antara pusat-pusat produksi, distribusi, pelayanan publik, dan permukiman masyarakat.

Upaya peningkatan konektivitas diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten, peningkatan kualitas jembatan, serta pengembangan akses menuju sentra pertanian, perikanan, pariwisata, dan kawasan ekonomi lainnya. Dengan infrastruktur yang semakin baik, mobilitas orang dan barang menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih efisien, serta biaya logistik dapat ditekan. Hal ini secara langsung meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Selain itu, konektivitas yang baik memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. Desa-desa yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat perdagangan. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat meningkat dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.

Peningkatan konektivitas juga berperan sebagai pengungkit (enabler) bagi sektor-sektor strategis. Ketersediaan akses menuju kawasan pertanian dan destinasi wisata, misalnya, menciptakan efek pengganda ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan.

Capaian target terkait dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dalam dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 69 SASARAN 4.2.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Konektivitas	Poin	= $\frac{\sum \text{jaringan jalan}}{\sum \text{jumlah kota}}$	86.50	93,248	99.99	85.18	88,44	98.37	94,84	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

1. **Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Capaian indikator Indeks Konektivitas Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks konektivitas ditetapkan sebesar 93,248 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,44 poin. Dengan demikian, terdapat selisih negatif sebesar 4,81 poin, atau capaian kinerja baru mencapai sekitar 94,84% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum berhasil memenuhi sasaran yang direncanakan.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pengembangan konektivitas wilayah, baik dari aspek infrastruktur transportasi, kualitas jaringan jalan, aksesibilitas antar wilayah, maupun keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta belum optimalnya integrasi antar moda transportasi juga dapat menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator ini.

Secara keseluruhan, meskipun capaian indeks konektivitas menunjukkan nilai yang cukup tinggi, namun masih diperlukan upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, penguatan integrasi antar wilayah, serta optimalisasi perencanaan pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;***

Capaian kinerja indikator Indeks Konektivitas Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya peningkatan kinerja, meskipun belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, baik tahunan maupun jangka menengah.

Pada tahun 2024, target indeks konektivitas ditetapkan sebesar 86,50 poin dengan realisasi sebesar 85,18 poin. Capaian ini masih berada di bawah target dengan selisih 1,32 poin atau sekitar 98,47% dari target, yang menunjukkan bahwa kinerja belum optimal.

Memasuki tahun 2025, target meningkat cukup signifikan menjadi 93,248 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,44 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 4,81 poin atau sekitar 94,84% dari target. Meskipun belum memenuhi target, secara absolut terjadi peningkatan capaian sebesar 3,26 poin dibandingkan tahun 2024 (dari 85,18 menjadi 88,44), yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja konektivitas wilayah.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi***

Namun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 99,99 poin, capaian tahun 2025 masih memiliki selisih yang cukup besar, yaitu 11,55 poin. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja indeks konektivitas menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum mampu mengimbangi kenaikan target yang cukup tinggi. Ke depan, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas jaringan transportasi, serta penguatan integrasi antar wilayah agar capaian indikator ini dapat lebih optimal dan mendekati target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Indeks konektivitas merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor penghambat capaian indikator adalah sbb

- a. Keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas;
- b. Penetapan target yang belum dirasionalkan dengan kapasitas upaya pencapaian kinerja (target jauh lebih besar dari kapasitas);
- c. Kondisi jalan kabupaten/desa yang belum seluruhnya kategori mantap atau rusak.
- d. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.

Alternatif /Solusi peningkatan pencapaian indikator :

- a. Prioritas peningkatan jalan kabupaten menuju sentra produksi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan dasar
- b. Penyelarasan program konektivitas dalam RKPD dengan RPJMD dan RTRW;

- c. Penguatan *money follow program* berbasis prioritas konektivitas wilayah tertinggal;
- d. Penyusunan *roadmap* konektivitas kawasan strategis.

6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*

Tabel III. 70 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.1 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	94,84	93,11	-1,73

Pada sasaran meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan indikator Indeks Konektivitas, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 94,84%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,11%, dengan nilai efisiensi sebesar -1,73% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong relatif efisien, karena penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Capaian kinerja mencapai (94,84%), namun belum mencapai 100%.
- Penyerapan anggaran juga tidak maksimal (93,11%), sehingga terdapat penghematan.
- Secara perbandingan input-output, penggunaan sumber daya masih tergolong efisien, namun efektivitas capaian kinerja perlu ditingkatkan.

7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel III. 71 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	93,248 poin	94,84%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	82,41	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	100,1	Menunjang
Rata-rata capain program							91,25	Tinggi

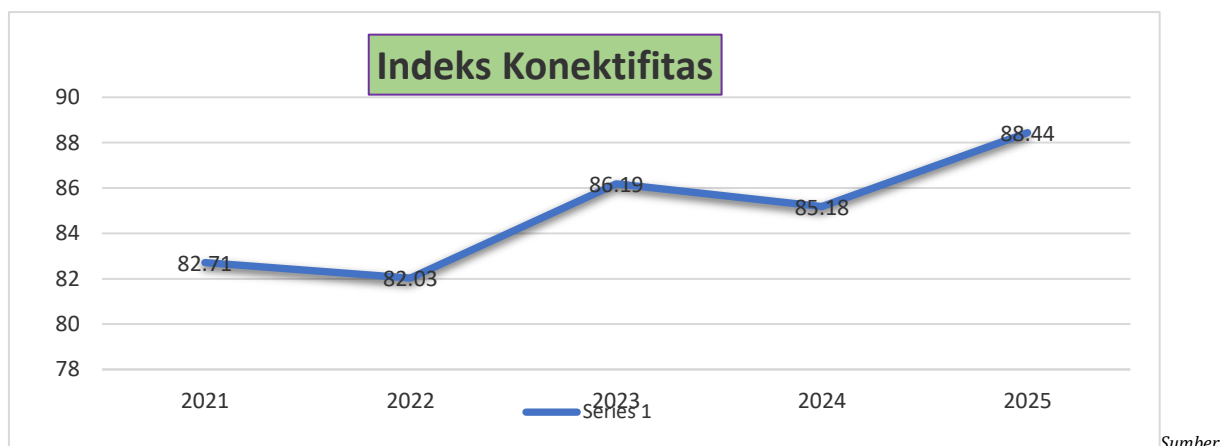
Pada rogram Penyelenggaraan Jalan dengan Indikator “Persentase jalan mantap” dengan capaian sebesar 82,41% dapat dinilai menunjang namun belum optimal terhadap sasaran. Kondisi jalan yang mantap merupakan faktor utama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran mobilitas orang dan baran

Kemudian pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator “Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan” dengan capaian sebesar 100,1% dapat dinilai sangat menunjang terhadap sasaran. Ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya berperan penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

Berdasarkan capaian kedua program tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang pencapaian sasaran, dengan tingkat kontribusi yang berbeda. Program Penyelenggaraan LLAJ berperan sangat menunjang terutama pada aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan Program Penyelenggaraan Jalan menunjang namun masih perlu dioptimalkan pada peningkatan kondisi jalan mantap.

Terkait dengan perkembangan capaian indeks konektifitas dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 33 Perkembangan Indeks Konektifitas 2021-2025



: Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan grafik tersebut maka Indeks Konektivitas selama periode 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks mengalami dinamika dari tahun ke tahun, namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, Indeks Konektivitas tercatat sebesar 82,71. Pada 2022, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 82,03, atau turun sebesar 0,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat keterhubungan wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur maupun mobilitas antarwilayah.

Selanjutnya pada 2023, indeks konektivitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 86,19, atau naik sebesar 4,16 poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah yang didukung oleh pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi. Pada 2024, indeks konektivitas kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 85,18, atau turun sebesar 1,01 poin dibandingkan tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian pada awal periode.

Pada 2025, indeks konektivitas meningkat kembali secara signifikan menjadi 88,44, atau naik sebesar 3,26 poin dibandingkan tahun 2024. Capaian ini merupakan nilai tertinggi selama periode 2021–2025, yang menunjukkan semakin baiknya tingkat keterhubungan wilayah dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.

III.1.11 III.1.15 SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN

Sistem irigasi yang andal dan merata tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan produktivitas, stabilitas hasil panen, serta kesejahteraan petani.

Upaya peningkatan cakupan layanan dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi saluran yang mengalami kerusakan, serta optimalisasi fungsi bendung dan embung sebagai sumber suplai air. Selain itu, normalisasi dan pemeliharaan rutin saluran irigasi menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi air berjalan lancar hingga ke lahan pertanian di hilir.

Dengan bertambahnya luas lahan yang terlayani irigasi teknis maupun setengah teknis, indeks pertanaman (IP) dapat meningkat, memungkinkan petani melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun. Ketersediaan air yang lebih terjamin juga mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan dan meningkatkan kualitas hasil produksi.

Peningkatan cakupan layanan irigasi tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tanaman pangan, tetapi juga mendukung pengembangan hortikultura dan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Melalui komitmen pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan, sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah diharapkan semakin merata, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat terjaga, produktivitas pertanian meningkat, dan kesejahteraan masyarakat petani semakin membaik secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian target terkait cakupan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III. 72 SASARAN 4.2.2
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	=45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	66.10	68,60	71.1	70.58	77,11	106.78	112,41	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. ***Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;***

Capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks kinerja sistem irigasi ditetapkan sebesar 68,60 poin, sementara realisasi yang dicapai mencapai 77,11 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 8,51 poin atau sekitar 112,41% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan pembangunan sistem irigasi berada jauh di atas ekspektasi.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas dan fungsi jaringan irigasi berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat didukung oleh berbagai faktor, seperti rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang optimal, peningkatan tata kelola air, partisipasi aktif petani dalam pengelolaan irigasi, serta dukungan program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah telah dikelola dengan baik dan mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan kinerja ini melalui pemeliharaan rutin, peningkatan efisiensi distribusi air, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;***

Capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif dan signifikan dari tahun ke tahun, serta melampaui target tahunan maupun target RPJMD.

Pada tahun 2024, target indeks sistem irigasi ditetapkan sebesar 66,10 poin, dengan realisasi mencapai 70,58 poin. Capaian ini melampaui target sebesar 4,48 poin atau sekitar 106,78%, menunjukkan kinerja pengelolaan irigasi yang sudah cukup baik.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 68,60 poin, sementara realisasi meningkat menjadi 77,11 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target tahunan sebesar 8,51 poin atau sekitar 112,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 6,53 poin (dari 70,58 menjadi 77,11), yang menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pengelolaan dan efektivitas sistem irigasi.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 71,1 poin, capaian tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah sebesar 6,01 poin, menegaskan bahwa indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan tetapi juga berhasil melampaui sasaran pembangunan jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sangat baik, mendukung produktivitas pertanian, dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Ke depan, pemeliharaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan peningkatan efisiensi distribusi air tetap menjadi fokus utama agar kinerja sistem irigasi tetap optimal.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Indeks kinerja sistem irigasi merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang mendorong pencapaian indikator :

- a. Rehabilitasi dan peningkatan saluran primer, sekunder, dan tersier secara berkala;
- b. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang baik untuk menjaga debit air
- c. Kualitas dan kapasitas jaringan irigasi (saluran primer, sekunder, tersier). terawat dengan baik sehingga tingkat kerusakan atau keberfungsian sistem irigasi menjadi efektif;
- d. Kesadaran petani dalam menjaga dan merawat jaringan irigasi.

Solusi/alternatif untuk peningkatan indeks kinerja sistem irigasi adalah:

- a. Pemeliharaan preventif secara berkala (pembersihan sedimentasi sebelum musim tanam);
- b. Revitalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

- c. Penyesuaian kalender tanam untuk mengurangi konflik distribusi;
- d. Rehabilitasi daerah tangkapan air (konservasi hulu).

6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*

Tabel III. 73 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.2 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	112,41	99,37	-13,04

Pada sasaran meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten dengan indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 112,41%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,37%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,37\% - 112,41\% = -13,04\%$

Nilai efisiensi sebesar -13,04% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ✓ Capaian kinerja melampaui target pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi.
- ✓ Terdapat penghematan anggaran sebesar 13,04% dari total pagu.
- ✓ Output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 112,41% dan tingkat efisiensi -13,04%, maka sasaran meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten dapat dikategorikan sangat efisien, karena mampu menghasilkan capaian yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel III. 74 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.2 Pada Tujuan 4.2 Misi
4

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	68,60 poin	112,41%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	109,4	Menunjang
	Rata-rata capain program						109,4	Sangat tinggi

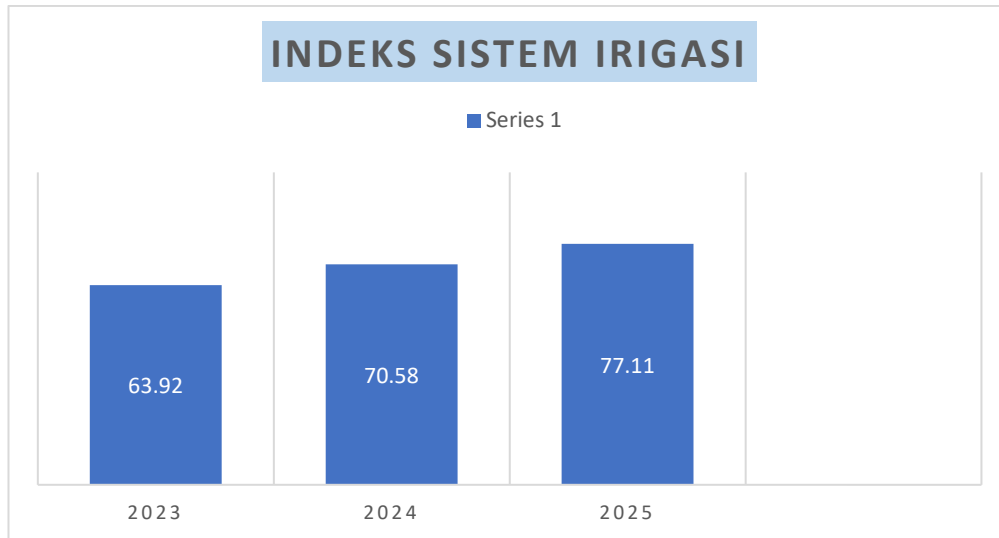
Pada Indikator program yaitu “Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi” dengan capaian sebesar 109,4% dapat dinilai sangat menunjang terhadap pencapaian sasaran. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa pelayanan jaringan irigasi telah menjangkau area yang lebih luas dari yang direncanakan, sehingga meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya air telah berjalan efektif, termasuk dalam hal pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi distribusi air. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, perlu tetap diperhatikan aspek kualitas layanan, seperti kondisi fisik jaringan, efisiensi distribusi, serta keberlanjutan sumber air, agar peningkatan cakupan layanan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja sistem irigasi secara menyeluruh.

Untuk Tren perkembangan indeks kinerja system irigasi Kabupaten Lombok dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar III. 34 Perkembangan indeks kinerja system irigasi 2023-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas terlihat dengan jelas bahwa capaian untuk dua terakhir pada indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. pencapaian ini tentu sekali merupakan kerja keras perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang mebidangi irigasi disamping itu pula kesadaran para petani untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada juga sudah meningkat.

III.1.12 III.1.16 SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN

Peningkatan akses air minum aman merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Air minum yang aman tidak hanya menyangkut ketersediaan secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis sehingga layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Upaya peningkatan akses dilakukan melalui pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) skala kawasan maupun perdesaan, serta optimalisasi sumber air baku yang berkelanjutan. Selain itu, rehabilitasi instalasi pengolahan air dan pengurangan tingkat kebocoran jaringan distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan kontinuitas layanan.

Pemerintah daerah juga mendorong pemerataan layanan hingga ke wilayah perdesaan dan kawasan dengan tingkat akses rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang air bersih dan sanitasi.

Peningkatan akses air minum aman memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta efisiensi pengeluaran rumah tangga. Ketersediaan air yang layak dan terjangkau juga mendukung aktivitas ekonomi, termasuk sektor UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Capaian target untuk meningkatnya akses air minum aman dapat dilihat pada tabel dibawah ;

Tabel III. 75 SASARAN 4.2.3

Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Cakupan layanan air minum	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	79,28	79,78	80,28	78,82	76,30	99,42	95,64	Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target cakupan layanan air minum ditetapkan sebesar 79,78%, sementara realisasi yang dicapai hanya 76,30%. Dengan demikian, terdapat selisih negatif sebesar 3,48 poin atau capaian baru sekitar 95,63% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan air minum di Kabupaten Lombok Tengah masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi sasaran yang direncanakan.

Belum tercapainya target ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan distribusi air, aksesibilitas ke daerah terpencil yang

masih rendah, kapasitas sumber air yang terbatas, serta tantangan operasional dalam pengelolaan layanan air minum.

Secara keseluruhan, meskipun capaian belum memenuhi target, angka 76,30% menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terlayani. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan layanan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas sumber daya air, serta penguatan manajemen penyediaan air minum agar cakupan layanan dapat mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu***

Capaian indikator Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren kinerja yang beragam, dengan capaian tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan belum mencapai target jangka menengah RPJMD.

Pada tahun 2024, target cakupan layanan air minum ditetapkan sebesar 79,28%, dengan realisasi mencapai 78,82%. Capaian ini hampir mendekati target, selisih hanya 0,46 poin atau sekitar 99,42% dari target, menunjukkan bahwa layanan air minum pada tahun tersebut relatif stabil dan mendekati sasaran.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 79,78%, namun realisasi hanya mencapai 76,30%. Dengan demikian, capaian berada di bawah target sebesar 3,48 poin atau sekitar 95,63% dari target, menunjukkan adanya penurunan kinerja dibandingkan tahun 2024, meskipun secara absolut tetap lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023/awal periode.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80,28%, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target sebesar 3,98 poin. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan layanan air minum masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi sasaran pembangunan jangka menengah dan memastikan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar masyarakat telah terlayani, capaian tahun 2025 menunjukkan perlunya percepatan upaya peningkatan layanan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas sumber air,

dan penguatan pengelolaan layanan air minum agar target tahunan maupun RPJMD dapat tercapai secara berkelanjutan.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Cakupan Layanan Air Minum merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor penghambat pencapaian target indikator :

- a. Adanya penyesuaian data penduduk yang berpengaruh terhadap perubahan hasil perhitungan persentase RT yang terlayani air minum oleh perangkat daerah teknis ;
- b. Belum optimalnya peningkatan dan pengukuran kualitas air yang dipasok dari infrastruktur air minum yang dibangun;
- c. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum;
- d. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM.

Solusi/Alternatif untuk mendukung pencapaian target indikator cakupan layanan air minum :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi untuk meningkatkan akses air bersih di daerah yang belum terjangkau;
- b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Edukasi masyarakat tentang konservasi air untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air serta menggalakan reboisasi untuk kelangsungan ekosistem terutama dalam wilayah yang menyediakan mata air;
- d. Peningkatan peran PDAM dalam menyediakan layanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat.
- e. Membuat atau mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan air berkelanjutan, termasuk pengawasan kualitas dan kuantitas air.

6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel III. 76 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.3 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	95,64	99,27	3,63

Pada sasaran meningkatnya akses air minum aman dengan indikator cakupan layanan air minum, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 95,64%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,27%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,27\% - 95,64\% = 3,63\%$

Nilai efisiensi sebesar 3,63% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong kurang efisien, karena penggunaan anggaran relatif tinggi, sementara capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ❖ Capaian kinerja belum optimal baru mencapai 95,64%.
- ❖ Penyerapan anggaran cukup tinggi 99,27%.
- ❖ Terdapat ketidakseimbangan antara input dan output, di mana anggaran hampir habis namun hasil belum maksimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 95,64% dan tingkat efisiensi 3,63%, maka sasaran meningkatnya akses air minum aman dapat dikategorikan kurang efisien, karena penggunaan anggaran yang tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan capaian kinerja yang optimal.

7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel III. 77 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.3 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	79,78%	95,64%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	89,75	Menunjang
Rata-rata capain program							89,75	Tinggi

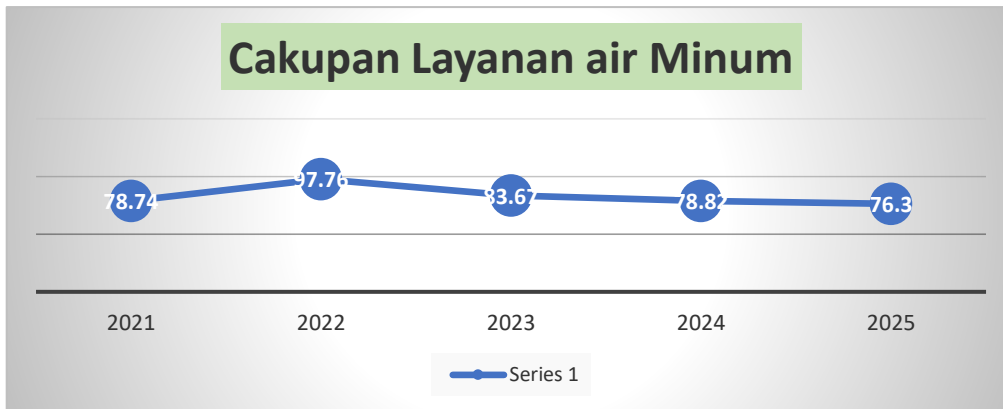
Capaian program sebesar 89,75% menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program berada pada kategori menunjang namun belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah terlayani akses air minum, namun masih terdapat kelompok atau wilayah yang belum mendapatkan layanan secara memadai.

Dari sisi kontribusi terhadap sasaran, capaian ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses air minum aman, baik melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, maupun perbaikan kualitas layanan. Namun demikian, capaian yang belum mencapai target optimal menunjukkan bahwa upaya perluasan layanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, maupun kapasitas pengelolaan.

Dengan demikian, Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dapat dinilai telah menunjang pencapaian sasaran, tetapi kontribusinya masih perlu ditingkatkan agar cakupan layanan air minum dapat lebih merata dan menyeluruh.

Perkembangan pencapaian indikator cakupan layanan air minum ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar III. 35 Perkembangan Cakupan layanan air minum 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat kondisi perkembangan untuk cakupan layanan air minum terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. hal ini dipegaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari pengguna atau masyarakat yang dilayani volumenya semakin banyak kemudian dari faktor alam sebagai penyedia pasokan air mengalami penyusutan debit maupun ketersediaanya.

III.1.13 III.1.17 SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permukiman yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh kondisi fisik bangunan yang memadai, tetapi juga tersedianya infrastruktur dasar, akses pelayanan publik, serta lingkungan yang tertata dan nyaman.

Upaya peningkatan kualitas kawasan dilakukan melalui penataan dan rehabilitasi permukiman, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Selain aspek fisik, pemerintah daerah juga mendorong penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi rumah tangga menjadi bagian integral dalam pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

Penataan kawasan perumahan dan permukiman juga diarahkan agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga pertumbuhan permukiman dapat terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir, kepadatan berlebih, maupun degradasi lahan.

Untuk melihat capaian indikator terkait penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 78 SASARAN 4.2.4
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha/tahun	= Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	775,37	765,37	755,37	751,07	775,37	103,13	98,69	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja dalam menurunkan kawasan kumuh belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2025, target luasan kawasan kumuh yang tersisa ditetapkan sebesar 765,37 hektar, sementara realisasi tercatat sebesar 775,37 hektar. Dengan catatan bahwa semakin kecil volume realisasi, semakin baik dan berhasil, capaian tahun 2025 ini menunjukkan bahwa luasan kumuh yang tersisa masih lebih tinggi dibanding target, sehingga kinerja penanganan belum optimal. Terdapat selisih 10 hektar lebih tinggi dari target, yang menunjukkan perlunya percepatan upaya penanganan.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan lahan untuk revitalisasi, hambatan teknis dalam penataan kawasan, keterbatasan anggaran, atau koordinasi antar pihak terkait yang belum maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun masih berada di atas target, capaian ini menegaskan pentingnya strategi lanjutan dalam menurunkan luasan kawasan kumuh. Upaya yang perlu diperkuat meliputi peningkatan revitalisasi kawasan permukiman, penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pengawasan pembangunan permukiman agar target tahunan dapat tercapai dan kualitas permukiman meningkat secara signifikan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;***

Capaian indikator Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, dengan catatan bahwa semakin kecil luasan kawasan kumuh yang tersisa, semakin baik pencapaian indikator.

Pada tahun 2024, target penanganan kawasan kumuh ditetapkan sebesar 775,37 ha, dengan realisasi mencapai 751,07 ha. Mengingat prinsip bahwa semakin kecil luasan kumuh yang tersisa semakin baik, realisasi 751,07 ha menunjukkan bahwa kinerja penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 cukup baik karena berhasil menurunkan volume kawasan kumuh dibanding target.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 765,37 ha, sementara realisasi mencapai 775,37 ha. Dalam konteks indikator ini, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa luasan kumuh yang tersisa lebih besar dari target, sehingga kinerja relatif menurun dibanding target tahunan, meskipun secara absolut masih sejalan dengan upaya pengendalian kawasan kumuh.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 755,37 ha, capaian tahun 2025 masih berada di atas target jangka menengah. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan upaya tambahan untuk menurunkan luasan kawasan kumuh sesuai target RPJMD.

Secara keseluruhan, indikator luasan kawasan kumuh menunjukkan bahwa kinerja penanganan masih membutuhkan percepatan dan peningkatan efektivitas program, termasuk melalui revitalisasi kawasan, penguatan partisipasi masyarakat, pengelolaan lahan, dan pengawasan pembangunan permukiman agar target jangka menengah dan prinsip “semakin kecil semakin baik” dapat tercapai secara optimal.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;***

Luasan penanganan Kawasan kumuh merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang menyebabkan target tidak tercapai adalah sbb :

- a. Alokasi APBD untuk penataan kawasan permukiman masih terbatas dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang harus ditangani;
- b. Ketergantungan pada dukungan program pemerintah pusat, Provinsi relatif masih besar untuk penataan kawasan kumuh;
- c. Anggaran penataan kawasan kumuh relatif tinggi karena membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar sekaligus.
- d. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan kawasan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekumuhan dan jumlah penduduk terdampak;
- b. Sinkronisasi program daerah dengan program pemerintah pusat, misalnya melalui program penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
- c. Penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar tidak muncul kawasan kumuh baru;
- d. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR.

1. ***Anlisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian indikator Indeks Gini tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional.

Pada tahun 2025, Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 0,344, sedangkan Indeks Gini nasional sebesar 0,363. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 0,019 poin, di mana tingkat ketimpangan di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional. Meskipun demikian, nilai Indeks Gini yang masih berada pada kisaran di atas 0,3 menunjukkan bahwa

ketimpangan pendapatan tetap perlu menjadi perhatian, karena masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam pengendalian ketimpangan di tingkat daerah jika dibandingkan dengan nasional. Namun demikian, upaya penurunan ketimpangan tetap perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemerataan akses ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat, agar distribusi pendapatan semakin merata dan berkelanjutan.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator indeks gini :

1. Sulitnya akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha;
2. Bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran;
3. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi;
4. Sektor ekonomi tertentu. seperti pertanian berkembang lebih pesat dibanding sektor lain seperti manufaktur. pelayanan jasa. pariwisata dll.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator :

1. Memperketat pengawasan dalam pemberian subsidi seperti subsidi pendidikan. kesehatan. dan perumahan bagi masyarakat Lombok Tengah sehingga tepat sasaran;
2. Pemberian bantuan langsung tunai yang berbasis data yang akurat agar tepat sasaran;
3. Mengkaji ulang penerapan upah minimum yang layak agar pekerja mendapatkan pendapatan yang cukup;
4. Menarik minat investor agar menanamkan modalnya untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

**Tabel III.44 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tujuan 4.1
Indikator Indeks Gini**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Indeks Gini	99,71	99,70	-0,01

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator Indeks Gini sebesar 99,71%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,70%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -0,01%.

Nilai efisiensi sebesar -0,01% menunjukkan bahwa capaian kinerja dan penyerapan anggaran berada pada kondisi yang sangat seimbang. Capaian kinerja hampir mencapai target, dan penggunaan anggaran juga hampir sepenuhnya terserap sesuai perencanaan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada indikator Indeks Gini tergolong efisien dan proporsional, di mana alokasi anggaran telah digunakan secara optimal dan tepat sasaran untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target.

Efisiensi yang sangat kecil (mendekati nol) menunjukkan bahwa:

- Perencanaan anggaran sangat akurat, sesuai dengan kebutuhan riil program.
- Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, tanpa kelebihan maupun kekurangan penggunaan anggaran yang signifikan.
- Hubungan antara input (anggaran) dan output/outcome (penurunan ketimpangan) berada dalam kondisi ideal.

Namun demikian, capaian kinerja yang sedikit di bawah 100% (99,71%) menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya sangat kecil dan secara umum masih dalam kategori baik.

Pada Tujuan 4.1 indikator Indeks Gini, capaian kinerja (99,71%) sedikit lebih rendah dibandingkan penyerapan anggaran (99,70%), namun selisihnya sangat kecil (-0,01%), sehingga secara praktis masih dapat dikategorikan efisien dan seimbang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah optimal dan terkendali, tanpa adanya pemborosan maupun kekurangan yang signifikan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Tabel III. 45 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.1 Indikator Indeks Gini

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Indeks Gini						
	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Rata-rata pengeluaran perkapita	10,06 jt/Rp./tahun	117,99%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang
	Rata-rata capain program						100	Sangat tinggi

Pada Tujuan 4.1: *Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan Indikator tujuan:* Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya melalui peningkatan daya beli dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan data yang tersedia, dukungan terhadap pencapaian indikator Indeks Gini dalam Tujuan 4.1 ditopang oleh program pada sasaran **meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha**, khususnya melalui indikator **rata-rata pengeluaran per kapita** dengan target sebesar **Rp10,06 juta/kapita/tahun** dan capaian **117,99%**. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui target, yang mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat.

Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita tersebut didukung oleh **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan indikator **persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** yang mencapai **100%** dan dinilai

menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan telah mendapatkan intervensi yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.

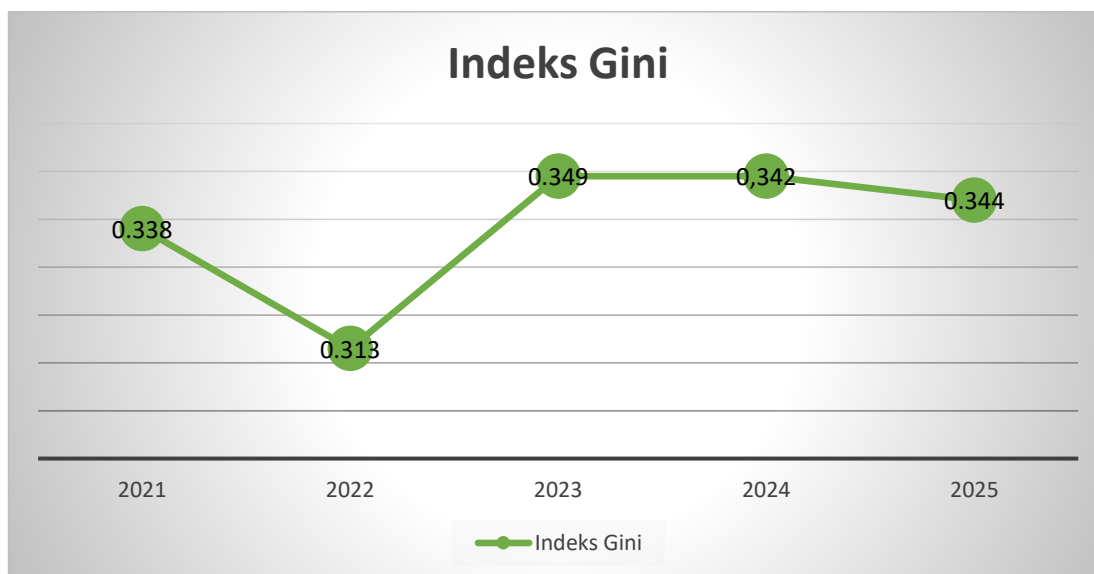
Program Rehabilitasi Sosial memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan, karena intervensinya secara langsung menasar kelompok masyarakat yang berada pada kondisi rentan dan berpenghasilan rendah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok tersebut, kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi dapat dikurangi, sehingga berdampak positif terhadap perbaikan nilai Indeks Gini.

Dengan capaian program sebesar **100%** dan kategori **sangat tinggi**, dapat disimpulkan bahwa program pendukung telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Gini. Meskipun dalam tabel hanya terdapat satu program utama yang ditampilkan, kontribusi program ini cukup signifikan karena menasar aspek distribusi kesejahteraan secara langsung.

Secara keseluruhan, program penunjang Tujuan 4.1 pada indikator Indeks Gini telah **menunjang dengan baik** pencapaian tujuan, terutama melalui peningkatan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Capaian rata-rata pengeluaran per kapita yang melampaui target serta terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi telah berjalan efektif.

Tren perkembangan indeks gini Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021-2025 sesuai gambar berikut:

Gambar III. 36 Indeks Gini Lombok Tengah tahun 2021-2025



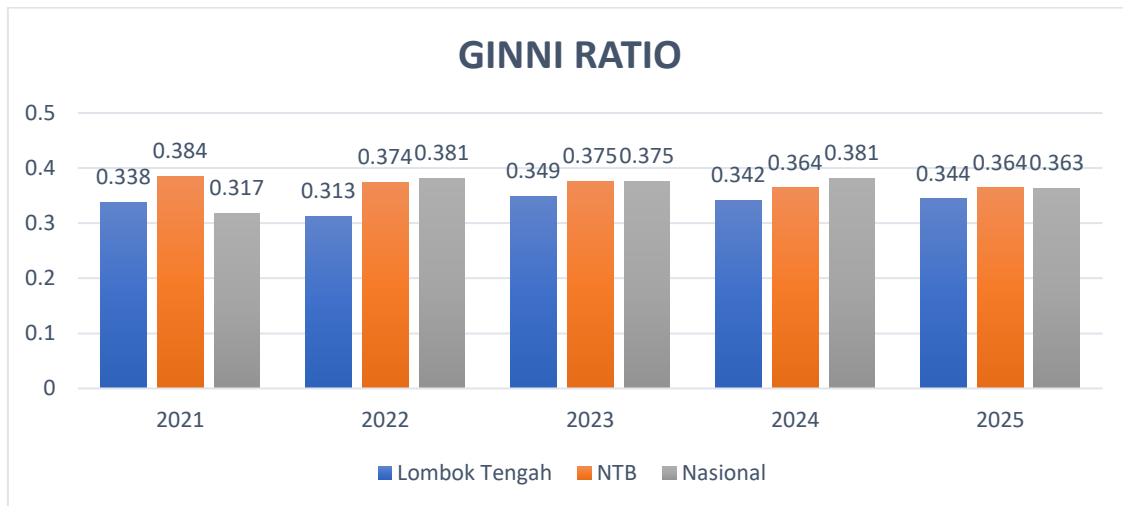
Sumber

: Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks gini di Lombok Tengah bergerak fluktuatif artinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan pada masyarakat Lombok Tengah masih terjadi sehingga pemerataan itu harus diupayakan lebih terukur dan terintegrasi dalam semua aspek yang akan mendorong pengendalian ketimpangan dimaksud.

Komparasi indeks Gini Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB sesuai tabel berikut :

Gambar III. 37 Perbandingan tren indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Nasional tahun 2021-2025



Sumber : BPS NTB Tahun 2024

Berdasarkan grafik Indeks Gini (Gini Ratio) tahun 2021–2025, terlihat perbandingan tingkat ketimpangan pendapatan antara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan tingkat nasional.

Pada tahun 2021, Indeks Gini Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 0,338. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Provinsi NTB yang mencapai 0,384, namun lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, tetapi masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional.

Memasuki tahun 2022, Indeks Gini Lombok Tengah menurun menjadi 0,313, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Pada tahun yang sama, NTB berada pada angka 0,374, sedangkan nasional sebesar 0,381. Dengan demikian, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah merupakan yang terendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, Indeks Gini Lombok Tengah meningkat menjadi 0,349, sementara NTB sebesar 0,375 dan nasional juga sebesar 0,375. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya, namun Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Selanjutnya pada tahun 2024, Indeks Gini Lombok Tengah kembali menurun menjadi 0,342. Sementara itu NTB berada pada angka 0,364 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2025, Indeks Gini Lombok Tengah sedikit meningkat menjadi 0,344, sedangkan NTB mencapai 0,364 dan nasional sebesar 0,363. Secara komparatif, ketimpangan pendapatan di Lombok Tengah tetap lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

D. ANGKA KEMISKINAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target angka kemiskinan berada pada kisaran 11,98%–12,31%, yang mencerminkan upaya penurunan kemiskinan secara bertahap. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 10,68%, yang berarti berada di bawah batas bawah target. Hal ini menunjukkan capaian yang lebih baik dari yang direncanakan, dengan selisih sebesar 1,30 poin persentase dari batas bawah target dan 1,63 poin persentase dari batas atas target.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sangat efektif, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan melebihi ekspektasi. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, efektivitas program perlindungan sosial, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, target angka kemiskinan ditetapkan sebesar 12,4% dengan realisasi mencapai 12,07%. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,33 poin persentase, yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan pada kisaran 11,98%–12,31%. Realisasi yang dicapai sebesar 10,68%, yang berarti berada jauh di bawah batas bawah target.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target secara signifikan, dengan selisih sebesar 1,30 poin persentase dari batas bawah target dan 1,63 poin persentase dari batas atas target. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,39 poin persentase (dari 12,07% menjadi 10,68%), yang menunjukkan perbaikan yang cukup besar dan progresif.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 11,72%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sebesar 1,04 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan, memastikan ketepatan sasaran program, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian angka kemiskinan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah masih berada di atas rata-rata nasional.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 10,68%, sedangkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 2,43 poin persentase, yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di Lombok Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Lombok Tengah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah, tingkat produktivitas masyarakat, akses terhadap lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan yang belum optimal.

Namun demikian, capaian penurunan kemiskinan hingga 10,68% tetap menunjukkan progres yang positif dan mencerminkan efektivitas berbagai program penanggulangan

kemiskinan yang telah dilaksanakan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, seperti penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja, agar kesenjangan dengan capaian nasional dapat semakin diperkecil.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendorong pencapaian target indikator :

- e. Pertumbuhan ekonomi yang merata. tidak hanya terpusat di kota tetapi juga di desa;
- f. Pelatihan keterampilan dan vokasi bagi calon tenaga kerja sehingga lebih kompetitif dan mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak;
- g. Pemerintah Lombok Tengah telah membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas;
- h. Pemerintah memberikan beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan pencapaian target indikator :

- f. (BLT) kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- g. Distribusi sembako dan subsidi pangan bagi masyarakat kurang mampu;
- h. Kredit usaha mikro tanpa jaminan untuk masyarakat miskin agar bisa memulai usaha;
- i. Memberikan pendampingan bisnis cepat untuk membantu wirausaha kecil berkembang;
- j. Memberikan atau meningkatkan volume program kegiatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 46 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tujuan 4.1 Indikator Angka Kemiskinan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	110,85	99,36	-11.49

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator angka kemiskinan sebesar 110,85%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,36%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -11,49%.

Nilai efisiensi sebesar -11,49% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target secara signifikan, sementara penggunaan anggaran relatif lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada indikator angka kemiskinan tergolong efisien.

Capaian kinerja yang melebihi target mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan lebih baik dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program yang dilaksanakan, baik melalui peningkatan kesempatan kerja, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah berjalan efektif.

Efisiensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efektivitas program pengentasan kemiskinan, yang tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- Sinergi antara program ekonomi dan sosial, seperti peningkatan investasi, pelatihan tenaga kerja, serta bantuan sosial yang saling melengkapi.
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian outcome dapat diraih tanpa harus menggunakan seluruh anggaran.
- Dampak positif pertumbuhan ekonomi daerah, yang turut meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada Tujuan 4.1 indikator angka kemiskinan, capaian kinerja (110,85%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (99,36%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang cukup besar menunjukkan adanya pemanfaatan anggaran yang optimal, dimana hasil yang dicapai lebih tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel III. 47 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.1 Indikator Angka Kemiskinan

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan							
S4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,57-2,63 %	72,24%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMA	177,66	Menunjang	
						Nilai investasi PMDN	859,54	Menunjang	
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	302,08	Menunjang	
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	108,7	Menunjang	
	Rata-rata capain program							361,995	Sangat tinggi

Tujuan 4.1: *Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah* dengan Indikator tujuan: Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator strategis yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penurunan angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja agar mampu terserap dalam aktivitas ekonomi produktif.

Berdasarkan data yang tersedia, pencapaian indikator angka kemiskinan pada Tujuan 4.1 didukung oleh program pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha,

khususnya melalui indikator tingkat pengangguran terbuka dengan target 2,57–2,63% dan capaian 72,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran belum mencapai target, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan pengangguran sebagai salah satu faktor utama pengurangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian, program-program pendukung pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 361,995% dan seluruhnya berstatus menunjang. Hal ini menunjukkan bahwa secara programatik, intervensi yang dilakukan sudah kuat, meskipun dampaknya terhadap indikator makro masih belum optimal.

Ketika kita melihat program-program penunjang Tujuan 4.1 ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan indikator nilai investasi PMA sebesar 177,66% dan nilai investasi PMDN sebesar 859,54%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap daerah serta berkembangnya aktivitas ekonomi. Secara teoritis, peningkatan investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Namun, tingginya investasi ini belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, yang tercermin dari belum optimalnya capaian tingkat pengangguran.
2. Program Promosi Penanaman Modal juga menunjukkan capaian sangat tinggi sebesar 302,08% pada indikator jumlah proyek investasi baru di atas Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi baru. Program ini berperan penting dalam memperluas basis ekonomi daerah dan membuka peluang kerja, sehingga secara tidak langsung mendukung pengurangan kemiskinan.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mencapai 108,7% pada indikator persentase tenaga kerja yang terlatih. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja telah berjalan dengan baik. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, program-program tersebut memiliki keterkaitan yang kuat terhadap penurunan angka kemiskinan melalui tiga jalur utama:

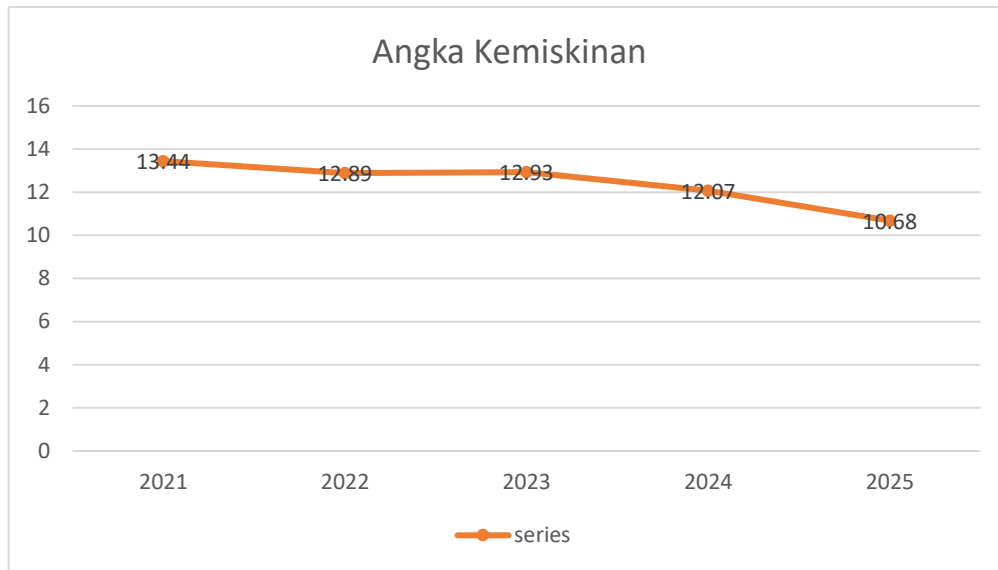
1. Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.
2. Perluasan kesempatan usaha melalui promosi penanaman modal.
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan produktivitas.

Meskipun demikian, belum optimalnya capaian tingkat pengangguran menunjukkan bahwa manfaat dari program-program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Hal ini dapat disebabkan oleh

adanya kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja, atau distribusi peluang kerja yang belum merata.

Tren perkembangan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III. 38 Penurunan angka kemiskinan tahun 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Untuk indikator kemiskinan ini perkembangannya dari tahun 2021-2025 terlihat bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2023 sempat terkoreksi naik sekitar 0,04 % dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan segenap daya Upaya menurunkan angka kemiskinan level yang cukup signifikan dimana menoreh hasil sebesar 12.7% dan di tahun 2025 turun lagi ke angka 10,68 %.

Untuk Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 48 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Maret 2017-2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	369.650	142,14	15,31
2018	386.676	130	13,87
2019	404.633	128,82	13,63
2020	421.439	128,1	13,44
2021	447.200	131,94	13,44
2022	480.657	128	12,89
2023	520.852	129,74	12,93
2024	594.400	122,32	12,07
2025	569.910	109,25	10,68

Sumber : BPS Lombok Tengah dalam Angka 2026

Berdasarkan data pada table diatas terlihat bahwa, kondisi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya perbaikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp594.400 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 122.232 jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 12,07 persen dari total penduduk.

Selanjutnya pada tahun 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp569.910 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 109.925 jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 10,68 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12.307 jiwa, serta penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,39 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta efektivitas berbagai program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terhadap indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 49 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, 2017-2025

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2017	2,81	0,75
2018	2,31	0,54
2019	2,33	0,25
2020	1,42	0,26
2021	1,69	0,35
2022	2,01	0,44
2023	2,12	0,52
2024	1,56	0,27
2025	1,55	0,31

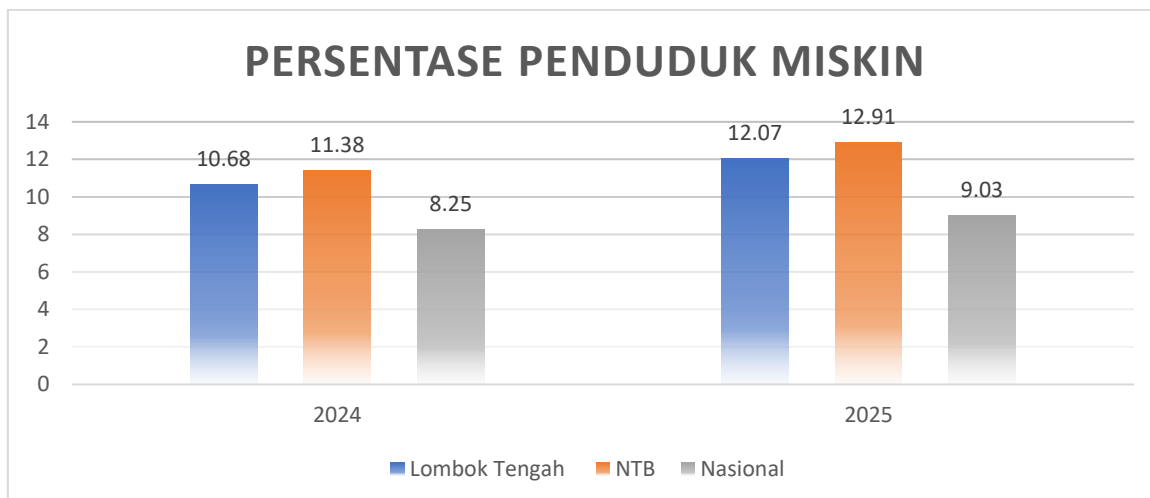
Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka 2026

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,56, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 1,55. Penurunan sebesar 0,01 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin, dimana rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan cenderung semakin mengecil.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,27, kemudian meningkat menjadi 0,31 pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 0,04 poin tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok miskin lainnya.

Secara umum, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan dinamika kondisi kemiskinan yang berbeda. Di satu sisi, kedalaman kemiskinan mengalami sedikit perbaikan, yang berarti rata-rata kondisi ekonomi masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Namun di sisi lain, keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin masih perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Gambar III. 39 Komparasi persentase penduduk miskin di Lombok Tengah, NTB dan Nasional dua tahun terakhir



Sumber BPS NTB tahun 2025

Berdasarkan grafik persentase penduduk miskin, terlihat adanya perbandingan kondisi antara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan tingkat nasional pada tahun 2024–2025.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 10,68%. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTB yang mencapai 11,38%, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, tetapi masih berada di atas capaian nasional.

Memasuki tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah meningkat menjadi 12,07% atau mengalami kenaikan sebesar 1,39 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Provinsi NTB meningkat menjadi 12,91% dari sebelumnya 11,38% (naik 1,53 poin persentase), sedangkan nasional meningkat menjadi 9,03% dari 8,25% (naik 0,78 poin persentase).

Secara komparatif pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTB, namun tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, meskipun posisi Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan provinsi, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat agar dapat mendekati bahkan melampaui capaian nasional.

III.1.14 III.1.11 SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA. LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Meningkatnya kesempatan kerja, perluasan lapangan usaha, dan penguatan perlindungan sosial merupakan fondasi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan yang produktif, layak, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Tengah, perluasan kesempatan kerja didorong melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Penguatan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pendampingan usaha menjadi strategi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.

Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sehingga diharapkan link and match dengan dunia usaha dan industri. Langkah ini bertujuan agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan mampu mengisi peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun luar daerah.

Untuk mengetahui tingkat kesempatan kerja serta lapangan dan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 50 Capaian indikaor Meningkatnya Kesempatan Kerja. Lapangan Usaha Dan Perlindungan Sosial

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100$	2,5 2	2,57- 2,63	2.28	2.55	3,36	98,81	72,24	Tinggi
Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah /Tahun	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{2024}) - \ln(\text{pengeluaran}_{2025})}{\ln(\text{pengeluaran}_{2024}) - \ln(\text{pengeluaran}_{2023})}$	10,03	10,06	10,09	11,53	11,87	114,95	117,99	Sangat tinggi

Sumber: Bapperida Kab. Lombok Tengah

C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target TPT berada pada kisaran 2,57%–2,63%, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menekan tingkat pengangguran. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar 3,36%, yang berarti berada di atas batas atas target. Terdapat selisih sebesar 0,73 poin persentase dari batas atas target, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari yang diharapkan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal, sehingga jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor penyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa indikator TPT masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang lebih intensif.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya penurunan kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, serta masih belum mencapai target jangka menengah daerah.

Pada tahun 2024, target TPT ditetapkan sebesar 2,52% dengan realisasi sebesar 2,55%. Capaian ini sedikit berada di atas target dengan selisih 0,03 poin persentase, namun secara umum masih mendekati target yang direncanakan dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif terkendali.

Memasuki tahun 2025, target TPT ditetapkan pada kisaran 2,57%–2,63%. Namun, realisasi yang dicapai sebesar 3,36%, yang berarti melampaui batas atas target dengan selisih sebesar 0,73 poin persentase. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 0,81 poin persentase (dari 2,55% menjadi 3,36%), yang menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,28%, capaian tahun 2025 masih berada jauh di atas target tersebut, dengan selisih sebesar 1,08 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa indikator TPT belum berada pada jalur yang diharapkan untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan yang cukup besar pada tahun 2025, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kesesuaian kompetensi tenaga kerja. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, seperti peningkatan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, pengembangan sektor-sektor padat karya, serta peningkatan investasi daerah, agar tingkat pengangguran dapat ditekan dan mendekati target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.

Pada tahun 2025, TPT Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,36%, sedangkan TPT nasional sebesar 4,74%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,38 poin persentase, di mana tingkat pengangguran di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Jika dilihat secara persentase, TPT Kabupaten Lombok Tengah lebih rendah sekitar 29,11% dibandingkan TPT nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif, penyerapan tenaga kerja di Lombok Tengah lebih baik dibandingkan kondisi nasional.

Meskipun demikian, capaian TPT sebesar 3,36% tetap perlu menjadi perhatian karena masih berada di atas target daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun secara komparatif lebih baik dari nasional, upaya penurunan tingkat pengangguran tetap perlu diperkuat melalui peningkatan penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

5. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

- a. Kurangnya dorongan untuk kewirausahaan dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Minimnya jumlah wahana pendidikan dan pelatihan keterampilan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah sehingga dapat membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
- c. Kurangnya jumlah/nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja.
- d. Belum optimal pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah sehingga menghambat pertumbuhan wirausaha baru

Solusi/Alternatif untuk eninhgkatan pencapaian indiator :

- a. Memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha bagi wirausaha muda dan pelaku UMKM;
 - b. Mengadakan pelatihan bisnis yang berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.
 - c. Meningkatkan program infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal untuk menyerap tenaga kerja. seperti pembangunan jalan desa dan irigasi (padat karya);
 - d. Menyederhanakan birokrasi perizinan usaha agar lebih banyak bisnis bisa berkembang.
6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*

Tabel III. 51 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	72,24	99,36	27,12

Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), capaian kinerja pada tahun berjalan sebesar 72,24%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,36%. tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh: $99,36\% - 72,24\% = 27,12\%$.

Nilai efisiensi sebesar 27,12% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong tidak efisien, karena penggunaan anggaran hampir seluruhnya terserap, namun capaian kinerja masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa :

- Capaian indikator TPT belum optimal (baru mencapai 72,24% dari target).
- Penyerapan anggaran sangat tinggi (99,36%), namun belum mampu mendorong hasil kinerja yang sebanding.
- Terdapat kesenjangan antara input (anggaran) dan output (kinerja) yang cukup signifikan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 52 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja Sasaran 4.1.1 Tujuan 4 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,57-2,63 %	72,24%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMA	177,66	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
	lapangan usaha								
						Nilai investasi PMDN	859,54	Menunjang	
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	302,08	Menunjang	
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	108,7	Menunjang	
	Rata-rata capain program							361,99	Sangat tinggi

Untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator sebagai berikut

:

- ✓ Indikator “Nilai investasi PMA” dengan capaian 177,66% dapat dinilai sangat menunjang, karena peningkatan investasi asing akan mendorong pembukaan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
- ✓ Indikator “Nilai investasi PMDN” dengan capaian 859,54% menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan dominan dalam menunjang sasaran. Lonjakan investasi dalam negeri ini mengindikasikan ekspansi usaha yang signifikan, sehingga berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru secara masif.

Sedangkan untuk Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator “Jumlah proyek investasi baru di atas 1 miliar” dengan capaian 302,08% dapat dikategorikan sangat menunjang. Banyaknya proyek investasi baru menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi riil yang secara langsung membuka kesempatan kerja di berbagai sektor.

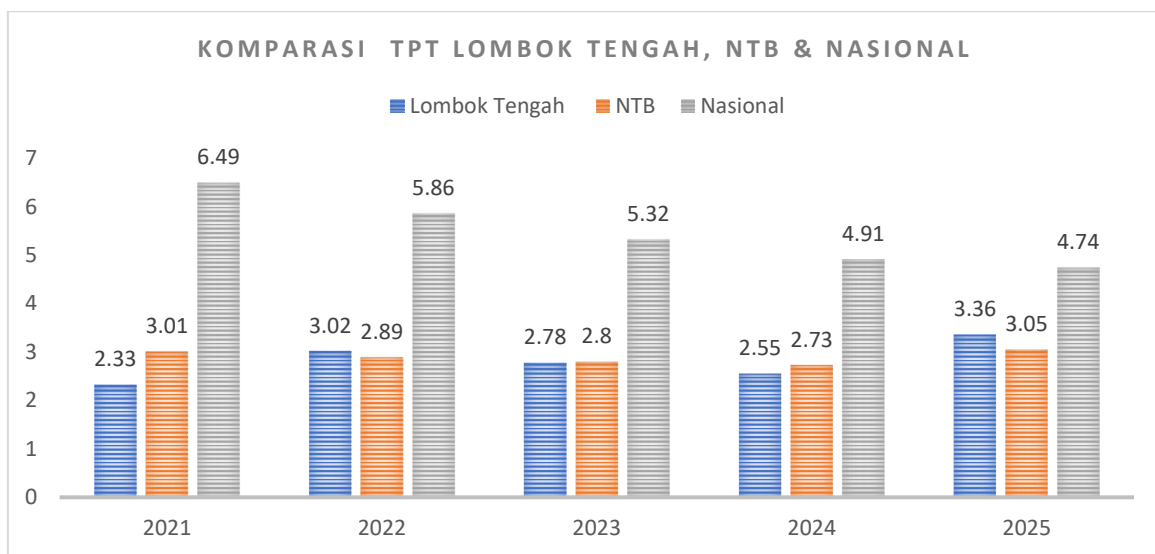
Selanjutnya untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Indikator “Persentase tenaga kerja yang terlatih” dengan capaian 108,7% dinilai sangat menunjang terhadap sasaran. Peningkatan kompetensi tenaga kerja akan memperbesar peluang masyarakat untuk terserap di pasar kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal.

Berdasarkan capaian seluruh indikator program, dapat disimpulkan bahwa program-program pendukung telah sangat menunjang pencapaian sasaran. Program yang berkaitan dengan investasi menjadi faktor paling dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru,

sedangkan program pelatihan tenaga kerja berperan dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Untuk melihat komparasi Tren Perkembangan penurunan TPT Kabupaten Lombok Tengah, NTB dan Nasional untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar III. 40 Komparasi perkembangan TPT di Lombok Tengah, NTB dan Nasional tahun 2021-2025



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS NTB 2025 dan Bapperida Lombok Tengah (data diolah)

Berdasarkan data yang tersebut diatas, Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun secara umum membaik, baik di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun pada tingkat nasional. Pada tahun 2021, TPT Lombok Tengah tercatat sebesar 2,33 persen, lebih rendah dibandingkan NTB sebesar 3,01 persen dan jauh di bawah angka nasional yang mencapai 6,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Lombok Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Pada tahun 2022, TPT Lombok Tengah meningkat menjadi 3,02 persen, sedangkan NTB justru menurun menjadi 2,89 persen dan nasional juga turun menjadi 5,86 persen. Kenaikan TPT di Lombok Tengah pada tahun ini mengindikasikan adanya tekanan pada pasar kerja daerah, sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi, meskipun masih tetap jauh lebih rendah dari tingkat nasional.

Selanjutnya pada tahun 2023, TPT Lombok Tengah menurun menjadi 2,78 persen, hampir sama dengan NTB yang sebesar 2,80 persen, sementara nasional masih berada pada angka 5,32

persen. Penurunan ini menunjukkan mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Lombok Tengah setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, TPT Lombok Tengah kembali menurun menjadi 2,55 persen, lebih rendah dibandingkan NTB yang sebesar 2,73 persen dan tetap jauh di bawah nasional yang mencapai 4,91 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar kerja di Lombok Tengah semakin membaik, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Namun pada tahun 2025, TPT Lombok Tengah kembali meningkat menjadi 3,36 persen. Meskipun demikian, angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 3,05 persen, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan nasional yang berada pada 4,74 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ketenagakerjaan Lombok Tengah relatif masih lebih baik daripada nasional, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian agar peningkatan pengangguran tidak berlanjut.

Secara keseluruhan, tren perkembangan TPT Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, bahkan pada sebagian besar tahun juga lebih baik dibandingkan Provinsi NTB. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2025, secara umum tingkat pengangguran di Lombok Tengah masih berada pada level yang cukup terkendali.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 820.546 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 79,16 persen tergolong angkatan kerja, yang dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingginya TPAK mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Secara sederhana, TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia produktif. Pada 2024, TPAK laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan, kondisi yang kerap dipengaruhi oleh norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam urusan rumah tangga.

Untuk mengetahui kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Lombok Tengah berdasarkan hasil sensus BPS sesuai tabel berikut :

Tabel III. 53 TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (persen)

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia 15 tahun ke atas (jiwa)	411.390	409.325	820.546

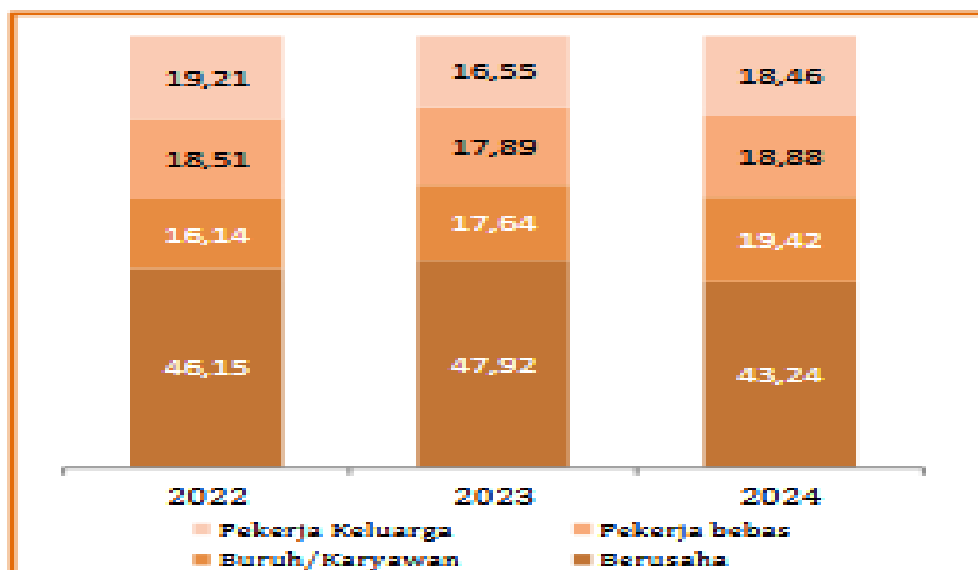
Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja			
Bekerja	96,81	98,24	97,45
Pengangguran	3,19	1,76	2,55
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	47,66	16,19	26,12
Mengurus Rumah Tangga	26,17	78,85	62,23
Lainnya	26,16	4,97	11,66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	86,88	70,12	79,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,19	1,76	2,55

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 (data 2025 belum di publis)

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Untuk angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat seai tabel berikut :

Gambar III. 41 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2022-2024

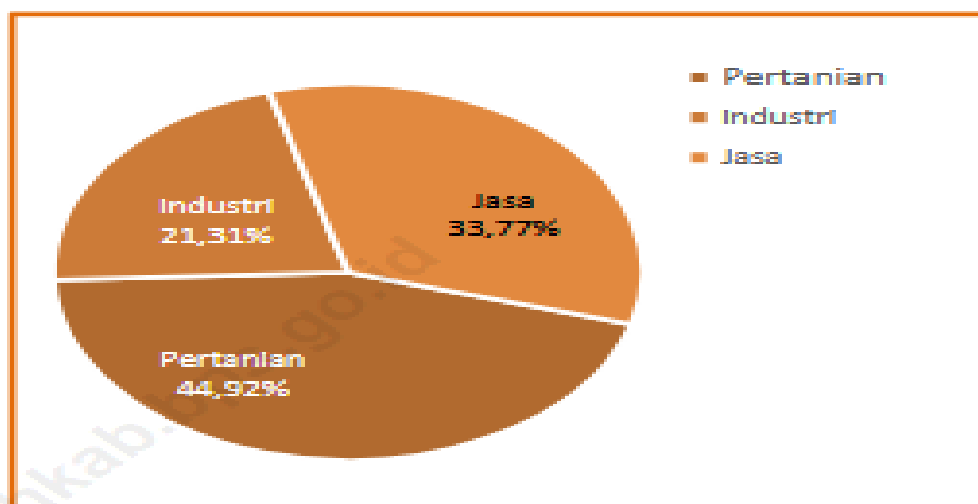


Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022-2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2024 sekitar 43,24 persen angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah berstatus sebagai berusaha. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian yang cukup baik dalam menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Namun demikian, terdapat sekitar 18,46 persen yang bekerja sebagai pekerja keluarga dan 18,88 persen sebagai pekerja bebas. Kedua kelompok ini tergolong rentan karena keterbatasan keterampilan serta kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga memiliki kemungkinan lebih besar untuk beralih menjadi penganggur. Dilihat dari status pekerjaan utama, sekitar 47,92 persen angkatan kerja yang bekerja berstatus berusaha pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa kemandirian angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan lapangan usaha sendiri sudah cukup baik. Namun, sekitar 16,55 persen dan 17,89 persen masing-masing sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas. Golongan ini sangat rentan beralih status menjadi pengangguran karena keterampilan yang dimiliki terbatas dan ketidakstabilan ekonomi.

Sektor pertanian, manufaktur dan jasa merupakan lapangan usaha utama yang dominan di Lombok Tengah. Untuk perkembangan sektor ini dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III. 42 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1, sekitar 97,22 persen atau sebanyak 602.084 ribu angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah berstatus bekerja. Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor jasa dan pertanian, yakni masing-masing mencapai 36,63 persen dan 36,22 persen. Sedangkan sektor industri menyerap sebanyak 27,15 persen tenaga kerja. Secara garis besar, pada tahun 2023 terdapat pergeseran lapangan usaha utama yang

diusahakan oleh penduduk Kabupaten Lombok Tengah dari yang sebelumnya sektor pertanian menjadi sektor jasa

D. RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target rata-rata pengeluaran per kapita ditetapkan sebesar 10,06 juta rupiah per tahun, sementara realisasi yang dicapai sebesar 11,87 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 1,81 juta rupiah atau sekitar 118,00% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta membaiknya aktivitas konsumsi rumah tangga.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa peningkatan pengeluaran juga perlu diimbangi dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga secara riil.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren peningkatan yang konsisten serta capaian yang melampaui target tahunan maupun target jangka menengah.

Pada tahun 2024, target rata-rata pengeluaran per kapita ditetapkan sebesar 10,03 juta rupiah per tahun dengan realisasi mencapai 11,53 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 1,50 juta rupiah atau sekitar 114,96%, yang mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat.

Memasuki tahun 2025, target sedikit meningkat menjadi 10,06 juta rupiah per tahun, sementara realisasi juga mengalami peningkatan menjadi 11,87 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 1,81 juta rupiah atau sekitar 118,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,34 juta rupiah (dari 11,53 juta menjadi 11,87 juta), yang menunjukkan adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 10,09 juta rupiah per tahun, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 1,78 juta rupiah atau sekitar 117,64%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran jangka menengah daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan konsumsi rumah tangga. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga stabilitas daya beli melalui pengendalian inflasi serta memastikan pemerataan peningkatan kesejahteraan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 11,87 juta rupiah per tahun, sedangkan rata-rata nasional mencapai 12,8 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 0,93 juta rupiah per tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Lombok Tengah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Jika dilihat secara relatif, rata-rata pengeluaran per kapita Lombok Tengah berada sekitar 7,27% lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati kondisi nasional.

Meskipun demikian, capaian sebesar 11,87 juta rupiah per tahun tetap menunjukkan kondisi yang cukup baik dan mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas, sehingga daya beli masyarakat dapat terus meningkat dan kesenjangan dengan tingkat nasional dapat semakin diperkecil.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat;
- b. Pemerintah memberikan subsidi/BLT bagi kelompok rentan sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar;
- c. Pemerintah telah melakukan perbaikan akses transportasi (Jalan dan jembatan) serta infra struktur irigasi;

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator :

- a. Mengembangkan desa wisata dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pariwisata yang berkompeten ;
- b. Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga agar masyarakat mampu menjangkau harga terutama untuk kebutuhan pokok;
- c. Mengoptimalkan program bantuan sosial berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilannya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 54 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.1 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Rata-rata pengeluaran perkapita	117,99	99,70	-18,29

Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial dengan indikator rata-rata pengeluaran per kapita, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 117,99%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,70%. maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,70\% - 117,99\% = -18,29\%$

Nilai efisiensi sebesar -18,29% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja tidak hanya mencapai target tetapi juga melampaui secara signifikan, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement yang cukup tinggi pada indikator rata-rata pengeluaran per kapita.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 18,29% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya sangat optimal dengan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 55 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1 Misi 4

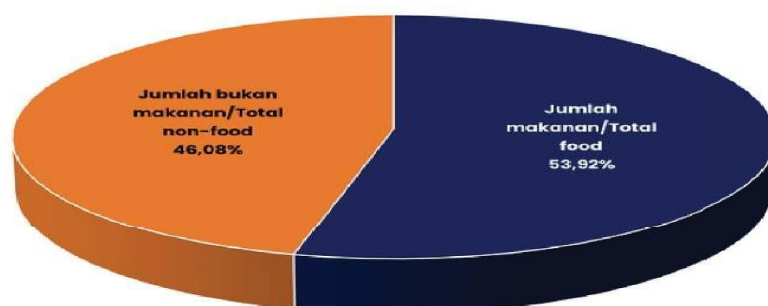
No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Rata-rata pengeluaran perkapita	10,06 jt/Rp./t hn	117,99%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Menunjang
	Rata-rata capain program						100	Sangat tinggi

Bahwa pada tabel tersebut dapat dilihat program pendukung sasaran kinerja adalah Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator “Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan capaian sebesar 100% dapat dinilai menunjang, namun dalam konteks yang tidak langsung terhadap sasaran. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar kelompok rentan telah terpenuhi secara optimal, yang berdampak pada peningkatan daya tahan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita, karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan mendorong stabilitas konsumsi rumah tangga.

Namun demikian, program ini tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja atau memperluas kesempatan usaha, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan indikator sasaran lebih bersifat pendukung (supporting) dibandingkan sebagai penggerak utama.

Selama 2025, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 1.361.849 rupiah. Pengeluaran tersebut 53,92 persen untuk makanan dan 46,08 persen untuk bukan makanan, sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar III. 43 Persentase pengeluaran berdasarkan kelompok makanan dan non makanan



Sumber ; BPS Lombok Tengah 2025

Kelompok komoditas makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 16,70 persen. Sementara kelompok

komoditas bukan makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 23,80 persen.

Untuk komoditas-komoditas yang memiliki persentase pengeluaran tinggi dapat dilihat sesuai table berikut:

Tabel III. 56 persentase pengeluaran komoditas

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	16,92	7,00
Umbi-umbian/Tubers	0,41	0,32
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	7,09	3,98
Daging/Meat	4,56	2,70
Telur dan susu/Eggs and milk	3,47	2,00
Sayur-sayuran/Vegetables	9,16	6,03
Kacang-kacangan/Legumes	2,25	1,37
Buah-buahan/Fruits	5,57	3,09
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	2,33	1,42
Bahan minuman/Beverage stuffs	2,55	1,44
Bumbu-bumbuan/Spices	2,08	1,11
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1,56	0,96
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	29,81	16,70
Rokok/Cigarettes	12,24	5,81
Jumlah makanan/Total food	58,28	53,92
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	22,89	23,80
Aneka barang dan jasa/Goods and services	7,86	8,77
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	2,52	2,81
Barang tahan lama/Durable goods	4,60	6,07
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	2,42	2,77
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	1,42	1,87
Jumlah bukan makanan/Total non-food	41,72	46,08
Jumlah/Total	100,00	100

Sumber : BPS Lombok Tengah (Lombok Dalam Angka Tahun 2025)

Dari Tabel tersebut diatas persentase pengeluaran komoditas terbesar dari kelompok makanan Adalah sektor makan dan minum untuk tahun 2024 tercatat sebesar 29,81 % dan padatahun 2025 tercatat sebesar 16 70% selisihanatar tahun 2024 dengan 2025 sekitar 13,11 %

Untuk pengeluaran per kapita di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai tabel berikut :

Tabel III. 57 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah. 2024 dan 2025

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	109.647	95.386
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	2.649	4.330
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	45.958	54.254
Daging/ <i>Meat</i>	29.563	36.779
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	22.491	27.241
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	59.338	82.091
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	14.557	18.600
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	36.098	42.042
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	15.093	19.286
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	16.546	19.576
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	13.461	15.183
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	10.076	13.048
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	193.189	227.405
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	79.304	79.061
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	647.989	734.281
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	254.462	324.054
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	87.442	119.399
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	28.063	38.288
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	51.116	82.692
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	26.924	37.675
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	15.807	25.459
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	463.814	627.586
Jumlah/<i>Total</i>	1.111.803	1.361.849

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam angka 2025)

III.1.15 III.1.12 SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan nilai tambah tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi pada proses pengolahan, inovasi, pengemasan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar yang mampu meningkatkan harga jual dan daya saing produk lokal.

Di Kabupaten Lombok Tengah, pengembangan produk unggulan daerah diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, serta industri kecil dan menengah. Ekonomi kreatif juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan tumbuhnya usaha berbasis kreativitas dan inovasi seperti kuliner, fesyen, serta konten digital. Dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, serta promosi dan pameran produk menjadi faktor pendorong utama dalam memperluas pasar produk kreatif lokal. Pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran berbasis online turut memperluas jangkauan pasar hingga tingkat regional. Kolaborasi antara pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan dunia usaha memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan global. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal menuju ekonomi yang lebih inovatif, produktif, dan bernilai tinggi.

Khususnya bagaimana produk unggulan pada daerah bisa memiliki nilai tambah. Terkait bagaimana peran penting unsur pemda dalam mengimplementasi peningkatan nilai tambah produk unggulan dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sesuai tabel dibawah :

Tabel III. 58 Meningkatnya Nilai Tumbuh Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t - \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1})}{\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t} \times 100$	3.03	3,53	3.83	3.99	3,54	131.68	100,28	Sangat tinggi 3,53
Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$\text{LPE} = \frac{(\text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_t - \text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_{t-1})}{\text{PDRB}_t} \times 100$	3.25	3,75	4.06	9.54	8,06	293.53	214,93	Sangat tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t - \text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t-1})}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t} \times 100$	1,36	1,46	1,56	1,04	7,67	76,47	525,34	Sedang

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

D. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar 3,53%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,54%. Dengan demikian, capaian kinerja sedikit melampaui target dengan selisih sebesar 0,01 poin persentase atau sekitar 100,28% dari target.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan mampu tumbuh secara stabil dan sesuai dengan ekspektasi yang direncanakan. Meskipun selisihnya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam menjaga kinerja sektor industri sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan sebesar 3,54% mencerminkan bahwa aktivitas industri pengolahan tetap berjalan dengan baik, didukung oleh faktor-faktor seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, serta permintaan pasar. Ke depan, diperlukan upaya untuk terus mendorong peningkatan nilai tambah sektor industri melalui penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan investasi di sektor industri pengolahan agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun terdapat dinamika antar tahun dan masih terdapat gap terhadap target jangka menengah.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar 3,03%, dengan realisasi mencapai 3,99%. Hal ini menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 0,96 poin persentase atau sekitar 131,68%, yang mencerminkan kinerja sektor industri yang cukup kuat pada tahun tersebut.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 3,53%, sementara realisasi tercatat sebesar 3,54%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 sedikit melampaui target sebesar 0,01 poin persentase atau sekitar 100,28%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 0,45 poin persentase (dari 3,99% menjadi 3,54%), yang mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi***

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,83%, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target tersebut dengan selisih sebesar 0,29 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, pertumbuhan sektor industri pengolahan belum sepenuhnya berada pada jalur untuk mencapai sasaran jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap tumbuh positif dan stabil, namun memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan laju pertumbuhannya. Ke depan, diperlukan penguatan sektor industri melalui peningkatan investasi, pengembangan hilirisasi, peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta dukungan terhadap pelaku industri lokal agar pertumbuhan dapat kembali meningkat dan mencapai target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,54%, sedangkan pada tingkat nasional mencapai 5,3%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,76 poin persentase, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi dan dinamika sektor industri pengolahan di daerah belum sekuat di tingkat nasional. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan skala industri, belum optimalnya hilirisasi produk, keterbatasan investasi, serta masih dominannya sektor-sektor primer dalam struktur ekonomi daerah.

Meskipun demikian, capaian pertumbuhan sebesar 3,54% tetap menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Lombok Tengah berada dalam kondisi tumbuh positif dan stabil. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja sektor ini, antara lain melalui peningkatan investasi industri, pengembangan kawasan industri, penguatan nilai tambah produk lokal, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk, sehingga dapat memperkecil kesenjangan dengan capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator :

- a. Bahan baku untuk sektor industri pengolahan cukup tersedia dengan harga yang stabil dan cukup berkualitas;
- b. Ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau sangat yang mendukung sektor industri pengolahan;
- c. Daya beli masyarakat meningkat.

Solusi/alternatif lebih meningkatkan pencanpaian indikator :

- a. Memperkuat kerja sama antara industri pengolahan dengan petani, nelayan, dan peternak untuk memastikan pasokan bahan baku stabil;
- b. Memperluas akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM sektor industri pengolahan;
Mendorong kebijakan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pemerintah dan swasta.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 59 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	100,28	93,04	-7,24

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 100,28%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,04%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh : $93,04\% - 100,28\% = -7,24\%$

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong efisien, karena capaian kinerja berhasil melampaui target, meskipun anggaran yang digunakan tidak terserap secara penuh.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Capaian kinerja mengalami sedikit over achievement (di atas 100%).
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 7,24% dari total pagu.
- Penggunaan sumber daya berjalan optimal dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 60 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.1 pada Tujuan 4.1

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
T4	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,53%	100,28%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai omset perdagangan pembangunan industri kabupaten	100	Menunjang
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai omset perdagangan	190,23	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk)	Pertumbuhan omset aset UMKM	100	
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	102,13	
	Rata-rata capain program						123,09	Sangat tinggi

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator “Nilai omset perdagangan pembangunan industri kabupaten” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. Program ini berperan dalam mendorong pengembangan kawasan dan aktivitas industri, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah barang hasil olahan

Kemudian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator “Nilai omset perdagangan” dengan capaian 190,23% dapat dikategorikan sangat menunjang. Capaian yang jauh melampaui target menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan yang signifikan, yang berdampak pada kelancaran distribusi hasil industri pengolahan.

Selanjutnya pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Indikator “Pertumbuhan omset aset UMKM” dengan capaian 100% dinilai

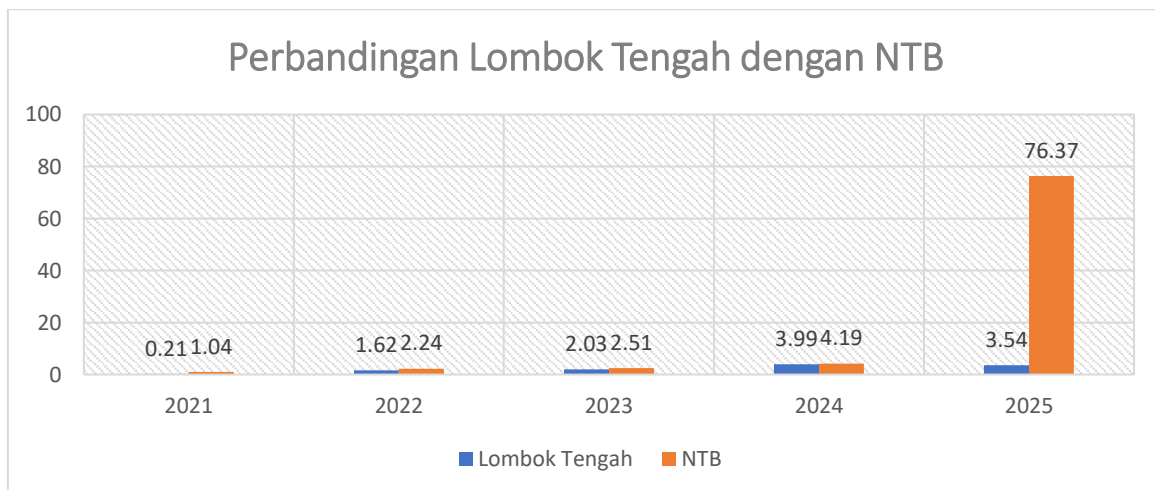
menunjang secara optimal. UMKM merupakan pelaku utama dalam sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah.

Untuk Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator “Pertumbuhan omset aset koperasi” dengan capaian 102,13% dapat dinilai menunjang secara signifikan. Koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mendukung pembiayaan, pemasaran, dan penguatan usaha anggota, termasuk dalam sektor industri pengolahan.

Berdasarkan capaian seluruh indikator program, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang bahkan sangat menunjang pencapaian sasaran. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menjadi faktor paling dominan karena capaian yang sangat tinggi dalam meningkatkan omset perdagangan. Sementara itu, program lainnya memberikan kontribusi yang solid dalam memperkuat ekosistem industri dari sisi produksi, pelaku usaha, dan kelembagaan ekonomi.

Perbandingan Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 44 Komparasi Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Lombok Tengah dan NTB tahun 2021-2025



Sumber

: BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Pada gambar III.1.23 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan pada beberapa tahun berada lebih tinggi dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah tercatat sebesar 0,21 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan NTB yang

sebesar 1,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode pemulihan ekonomi, laju pertumbuhan Lombok Tengah masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi.

Memasuki tahun 2022, pertumbuhan PDRB Lombok Tengah meningkat menjadi 1,62 persen, namun masih berada di bawah NTB yang mencapai 2,24 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah kembali meningkat menjadi 2,03 persen, tetapi tetap sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan NTB sebesar 2,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan ekonomi di Lombok Tengah, kecepatannya masih belum melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Perkembangan yang lebih baik terlihat pada tahun 2024, ketika laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah mencapai 3,99 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan NTB yang sebesar 4,19 persen. Selisih ini relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah mulai mendekati capaian tingkat provinsi.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah tercatat sebesar 3,54 persen, sedangkan NTB mengalami lonjakan sangat tinggi hingga 76,37 persen. Perbedaan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2025 didorong oleh faktor tertentu yang sangat signifikan, sehingga jauh melampaui pertumbuhan Lombok Tengah. Dengan demikian, secara umum Lombok Tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. .

E. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 3,75%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 8,06%. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 4,31 poin persentase atau sekitar 214,93% dari target. Capaian ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum mengalami ekspansi yang kuat, yang kemungkinan didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan, serta berkembangnya usaha jasa perhotelan dan kuliner di daerah. Sektor ini juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pariwisata.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang sangat baik pada sektor jasa terkait pariwisata. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan promosi pariwisata, serta pengembangan destinasi dan produk unggulan, agar kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, meskipun terdapat sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 3,25% dengan realisasi mencapai 9,54%. Hal ini menunjukkan capaian yang jauh melampaui target sebesar 6,29 poin persentase atau sekitar 293,54%, yang mencerminkan lonjakan pertumbuhan yang sangat kuat, terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor jasa pendukungnya.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 3,75%, sementara realisasi tercatat sebesar 8,06%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga melampaui target secara signifikan, dengan selisih sebesar 4,31 poin persentase atau sekitar 214,93%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 1,48 poin persentase (dari 9,54% menjadi 8,06%), yang mengindikasikan adanya normalisasi pertumbuhan setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,06%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut sebesar 4,00 poin persentase atau sekitar 198,52%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan melampaui ekspektasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor unggulan dengan pertumbuhan yang sangat kuat di Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga

keberlanjutan pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk wisata dan kuliner, serta penguatan daya saing sektor pariwisata agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah sedikit lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 8,06%, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 8,04%. Dengan demikian, terdapat selisih tipis sebesar 0,02 poin persentase, di mana Lombok Tengah berada sedikit di atas rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah memiliki daya tumbuh yang kompetitif dan mampu mengikuti bahkan sedikit melampaui dinamika pertumbuhan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran sektor pariwisata yang cukup dominan dalam mendorong aktivitas usaha jasa akomodasi dan kuliner di daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja sektor yang sangat baik dan berada pada level yang sebanding dengan nasional. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keunggulan tersebut melalui penguatan kualitas layanan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan destinasi dan produk wisata, sehingga sektor ini dapat terus menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendorong pencapaian indikator adalah :

- a. Peningkatan kunjungan wisatawan.
- b. Meningkatnya tingkat hunian hotel dan restoran.
- c. Bertambahnya pelaku usaha di sektor kuliner dan jasa akomodasi.

Solusi/alternatif untuk meningkatkan pencapaian indikator :

- a. Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata & Kuliner melalui berbagai media;

- b. Meningkatkan kemas event budaya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan konsumsi di sektor ini;
- c. Meningkatkan skema kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur pariwisata;
- d. Mendorong pengelolaan street food yang terorganisir. dengan kebersihan dan standar kualitas yang tinggi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 61 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	214,99	97,24	-117,75

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 214,99%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,24%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $97,24\% - 214,99\% = -117,75\%$

Nilai efisiensi sebesar -117,75% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target secara sangat signifikan, sementara penggunaan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement yang sangat tinggi pada indikator pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.

- Terdapat penghematan anggaran sebesar 117,75% dalam konteks perbandingan terhadap capaian kinerja.
- Output yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan efisiensi yang sangat tinggi.

Terhadap capaian yang begitu besar dengan dengan penghematan anggaran yang sangat tinggi maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap metode penetapan target agar lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika sektor;
- Meningkatkan kualitas intervensi program agar tetap relevan dan berkelanjutan di tengah pengaruh faktor eksternal yang kuat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 62 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	3,75%	214,93%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	100	Menunjang
					Rogram Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	100	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	100	

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang
						ditingkatkan kapasitasnya		
	Rata-rata capain program						100	Sangat tinggi

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Indikator “Persentase destinasi wisata yang dikembangkan” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. Pengembangan destinasi wisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap jasa akomodasi dan konsumsi makanan dan minuman.

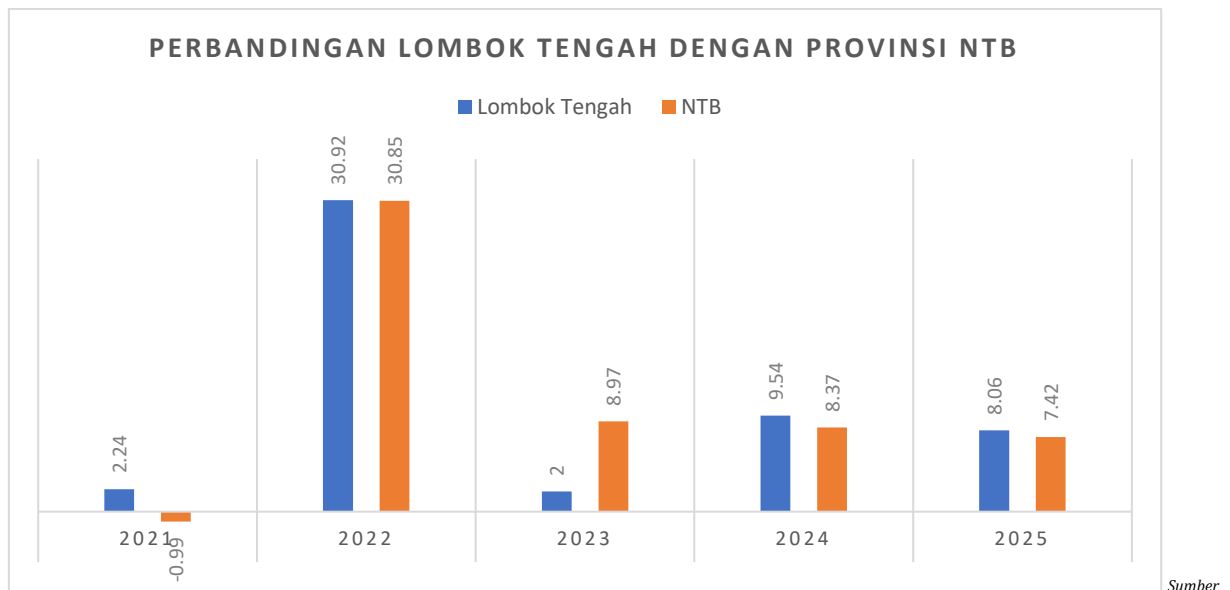
Kemudian pada Program Pemasaran Pariwisata Indikator “Media promosi online yang aktif” dengan capaian 100% juga dinilai menunjang secara optimal. Promosi yang efektif, khususnya melalui media digital, berperan dalam meningkatkan visibilitas destinasi dan menarik minat wisatawan. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.

Selanjutnya untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Indikator “Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal terhadap sasaran. SDM yang kompeten akan meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan capaian indikator pada ketiga program tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang secara optimal pencapaian sasaran.

Komparasi persentase capaian laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada sektor akomodasi dan makan minum tahun 2021-2025, sebagai mana termuat pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 45 Tren capaian laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada sektor akomodasi dan makan minum tahun 2021-2025



: BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 2,24 persen, sedangkan NTB mengalami kontraksi sebesar -0,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah pada tahun tersebut lebih baik dibandingkan capaian provinsi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum meningkat sangat signifikan baik di Lombok Tengah maupun NTB. Lombok Tengah mencapai 39,92 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 30,85 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah berlangsung lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan rata-rata provinsi.

Namun demikian, pada tahun 2023 pertumbuhan di Lombok Tengah melambat cukup tajam menjadi 2,00 persen, sementara NTB masih mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 8,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pertumbuhan pada tahun sebelumnya, sektor akomodasi dan makan minum di Lombok Tengah mengalami perlambatan yang lebih besar dibandingkan provinsi.

Pada tahun 2024, Lombok Tengah kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 9,54 persen, lebih tinggi dibandingkan NTB yang mencapai 8,37 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025, di mana Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 8,06 persen, juga masih lebih tinggi dibandingkan NTB sebesar 7,42 persen.

Secara keseluruhan, komparasi selama tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kinerja pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi NTB pada sebagian besar tahun pengamatan, yakni tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025. Hanya pada tahun 2023 Lombok Tengah berada di bawah capaian provinsi

F. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 1,46%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 7,67%. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 6,21 poin persentase atau sekitar 525,34% dari target. Capaian ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kinerja yang sangat kuat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan produksi komoditas unggulan, kondisi cuaca yang mendukung, perbaikan infrastruktur pertanian, serta meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, dukungan program pemerintah di sektor pertanian dan perikanan juga turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan yang tinggi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah dengan kontribusi yang signifikan. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, modernisasi sektor pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor ini.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya lonjakan kinerja yang sangat

signifikan pada tahun 2025 setelah sebelumnya mengalami capaian yang relatif rendah pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan sektor ini ditetapkan sebesar 1,36%, namun realisasi hanya mencapai 1,04%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 0,32 poin persentase atau sekitar 76,47% dari target, yang mengindikasikan adanya tekanan atau kendala pada kinerja sektor tersebut.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 1,46%, dan realisasi melonjak tajam menjadi 7,67%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target sebesar 6,21 poin persentase atau sekitar 525,34%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6,63 poin persentase (dari 1,04% menjadi 7,67%), yang menunjukkan adanya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan yang kuat di sektor ini.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,56%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan selisih sebesar 6,11 poin persentase atau sekitar 491,67%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga jauh melampaui sasaran jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pemulihan yang sangat kuat dan kinerja yang luar biasa pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut serta memastikan stabilitas produksi melalui penguatan ketahanan sektor, peningkatan produktivitas, serta mitigasi terhadap risiko seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 7,67%, sedangkan pada tingkat nasional mencapai 13,53%. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 5,86 poin persentase, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan signifikan, namun laju pertumbuhannya belum secepat pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti skala produksi, produktivitas, teknologi yang digunakan, serta dukungan infrastruktur dan pasar.

Secara keseluruhan, capaian sebesar 7,67% tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pertumbuhan yang kuat di tingkat daerah. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor, penguatan hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah komoditas agar pertumbuhan sektor ini dapat semakin meningkat dan mendekati capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Curah hujan yang relatif stabil dan distribusi musim tanam yang baik.
- b. Berkurangnya gangguan iklim ekstrem dibanding tahun sebelumnya..
- c. Penerapan teknologi pertanian modern (benih unggul, pupuk tepat guna, mekanisasi).
- d. Bantuan sarana produksi (alsintan, benih, pupuk bersubsidi).

Solusi/Alternatif untuk pencapaian indikator :

- a. Penggunaan benih unggul dan varietas tahan iklim;
- b. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi;
- c. Perbaikan akses jalan produksi menuju sentra pertanian dan perikanan.
- d. Penguatan koperasi tani dan nelayan.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 63 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2 Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		Indeks Gini			
		Angka Kemiskinan			
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	525,34	96,58	-428,76

Pada sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 525,34%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,58%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $96,58\% - 525,34\% = -428,76\%$

Nilai efisiensi sebesar -428,76% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien namun bersifat anomali (ekstrem), sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasi, mengingat capaian kinerja melampaui target secara sangat signifikan, sementara penggunaan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Output yang dihasilkan jauh melampaui target dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan.
- Secara matematis menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi, namun juga perlu dicermati secara lebih mendalam dari sisi kualitas perencanaan.

Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- ❖ Rendahnya baseline atau target awal, sehingga realisasi tampak melonjak sangat tinggi.
- ❖ Adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan intervensi program yang dibiayai

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**Tabel III. 64 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2
Tujuan 4.1 Misi 4**

pada

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
		Angka Kemiskinan						
		Indeks Gini						
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,46%	525,34%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Padi	156,83	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tembakau	134,3	Menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Buah Melon	52,16	Tidak menunjang
						Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Sapi	76,38	Mneunjang
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	90,85	Menunjang
						Produksi Benih Ikan	109,39	Menunjang
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Konsumsi Protein	97,41	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang	
					Pangan Masyarakat				
	Rata-rata capain program							102,17	Sangat tinggi

Untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikatornya sebagai berikut:

- Indikator produksi padi dengan capaian 156,83% dapat dinilai sangat menunjang, karena peningkatan produksi padi secara signifikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor pertanian.
- Indikator produksi tembakau dengan capaian 134,3% juga sangat menunjang, mengingat tembakau merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.
- Indikator produksi melon dengan capaian 52,16% dinilai kurang menunjang, karena realisasi yang jauh di bawah target menunjukkan belum optimalnya pengembangan komoditas hortikultura tersebut.
- Indikator produksi sapi dengan capaian 76,38% dinilai cukup menunjang namun belum optimal, karena meskipun berkontribusi terhadap sektor peternakan, capaian yang belum maksimal membatasi dampaknya terhadap pertumbuhan sektor secara keseluruhan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Indikator “Indeks ketersediaan prasarana pertanian” dengan capaian 100% dapat dinilai menunjang secara optimal. Ketersediaan prasarana yang memadai seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, sehingga mendukung pertumbuhan sektor secara berkelanjutan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indicator sebagai berikut :

- Indikator capaian program sebesar 90,85% dinilai menunjang namun belum optimal, karena belum sepenuhnya mencapai target sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor perikanan masih terbatas.
- Indikator produksi benih ikan dengan capaian 109,39% dapat dinilai sangat menunjang, karena ketersediaan benih yang cukup akan mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator “Konsumsi protein” dengan capaian 97,41% dinilai menunjang namun belum optimal. Program ini lebih

berperan pada sisi konsumsi dan kualitas gizi masyarakat, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB bersifat tidak langsung.

Untuk mengetahui perkembangan laju pertumbuhan ketiga indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 65 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025

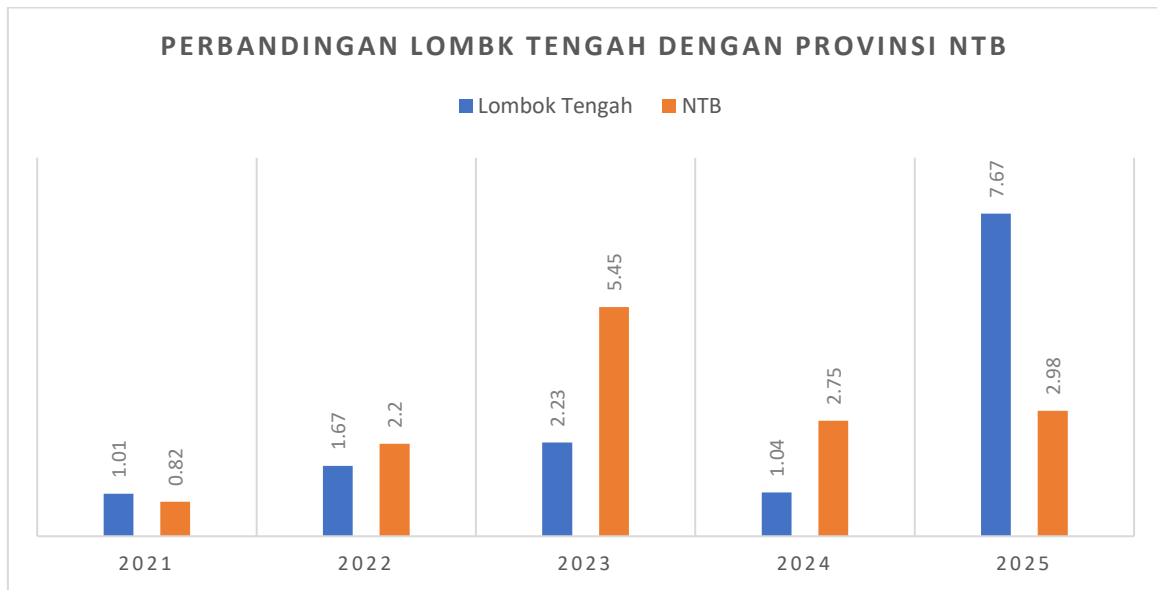
Sektor PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.01	1.67	2.23	1.04	7,67
B. Pertambangan dan Penggalian	6.64	-4.03	5.39	1.84	2,12
C. Industri Pengolahan	0.2	1.62	2.03	3.99	3,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.23	10.41	5.13	9.28	5,78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.43	4.74	1.00	0.49	1,79
F. Konstruksi	16.74	-5.28	8.36	2.11	2,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.69	5.57	7.84	6.51	5,96
H. Transportasi dan Pergudangan	-5.58	28.74	13.85	3.92	4,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.24	30.92	8.62	9.54	8,06
J. Informasi dan Komunikasi	5.02	3.46	5.07	4.37	3,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.48	3.51	4.06	4.52	10,83
L. Real Estate	1.52	4.63	4.35	3.98	3,71
M.N. Jasa Perusahaan	0.41	9.14	8.32	5.22	4,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.64	1.73	1.11	5.28	2,94
P. Jasa Pendidikan	1.46	3.17	5.01	3.39	1,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.01	2.13	5.98	6.29	3,17
R.S.T.U. Jasa lainnya	2.26	13.74	6.26	4.86	4,92
PDRB	4.03	3.55	5.77	3.34	4,87

Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Dari ketiga indikator untuk sasaran ini hanya indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2025 pencapaiannya sebagaimana tergambar pada table diatas.

Sedangkan untuk melihat komparasi perkembangan pada indikator ini selama lima tahun terakhir dengan provinsi NTB sesuai gambar berikut :

Gambar III. 46 Tren laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan 2021-2025



Sumber : BPS Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam Angka 2026) dan BPS NTB (BRS Pertumbuhan Ekonomi NTB tahun 2021-2025) data di olah

Berdasarkan Gambar tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 1,01 persen, lebih tinggi dibandingkan NTB yang sebesar 0,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan capaian provinsi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah meningkat menjadi 1,67 persen, namun masih berada di bawah NTB yang mencapai 2,20 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, Lombok Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 2,23 persen, sedangkan NTB tumbuh jauh lebih tinggi yaitu 5,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 hingga 2023, laju pertumbuhan sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan di tingkat provinsi berkembang lebih cepat dibandingkan Lombok Tengah.

Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini di Lombok Tengah menurun menjadi 1,04 persen, sementara NTB tetap berada pada angka yang lebih tinggi yaitu 2,75 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan masih tertinggal dari capaian provinsi.

Namun demikian, pada tahun 2025 Lombok Tengah menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat kuat hingga mencapai 7,67 persen, jauh melampaui NTB yang sebesar 2,98 persen. Capaian ini menandakan adanya perbaikan yang sangat signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lombok Tengah, sehingga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Secara keseluruhan, komparasi tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah cenderung fluktuatif. Lombok Tengah unggul dibandingkan NTB pada tahun 2021 dan 2025, sedangkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pertumbuhan sektor ini masih berada di bawah capaian provinsi. Dengan demikian, meskipun sektor ini sempat mengalami perlambatan, pada akhir periode pengamatan Lombok Tengah berhasil menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat baik

III.1.13 TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

Pemerataan pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas layanan dasar lainnya diarahkan untuk membuka akses terhadap pusat-pusat produksi, distribusi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan akses yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan arus barang menjadi lebih efisien, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, prinsip keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga dipastikan kualitasnya, daya tahannya, serta sistem pemeliharannya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan

sumber daya secara efisien, serta integrasi dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.

Dukungan infrastruktur yang merata juga berperan dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Desa dan wilayah terpencil yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses kini mulai terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi. Hal ini berdampak pada meningkatnya peluang usaha, akses terhadap pasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, diharapkan tercipta struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif. Infrastruktur menjadi enabler utama pembangunan, bukan hanya sebagai sarana fisik, tetapi sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah.

Terkait capain indikator pada tujuan ni dapat dilihat sesuai tabel dibawah:

Tabel III. 66 TUJUAN 4.2
MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN
BERKELANJUTAN
Capain indkator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	$IFW = \frac{\sum(jm + ir + am + sl + km)}{5}$ <p>Jm= persentase jalan mantap</p> <p>Ir = persentase irigasi kondisi baik</p> <p>am = persentase RT akses air minum layak</p> <p>sl = persentase RT sanitasi layak</p> <p>km = persentase kawasan kumuh</p>	69,55	71,05	72,55	74,93	72,46	107,74	101,98	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian III.240 adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks infrastruktur wilayah ditetapkan sebesar 71,05 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 72,46 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 1,41 poin atau sekitar 101,99% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja berada di atas ekspektasi yang direncanakan.

Keberhasilan melampaui target ini mengindikasikan bahwa infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan cukup efektif, baik dari sisi penyediaan, kualitas, maupun pemerataan infrastruktur wilayah. Peningkatan ini dapat didorong oleh berbagai infrastruktur dasar (jalan, irigasi, dan fasilitas publik), peningkatan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi program yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa infrastruktur wilayah telah berkembang dengan baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Ke depan, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas infrastruktur, meningkatkan pemerataan antar wilayah, serta memastikan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika kinerja yang tetap baik meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, target indeks infrastruktur wilayah ditetapkan sebesar 69,55 poin dengan realisasi mencapai 74,93 poin. Capaian ini melampaui target sebesar 5,38 poin atau sekitar 107,73%, yang menunjukkan kinerja infrastruktur yang sangat optimal.

Selanjutnya pada tahun 2025, target meningkat menjadi 71,05 poin dan realisasi tercatat sebesar 72,46 poin. Capaian ini masih melampaui target sebesar 1,41 poin atau sekitar 101,99%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 2,47 poin (dari 74,93 menjadi 72,46), yang mengindikasikan adanya perlambatan atau normalisasi capaian setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 72,55 poin, capaian tahun 2025 sudah sangat mendekati sasaran tersebut, dengan selisih tipis sebesar 0,09 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja III.241 adalah III.241 or III.241 n infrastruktur wilayah telah berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik karena masih melampaui target tahunan dan III.241 adalah memenuhi target akhir RPJMD. Ke depan, diperlukan III.241 adalah untuk menjaga konsistensi kualitas III.241 adalah III.241 or III.241 n, meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan pemerataan III.241 adalah III.241 or III.241 n antar wilayah agar capaian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam melakukan perbandingan dengan capaian nasional.

Meskipun pada tahun 2025 indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah menunjukkan capaian yang baik, namun hasil tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian di III.241 adalah III.241 nasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam pendekatan pengukuran yang digunakan.

Pada III.241 adalah III.241 pemerintah pusat, pengukuran infrastruktur umumnya menggunakan pendekatan yang bersifat makro dan agregatif lintas wilayah, sehingga III.241 adalah III.241 or yang dihasilkan merupakan III.241 adalah III.241 o umum kondisi infrastruktur secara nasional dengan cakupan yang luas dan terstandar. Sementara itu, pada III.241 adalah III.241 pemerintah daerah, pengukuran indeks infrastruktur wilayah cenderung

menggunakan pendekatan yang lebih operasional dan kontekstual, yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi spesifik daerah.

Perbedaan pendekatan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam metodologi, III.242 adalah III.242 or penyusun, serta cakupan penilaian, sehingga hasil pengukuran tidak berada pada basis yang sama untuk diperbandingkan secara langsung.

Dengan demikian, capaian indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 lebih tepat dianalisis secara internal (time series) maupun terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, dibandingkan dengan melakukan komparasi dengan capaian nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor pendorong pencapaian III.242 adalah III.242 or :

- a. Konsistensi pengalokasian anggaran belanja modal untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar;
- b. Sinergi pendanaan dari APBN, DAK, dan bantuan provinsi.;
- c. Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten/desa;
- d. Pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian III.242 adalah III.242 or ini III.242 adalah :

- a. Penyusunan prioritas berbasis gap wilayah (desa/kecamatan dengan indeks terendah);
- b. Pengawasan mutu pekerjaan secara ketat dan transparan;
- c. Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mendeteksi kerusakan dini.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Tabel III. 67 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tujuan 4.2 Indikator Indeks Infrsatruktur Wilayah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	101,98	98,18	-3,8

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator Indeks Infrastruktur Wilayah sebesar 101,98%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,18%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -3,8%.

Nilai efisiensi sebesar -3,8% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 4.2 tergolong efisien.

Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah yang melebihi target mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, yang meliputi konektivitas jalan, irigasi, air minum, permukiman, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana. Keberhasilan ini dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak sepenuhnya maksimal, menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif dan hemat.

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efektivitas pelaksanaan program infrastruktur, yang mampu menghasilkan output optimal dengan penggunaan anggaran yang terkendali.
- Prioritisasi kegiatan strategis, sehingga anggaran difokuskan pada program yang memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan indeks infrastruktur.
- Sinergi antar sektor infrastruktur, seperti keterpaduan antara pembangunan jalan, permukiman, dan layanan dasar.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian proyek, sehingga meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Pada Tujuan 4.2 indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, capaian kinerja (101,98%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (98,18%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang relatif kecil menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah cukup proporsional, dengan keseimbangan yang baik antara input (anggaran) dan outcome (kinerja infrastruktur).

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 68 Analisis Program Penunjang Tujuan 4.2 Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	93,248 poin	94,84%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	82,41	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	100,1	Menunjang
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	68,60 poin	112,41%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	109,4	Mennjang
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	79,78%	95,64%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	89,75	Menunjang
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	765,37 ha/thn	98,69	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0	Tidak Menunjang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase Akses Sanitasi Layak	86,91	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
					Sistem Air Limbah	dan Aman		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	375,73	Menunjang
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,10 poin	114,80 %	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	102,99	Menunjang
		Cakupan layanan persampahan	30,3%	117,19%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	74,77	Menunjang
						Persentase Pengurangan Sampah	12,91	Tidak Menunjang
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	115,95 poin	94,15 %	Program Pengembangan Perumahan	Pengelolaan/pemeliharaan Perumahan (Rumah Susun Umum, Rumah Khusus dan Perumahan Komersil)	100	Menunjang
						Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	100	
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	147,68	
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana	100	

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
						na alam dan sosial yang terlaya ni kebutuhan dasarnya		
	Rata-rata capain program						105,90	Tinggi

Secara umum, pencapaian Tujuan 4.2 Misi 4 didukung oleh berbagai program pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup konektivitas wilayah, layanan irigasi, air minum aman, kawasan perumahan dan permukiman, kualitas lingkungan hidup, persampahan, serta ketahanan bencana. Berdasarkan tabel yang disampaikan, rata-rata capaian program sebesar 105,90% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program-program pendukung telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator program yang belum optimal dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran.

1. Capaian Sasaran 4.2.1 sebesar 94,84% menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah belum sepenuhnya mencapai target, meskipun secara umum pelaksanaan program pendukung telah memberikan kontribusi positif.

Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator persentase jalan mantap mencapai 82,41% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas jalan telah berjalan, namun belum optimal. Kondisi jalan mantap yang belum sepenuhnya sesuai harapan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum tercapainya target indeks konektivitas.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan mencapai 100,1% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan transportasi telah terpenuhi dengan baik dan memberi dukungan positif terhadap kelancaran konektivitas wilayah.

Secara keseluruhan, program-program pendukung pada Sasaran 4.2.1 telah menunjang, namun hasil sasaran belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas dan pemerataan kemantapan jalan agar konektivitas antarwilayah dapat lebih optimal.

2. Capaian Sasaran 4.2.2 sebesar 112,41% menunjukkan bahwa target layanan sistem irigasi kabupaten telah tercapai dan melampaui target. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan infrastruktur irigasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan produksi.

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi yang mencapai 109,4% dan dinilai menunjang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan jaringan irigasi telah dapat menjangkau wilayah irigasi sesuai bahkan melebihi target yang direncanakan.

Dengan demikian, Program Pengelolaan Sumber Daya Air memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sistem irigasi kabupaten. Keberhasilan ini penting untuk dipertahankan karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan kestabilan penyediaan air irigasi.

3. Capaian Sasaran 4.2.3 sebesar 95,64% menunjukkan bahwa akses air minum aman belum sepenuhnya mencapai target, meskipun sudah berada pada kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan air minum aman masih perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman yang mencapai 89,75% dan dinilai menunjang. Capaian ini memperlihatkan bahwa program telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan layanan, namun belum optimal untuk mendorong sasaran mencapai target sepenuhnya.

Secara umum, program pendukung pada Sasaran 4.2.3 masih menunjang, tetapi masih diperlukan peningkatan jangkauan layanan, kualitas sistem penyediaan air minum, dan percepatan perluasan akses air minum aman khususnya pada wilayah yang belum terlayani secara memadai.

4. Capaian Sasaran 4.2.4 sebesar 98,69% menunjukkan bahwa target penanganan kawasan kumuh hampir tercapai, namun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman telah berjalan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya optimal.

Sasaran ini didukung oleh beberapa program, dengan hasil yang bervariasi.

- Program Kawasan Permukiman pada indikator persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani hanya mencapai 0% dan dinilai tidak menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi penanganan langsung

terhadap kawasan kumuh skala kecil belum terlaksana, sehingga menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pencapaian sasaran.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator persentase akses sanitasi layak dan aman mencapai 86,91% dan dinilai menunjang. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan sanitasi dasar masyarakat.
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator persentase perumahan/lingkungan/dusun yang terfasilitasi PSU mencapai 375,73% dan dinilai menunjang. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya dukungan sangat kuat dalam penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.
 - Secara keseluruhan, Sasaran 4.2.4 didukung oleh program-program yang pada umumnya menunjang, terutama melalui sanitasi dan penyediaan PSU. Namun demikian, belum adanya capaian pada Program Kawasan Permukiman menjadi kelemahan utama yang menyebabkan sasaran belum sepenuhnya mencapai target.
5. Capaian Sasaran 4.2.5 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah melampaui target, demikian pula pada aspek layanan persampahan secara umum. Hal ini menunjukkan adanya hasil positif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan layanan persampahan di daerah.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan mencapai 102,99% dan dinilai menunjang. Capaian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan sudah cukup baik dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.
 - Program Pengelolaan Persampahan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya merata. Indikator persentase sampah yang ditangani mencapai 74,77% dan dinilai menunjang, yang berarti program tetap berkontribusi positif terhadap peningkatan layanan persampahan. Namun, indikator persentase pengurangan sampah hanya mencapai 12,91% dan dinilai tidak menunjang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah dari sumber, seperti pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, masih sangat rendah.

Secara keseluruhan, Sasaran 4.2.5 tetap menunjukkan capaian yang sangat baik. Namun, ke depan diperlukan penguatan pada aspek pengurangan sampah agar pengelolaan persampahan tidak hanya berfokus pada penanganan akhir, tetapi juga pada upaya pengendalian dari hulu.

6. Capaian Sasaran 4.2.6 sebesar 94,15% menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan bencana belum sepenuhnya mencapai target, meskipun sebagian besar program pendukung menunjukkan hasil yang baik.

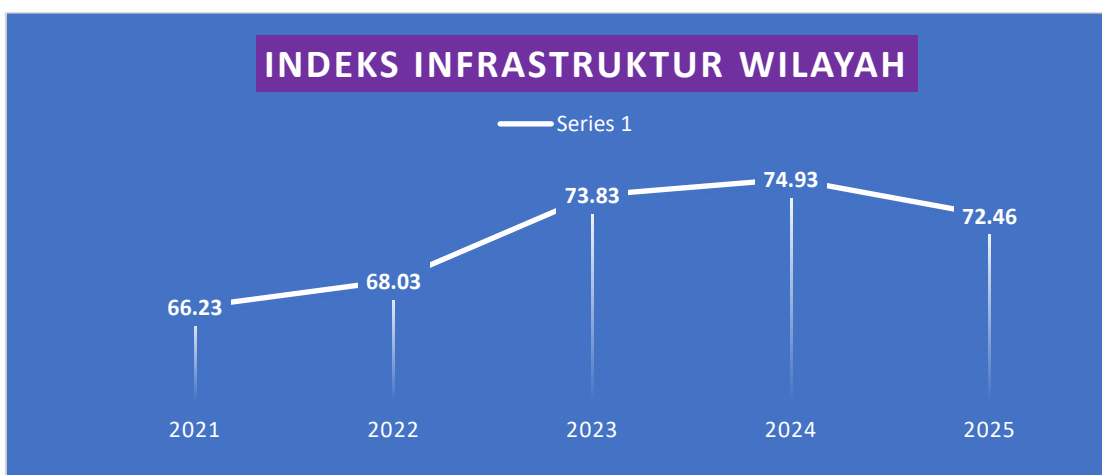
- Program Pengembangan Perumahan menunjukkan kinerja baik, dengan indikator pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus, dan perumahan komersial) mencapai 100% dan indikator persentase rumah korban bencana yang ditangani juga mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan pada pemulihan perumahan akibat bencana telah berjalan sesuai target dan dapat dinilai menunjang.
- Program Penanggulangan Bencana dengan indikator persentase desa tangguh bencana mencapai 147,68%. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik dalam penguatan kapasitas masyarakat dan desa dalam menghadapi risiko bencana. Walaupun status pada tabel belum dituliskan, berdasarkan capaian tersebut program ini dapat dinilai menunjang.
- Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban bencana telah berjalan sesuai target. Berdasarkan capaian tersebut, program ini juga dapat dinilai menunjang.
- Secara umum, program-program pendukung Sasaran 4.2.6 telah memberikan kontribusi yang baik, terutama dalam penanganan pascabencana, pelayanan korban, dan penguatan desa tangguh bencana. Namun demikian, capaian sasaran yang masih di bawah target menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana secara menyeluruh masih perlu diperkuat, terutama pada aspek mitigasi dan pencegahan.

Indeks Infrastruktur wilayah ini ditentukan melalui pengukuran capaian beberapa indikator lainnya sebagai berikut :

- 1) Persentase Jalan kondisi mantap
- 2) Persentase irigasi baik
- 3) Persentase RT yang terakses air minum layak
- 4) Persentase RT sanitasi layak
- 5) Persentase penanganan kawasan kumuh

Lebih lanjut Tren perkembangan indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lombok Tengah dari 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 47 Perkembangan indeks infrastruktur wilayah 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan grafik Indeks Infrastruktur Wilayah selama periode 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2024, meskipun pada 2025 terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2021, Indeks Infrastruktur Wilayah tercatat sebesar 66,23. Pada 2022, indeks tersebut meningkat menjadi 68,03, atau naik sebesar 1,80 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

Selanjutnya pada 2023, indeks kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,83, atau bertambah 5,80 poin dari tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pada 2024, capaian Indeks Infrastruktur Wilayah meningkat lagi menjadi 74,93, atau naik sebesar 1,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini merupakan capaian tertinggi selama periode 2021–2025.

Namun demikian, pada 2025 terjadi sedikit penurunan indeks menjadi 72,46, atau turun sebesar 2,47 poin dibandingkan capaian tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode awal (2021–2022).

III.1.16 III.1.14 SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Konektivitas tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya akses jalan atau sarana transportasi, tetapi juga sebagai keterhubungan yang efektif antara pusat-pusat produksi, distribusi, pelayanan publik, dan permukiman masyarakat.

Upaya peningkatan konektivitas diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten, peningkatan kualitas jembatan, serta pengembangan akses menuju sentra pertanian, perikanan, pariwisata, dan kawasan ekonomi lainnya. Dengan infrastruktur yang semakin baik, mobilitas orang dan barang menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih efisien, serta biaya logistik dapat ditekan. Hal ini secara langsung meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Selain itu, konektivitas yang baik memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. Desa-desa yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat perdagangan. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat meningkat dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan secara bertahap.

Peningkatan konektivitas juga berperan sebagai pengungkit (enabler) bagi sektor-sektor strategis. Ketersediaan akses menuju kawasan pertanian dan destinasi wisata, misalnya, menciptakan efek pengganda ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan.

Capaian target terkait dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dalam dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 69 SASARAN 4.2.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Konektivitas	Poin	$= \frac{\sum \text{jaringan jalan}}{\sum \text{jumlah kota}}$	86,50	93,248	99,99	85,18	88,44	98,37	94,84	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

1. **Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Capaian indikator Indeks Konektivitas Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks konektivitas ditetapkan sebesar 93,248 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,44 poin. Dengan demikian, terdapat selisih negatif sebesar 4,81 poin, atau capaian kinerja baru mencapai sekitar 94,84% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum berhasil memenuhi sasaran yang direncanakan.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pengembangan konektivitas wilayah, baik dari aspek infrastruktur transportasi, kualitas jaringan jalan, aksesibilitas antar wilayah, maupun keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta belum optimalnya integrasi antar moda transportasi juga dapat menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator ini.

Secara keseluruhan, meskipun capaian indeks konektivitas menunjukkan nilai yang cukup tinggi, namun masih diperlukan upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, penguatan integrasi antar wilayah, serta optimalisasi perencanaan pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;***

Capaian kinerja indikator Indeks Konektivitas Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya peningkatan kinerja, meskipun belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, baik tahunan maupun jangka menengah.

Pada tahun 2024, target indeks konektivitas ditetapkan sebesar 86,50 poin dengan realisasi sebesar 85,18 poin. Capaian ini masih berada di bawah target dengan selisih 1,32 poin atau sekitar 98,47% dari target, yang menunjukkan bahwa kinerja belum optimal.

Memasuki tahun 2025, target meningkat cukup signifikan menjadi 93,248 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,44 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 juga masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 4,81 poin atau sekitar 94,84% dari target. Meskipun belum memenuhi target, secara absolut terjadi peningkatan

capaian sebesar 3,26 poin dibandingkan tahun 2024 (dari 85,18 menjadi 88,44), yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja konektivitas wilayah.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi***

Namun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 99,99 poin, capaian tahun 2025 masih memiliki selisih yang cukup besar, yaitu 11,55 poin. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja indeks konektivitas menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum mampu mengimbangi kenaikan target yang cukup tinggi. Ke depan, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas jaringan transportasi, serta penguatan integrasi antar wilayah agar capaian indikator ini dapat lebih optimal dan mendekati target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Indeks konektivitas merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor penghambat capaian indikator adalah sbb

- a. Keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas;
- b. Penetapan target yang belum dirasionalkan dengan kapasitas upaya pencapaian kinerja (target jauh lebih besar dari kapasitas);
- c. Kondisi jalan kabupaten/desa yang belum seluruhnya kategori mantap atau rusak.
- d. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.

Alterntif /Solusi peningkatan pencapaian indikator :

- a. Prioritas peningkatan jalan kabupaten menuju sentra produksi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan dasar
- b. Penyelarasan program konektivitas dalam RKPD dengan RPJMD dan RTRW;
- c. Penguatan *money follow program* berbasis prioritas konektivitas wilayah tertinggal;
- d. Penyusunan *roadmap* konektivitas kawasan strategis.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 70 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.1 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	94,84	93,11	-1,73

Pada sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Indeks Konektivitas, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 94,84%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,11%, dengan nilai efisiensi sebesar -1,73% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong relatif efisien, karena penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Capaian kinerja mencapai (94,84%), namun belum mencapai 100%.
- Penyerapan anggaran juga tidak maksimal (93,11%), sehingga terdapat penghematan.
- Secara perbandingan input-output, penggunaan sumber daya masih tergolong efisien, namun efektivitas capaian kinerja perlu ditingkatkan.

7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Tabel III. 71 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.1.2 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	93,248 poin	94,84%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	82,41	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	100,1	Menunjang
Rata-rata capain program							91,25	Tinggi

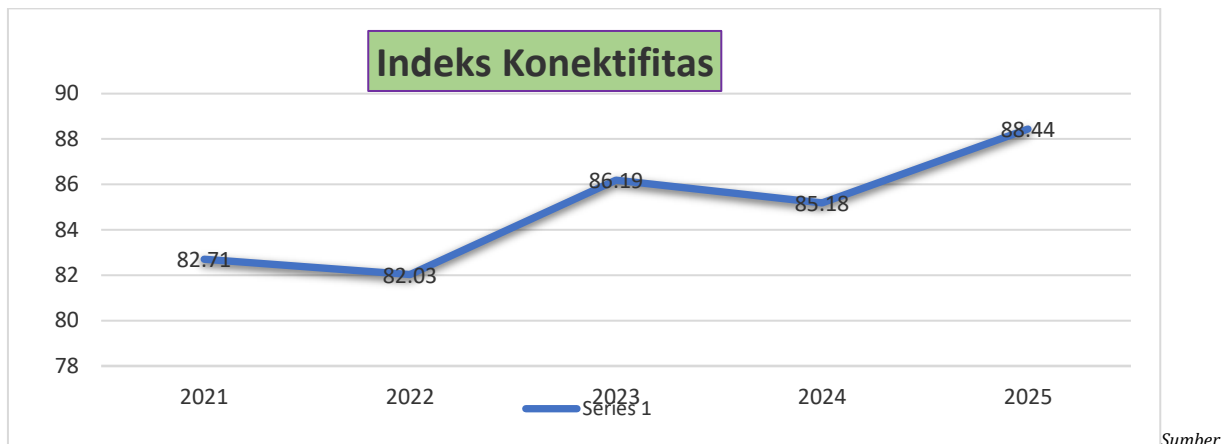
Pada rogram Penyelenggaraan Jalan dengan Indikator “Persentase jalan mantap” dengan capaian sebesar 82,41% dapat dinilai menunjang namun belum optimal terhadap sasaran. Kondisi jalan yang mantap merupakan faktor utama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran mobilitas orang dan baran

Kemudian pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator “Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan” dengan capaian sebesar 100,1% dapat dinilai sangat menunjang terhadap sasaran. Ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya berperan penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

Berdasarkan capaian kedua program tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang pencapaian sasaran, dengan tingkat kontribusi yang berbeda. Program Penyelenggaraan LLAJ berperan sangat menunjang terutama pada aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan Program Penyelenggaraan Jalan menunjang namun masih perlu dioptimalkan pada peningkatan kondisi jalan mantap.

(lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 48 Perkembangan Indeks Konektifitas 2021-2025



: Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan grafik tersebut maka Indeks Konektivitas selama periode 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks mengalami dinamika dari tahun ke tahun, namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, Indeks Konektivitas tercatat sebesar 82,71. Pada 2022, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 82,03, atau turun sebesar 0,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat keterhubungan wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur maupun mobilitas antarwilayah.

Selanjutnya pada 2023, indeks konektivitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 86,19, atau naik sebesar 4,16 poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah yang didukung oleh pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi. Pada 2024, indeks konektivitas kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 85,18, atau turun sebesar 1,01 poin dibandingkan tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian pada awal periode.

Pada 2025, indeks konektivitas meningkat kembali secara signifikan menjadi 88,44, atau naik sebesar 3,26 poin dibandingkan tahun 2024. Capaian ini merupakan nilai tertinggi selama periode 2021–2025, yang menunjukkan semakin baiknya tingkat keterhubungan wilayah dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.

III.1.17 III.1.15 SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN

Sistem irigasi yang andal dan merata tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan produktivitas, stabilitas hasil panen, serta kesejahteraan petani.

Upaya peningkatan cakupan layanan dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi saluran yang mengalami kerusakan, serta optimalisasi fungsi bendung dan embung sebagai sumber suplai air. Selain itu, normalisasi dan pemeliharaan rutin saluran irigasi menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi air berjalan lancar hingga ke lahan pertanian di hilir.

Dengan bertambahnya luas lahan yang terlayani irigasi teknis maupun setengah teknis, indeks pertanaman (IP) dapat meningkat, memungkinkan petani melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun. Ketersediaan air yang lebih terjamin juga mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan dan meningkatkan kualitas hasil produksi.

Peningkatan cakupan layanan irigasi tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tanaman pangan, tetapi juga mendukung pengembangan hortikultura dan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Melalui komitmen pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan, sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah diharapkan semakin merata, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat terjaga, produktivitas pertanian meningkat, dan kesejahteraan masyarakat petani semakin membaik secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian target terkait cakupan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	=45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	66,10	68,60	71,1	70,58	77,11	106,78	112,41	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indeks kinerja sistem irigasi ditetapkan sebesar 68,60 poin, sementara realisasi yang dicapai mencapai 77,11 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 8,51 poin atau sekitar 112,41% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan pembangunan sistem irigasi berada jauh di atas ekspektasi.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas dan fungsi jaringan irigasi berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat didukung oleh berbagai faktor, seperti rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang optimal, peningkatan tata kelola air, partisipasi aktif petani dalam pengelolaan irigasi, serta dukungan program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah telah dikelola dengan baik dan mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan kinerja ini melalui pemeliharaan rutin, peningkatan efisiensi distribusi air, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;***

Capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif dan signifikan dari tahun ke tahun, serta melampaui target tahunan maupun target RPJMD.

Pada tahun 2024, target indeks sistem irigasi ditetapkan sebesar 66,10 poin, dengan realisasi mencapai 70,58 poin. Capaian ini melampaui target sebesar 4,48 poin atau sekitar 106,78%, menunjukkan kinerja pengelolaan irigasi yang sudah cukup baik.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 68,60 poin, sementara realisasi meningkat menjadi 77,11 poin. Dengan demikian, capaian tahun 2025 melampaui target tahunan sebesar 8,51 poin atau sekitar 112,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 6,53 poin (dari 70,58 menjadi 77,11), yang menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pengelolaan dan efektivitas sistem irigasi.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 71,1 poin, capaian tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah sebesar 6,01 poin, menegaskan bahwa indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan tetapi juga berhasil melampaui sasaran pembangunan jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sangat baik, mendukung produktivitas pertanian, dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Ke depan, pemeliharaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan peningkatan efisiensi distribusi air tetap menjadi fokus utama agar kinerja sistem irigasi tetap optimal.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Indeks kinerja sistem irigasi merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang mendorong pencapaian indikator :

- a. Rehabilitasi dan peningkatan saluran primer, sekunder, dan tersier secara berkala;
- b. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang baik untuk menjaga debit air
- c. Kualitas dan kapasitas jaringan irigasi (saluran primer, sekunder, tersier). terawat dengan baik sehingga tingkat kerusakan atau keberfungsian sistem irigasi menjadi efektif;
- d. Kesadaran petani dalam menjaga dan merawat jaringan irigasi.

Solusi/alternatif untuk peningkatan indeks kinerja sitem irigasi adalah:

- a. Pemeliharaan preventif secara berkala (pembersihan sedimentasi sebelum musim tanam);
- b. Revitalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- c. Penyesuaian kalender tanam untuk mengurangi konflik distribusi;
- d. Rehabilitasi daerah tangkapan air (konservasi hulu).

6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel III. 73 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.2 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	112,41	99,37	-13.04

Pada sasaran meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten dengan indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 112,41%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,37%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,37\% - 112,41\% = -13,04\%$

Nilai efisiensi sebesar -13,04% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ✓ Capaian kinerja melampaui target pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi.
- ✓ Terdapat penghematan anggaran sebesar 13,04% dari total pagu.
- ✓ Output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 112,41% dan tingkat efisiensi -13,04%, maka sasaran meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten dapat dikategorikan sangat efisien, karena mampu menghasilkan capaian yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 74 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.2 Pada Tujuan 4.2 Misi
4

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	68,60 poin	112,41%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	109,4	Mennjang
	Rata-rata capain program						109,4	Sangat tinggi

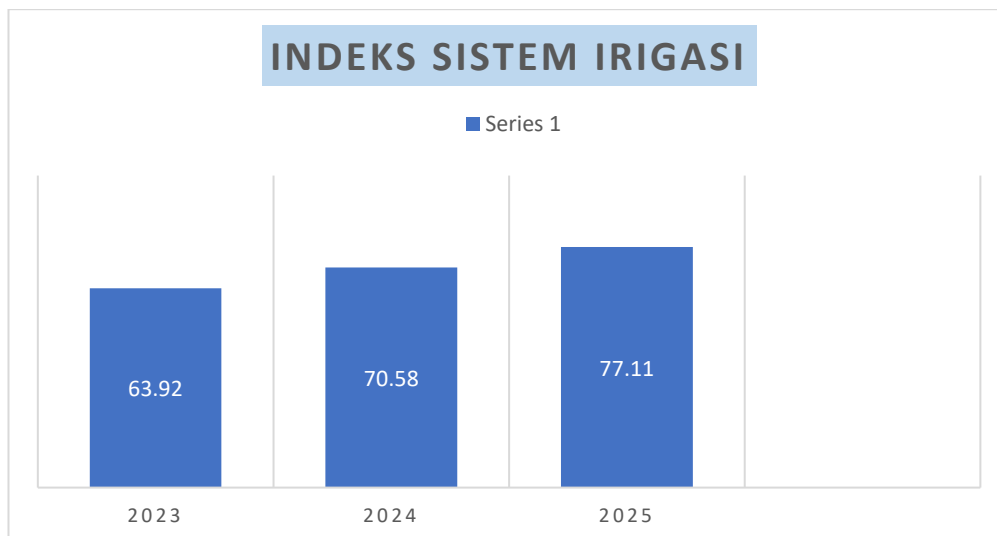
Pada Indikator program yaitu “Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi” dengan capaian sebesar 109,4% dapat dinilai sangat menunjang terhadap pencapaian sasaran. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa pelayanan jaringan irigasi telah menjangkau area yang lebih luas dari yang direncanakan, sehingga meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya air telah berjalan efektif, termasuk dalam hal pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi distribusi air. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, perlu tetap diperhatikan aspek kualitas layanan, seperti kondisi fisik jaringan, efisiensi distribusi, serta keberlanjutan sumber air, agar peningkatan cakupan layanan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja sistem irigasi secara menyeluruh.

Untuk Tren perkembangan indeks kinerja system irigasi Kabupaten Lombok dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar III. 49 Perkembangan indeks kinerja system irigasi 2023-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas terlihat dengan jelas bahwa capaian untuk dua terakhir pada indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. pencapaian ini tentu sekali merupakan kerja keras perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang mebidangi irigasi disamping itu pula kesadaran para petani untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada juga sudah meningkat.

III.1.18 III.1.16 SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN

Peningkatan akses air minum aman merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Air minum yang aman tidak hanya menyangkut ketersediaan secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis sehingga layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Upaya peningkatan akses dilakukan melalui pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) skala kawasan maupun perdesaan, serta optimalisasi sumber air baku yang berkelanjutan. Selain itu, rehabilitasi instalasi pengolahan air dan pengurangan tingkat kebocoran jaringan distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan kontinuitas layanan.

Pemerintah daerah juga mendorong pemerataan layanan hingga ke wilayah perdesaan dan kawasan dengan tingkat akses rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang air bersih dan sanitasi.

Peningkatan akses air minum aman memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta efisiensi pengeluaran rumah tangga. Ketersediaan air yang layak dan terjangkau juga mendukung aktivitas ekonomi, termasuk sektor UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Capaian target untuk meningkatnya akses air minum aman dapat dilihat pada tabel dibawah ;

Tabel III. 75 SASARAN 4.2.3
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Cakupan layanan air minum	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	79,28	79,78	80,28	78,82	76,30	99,42	95,64	Tinggi

1. ***Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini***

Capaian indikator Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target cakupan layanan air minum ditetapkan sebesar 79,78%, sementara realisasi yang dicapai hanya 76,30%. Dengan demikian, terdapat selisih negatif sebesar 3,48 poin atau capaian baru sekitar 95,63% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan air minum di Kabupaten Lombok Tengah masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi sasaran yang direncanakan.

Belum tercapainya target ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan distribusi air, aksesibilitas ke daerah terpencil yang masih rendah, kapasitas sumber air yang terbatas, serta tantangan operasional dalam pengelolaan layanan air minum.

Secara keseluruhan, meskipun capaian belum memenuhi target, angka 76,30% menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terlayani. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan layanan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas sumber daya air, serta penguatan manajemen penyediaan air minum agar cakupan layanan dapat mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu***

Capaian indikator Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren kinerja yang beragam, dengan capaian tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan belum mencapai target jangka menengah RPJMD.

Pada tahun 2024, target cakupan layanan air minum ditetapkan sebesar 79,28%, dengan realisasi mencapai 78,82%. Capaian ini hampir mendekati target, selisih hanya 0,46 poin atau sekitar 99,42% dari target, menunjukkan bahwa layanan air minum pada tahun tersebut relatif stabil dan mendekati sasaran.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 79,78%, namun realisasi hanya mencapai 76,30%. Dengan demikian, capaian berada di bawah target sebesar 3,48 poin atau sekitar 95,63% dari target, menunjukkan adanya penurunan kinerja dibandingkan

tahun 2024, meskipun secara absolut tetap lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023/awal periode.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80,28%, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target sebesar 3,98 poin. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan layanan air minum masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi sasaran pembangunan jangka menengah dan memastikan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar masyarakat telah terlayani, capaian tahun 2025 menunjukkan perlunya percepatan upaya peningkatan layanan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas sumber air, dan penguatan pengelolaan layanan air minum agar target tahunan maupun RPJMD dapat tercapai secara berkelanjutan.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Cakupan Layanan Air Minum merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor penghambat pencapaian target indikator :

- a. Adanya penyesuaian data penduduk yang berpengaruh terhadap perubahan hasil perhitungan persentase RT yang terlayani air minum oleh perangkat daerah teknis ;
- b. Belum optimalnya peningkatan dan pengukuran kualitas air yang dipasok dari infrastruktur air minum yang dibangun;
- c. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum;
- d. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM.

Solusi/Alternatif untuk mendukung pencapaian target indikator cakupan layanan air minum :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi untuk meningkatkan akses air bersih di daerah yang belum terjangkau;
- b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Edukasi masyarakat tentang konservasi air untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air serta menggalakan reboisasi untuk kelangsungan ekosistem terutama dalam wilayah yang menyediakan mata air;
- d. Peningkatan peran PDAM dalam menyediakan layanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat.
- e. Membuat atau mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan air berkelanjutan, termasuk pengawasan kualitas dan kuantitas air.

6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel III. 76 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.3 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	95,64	99,27	3,63

Pada sasaran meningkatnya akses air minum aman dengan indikator cakupan layanan air minum, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 95,64%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,27%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh 99,27%–

95,64%=3,63%

Nilai efisiensi sebesar 3,63% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong kurang efisien, karena penggunaan anggaran relatif tinggi, sementara capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ❖ Capaian kinerja belum optimal baru mencapai 95,64%.
- ❖ Penyerapan anggaran cukup tinggi 99,27%.
- ❖ Terdapat ketidakseimbangan antara input dan output, di mana anggaran hampir habis namun hasil belum maksimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 95,64% dan tingkat efisiensi 3,63%, maka sasaran meningkatnya akses air minum aman dapat dikategorikan kurang efisien, karena penggunaan anggaran yang tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan capaian kinerja yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 77 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.3 pada Tujuan 4.1 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	79,78%	95,64%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	89,75	Menunjang
	Rata-rata capain program						89,75	Tinggi

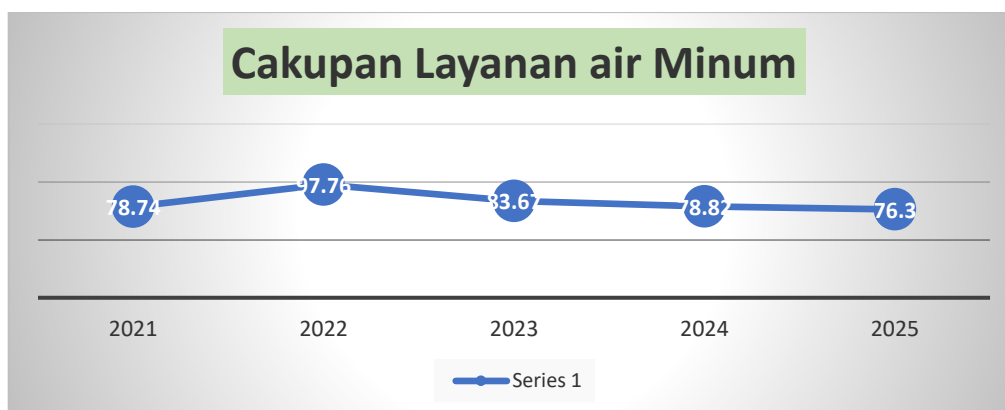
Capaian program sebesar 89,75% menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program berada pada kategori menunjang namun belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah terlayani akses air minum, namun masih terdapat kelompok atau wilayah yang belum mendapatkan layanan secara memadai.

Dari sisi kontribusi terhadap sasaran, capaian ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses air minum aman, baik melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, maupun perbaikan kualitas layanan. Namun demikian, capaian yang belum mencapai target optimal menunjukkan bahwa upaya perluasan layanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, maupun kapasitas pengelolaan.

Dengan demikian, Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dapat dinilai telah menunjang pencapaian sasaran, tetapi kontribusinya masih perlu ditingkatkan agar cakupan layanan air minum dapat lebih merata dan menyeluruh.

Perkembangan pencapaian indikator cakupan layanan air minum ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar III. 50 Perkembangan Cakupan layanan air minum 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat kondisi perkembangan untuk cakupan layanan air minum terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. hal ini dipegaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari pengguna atau masyarakat yang dilayani volumenya semakin banyak kemudian dari faktor alam sebagai penyedia pasokan air mengalami penyusutan debit maupun ketersediaanya.

III.1.19 III.1.17 SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permukiman yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh kondisi fisik bangunan yang memadai, tetapi juga tersedianya infrastruktur dasar, akses pelayanan publik, serta lingkungan yang tertata dan nyaman.

Upaya peningkatan kualitas kawasan dilakukan melalui penataan dan rehabilitasi permukiman, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Selain aspek fisik, pemerintah daerah juga mendorong penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan pemeliharaan lingkungan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi rumah tangga menjadi bagian integral dalam pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

Penataan kawasan perumahan dan permukiman juga diarahkan agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga pertumbuhan permukiman dapat terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir, kepadatan berlebih, maupun degradasi lahan.

Untuk melihat capaian indikator terkait penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel III. 78 SASARAN 4.2.4
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha/tahun	= Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	775.37	765,37	755.37	751.07	775,37	103.13	98,69	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. ***Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini***

Capaian indikator Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja dalam menurunkan kawasan kumuh belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2025, target luasan kawasan kumuh yang tersisa ditetapkan sebesar 765,37 hektar, sementara realisasi tercatat sebesar 775,37 hektar. Dengan catatan bahwa semakin kecil volume realisasi, semakin baik dan berhasil, capaian tahun 2025 ini menunjukkan bahwa luasan kumuh yang tersisa masih lebih tinggi dibanding target, sehingga kinerja penanganan belum optimal. Terdapat selisih 10 hektar lebih tinggi dari target, yang menunjukkan perlunya percepatan upaya penanganan.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan lahan untuk revitalisasi, hambatan teknis dalam penataan kawasan, keterbatasan anggaran, atau koordinasi antar pihak terkait yang belum maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun masih berada di atas target, capaian ini menegaskan pentingnya strategi lanjutan dalam menurunkan luasan kawasan kumuh. Upaya yang perlu diperkuat meliputi peningkatan revitalisasi kawasan permukiman, penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pengawasan pembangunan permukiman agar target tahunan dapat tercapai dan kualitas permukiman meningkat secara signifikan.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;***

Capaian indikator Luasan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, dengan catatan bahwa semakin kecil luasan kawasan kumuh yang tersisa, semakin baik pencapaian indikator.

Pada tahun 2024, target penanganan kawasan kumuh ditetapkan sebesar 775,37 ha, dengan realisasi mencapai 751,07 ha. Mengingat prinsip bahwa semakin kecil luasan kumuh yang tersisa semakin baik, realisasi 751,07 ha menunjukkan bahwa kinerja penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 cukup baik karena berhasil menurunkan volume kawasan kumuh dibanding target.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 765,37 ha, sementara realisasi mencapai 775,37 ha. Dalam konteks indikator ini, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa luasan kumuh yang tersisa lebih besar dari target, sehingga kinerja relatif menurun dibanding target tahunan, meskipun secara absolut masih sejalan dengan upaya pengendalian kawasan kumuh.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 755,37 ha, capaian tahun 2025 masih berada di atas target jangka menengah. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan upaya tambahan untuk menurunkan luasan kawasan kumuh sesuai target RPJMD.

Secara keseluruhan, indikator luasan kawasan kumuh menunjukkan bahwa kinerja penanganan masih membutuhkan percepatan dan peningkatan efektivitas program, termasuk melalui revitalisasi kawasan, penguatan partisipasi masyarakat, pengelolaan lahan, dan pengawasan pembangunan permukiman agar target jangka menengah dan prinsip “semakin kecil semakin baik” dapat tercapai secara optimal.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;***

Luasan penanganan Kawasan kumuh merupakan Indikator yang menjadi salah satu item/instrument pembentuk indeks infrastruktur wilayah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan standar nasional sebab aspek pendekatannya yang berbeda antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Faktor yang menyebabkan target tidak tercapai adalah sbb :

- a. Alokasi APBD untuk penataan kawasan permukiman masih terbatas dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang harus ditangani;
- b. Ketergantungan pada dukungan program pemerintah pusat, Provinsi relatif masih besar untuk penataan kawasan kumuh;
- c. Anggaran penataan kawasan kumuh relatif tinggi karena membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar sekaligus.
- d. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan kawasan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekumuhan dan jumlah penduduk terdampak;
- b. Sinkronisasi program daerah dengan program pemerintah pusat, misalnya melalui program penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
- c. Penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar tidak muncul kawasan kumuh baru;
- d. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR.

Tabel III. 79 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.1.2.4 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	98,69	99,55	0,86

Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman dengan indikator luasan penanganan kawasan kumuh, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 98,69%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,55%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,55\% - 98,69\% = 0,86\%$

Nilai efisiensi sebesar 0,86% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong kurang efisien, meskipun selisih antara input dan output relatif kecil.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Capaian kinerja hampir mencapai target (98,69%), namun belum optimal.
- Penyerapan anggaran sangat tinggi (99,55%), mendekati penuh.
- Terdapat selisih kecil antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja, yang menunjukkan bahwa efisiensi belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 98,69% dan tingkat efisiensi 0,86%, maka sasaran meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman dapat dikategorikan cukup efisien namun belum optimal, karena penggunaan anggaran hampir seluruhnya terserap, sementara capaian kinerja belum mencapai 100%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III. 80 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.4 pada Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran (%)	Capaian kinerja	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	765,37 ha/thn	98,69	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0	Tidak Menunjang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman	86,91	Menunjang
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	375,73	Menunjang
	Rata-rata capain program						231,32	Sangat Tinggi

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Indikator “Persentase akses sanitasi layak dan aman” dengan capaian sebesar 85,91% dapat dinilai menunjang namun belum optimal terhadap sasaran. Akses sanitasi yang layak merupakan salah satu komponen utama dalam penilaian kawasan kumuh.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan Indikator “Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU” dengan capaian sebesar

375,73% dapat dinilai sangat menunjang secara signifikan terhadap sasaran. Capaian yang jauh melampaui target

Berdasarkan capaian kedua program tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendukung telah menunjang pencapaian sasaran, dengan tingkat kontribusi yang berbeda. Program PSU menjadi faktor dominan yang sangat menunjang, sementara program pengelolaan air limbah menunjang namun masih perlu dioptimalkan.

Dengan demikian, sinergi kedua program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman serta pengurangan luasan kawasan kumuh.

Untuk Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani capain kinerjanya adalah 0% disebabkan oleh Perangkat Daerah teknis fokus ke pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan masih dalam penyusunan dokumen perencanaan (DED) penanganan kawasan kumuh.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. Tabel berikut adalah daftar permukiman kumuh tahun 2025.

Tabel III. 81 NAMA LOKASI DAN LUAS KAWASAN KUMUH

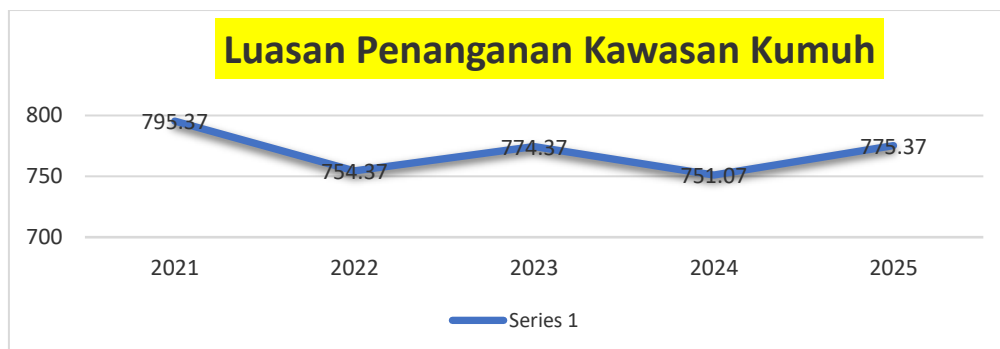
No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16.76
2	Semayan	2.25
3	Perbawe	2.60
4	Leneng dan Handayani	7.42
5	Kemulah	2.31
6	Wakul	2.92
7	Ketejer	4.42
8	Lok dan Gubuk alang	16.60
9	Montong Gamang	25.11
10	Enjer	15.50
11	Kuta Dua	5.23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17.18
13	Sokat	14.99
14	Awang	20.74
15	Penyalun. Kukun. Rebuk 1 & Rebuk 2	15.22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9.49
17	Gerupuk	23.98
18	Ketiwing.Montong dan Begum	23.02

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
19	Baturiti. Tumpak Satu. Mawundan Are Guling	81.93
20	Pancor	25.97
21	Bongak dan Bunlesung	6.00
22	Bile Tengah	18.84
23	Kampung Nelayan	1.30
24	Rujak Praya	7.99
25	Rujak Tengah	9.01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22.61
27	Aur Manis	4.77
28	Kelongkong	2.29
29	Tanak Awu	15.38
30	Jomang. Kebontun. Batulang. Belong. Ketangge. dan Gabah	44.65
31	Bagean dan Mentor	50.79
32	Adong. Krangi dan Tongkek	21.49
33	Piang	9.84
34	Dusun Selak	3.23
35	Ketare	51.10
36	Mujur	23.00
37	Beleka	56.61
38	Labulia. Sulin dan Pande	40.80
39	Bun Sumpak	32.53
40	Ceret. Seganteng. Keren. Rajumas dan Jantuk	28.00
41	Pancor Dao	17.30
42	Pemepek	14.20
Total		815.37

Sumber : LKjIP Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Untuk mengetahui perkembangan pengurangan luas kawasan kumuh di Lombok Tengah dalam lima tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar III. 51 Pengurangan luas wilayah kawasan kumuh 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan grafik Luasan Penanganan Kawasan Kumuh selama periode 2021–2025, terlihat bahwa capaian penanganan kawasan kumuh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tetap menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam penanganan dan pengurangan kawasan kumuh. Pada tahun 2021, luasan penanganan kawasan kumuh tercatat sebesar 795,37. Pada 2022, capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 754,37, atau turun sebesar 41,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.

Selanjutnya pada 2023, luasan penanganan kawasan kumuh kembali meningkat menjadi 774,37, atau naik sebesar 20,00 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya tambahan luasan kawasan kumuh, namun pada 2024, capaian kembali mengalami penurunan menjadi 751,07, atau turun sebesar 23,30 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, program penanganan kawasan kumuh tetap menunjukkan keberlanjutan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pada 2025, luasan penanganan kawasan kumuh kembali mengalami peningkatan menjadi 775,37, atau naik sebesar 24,30 luas kawasan dibandingkan capaian tahun 2024.

III.1.20 III.1.18 SASARAN 4.2.5 MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (*supply*) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup. Penghitungan daya dukung daya tampung dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya.

Karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Dengan pendekatan jasa lingkungan hidup, DDDT dari aspek ketersediaan adalah sama dengan

besaran jasa lingkungan atau besaran kontribusi yang mampu diberikan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.

Capaian indikator untuk meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 82 SASARAN 4.2.5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	= (Ikualitas air + Ikualitas udara + Itutupan lahan) / 3	60.87	61,10	61.40	63.47	70,14	104.27	114,80	Sangat tinggi
Cakupan layanan persampahan	Perse n	=Jumlah wilayah terlayani persampahan / Jumlah seluruh wilayah	29.3	30,3	31.3	39.65	35,51	135.32	117,19	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

A. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target IKLH ditetapkan sebesar 61,10 poin, sementara realisasi yang dicapai mencapai 70,14 poin. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 9,04 poin, atau persentase capaian mencapai 114,80% dari target. Hal ini menegaskan bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah berjalan melebihi ekspektasi.

Capaian yang tinggi ini menunjukkan keberhasilan berbagai program dan strategi lingkungan, seperti peningkatan kualitas air, pengelolaan sampah yang lebih baik, penataan kawasan hijau, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian pencemaran. Peningkatan indeks juga mencerminkan bahwa lingkungan hidup di daerah ini lebih sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator IKLH tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Ke depan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemantauan lingkungan yang lebih intensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan regulasi dan program pengelolaan lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dan terus meningkat.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan kinerja yang positif dari tahun 2024 ke 2025, sekaligus melampaui target tahunan maupun target jangka menengah RPJMD.

Pada tahun 2024, target IKLH ditetapkan sebesar 60,87 poin dengan realisasi 63,47 poin, sehingga capaian mencapai 104,27% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 telah melebihi ekspektasi, meskipun selisih capaian masih relatif moderat.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 61,10 poin, sementara realisasi mencapai 70,14 poin. Persentase capaian tahun 2025 sebesar 114,80%, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya dan menegaskan kinerja yang jauh melampaui target tahunan. Jika dibandingkan secara absolut, terjadi peningkatan realisasi sebesar 6,67 poin (dari 63,47 menjadi 70,14), yang mencerminkan keberhasilan program pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2025 telah melampaui sasaran yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pembangunan lingkungan hidup di Lombok Tengah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung target jangka menengah dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian IKLH menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konsisten, mencerminkan efektivitas kebijakan lingkungan, peningkatan pengelolaan sumber daya, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Ke depan, perlu terus dipertahankan melalui penguatan pemantauan, pengelolaan limbah, pengembangan ruang terbuka hijau, dan program konservasi yang berkelanjutan.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian daerah masih berada di bawah tingkat nasional.

Pada tahun 2025, IKLH Lombok Tengah tercatat sebesar 70,14 poin, sedangkan IKLH nasional mencapai 76,49 poin. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 6,35 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Lombok Tengah masih sedikit tertinggal dibanding rata-rata nasional.

Kesenjangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi geografis, tingkat urbanisasi, kapasitas pengelolaan limbah dan sanitasi, serta intensitas kegiatan ekonomi yang memengaruhi kualitas lingkungan. Meskipun demikian, capaian 70,14 poin tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik secara lokal dan melampaui target tahunan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun masih ada perbedaan dengan capaian nasional, IKLH Lombok Tengah menunjukkan tren positif dan menunjukkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Ke depan, perlu dilakukan upaya lebih intensif, seperti peningkatan pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, pengembangan ruang terbuka hijau, dan penguatan regulasi lingkungan, agar kualitas lingkungan hidup daerah semakin mendekati standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

- a. Pengurangan praktik pembuangan sampah ke badan air.
- b. Penghijauan kawasan perkotaan dan penambahan ruang terbuka hijau.
- c. Pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

- a. Pembangunan dan perluasan IPAL komunal di kawasan padat penduduk;
- b. Penataan dan pengawasan pembuangan limbah usaha kecil, hotel, dan industri;
- c. Perlindungan kawasan resapan air dan sempadan sungai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 83 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.5 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	114,80	91,94	-22,86

Pada sasaran meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 114,80%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,94%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $91,94\% - 114,80\% = -22,86\%$

Nilai efisiensi sebesar -22,86% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target secara signifikan, sementara penggunaan anggaran lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement/melampaui target pada indikator IKLH.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 22,86% dari total pagu.
- Output yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 114,80% dan tingkat efisiensi -22,86%, maka sasaran meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dikategorikan sangat efisien, karena menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

**Tabel III. 84 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.5
pada Tujuan 4.2**

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,10 poin	114,80 %	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	102,99	Menunjang
	Rata-rata capain program						102,99	Sangat Tinggi

Dalam indikator program, yaitu “Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan” dengan capaian sebesar 102,99%, dapat dinilai menunjang secara signifikan terhadap pencapaian sasaran. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan semakin baik. Hal ini berdampak positif terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena perusahaan yang memiliki izin lingkungan umumnya telah melalui proses kajian dampak lingkungan dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan. Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Lombok Tengah sesuai tabel berikut :

Tabel III. 85 Hasil penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Indikator	2024			2025		
		Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil

1	Indeks Kualitas Air	56.67	0.376	18.4428	64.34	0.376	24.19184
2	Indeks Kualitas Udara	94.7	0.405	37.58805	82.1	0.405	33.2505
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34.34	0.219	7.43505	57.99	0.219	12.69981
IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH				63.4659			70.14215

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah. Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada kertas kerja IKLH Kabupaten Lombok Tengah, diketahui bahwa pada tahun 2024 nilai IKLH tercatat sebesar 63,47. Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi dari tiga indikator penyusun, yaitu Indeks Kualitas Air dengan nilai 56,67 dengan bobot 0,376 yang menghasilkan kontribusi sebesar 18,44, Indeks Kualitas Udara dengan nilai 94,70 dengan bobot 0,405 yang menghasilkan kontribusi sebesar 37,59, serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan nilai 34,34 dengan bobot 0,219 yang menghasilkan kontribusi sebesar 7,44.

Pada tahun 2025, nilai IKLH Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan menjadi 70,14. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan pada beberapa indikator penyusun. Indeks Kualitas Air meningkat menjadi 64,34 dengan kontribusi nilai sebesar 24,19, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas air di beberapa wilayah. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 34,34 pada tahun 2024 menjadi 57,99 pada tahun 2025, dengan kontribusi nilai sebesar 12,70. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan tutupan lahan, seperti melalui upaya rehabilitasi lahan, pengendalian alih fungsi lahan, serta peningkatan ruang terbuka hijau.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,10, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 94,70. Meskipun demikian, kontribusi indikator ini terhadap nilai IKLH masih relatif besar dengan hasil sebesar 33,25, mengingat bobot indikator kualitas udara merupakan yang tertinggi di antara komponen penyusun IKLH.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKLH Kabupaten Lombok Tengah dari 63,47 pada tahun 2024 menjadi 70,14 pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas lingkungan hidup di daerah. Peningkatan ini mencerminkan bahwa berbagai upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mulai memberikan dampak positif, khususnya dalam peningkatan kualitas air dan perbaikan tutupan lahan.

Trend perkembangan IKLH Lombok Tengah sesuai gambar berikut :

Gambar III. 52 Perkembangan IKLH dari tahun 2021 s/d 2025



Sumber : Dinas LH Kab. Lombok Tengah

Perkembangan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai indeks pada tahun 2021 sebesar 62,71, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,17. Pada tahun 2023 nilai indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 67,18, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 63,47. Selanjutnya pada tahun 2025 nilai IKLH meningkat cukup signifikan menjadi 70,14, yang merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir.

Fluktuasi nilai IKLH tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi tutupan lahan, kualitas air, kualitas udara, serta dinamika aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penurunan nilai indeks pada beberapa tahun tertentu dapat mencerminkan adanya tekanan terhadap lingkungan, baik akibat peningkatan aktivitas pembangunan, perubahan penggunaan lahan, maupun pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal.

B. CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target cakupan layanan persampahan ditetapkan sebesar 30,3%, sedangkan realisasi mencapai 35,51%. Dengan demikian, capaian melampaui target sebesar 5,21 poin atau sekitar 117,19% dari target, menegaskan bahwa program pengelolaan persampahan telah berjalan lebih efektif dibandingkan perencanaan awal.

Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan layanan persampahan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yang dapat dipengaruhi oleh optimalisasi sistem pengumpulan

dan pengelolaan sampah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kebersihan, serta penguatan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah. Peningkatan cakupan layanan persampahan juga berdampak positif terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan penataan kawasan permukiman.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di Lombok Tengah telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, dan penguatan partisipasi masyarakat agar layanan persampahan tetap optimal dan dapat terus ditingkatkan hingga mencapai cakupan yang lebih luas

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya dinamika kinerja yang berbeda antara tahun 2024 dan 2025, sekaligus menyoroti posisi capaian terhadap target akhir RPJMD.

Pada tahun 2024, target layanan persampahan ditetapkan sebesar 29,3%, dengan realisasi mencapai 39,65%, sehingga persentase capaian tercatat 135,32% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kinerja pengelolaan persampahan jauh melampaui target tahunan, menunjukkan efektivitas program layanan persampahan yang tinggi.

Memasuki tahun 2025, target meningkat menjadi 30,3%, sementara realisasi tercatat 35,51%, dengan persentase capaian sebesar 117,19%. Meskipun capaian tahun 2025 tetap melampaui target, persentase capaian menurun dibandingkan tahun 2024 (dari 135,32% menjadi 117,19%). Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan target tahunan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi. Secara absolut, meskipun realisasi menurun dari 39,65% menjadi 35,51%, kinerja tahun 2025 tetap berada di atas target.

3. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 31,3%, realisasi tahun 2025 telah melampaui sasaran jangka menengah sebesar 4,21 poin, menunjukkan bahwa layanan persampahan berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan layanan persampahan di Lombok Tengah tetap berada pada kinerja yang baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada pemeliharaan keberlanjutan layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan sampah agar capaian dapat terus ditingkatkan dan lebih konsisten dibanding target tahunan maupun RPJMD.

4. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Indikator cakupan layanan persampahan ini aspek pendekatan lebih secara kontekstual dan berdasarkan kebutuhan serta kondisi spesifik daerah sehingga tidak bisa disandingkan dengan nasional dan hal ini juga tidak berada pada basis dan skala yang sama dalam pengukurannya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor yang mendukung pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah. termasuk perawatan/pengadaan armada pengangkut dan infrastruktur pengolahan sampah.
- b. Ketersediaan TPS (Tempat Penampungan Sementara). TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang memadai
- c. Penyediaan alat pengangkut sampah yang mencukupi (truk sampah. motor pengangkut sampah. kontainer).
- d. Jadwal pengangkutan yang tepat dan tidak terlambat.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

- a. Pengembangan penerapan program bank sampah untuk meningkatkan kesadaran ekonomi dari daur ulang.
- b. Kampanye pengelolaan sampah di sekolah. tempat ibadah. dan komunitas;

- c. Peningkatan peran RT/RW dalam memilah dan mengelola sampah di tingkat lingkungan.
- d. Menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMS melalui program CSR dari perusahaan dalam bentuk fasilitas pengolahan sampah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 86 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.5 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	117,19	97,12	-20,07

Pada sasaran meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan indikator cakupan layanan persampahan, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 117,19%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,12%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $97,12\% - 117,19\% = -20,07\%$

Nilai efisiensi sebesar -20,07% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target secara signifikan, sementara penggunaan anggaran tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ✓ Terjadi over achievement/ melampaui target pada indikator cakupan layanan persampahan.
- ✓ Terdapat penghematan anggaran sebesar 20,07% dari total pagu.
- ✓ Output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 117,19% dan tingkat efisiensi -20,07%, maka sasaran meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada indikator cakupan layanan persampahan dapat dikategorikan sangat efisien, karena mampu menghasilkan capaian yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel III. 87 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.5 pada Tujuan 4.2

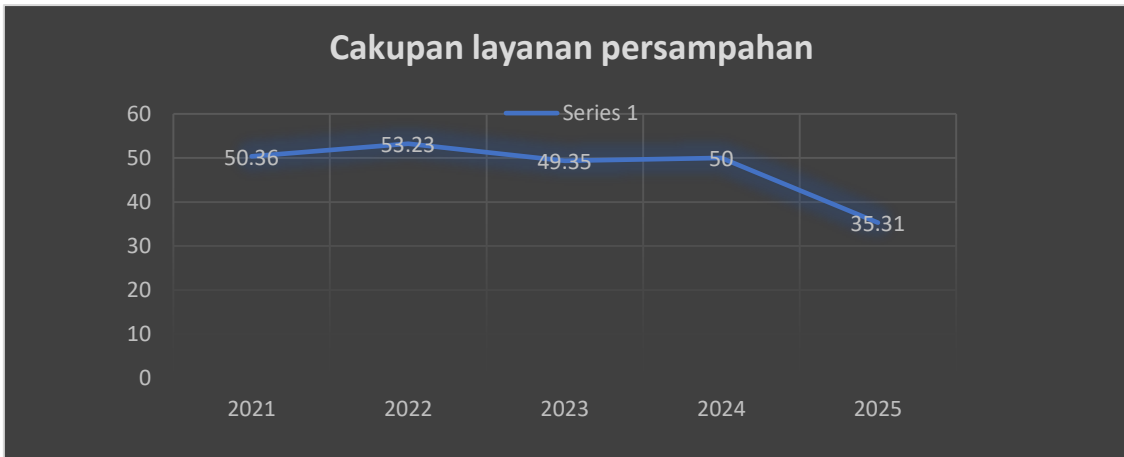
No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program (%)	Capain kinerja program	Menunjang /Tidak Menunjang	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah							
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	30,3%	117,19%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	74,77	Menunjang	
						Persentase Pengurangan Sampah	12,91	Tidak Menunjang	
	Rata-rata capain program							43,84	Rendah

Pada indikator pertama, yaitu “Persentase sampah yang ditangani” dengan capaian sebesar 74,77%, dapat dinilai cukup menunjang namun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah telah tertangani, tetapi masih terdapat porsi sampah yang belum terlayani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cakupan layanan persampahan belum sepenuhnya maksimal, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan.

Indikator kedua, yaitu “Persentase pengurangan sampah” dengan capaian sebesar 12,91%, dapat dinilai kurang menunjang terhadap sasaran. Rendahnya capaian pengurangan sampah menunjukkan bahwa upaya pengendalian dari sumber belum berjalan optimal. Padahal, aspek pengurangan sampah sangat penting dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta menjaga daya tampung lingkungan dalam jangka panjang

Untuk mengetahui lebih lanjut tren perkembangan cakupan layanan persampahan di Lombok Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III. 53 Perkembangan cakupan layanan persampahan tahun 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan cakupan layanan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung menurun, meskipun pada beberapa tahun sempat mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 cakupan layanan persampahan tercatat sebesar 50,36%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 53,23%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 49,35%, dan pada tahun 2024 relatif stabil pada angka 50,00%. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 35,31%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pelayanan pengelolaan persampahan terhadap jumlah penduduk atau wilayah yang dilayani mengalami tantangan yang cukup besar. Penurunan cakupan layanan pada tahun 2025 dapat mengindikasikan adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, keterbatasan armada pengangkutan sampah, peningkatan jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas layanan, serta masih terbatasnya jangkauan pelayanan terutama di wilayah permukiman yang jauh dari pusat layanan.

III.1.21 III.1.19 SASARAN 4.2.6. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA

Peningkatan ketahanan bencana merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, serta keberlangsungan pembangunan daerah. Ketahanan bencana mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari kejadian bencana secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, penguatan ketahanan bencana menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan ketahanan bencana dilakukan melalui berbagai langkah yang terintegrasi, mulai dari penguatan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aspek mitigasi bencana telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, tata ruang wilayah, serta program dan kegiatan perangkat daerah yang terkait. Dengan demikian, potensi risiko bencana dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, peningkatan ketahanan bencana juga dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan langkah-langkah penanganannya menjadi penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak secara tepat saat terjadi bencana.

Di sisi lain, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan bencana. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat ketahanan bencana di daerah dapat terus meningkat sehingga dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalkan

Berdasarkan buku Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah periode Tahun 2024-2028 Halaman 51 telah dituangkan dalam Tabel 2.40. mengenai Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Lombok Tengah :

1. Gempa Bumi
2. Tsunami
3. Tanah Longsor
4. Erupsi Gunung Api
5. Cuaca Ekstrim
6. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
7. Kekeringan
8. Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Banjir
10. Epidemii dan Wabah Penyakit

Tabel III. 88 SASARAN 4.2.6**Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Indeks Resiko Bencana	Poin	IRB= hazard x (vulnerability / capacity)	155.98	155,95	155.93	133.05	165,07	114.70	94,15	Sangat tinggi

Sumber : Buku IRB BNPB

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja dalam menurunkan risiko bencana masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, target IRB ditetapkan sebesar 155,95 poin, sementara realisasi tercatat 165,07 poin, dengan persentase pencapaian sebesar 94,15% dari target. Mengingat prinsip IRB, di mana semakin kecil nilai IRB menunjukkan risiko bencana yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik, capaian realisasi yang lebih tinggi dari target ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Lombok Tengah masih lebih tinggi dari yang diharapkan.

Hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya mitigasi risiko bencana, termasuk penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas penanganan darurat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan pendidikan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana.

Secara keseluruhan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan untuk menurunkan IRB ke level target. Ke depan, strategi mitigasi bencana yang lebih terintegrasi dan partisipatif sangat penting agar Kabupaten Lombok Tengah dapat mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara efektif.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika kinerja yang berbeda antara tahun 2024 dan 2025, serta posisi capaian terhadap target akhir RPJMD.

Pada tahun 2024, target IRB ditetapkan sebesar 155,98 poin, dengan realisasi tercatat 133,05 poin, sehingga persentase capaian mencapai 114,70%. Mengingat prinsip IRB, di mana semakin kecil nilai IRB menunjukkan risiko bencana lebih rendah dan kinerja lebih baik, capaian tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena berhasil menurunkan risiko bencana jauh di bawah target.

Memasuki tahun 2025, target IRB sebesar 155,95 poin, namun realisasi meningkat menjadi 165,07 poin, dengan persentase capaian 94,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan risiko bencana menurun dibanding tahun sebelumnya, karena nilai IRB lebih tinggi dari target. Dengan kata lain, risiko bencana meningkat dibanding tahun 2024 meskipun tetap menjadi fokus perhatian.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi***

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 155,93 poin, realisasi tahun 2025 masih berada di atas target jangka menengah, menandakan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

Secara keseluruhan, perbandingan antara dua tahun menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan pada beberapa aspek mitigasi, terdapat tantangan signifikan yang menyebabkan IRB meningkat pada tahun 2025. Ke depan, strategi mitigasi bencana perlu diperkuat, termasuk melalui pengembangan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas tanggap darurat, pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi perencanaan pembangunan yang lebih proaktif terhadap risiko bencana.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;***

Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah terhadap tingkat nasional menunjukkan bahwa Lombok Tengah memiliki risiko bencana yang sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Berdasarkan data tahun 2024, IRB Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 133,05 poin, sedangkan IRB rata-rata nasional sebesar 128,52 poin. Dengan selisih 4,53 poin, hal ini menunjukkan bahwa potensi risiko bencana di Lombok Tengah masih sedikit lebih tinggi dibanding kondisi nasional. Faktor penyebab perbedaan ini dapat meliputi kondisi geografis

yang rawan bencana, tingkat kerentanan masyarakat, infrastruktur yang belum sepenuhnya tahan bencana, serta kapasitas mitigasi yang masih perlu ditingkatkan.

Perlu dicatat bahwa data nasional yang digunakan merupakan data tahun 2024, karena data IRB tahun 2025 belum dipublikasikan oleh BNPB. Meskipun demikian, perbandingan ini memberikan gambaran bahwa meskipun Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya mitigasi, risiko bencana masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Tengah perlu memperkuat strategi mitigasi risiko bencana, termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas tanggap darurat, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi perencanaan pembangunan yang proaktif terhadap potensi risiko bencana agar IRB daerah dapat mendekati atau bahkan lebih baik dari rata-rata nasional.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;***

Faktor yang menghambat pencapaian indikator tersebut adalah :

- a. Dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian bencana;
- b. Berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan;
- c. Keterbatasan SDM teknis kebencanaan;
- d. Minimnya simulasi kebencanaan.

Solusi/Alternatif peningkatan capaian indikator ini adalah :

- a. Pembatasan izin pembangunan di kawasan rawan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM kebencanaan melalui pelatihan teknis;
- c. Penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pengurangan risiko;
- d. Peningkatan alokasi anggaran mitigasi.

6. ***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;***

Tabel III. 89 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4.2.6 Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M4	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;				
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah			
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	94,15	99,24	5,09

Pada sasaran meningkatnya ketahanan bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 94,15%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,24%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,24\% - 94,15\% = 5,09\%$

Nilai efisiensi sebesar 5,09% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong kurang efisien, karena penggunaan anggaran relatif tinggi, sementara capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- ❖ Capaian kinerja belum optimal dengan capaian sebesar 94,15%.
- ❖ Penyerapan anggaran sangat tinggi berada pada level 99,24%.
- ❖ Terdapat kesenjangan antara input dan output, di mana hampir seluruh anggaran telah digunakan namun hasil belum maksimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 94,15% dan tingkat efisiensi 5,09%, maka sasaran meningkatnya ketahanan bencana dapat dikategorikan kurang efisien, karena penggunaan anggaran yang tinggi belum diikuti dengan capaian kinerja yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel III. 90 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 4.2.6 pada Tujuan 4.2 Misi 4 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah						

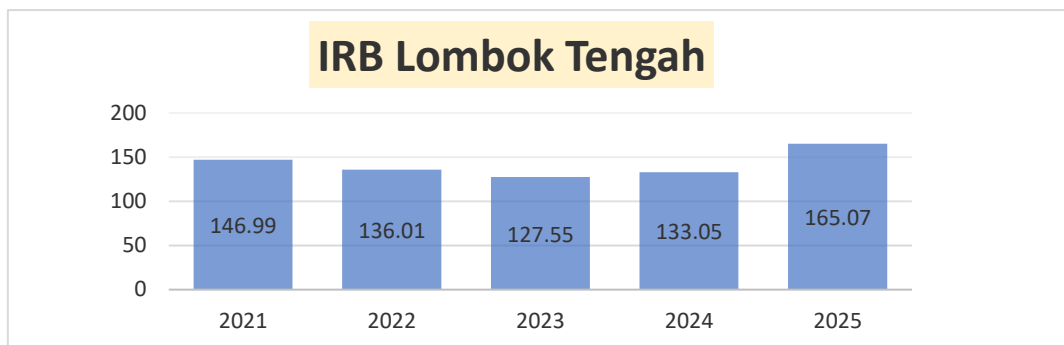
No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	115,95 poin	94,15 %	Program Pengembangan Perumahan	Pengelolaan/pe mel iharaan Perumahan (Rumah Susun Umum, Rumah Khusus dan Perumahan Komersil)	100	Menunjang
						Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	100	
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	147,68	
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100	
	Rata-rata capain program						115,89	Sangat tinggi

Berdasarkan capaian indikator pada masing-masing program, seluruh program pendukung dapat dikategorikan menunjang hingga sangat menunjang pencapaian Sasaran Kinerja 4.2.6. Program Penanggulangan Bencana menjadi faktor paling dominan karena berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. Sementara itu, Program Pengembangan Perumahan dan Program Penanganan Bencana berperan sebagai pendukung yang memperkuat aspek mitigasi struktural dan pemulihan pascabencana.

Dengan sinergi ketiga program tersebut, upaya peningkatan ketahanan bencana berjalan secara komprehensif dari hulu ke hilir, sehingga mendukung penurunan risiko bencana sebagaimana diukur melalui indikator IRB.

Lebih lanjut akan dipaparkan perkembangan capaian indeks risiko bencana Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 (lima) tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar III. 54 Perkembangan indeks risiko bencana Lombok Tengah 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan data capaian indikator, nilai IRB pada tahun 2021 tercatat sebesar 146,99. Pada tahun 2022 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 136,01, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 127,55. Penurunan nilai IRB pada periode tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat risiko bencana, yang dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai IRB kembali mengalami peningkatan menjadi 133,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi kerentanan wilayah, potensi ancaman bencana alam, serta tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya pada tahun 2025, nilai IRB Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 165,07, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini dapat mencerminkan adanya peningkatan potensi ancaman maupun kerentanan terhadap bencana di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas pembangunan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

III.1.22 III.1.20 TUJUAN 5 MENINGKATNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas daerah, serta mendorong pembangunan yang berkarakter. Di Kabupaten Lombok Tengah, nilai-nilai budaya luhur tumbuh dan berkembang dalam tradisi masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi etika, gotong royong, religiusitas, serta penghormatan terhadap adat dan norma sosial.

Budaya luhur tersebut tercermin dalam sikap hidup masyarakat yang mengedepankan kebersamaan (besiru/gotong royong), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat kolektif ini tampak pada kegiatan sosial seperti pembangunan rumah warga, kegiatan adat, hingga penyelenggaraan upacara keagamaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Nilai religiusitas juga menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter masyarakat Lombok Tengah. Tradisi keagamaan yang kuat membentuk perilaku sosial yang santun, toleran, dan menjunjung tinggi norma kesopanan. Kearifan lokal seperti adat istiadat pernikahan, tradisi peresean, hingga berbagai ritual budaya tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga sarana mempererat solidaritas sosial dan memperkuat identitas budaya daerah.

Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan, nilai budaya luhur diwujudkan melalui pendekatan partisipatif, transparansi, serta penguatan etika pelayanan publik. Budaya musyawarah dan mufakat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan desa maupun daerah, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, pelestarian seni dan budaya lokal, pembinaan generasi muda melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta penyelenggaraan festival budaya menjadi bentuk konkret upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur tersebut di tengah arus modernisasi.

Capain target indikator untuk tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 91 TUJUAN 5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	Persen	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan/ Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. ***Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini***

Capaian indikator Persentase Pelanggaran yang diselesaikan melalui Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indikator ini adalah 100%, dan realisasi yang dicapai juga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang masuk ke ranah penyelesaian melalui Krama Adat berhasil ditangani secara penuh sesuai mekanisme adat, tanpa ada kasus yang tertunda atau tidak terselesaikan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Krama Adat dalam menjaga ketertiban dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas, serta menunjukkan integrasi antara norma adat dengan sistem hukum lokal. Keberhasilan ini juga mencerminkan koordinasi yang baik antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga adat dalam menangani pelanggaran secara adil dan partisipatif.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan sangat baik, memenuhi target, dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial serta harmonisasi masyarakat. Ke depan, keberlanjutan mekanisme ini perlu dijaga melalui pelatihan, pembinaan, dan dokumentasi praktik terbaik agar kualitas penyelesaian pelanggaran tetap konsisten.

2. ***Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;***

Perbandingan capaian indikator Persentase Pelanggaran yang diselesaikan melalui Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal dari tahun 2024 hingga 2025, serta sejalan dengan target jangka menengah RPJMD.

Pada tahun 2024, target indikator ini ditetapkan 100%, dan realisasi yang tercapai juga 100%, menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang ditangani melalui mekanisme Krama Adat berhasil diselesaikan sepenuhnya.

Memasuki tahun 2025, target tetap 100%, dan realisasi tercapai 100%. Hal ini menegaskan bahwa kinerja penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat tetap konsisten dan stabil dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa adanya penurunan efektivitas atau keterlambatan penyelesaian.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **100%**, capaian tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi sasaran jangka menengah, menandakan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat telah berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah berhasil mempertahankan efektivitas penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat, memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial, penegakan norma adat, dan harmonisasi masyarakat. Ke depan, keberlanjutan mekanisme ini perlu terus dipertahankan melalui pembinaan, dokumentasi praktik terbaik, dan penguatan kapasitas Krama Adat.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional***

Capaian indikator Persentase Pelanggaran yang Diselesaikan melalui Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja daerah mencapai 100%, sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menegaskan efektivitas mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat dalam menjaga ketertiban dan harmonisasi sosial di tingkat lokal.

Namun, secara nasional, tidak terdapat indikator serupa yang dapat dijadikan pembandingan. Indikator ini bersifat khusus lokal, terkait dengan praktik dan aturan adat yang berlaku di Lombok Tengah, sehingga tidak memungkinkan untuk disandingkan dengan capaian nasional. Meskipun demikian, capaian 100% ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam memaksimalkan peran Krama Adat sebagai instrumen penyelesaian pelanggaran, yang berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan penegakan norma adat di masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menegaskan bahwa Lombok Tengah berhasil mempertahankan kualitas penyelesaian pelanggaran melalui Krama Adat, dan meskipun tidak dapat dibandingkan secara nasional, kinerja daerah dalam konteks lokal sudah optimal dan patut dijadikan contoh pengelolaan konflik berbasis adat.

5. ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;***

Faktor-faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Struktur kelembagaan adat masih berfungsi aktif di tingkat desa/lingkungan;
- b. Keputusan adat dianggap adil, partisipatif, dan mengedepankan harmoni sosial;
- c. Penyelesaian konflik berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan penghukuman semata.
- d. Tidak semua kasus harus masuk ranah hukum formal, sehingga ruang penyelesaian adat tetap terbuka.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian ini adalah :

- a. Penguatan kapasitas lembaga adat melalui pelatihan mediasi dan resolusi konflik bagi pemangku adat;
- b. Peningkatan intensitas koordinasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan lembaga adat;
- c. Evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat atas keberadaan kerama adat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III. 92 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tujuan 5 Indikator Pelanggaran Diselesaikan Melalui Krame Adat

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR				
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	100	99,32	-0,68

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja indikator sebesar 100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,32%. Dengan demikian, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yakni selisih antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja adalah sebesar -0,68%.

Nilai efisiensi sebesar -0,68% menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target secara optimal, sementara penggunaan anggaran sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pada Tujuan 5 tergolong efisien.

Capaian indikator yang mencapai 100% mencerminkan bahwa penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme krama adat telah berjalan dengan baik dan efektif dalam

kehidupan masyarakat. Penggunaan anggaran yang hampir seluruhnya terserap namun masih lebih rendah dari capaian menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang tepat guna dan proporsional.

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peran aktif lembaga adat dan masyarakat, sehingga penyelesaian permasalahan sosial tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah dan anggaran formal.
- Pemanfaatan kearifan lokal, yang relatif tidak membutuhkan biaya besar namun efektif dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial.
- Efektivitas program pembinaan budaya, yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara adat.
- Sinergi antara pemerintah dan lembaga adat, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efisien dan tepat sasaran.

Pada Tujuan 5, capaian kinerja (100%) lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran (99,32%), sehingga penggunaan sumber daya dikategorikan efisien.

Nilai efisiensi yang kecil menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sangat seimbang, dengan tingkat kesesuaian yang tinggi antara alokasi anggaran dan hasil yang dicapai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel III.93 Analisa Program Penunjang Sasaran Kinerja 5 pada Tujuan 5 Misi 5

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	% Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krame adat						
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	80%	103,88%	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	126	Menunjang
						Persentase satuan	185	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	% Capaian kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
						pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal		
					Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	145,86	Menunjang
	Rata-rata capain program						152,28	Sangat tinggi

Secara umum, capaian Sasaran 5 menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penanaman nilai budaya dan efektivitas lembaga budaya telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja sebesar 103,88% mengindikasikan bahwa partisipasi dan keaktifan krama adat dalam kehidupan bermasyarakat semakin kuat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya luhur, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme adat.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh program-program yang secara keseluruhan menunjang dengan capaian sangat tinggi. Salah satu program utama adalah Program Pengembangan Kurikulum, yang berkontribusi melalui indikator persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal dengan capaian 126%, serta persentase satuan pendidikan PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal dengan capaian 185%. Capaian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai budaya lokal melalui jalur pendidikan formal telah dilaksanakan dengan sangat baik. Penerapan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD merupakan strategi yang efektif untuk menanamkan nilai budaya sejak dini, sehingga generasi muda memiliki pemahaman, penghargaan, dan keterikatan terhadap budaya daerahnya.

Selain itu, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat juga memberikan dukungan yang sangat signifikan, dengan capaian 145,86% pada indikator persentase lembaga adat desa yang aktif. Capaian ini menunjukkan bahwa lembaga adat di desa semakin berfungsi dan berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keaktifan lembaga adat mencerminkan meningkatnya kapasitas kelembagaan budaya dalam menjaga norma, menyelesaikan persoalan sosial, serta memelihara tradisi dan kearifan lokal di tengah masyarakat.

Berdasarkan capaian masing-masing program, dapat dilihat bahwa dukungan terhadap Sasaran 5 tidak hanya dilakukan melalui penguatan kelembagaan adat, tetapi juga melalui pendekatan pendidikan yang sistematis. Sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga adat ini menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan penanaman nilai budaya secara berkelanjutan. Pendidikan muatan lokal berperan dalam membangun fondasi nilai budaya pada generasi muda, sementara lembaga adat menjadi ruang implementasi dan pelestarian nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Dengan rata-rata capaian program sebesar 152,28% dalam kategori sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa program-program pendukung pada Sasaran 5 telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan 5. Seluruh program pendukung dalam tabel juga berstatus menunjang, sehingga tidak terdapat program yang menjadi penghambat pencapaian sasaran.

Konflik adat yang sering terjadi di hampir seluruh desa yakni konflik perkawinan antara lain sengketa “wali enggan/wali bersyarat”. pisuke yang harus dibayar di muka. gantiran. dan sengketa tanah/hibah/warisan. Namun dengan keberadaan Kerme adat maka Sengketa/konflik tersebut dapat diselesaikan oleh pengemong krame dan pengemban adat dengan metode mediasi secara kekeluargaan, sehingga konflik tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar yang mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam tatatnan bermasyarakat di Lombok Tengah.

Diharapkan juga penyelesaian sengketa adat melalui Kerame adat akan berimplikasi terhadap keberadaan tradisi leluhur yang bersendikan adat tidak luntur atau tetap lestari ditengah dinamika kehidupan yang terus mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman.

Untuk kondisi lima tahun terakhir pelanggaran adat yang diselesaikan melalui krama adat di Lombok Tengah adalah sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar III. 55 Pelanggaran adat yang diselesaikan melalui krama adat 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat kondisi dari tahun 2021 – 2025 bahwa seluruh perkara adat atau kasus adat di Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan melalui krama adat yang sudah menjadi acuan hukum dalam menangani perkara adat atau sengketa adat. sehingga secara persentase tercapai 100% artinya tidak ada satu kasus adat pun yang tidak terselesaikan oleh pengemong/pemangku krama adat.

III.1.23 III.1.21 SASARAN 5.1 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA

Penanaman nilai budaya dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal. Pada jalur pendidikan, nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Di lingkungan keluarga dan masyarakat, nilai budaya diwariskan melalui praktik kehidupan sehari-hari, upacara adat, tradisi sosial, serta keteladanan tokoh masyarakat. Kegiatan festival budaya, pembinaan seni tradisional, dan pelestarian adat istiadat juga menjadi media efektif dalam memperkuat identitas budaya generasi muda. Efektivitas lembaga budaya sangat menentukan keberhasilan proses tersebut. Lembaga adat dan lembaga budaya berperan sebagai penjaga norma, mediator sosial, sekaligus penggerak pelestarian tradisi. Keberadaan aturan adat (*awig-awig*) serta mekanisme musyawarah dalam penyelesaian persoalan sosial menunjukkan bahwa lembaga budaya masih relevan dan berfungsi dalam menjaga ketertiban serta harmoni masyarakat.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan kelembagaan, fasilitasi kegiatan budaya, serta pengakuan terhadap peran lembaga adat turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan fungsi lembaga budaya. Sinergi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas lembaga budaya di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan nilai budaya tetap hidup dan adaptif tanpa kehilangan esensi luhur yang diwariskan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dokumentasi nilai dan tradisi secara sistematis, serta inovasi dalam penyampaian nilai budaya kepada generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan kontekstual.

Tekait dengan capaian indikator untuk meningkatnya nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel III. 94 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	
Persentase krama adat aktif	Persen	= Jumlah krame adat aktif / Jumlah seluruh krame adat	78	80	85	80	83,10	102,56	103,88	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Persentase Krama Adat Aktif Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 83,10%, dengan demikian, persentase pencapaian mencapai 103,88% dari target, menegaskan bahwa partisipasi Krama Adat dalam kegiatan adat dan sosial berjalan lebih baik dibanding yang direncanakan.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya pemberdayaan Krama Adat, termasuk melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan lokal, partisipasi dalam program pembangunan, dan pemeliharaan nilai-nilai adat. Tingginya persentase keaktifan Krama Adat juga berdampak positif terhadap penguatan sosial budaya, penegakan norma adat, dan keberlanjutan program berbasis komunitas di Kabupaten Lombok Tengah.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemberdayaan Krama Adat, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan adat, dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung peran Krama Adat. Ke depan, perlu terus dipertahankan melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat agar tingkat keaktifan tetap tinggi.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Capaian indikator Persentase Krama Adat Aktif Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat dari tahun 2024 ke 2025.

Pada tahun 2024, target indikator ini sebesar 78%, dengan realisasi mencapai 80%, sehingga persentase pencapaian sebesar 102,56%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Krama Adat telah melampaui target, menandakan efektivitas program pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adat.

Memasuki tahun 2025, target ditetapkan sebesar 80%, dengan realisasi tercatat 83,10%, sehingga persentase pencapaian mencapai 103,88%. Capaian ini menunjukkan peningkatan partisipasi Krama Adat dibanding tahun sebelumnya, baik secara absolut maupun relatif terhadap target tahunan.

3. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;***

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 85%, capaian tahun 2025 masih berada sedikit di bawah sasaran jangka menengah, dengan selisih 1,9 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi Krama Adat telah sangat baik, masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterlibatan lebih lanjut agar target RPJMD tercapai.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong keaktifan Krama Adat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat fungsi adat dalam kehidupan sosial. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada penguatan kapasitas, pembinaan berkelanjutan, dan program insentif agar tingkat keaktifan Krama Adat semakin mendekati target RPJMD.

4. ***Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;***

Secara nasional, indikator serupa tidak tersedia, karena mekanisme Krama Adat bersifat khusus lokal dan hanya berlaku di wilayah tertentu. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan secara nasional, meskipun pencapaian di Lombok Tengah menunjukkan efektivitas tinggi dalam konteks lokal.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Lombok Tengah dalam mempertahankan dan meningkatkan keaktifan Krama Adat, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, keberlanjutan upaya ini perlu dijaga melalui pembinaan, penguatan kapasitas, dan pelibatan masyarakat secara berkesinambungan.

5. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;*

Faktor pendukung pencapaian indikator :

- a. Dukungan kebijakan terhadap penguatan kelembagaan adat;
- b. Ketaatan masyarakat terhadap norma dan aturan adat (*awig-awig*).
- c. Kesadaran kolektif untuk menjaga harmoni dan ketertiban sosial.

Solusi/Alternatif peningkatan pencapai indikator :

- a. Penetapan standar kriteria “aktif” yang jelas dan terukur;
- b. Pelatihan manajemen organisasi dan administrasi bagi pengurus adat;
- c. Pelibatan generasi muda dalam struktur kelembagaan adat;
- d. Fasilitasi sarana prasarana sekretariat kerama adat.

6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*

Tabel III. 95 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5 Tujuan 5 Misi 5 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	5-4
M5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR				
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermas-yarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krama adat			
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	103,88	99,31	-4,57

Pada sasaran meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektivitas lembaga budaya dengan indikator persentase krama adat aktif, capaian kinerja pada tahun berjalan mencapai 103,88%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,31%, maka tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga diperoleh $99,31\% - 103,88\% = -4,57\%$

Nilai efisiensi sebesar -4,57% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tergolong efisien, karena capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa:

- Terjadi over achievement pada indikator persentase krama adat aktif.
- Terdapat penghematan anggaran sebesar 4,57% dari total pagu.
- Output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan, mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Dengan demikian capaian kinerja sebesar 103,88% dan tingkat efisiensi -4,57%, maka sasaran meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektivitas lembaga budaya dapat dikategorikan efisien, karena mampu menghasilkan capaian yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel III. 96 Analisis Program Penunjang Sasaran Kinerja 5 pada Tujuan 5 Misi 5 Tahun 2025

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	% Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krame adat						
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	80%	103,88%	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	126	Menunjang
						Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	185	Menunjang
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	145,86	Menunjang

No.	Tujuan /sasaran	indikator	Target sasaran	Capaian kinerja (%)	Program pendukung sasaran	Indikator program	% Capain kinerja program (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
	Rata-rata capain program						152,28	Sangat tinggi

Program pendukung sasaran seluruhnya melampaui 100%) menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keaktifan krama adat. Hal ini mengindikasikan adanya keterkaitan yang kuat antara intervensi program dengan perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat adat.

Dengan demikian, seluruh indikator pada kedua program tersebut dapat dikategorikan menunjang bahkan sangat menunjang pencapaian Sasaran 5. Tidak terdapat indikator yang bersifat tidak menunjang, karena seluruhnya menunjukkan capaian di atas target serta memiliki keterkaitan logis dan fungsional terhadap peningkatan keaktifan krama adat. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang baik antara pendekatan pendidikan (melalui kurikulum muatan lokal) dan pemberdayaan kelembagaan adat dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Krama Adat merupakan wahana atau wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah. perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk membangun mulai dari Keluarga. Desa. Kecamatan. hingga Kabupaten. termasuk untuk menyelesaikan perselisihan. sengketa yang ada di Desa. Untuk mengukur capaian target indikator kinerja ini dibutuhkan kajian yang mendalam karena dalam implementasinya baik krama adat kecamatan maupun desa bentuk dan aktivitas belum terdokumentasikan secara teratur. Sejak Pengukuhan 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan oleh Bupati Lombok Tengah pada tahun 2016 gaung kegiatan krama belum banyak terekspose.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Serta telah dikukuhkan sebanyak 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan.

Krama adat yang aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakkan hukum adat dari tahun 2021-2025 secara persentase dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;

Gambar III. 56 Persentase krama adat aktif 2021-2025



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan persentase krama adat yang aktif di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021-2025. Hal ini akan memberikan dampak positif atas kelangsungan hidup hukum adat yang berjalan di masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman penyelesaian sengketa adat.

III.2 NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini pengelolaan keuangan adalah pendapat atau penilaian yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas. Nilai opini ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu entitas, apakah dalam keadaan baik, cukup baik, atau buruk.

Nilai opini pengelolaan keuangan memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Beberapa nilai opini pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 97 TAHUN PEROLEHAN WTP BAGI LOMBOK TENGAH

NO	Tahun	Lombok Tengah
1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP

NO	Tahun	Lombok Tengah
5	2016	WTP
6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2019	WTP
9	2020	WTP
10	2021	WTP
11	2022	WTP
12	2023	WTP
13	2024	WTP
14	2025	WTP

Sumber :BKAD Lombok Tengah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 12 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain :

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh Perangkat Daerah;

4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reviu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang. penyusunan KUA dan PPAS. penyusunan RKA. pembahasan Raperda APBD. evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi didaerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).

III.3 PEDOMAN DAN PINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23).

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan. pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal. antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan. pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi. tepat guna. tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan

secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan. pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran. hasil dan manfaat. indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III.4 REALISASI PENDAPATAN DAERAH MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.825.991.771.625,49. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.901.447.293.889,22 atau 102,67%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III. 98 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	2	3	4	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.825.991.771.625,49	2.901.447.293.889,22	102,67
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	504.607.362.379,49	545.794.813.104,22	108,16
4 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	276.329.157.274,00	327.500.641.030,22	118,52
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	25.964.886.316,89	23.055.720.450,00	88,80

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	2	3	4	%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	189.129.703.491,60	182.054.836.327,00	96,26
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.294.757.887.953,00	2.329.183.248.292,00	101,50
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.996.216.482.000,00	2.037.788.882.256,00	102,08
4.2.1.5	Dana Desa	176.357.457.000,00	162.209.204.800,00	91,98
4.2.1.6	Insentif Fiskal	7.888.237.000,00	7.888.237.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.295.711.953,00	121.296.924.236,00	106,13
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	114.141.711.953,00	121.142.924.236,00	106,13
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.626.521.293,00	26.469.232.493,00	99,41
4.3.1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	144.711.200,00	100,23
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah telah melampaui target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 276.329.257.274,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp.

327.500.641.030,00 atau 118,52%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 99 Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.09.	Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.025.321.880,00	92,06
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	361.085.293,75	410.255.543,00	113,62
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.991.234.820,49	4.770.677.876,75	95,58
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40
4.1.1.16.	Pajak PBHTB	41.500.000.000,00	61.896.234.001,00	149,15
4.1.1.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	127.183.118.280,76	161.835.166.625,47	127,25
4.1.1.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	38.333.255.000,00	36.884.496.784,00	96,22
4.1.1.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39.672.835.000,00	42.806.712.585,00	107,90
	JUMLAH	276.329.157.274,00	327.500.641.030,22	118,52

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 25.964.886.316,89 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 23.055.720.450,00 atau 96,86%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 100 Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.565.688.091,89	9.313.659.102,00	80,53

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.02	Retri/busi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	756.456.000,00	191,96
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.712.268.603,00	1.673.287.500,00	35,51
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.770.581.000,00	3.211.098.000,00	115,90
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	497.424.000,00	880.679.000,00	177,05
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00		0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	15.988.000,00	24,89
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasidan Olah Raga	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00	298.648.600,00	80,82
5.1.2.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			0,00
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.717.486.222,00	5.199.590.376,00	139,87
4.1.2.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32
	JUMLAH	25.964.886.316,89	23.055.720.450,00	88,80

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.183.615.297,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.183.615.297,00 atau 100%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya. PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah. PT. Jamkrida NTB dan Perumdam TIARA Kabupaten Lombok Tengah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp.189.129.703.491,60 Adapun capaian realisasinya sebesar Rp.182.054.836.327,00 atau 96,26%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 101 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	1.250.000.000,00	3.491.654.244,90	279,33
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	4.414.194.118,83	232,33
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		3.727.861.506,67	0,00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		4.358.027.744,38	0,00
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		163.127.564,05	0,00
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak		982.443.947,13	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi			0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian		3.312.545.130,00	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	185.979.703.491,60	161.566.597.156,04	86,87
4.1.4.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		38.384.915,00	0,00
	JUMLAH	189.129.703.491,60	182.054.836.327,00	96,26

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

a. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.294.757.887.953,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.329.183.248.292,00 atau 101,50%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 101,26% atau sebesar Rp 2.207.886.324.056,00 dari target anggaran sebesar Rp 2.180.462.176.000,00.

a. Dana Perimbangan terealisasi sebesar 102,08% atau sebesar 2.037.788.882.256,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.996.216.482.000,00 lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 179.123.616.000,00 Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp 177.896.979.100,00 atau 99,32% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci

Tabel III. 102 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.887.165.000,00	5.427.083.700,00	92,185
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.902.258.000,00	9.180.234.900,00	92,709
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	242.855.000,00	218.569.500,00	0,000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	97.252.434.000,00	97.252.434.000,00	100,000
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	6.509.000,00	6.509.000,00	0,000
4.2.01.07.02.0005	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	64.787.796.000,00	64.787.796.000,00	100,000
4.2.01.07.02.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.247.000,00	0,00	0,000
4.2.01.07.02.0009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.024.352.000,00	1.024.352.000,00	100,000
	JUMLAH	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

- Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.334.314.435.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.375.586.130.050,00 atau 103,09%.

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.482.778.431.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 484.305.773.106,00 atau 100,32%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun target DAK Fisik adalah sebesar Rp 46.919.753.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.46.250.980.209,00 atau 98,57%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp 438.054.792.897,00 atau sebesar 100,50% dari target anggaran sebesar Rp 435.858.678.000,00..

- Insentif Fiskal

Target Dana Insentif Fiskal pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.888.237.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.888.237.000,00 atau 100,00%.

- Dana ana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 176.357.457.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 162.209.204.800,00 atau 91,98%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 114.295.711.953,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp 121.296.924.236,00 atau 106,13%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III. 103 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.0001	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.616.953.084,00	1.907.732.718,00	15,12

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.0002	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.532.434.816,00	0,00
4.2.2.01.01.0003	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.278.492.019,00	70.561.679.284,00	130,00
4.2.2.01.01.0004	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	72.724.255,00	56.841.489,00	78,16
4.2.2.01.01.0005	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	47.173.542.595,00	46.084.235.929,00	97,69
	JUMLAH	114.141.711.953,00	121.142.924.236,00	106,13

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 terealisasi sebesar 99,41% atau sebesar Rp 26.469.232.493,00 dari target anggaran sebesar Rp. 26.626.521.293,00

Tabel III. 104 Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No.	Uraian	2025		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	144.711.200,00	47,92
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00
	Jumlah	26.626.521.293,00	26.469.232.493,00	99,41

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah di terealisasi sebesar Rp. 144.711.200,00 atau 47,92% dari target sebesar Rp302.000.000,00 merupakan sumbangan Pihak Ketiga berupa Rekom Ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp 116.711.200,00 dan Dana

Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp28.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro..

4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 26.324.521.293,00 atau mencapai 100% dari target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 26.324.521.293,00 bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi.

III.5 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Adapun target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.925.202.177.429,25 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 2.814.276.374.088,89 atau sebesar 96,21%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

Tabel III. 105 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.175.322.200.460,91	2.109.747.385.560,29	96,99
2.	Belanja Modal	361.992.972.794,03	345.128.292.859,60	95,34
3.	Belanja Tidak Terduga	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81
4.	Belanja Transfer	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14
Jumlah		2.925.202.177.429,25	2.814.276.374.088,89	96,21

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

E. Belanja operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.308.876.185.400,60 dan direalisasikan sebesar Rp 1.275.806.131.204,38 atau 97,47%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 106 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.207.540.559.105.65	1.156.474.338.361.76	95,77
	a. Gaji dan Tunjangan	780.338.966.465,10	771.839.370.851,00	98,91
	b. Tambahan Penghasilan PNS	403.939.851.816,55	396.770.130.138,88	98,23
	c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.320.200.722,00	26.963.662.691,00	98,69
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.578.691,00	327.381.720,00	90,04
	e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	847.800.000,00	826.800.000,00	97,52
	f. Belanja Pegawai BLUD	96.065.787.705,95	79.078.785.803,50	82,32

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 793.214.912.805,31 dan direalisasikan sebesar Rp 760.963.356.257,91 atau 95,93%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 107 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BelanjaBarang Jasa			
	a. Belanja Bahan PakaiHabis	363.848.305.947,89	347.516.383.403,00	95,51
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.070.762,00	8.834.800,00	62,79
	c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	218.888.364,00	203.504.636,00	92,97
	d. Belanja Jasa Kantor	109.557.725.042,60	99.870.771.370,00	91,16
	e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.166.088.868,42	109.542.643.349,00	99,43
	f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.335.494.975,00	3.113.340.018,00	93,34
	g. Belanja Sewa gedung dan Bangunan	2.025.765.000,00	1.743.802.600,00	86,08
	h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	121.064.963,00	119.599.375,00	98,79
	i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.544.090.228,48	2.500.439.100,00	98,28
	j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	776.783.750,00	622.152.410,00	80,09
	k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00
	l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.188.054.600,00	11.307.304.063,00	92,77
	m. Belanja Pemeliharaan	4.666.188.386,00	4.543.906.307,00	97,38
	n. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.313.712.260,00	4.237.766.500,00	98,24
	o. Belanja Perjalanan Dinas	21.228.613.553,00	19.072.447.487,00	89,84
	p. Belanja Barang dan Jasa BOSP	72.538.809.673,71	76.180.126.788,00	105,02
q. Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.471.256.431,21	80.330.334.051,91	93,99	
Jumlah		793.214.912.805,31	760.963.356.257,91	95,93

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp 9.817.569.753,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.817.569.753,00 atau 100% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang di peruntukkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp.62.533.928.345,00 atau sebesar 99,80% dari target sebesar Rp. 62.657.532.502,00. Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp.14.520.000.000,00 atau 99,11% dari target sebesar Rp.14.650.000.000,00. Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp1.002.532.502,00 atau 100% dari target sebesar Rp.1.002.532.502,00, dan Belanja Hibah Dana BOSP yang terealisasi sebesar Rp.47.011.395.843,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp.47.005.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp.626.400.000,00 mencapai 82,86% dari nilai targetnya. Bantuan Sosial sebesar Rp.756.000.000,00 merupakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT di Kab. Lombok Tengah Tahun 2025 sumber dana DBHCHT.

F. Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.361.992.972.794,03 dan realisasi sebesar Rp. 345.128.292.859,60 atau 95,34%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel III. 108 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30
2	Belanja Peralatan dan Mesin	104.694.908.450,31	95.212.730.251,00	90,94
3	Belanja Gedung dan Bangunan	148.501.231.866,77	151.392.513.979,60	101,95
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.394.793.044,12	83.625.546.702,00	91,50
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.260.692.984,00	13.412.042.406,00	94,05
6	Belanja Aset Lainnya	1.871.329.848,83	224.350.369,00	11,99
Jumlah		361.992.972.794,03	345.128.292.859,60	95,34

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realiasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp 9.109.795.471,00, serta Belanja modal yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 6.677.018.738,00 dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOSP sebesar Rp 24.863.433.105,00.

G. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp. 8.959.925.740,00 atau 45,81% dari target sebesar Rp. 19.556.796.096,12. Rincian Belanja Tak Terduga dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III. 109 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025
		Realisasi (Rp)
	BELANJA TAK TERDUGA	
1	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas silpa DAKNF 2024	4.742.440.142,00
2	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan atas silpa DAKNF 2024	1.356.583.350,00
3	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan DAKNF Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	686.831.775,00
4	Ppenyesuaian atas potongan salur DAKNF-Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian atas SILPA 2024	73.649.336,00
5	Penyesuaian potongan salur DAKNF -Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan atas silpa 2024	17.438.400,00
6	Penyesuaian atas potongan salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas silpa 2024	247.230.694,00
	Penyesuaian potongan salur DAU atas sisa dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) , (PK2UMK), sisa dana pelayanan kepariwisataan, dan sisa dana fasilitasi penanaman modal (FPM) Tahun 2024	179.100.995,00
	Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota pada RSUD Provinsi NTB, Bulan Mei s/d Nopember 2023 dengan rincian terlampir. (Sumber Dana PAD)	1.606.347.481,00
	Pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin non quota pada RSUD Propinsi NTB, Desember 2023 dengan rician terlampir	38.407.867,00
	Pengembalian atas kesalahan setor Dinas pendidikan Bulan Juli tahun 2025 An. Abdurrahim dkk	11.895.700,00

No.	Uraian	2025
		Realisasi (Rp)
Jumlah		8.959.925.740,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

H. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 350.440.769.929,00 atau 95,14% dari target sebesar Rp. 368.330.208.078,19, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 32.475.195.796,00 atau 93,02% dari target sebesar Rp 34.913.665.518,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 110 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tansfer Bagi Hasil Pajak	32.352.050.223,29	30.644.055.037,00	94,72
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.561.615.294,90	1.831.140.759,00	71,48
Jumlah		34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 317.965.574.133,00 dari target sebesar Rp. 333.416.542.560,00 atau sebesar 95,37%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.111 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.. Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	322.172.466.560,00	307.682.112.133,00	95,50
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	11.244.076.000,00	10.283.462.000,00	91,46

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

III.6 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III. 112 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ()	REALISASI	
				%
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.840.110.633,76	161.878.331.633,76	105,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	135.341.420.443,76	135.341.420.443,76	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.100.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.449.007.490,00	23.443.793.589,00	99,98
06.02.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.210.405.803,76	107.253.840.704,76	108,11

sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp161.878.331.633,76 atau 105,23% dari target sebesar Rp 153.840.110.633,76. Realisasi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp. 135.341.420.443,76, terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 26.526.811.190,00 merupakan Kerjasama pembiayaan antara Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah) dengan PT Bank Syariah Indonesia yang berbentuk dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dan terdapat penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp 10.100.000,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp 54.629.704.830,00 terealisasi sebesar Rp.54.624.490.929,00 atau 99,99% yang terdiri dari pembayaran cicilan pinjaman pokok utang kepada PT SMI atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 23.443.793.589,00 dan pembayaran utang RSUD kepada PT BankSyariah Indonesia berupa pinjaman dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan sebesar RP. 31.180.697.340,00.

Adapun Nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp. 107.253.840.704,76 atau 108,11% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 99.210.405.803,76. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 194.424.760.505,09

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2025 adalah sebesar **114,76 % (SANGAT TINGGI)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;
2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua PD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;

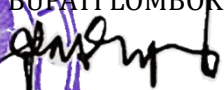
4. Kurangnya kedisiplinan PD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.


B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP terintegrasi ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan PD;
4. Tiap-tiap PD perlu menyusun profil PD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja PD.

7. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah kedepannya agar menyusun rencana aksi dari masing-masing item yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sehingga jelas dan terukur secara substansi.

Praya, Maret 2026
BUPATI LOMBOK TENGAH.

H. LALU PATHUL BAHRI. S.IP. M.AP



**INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026 BERDASARKAN RPJMD NOMOR 2 TAHUN 2021**

No	Indikator	Satuan	PERHITUNGAN	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Toleransi	Poin	Indeks Toleransi = $(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$ Nilai Indeks: 1 – 1,7 = Sangat rendah 1,8 – 2,5 = Rendah 2,6 – 3,3 = Cukup 3,4 – 4,1 = Tinggi 4,2 – 5 = Sangat tinggi	3,58	3,61	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75	3,75
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	= (Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun $n-1$ dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan $n-1$) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun $n-1$ dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	100
3	IPM	Poin	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{keselamatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01	68.01
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	$LPE = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_t \times 100$	-6.68	2.07	3.10	4.06	4.51	4.98	5.30	5.30
6	Angka Kemiskinan	Persen	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Po = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72	11.72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	$TPT = \text{Jumlah pengangguran (orang)} / \text{Jumlah angkatan kerja (orang)} \times 100$	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.28
8	Indeks Infrastruktur Wilayah (IFW)	Poin	$IFW = \sum (jm + ir + am + sl + km) / 5$ Jm= persentase jalan mantap Ir = persentase irigasi kondisi baik am = persentase RT akses air minum layak sl = persentase RT sanitasi layak	NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55	72.55

No	Indikator	Satuan	PERHITUNGAN	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPIMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			km = persentase kawasan kumuh								
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan / Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	NA	100	100	100	100	100	100	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$LPE = (PDRB \text{ sektor akomodasi dan makan minum }_t - PDRB \text{ sektor akomodasi dan makan minum }_{t-1}) / PDRB_t \times 100$	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25	3.75	4.05	4.05
11	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	= (Jumlah penyakit masyarakat $_{n-1}$ dikurangi selisih jumlah penyakit masyarakat tahun $_n$ dan $_{n-1}$) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun $_{n-1}$ dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Pendidikan	Poin	$I_{Pendidikan} = (I_{HLS} + I_{RLS}) / 2$	0.589	0.592	0.596	0.599	0.602	0.606	0.609	0.609
13	Indeks Kesehatan	Poin	$I_{Kesehatan} = (AHH - AHH_{min}) / (AHH_{max} - AHH_{min})$	0.711	0.714	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734	0.734
14	Predikat SAKIP	Predikat	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
15	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	= Jumlah OPD Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik / jumlah OPD yang menyelenggarakan indek kepuasan x 100% Ket: predikat baik > 62,51	80	80	85	90	95	95	100	100
16	Rata-rata pengeluaran perkapita	Rupiah	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$	9,95	9,96	9,971	10	10,03	10,06	10,09	10,09
17	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= (PDRB \text{ sektor industri pengolahan }_t - PDRB \text{ sektor industri pengolahan }_{t-1}) / PDRB \text{ sektor industri pengolahan }_t \times 100$	-3,05	0,43	1,33	2,53	3,03	3,53	3,83	3,83
18	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= (PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_t - PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_{t-1}) / PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_t \times 100$	-0.42	1.06	1.16	1.26	1.36	1.46	1.56	1.56
19	Indeks konektivitas	Poin	= Σ jaringan jalan dibagi Σ jumlah kota	NA	66,28	73,022	79,764	86,506	93,248	99,99	99,99
20	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	= 45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	56,1	58,6	61,1	63,6	66,1	68,6	71,1	71,1
21	Cakupan layanan air minum	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	77,28	77,78	78,28	78,78	79,28	79,78	80,28	80,28
22	Luasan penanganan kawasan kumuh	Persen	= Jumlah kawasan kumuh yang ditangani / Jumlah luasan kawasan kumuh	815,37	805,37	795,37	785,37	775,37	765,37	755,37	755,37
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	= (Ikuualitas air + Ikuualitas udara + Itutupan lahan) / 3	59,51	59,9	60,33	60,6	60,87	61,1	61,4	61,4
24	Cakupan layanan persampahan	Persen	= Jumlah wilayah terlayani persampahan / Jumlah seluruh wilayah	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	31,3
26	Indeks Resiko Bencana	Poin	IRB= hazard x (vulnerability / capacity)	NA	166,12	166,08	166,02	155,98	155,95	155,93	155,93
27	Persentase krame adat aktif	Persen	= Jumlah krame adat aktif / Jumlah seluruh krame adat	NA	75	75	77	78	80	85	85



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Praya , 2 Januari 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,72
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflikberlarat belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitasSDM	IPM	Poin	71,23
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahanyang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerjajapemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomidan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,50-6,00
		Angka Kemiskinan	Persen	11,98-12,31
		Indeks Gini	Poin	0,343-0,328
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,57 - 2,63

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,06
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,53
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3,75
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,46
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71,05
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	93,248
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	68,60
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79,78
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	765,37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,10
		Cakupan layanan persampahan	Persen	30,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,95
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	80



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Praya , 8 Oktober 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai- nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,72
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflikberlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitasSDM	IPM	Poin	71,97
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomidan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,35
		Angka Kemiskinan	Persen	11,62
		Indeks Gini	Poin	0,343
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,15

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	20,40
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,53
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3,75
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,46
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71,05
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	93,248
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	68,60
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79,78
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	765,37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,90
		Cakupan layanan persampahan	Persen	30,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,95
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat Aktif	Persen	80



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.522.407.450,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	76.650.000,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.230.545.735,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.008.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	116.326.461,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	323.731.964.109,77
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.244.101.297,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	710.802.923,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	525.088.420,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	13.760.207.090,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	37.165.526.070,88
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.030.657.807,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	40.582.991.890,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87.116.659.208,37
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25.434.498,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	880.930.829,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	440.155.245,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.852.824.907,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	41.983.508.012,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.131.415.855,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.177.648.837,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	752.703.655,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	845.946.012,10
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.463.470.387,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.709.333.309,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170.727.670,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	161.690.715,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	45.781.915,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.764.842.242,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	506.938.696,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.473.284.334,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	23.793.960,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	253.583.432,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	69.596.648,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	158.101.186,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	571.857.228,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.365.969.434,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	621.112.708,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	176.175.015,50
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.443.185.511,00
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	65.754.460,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	10.695.008,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	86.731.927,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213.668.277,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.644.030,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	76.498.603,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.525.040,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.605.944.768,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	885.744.345,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.247.691,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	95.981.417,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.597.866,00
PROGRAM PENATAAN DESA	72.473.600,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	945.713.936,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.956.924.501,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.254.875.884,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	583.221.328,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.610.733.178,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.489.640.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.458.796.816,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.965.892,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.535.976.094,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.280.082.256,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	11.300.350,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	158.029.903,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	994.660.254,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	244.311.222,90
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.855.478.215,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	266.110.225,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	19.790.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	48.957.151,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30.326.971,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.430.631.286,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.979.195.527,17
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	336.881.367,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.828.833,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.149.818,96
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	14.925.112.591,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	130.801.151,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.498.464.902,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	42.857.320,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235.244.628,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.485.000,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	7.849.595,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.195.643.127,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.472.453.512,55
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	307.578.499,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	627.007.751,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	825.246.116,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.132.330.323,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	33.741.086.388,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.192.520.342,45
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.051.944.506,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378.500.544,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	191.580.673,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.863.724.283,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.717.903.872,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	76.388.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160.077.325,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14.492.435.828,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.369.998,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.469.218.078,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.181.683.602,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.417.917.708,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.290.736.993,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.553.231.255,99
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	399.948.957.849,31
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.567.182.175,09
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.399.044.647,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.783.353.325,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.153.331.076,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.232.445.521,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.206.813.726,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	934.429.243,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	795.988.263,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.879.295.772,22
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	549.195.532,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.354.587.513,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	465.197.890,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.518.913.421,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.118.733.030,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	380.529.785,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	404.469.493,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.180.083.753,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.424.689.628.664,92
JUMLAH	2.926.100.945.429,25

BUPATI LOMBOK TENGAH,



[Handwritten Signature]

H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raden Punguh Puyung - Praya

Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedadukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	
Ketertarikan :	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah2 SOP Administrasi dan Teknis	
Peringatan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keterlambatan Penyusunan LKJ-IP Pemkab. Lombok Tengah serta penyampaian dokumen pendukung yang kurang valid	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada Penyusunan LKJ-IP Pemkab. Lombok Tengah yang tepat waktu dengan dokumen pendukung yang valid	
Nomor SOP	3 Maret 2016
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	9 Januari 2023
Tanggal Efektif	1 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah
Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Kualifikasi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none">1 Tim Penyusun LKJ-IP2 Kabag3 Inspektorat4 Asisten5 Sekretaris Daerah6 Bupati Lombok Tengah
Peralatan / Perlengkapan :	<ol style="list-style-type: none">1 Alat Tulis Kantor2 Peraturan Perundang-undangan3 Komputer4 LKJ-IP SKPD5 Laporan capaian target RPJMD6 Lombok Tengah dalam angka
Pencatatan dan Pendataan :	<ol style="list-style-type: none">1 Tim Penyusun LKJ-IP2 Tim Reviu LKJ-IP3 Sekretaris Daerah



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Uraian Prosedur	Pelaksana						Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
	Tim	Kabag	Inspektorat	Asisten	Sekda	Bupati		Waktu	Out put	
1 Melakukan verifikasi data							1. Data Laporan Kinerja 2. Checklist data dari PD	6 jam	hasil verifikasi data	
2 Menyusun draf Laporan Kinerja						Notulen rapat Data hasil verifikasi sistematisa laporan darta Bab I s/d Bab IV	25 jam	Draf laporan kinerja		
3 Melakukan koreksi terhadap Drat						Draf Laporan Kinerja	1 jam	Hasil koreksi		
4 Mengirim Laporan Kinerja ke Inspektorat untuk direviu						Laporan Kinerja surat Pengantar	1 jam	Reviu laporan kinerja		
5 Melakukan Finalisasi Laporan Kinerja sesuai hasil reviu						Laporan hasil reviu dari Inspektorat	9 jam	Hasil reviu laporan kinerja		
6 Mengoreksi dan memaraf draf LKjip						Laporan Kinerja sesuai hasil Reviu	5 menit	LKjip Pemda		
7 Mengoreksi dan memaraf draf LKjip						Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjip Pemda yang telah diparaf		
8 Mengoreksi dan memaraf draf LKjip						Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjip Pemda yang telah diparaf		
9 Menandatangani LKjip						Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjip Pemda yang telah ditanda tangan		
10 Menerima LKjip						Laporan Kinerja yang telah ditandatangani	5 menit	LKjip Pemda yang telah ditanda tangan		
11 Mengirim Laporan Kinerja ke Kementerian PAN RB						Laporan Kinerja yang telah discanling	2 menit	Dokumen LKjip Pemda terlapor		



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan LKj-IP merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun, mengklasifikasi, menganalisis dan mengolah data serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari SKPD dan instansi terkait lainnya;
2. Menyusun LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan seksama sesuai waktu yang telah ditentukan;
3. Melaksanakan rapat internal Tim maupun rapat Tim dengan SKPD dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi data dan penjelasan lain yang dibutuhkan dalam penyusunan LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2025;

4. Mengikuti dan mendampingi evaluasi LKj-IP Kabupaten Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh BPKP dan atau Inspektorat Provinsi NTB sesuai waktu yang telah ditentukan;
5. Tim Penyusun LKj-IP Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 9 FEBRUARI 2026

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

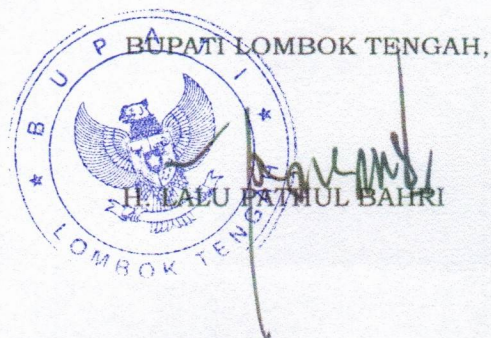
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 69 TAHUN 2026
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

Daftar Nama Tim:

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Lombok Tengah	Ketua
3	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah	Sekretaris
4	Wirye Darne, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
5	Samsuri Hariadi, S.STP, (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian APU Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
6	Sumar Ridwan, S.STP. M.Ec.Dev. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian APU Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
7	Mintane, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kab. Lombok Tengah)	Anggota
8	Lalu Muh. Iswandi, SE (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah)	Anggota
9	Lalu Syamsul Hadi, SE, M.Ak (PPUPD pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah)	Anggota
10	Burhanudin, S.IP (Analis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
11	Karina Dewi Sae Fitriana, S.STP (Analis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
12	Sofyan Syawal Setiawan, S.STP (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
13	Lalu Ferro Fraka Wirya, S.I.P (Analis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
14	Baiq Laela Ratnawidianti (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
15	Husnul Khatimah (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
16	M. Khairi Pavian (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH,

 H. LALU PATMUL BAHRI

LOMBOK TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

COPYRIGHT 2026